CALL FOR PAPER

Reviewer:
- Dr. Nurul Imam, Lc, M.H.I.
- Dr. Bambang Hermanto, M.Pd.
- Dr. Syarifan Nurjan, M.A.
- Wahyudi Setiawan

Semangat Publikasi
Dalam Membangun
Peradaban Negeri

Oleh:

Anak Agung Gde Satia Utama, Afirus Febian, Gema Budiarto,
Johan Bhimo Sukoco, Helina Apriyani, Musdar, Irawan, Muzani Lastri,
Edy Bambang Irawan, Santi Irawan, Rezzy Eko Caraka, Sugiarto,
Nikodemus Niko, Atem, Annisa Sintha Putri Nusantara, Rika Yuliana, Budianto,
Hariyanto Soeroso, Matdio Siahaan, R.M. Kindi Karsmono, Herdianti, Asmah, Erris Siregar,
Bina Melvia Girsang, Imam Jayanto

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau memberi izin untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Semangat Publikasi

Dalam Membangun Peradaban Negeri

Oleh :

Anak Agung Gde Satia Utama, Afirus Febian, Gema Budiarto,
Johan Bhimo Sukoco, Helina Apriyani, Musdar, Irawan, Muzani Lastri,
Edy Bambang Irawan, Santi Irawan, Rezzy Eko Caraka, Sugiarto,
Nikodemus Niko, Atem, Annisa Sintha Putri Nusantara, Rika Yuliana,
Budianto, Hariyanto Soeroso, Matdio Siahaan, R.M. Kindi Karsmono,
Herdianti, Asmah, Erris Siregar, Bina Melvia Girsang,
Imam Jayanto

SEMANGAT PUBLIKASI DALAM MEMBANGUN PERADABAN NEGERI

© Anak Agung Gde Satia Utama, Afirus Febian, Gema Budiarto, Johan Bhimo Sukoco, Helina Apriyani, Musdar, Irawan, Muzani Lastri, Edy Bambang Irawan, Santi Irawan, Rezzy Eko Caraka, Sugiarto, Nikodemus Niko, Atem, Annisa Sintha Putri Nusantara, Rika Yuliana, Budianto, Hariyanto Soeroso, Matdio Siahaan, R.M. Kindi Karsmono, Herdianti, Asmah, Erris Siregar, Bina Melvia Girsang, Imam Jayanto

Editor : Dr. Nurul Imam, Lc, M.H.I.
Dr. Bambang Hermanto, M.Pd.
Dr. Syarifan Nurjan, M.A.
Wahyudi Setiawan
Design Cover : Team WADE Publish
Layout : Team WADE Publish

Diterbitkan oleh:
Penerbit WADE
buatbuku.com
Jln. Pos Barat Km.1 Melikan Ngimput Purwosari
Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491
Website : BuatBuku.com
Email : redaksi@buatbuku.com
Phone : 0821 3954 7339

Januari 2017
ISBN: **978-602-6802-62-0**

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

311 hlm.; 15,5 x 23 cm

KATA PENGANTAR

Masih rendahnya semangat membaca, menulis, dan publikasi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar bersama bagaimana seharusnya sebagian masyarakat yang telah sadar akan pentingnya hal tersebut untuk berbagi semangat dan inspirasi bagi mereka supaya tergerak untuk bangkit bersama membangun negeri. Membaca, menulis serta publikasi merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat supaya terbentuk budaya keilmuan yang tinggi, sehingga proses pembangunan bangsa dalam menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai. Pengembangan keilmuan di Indonesia harus terus dilakukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat seiring dengan digitalisasi publikasi internasional yang semakin kompetitif. Inilah tuntutan bagi kita bersama untuk segera bangun dari tidur panjang dan segera bangkit dalam berkarya dan berkompetisi dalam kancah global.

Penerbit merupakan mitra masyarakat yang berperan sebagai fasilitator sekaligus media dalam publikasi ilmu supaya dapat diakses secara luas, baik nasional maupun internasional. Penerbit adalah media paling tepat untuk publikasi keilmuan dari berbagi disiplin ilmu sehingga diskusi-diskusi secara tidak langsung melalui buku, website, buletin, jurnal maupun bentuk media yang lain bisa terus dilakukan secara berkelanjutan. Peran penerbit sangat vital mengingat fasilitator bagi masyarakat secara umum dalam mempublikasikan setiap karyanya hanya bisa dilakukan melalui penerbit, terkecuali bagi instansi atau lembaga masyarakat yang bisa menerbitkan setiap informasi yang ingin diterbitkannya. Perkembangan penerbit di Indonesia mengalami perkembangan, perlahan tapi pasti dengan bertahap setiap penerbit terus melakukan berbagai program untuk menginspirasi masyarakat supaya memiliki semangat belajar yang tinggi dalam menciptakan budaya membaca, menulis, dan publikasi.

Penerbit Wade hadir sebagai bentuk semangat serta kepedulian terhadap publikasi ilmu-ilmu yang harus terus dikembangankan secara luas sebagai bentuk kontribusi pembangunan terhadap peradaban negeri. Penerbit Wade merupakan penerbit yang fokus terhadap publikasi terhadap kajian-kajian ilmiah dari berbagai disiplin ilmu baik secara nasional maupun internasional. Berawal dari semangat inilah Penerbit Wade hadir diusianya yang masih muda untuk terus melakukan publikasi setiap karya para peneliti, dosen, pemerhati, praktisi, mahasiswa, maupun seluruh masyarakat secara umum dalam bersama-sama menciptakan semangat yang sama dalam membangun negeri.

Kegiatan Semangat Publikasi Dalam Membangun Peradaban Negeri ini merupakan bentuk dari kecintaan Penerbit Wade terhadap negeri sekaligus kepedulian terhadap peningkatan budaya menulis serta publikasi masyarakat Indonesia. Berangkat dari langkah kecil ini Penerbit Wade bermimpi bahwa budaya belajar, membaca, menulis, dan publikasi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan menjadi sebuah budaya sehingga segera tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indoensia.

Januari 2017

Redaktur Penerbit Wade

DAFTAR ISI

TEMA PENDIDIKAN

1. Pembelajaran Berbasis Sosial Media di Perguruan Tinggi. (Oleh: Anak Agung Gde Satia Utama) …10
2. Model Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru (Oleh: Afirus Febian) …22
3. Peran Pendidikan Sejarah Dalam Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia (Oleh: Gema Budiarto) …47
4. Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Perspektif Desentralisasi di Kabupaten Sragen (Oleh: Johan Bhimo Sukoco) …68
5. Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Kepuasan Kerja Guru dengan Komitmen Terhadap Organisasi (Oleh: Helina Apriyani) …95
6. Kesulitan Mengimplementasikan Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran Fisika di SMA Negeri Sekota Banda Aceh (Oleh: Musdar) …114
7. Proses Berfikir Kreatif Siswa SMP Dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Tahapan Wallas ditinjau dari _Adversity Quotient (AQ)_ (Oleh Muzani Lastri, Edy Bambang Irawan, Santi Irawan) …125
8. Pemodelan Dana Bos Terhadap Rata-Rata Nilai Rapot (Rezzy Eko Caraka, Sugiarto) …144

TEMA PSIKOLOGI

1. Pemahaman Konteks Kekerasan Seksual Anak Dalam Keluarga (Nikodemus Niko, Atem, Annisa Sintha Putri Nusantara) …166

TEMA TEKNIK

1. Prinsip Dasar Tata Kelola TIK di Pemerintahan Tingkat Nasional Indonesia. (Oleh: Rika Yuliana) …186

2. Pelatihan Basic Design Kapal Untuk Galangan Tradisional Menggunakan Software Maxsurf (Oleh: Budianto, Hariyanto Soeroso) …195

TEMA EKONOMI

1. Strategi Pembangunan Ekonomi dengan Modernisasi Pertanian dan Industrialisasi (Oleh: Matdio Siahaan) …201

TEMA HUMANIORA

1. Kandungan Minyak Dalam Bitumen Padat Daerah Lasalimu, Kabuten Buton Sulawesi Tenggara. (Oleh: R. M. Kindi Karsmono) …227

2. Karakteristik Bitumen Padat Daerah Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Nerdasarkan Pyrolisis Rock - Eval dan Analisis Retort. (Oleh: R. M. Kindi Karsmono) …243

TEMA KESEHATAN

1. Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Peran Keluarga dengan Perilaku Penerapan Gizi Seimbang Pada di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2016 (Oleh: Herdianti, Asmah, Erris Siregar) …265

2. Perawatan Metode Kanguru dengan _Simple Support Binder_ Terhadap Kepercayaan Diri Ibu Merawat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Oleh : Bina Melvia Girsang) …279

3. Analisis Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan Matriks _Importance Performance Analysis_ dan _Customer Satisfaction Index_ (Studi di Enam Puskesmas Kabupaten Sleman, DIY). (Oleh: Imam Jayanto) …294

PENDIDIKAN

PEMBELAJARAN BERBASIS SOSIAL MEDIA DI PERGURUAN TINGGI

Oleh:
Anak Agung Gde Satia Utama
Departemen Akuntansi, Universitas Airlangga
gde.agung@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

Information Technology (IT) currently plays important role in a variety of sectors, without exception in education. Higher education utilize IT ranging from academic activities to non-academic. Important activity of this educational process are teaching and learning process. Student achievement can be increased by one effort that can be done is through learning innovation. One innovation the learning process are social media. Social media will be very useful when used as much as possible to improve academic achievement and non-academic students. This study aims to find out how the views of students about social media as learning in Higher Education. This study used a qualitative exploratory. Data were taken from interviews and observations. The analysis technique using content analysis with Nvivo11. Expected results of this research will be very helpful in providing preliminary information College readiness in making use of social media in the learning process.

Keywords: Social Media, Education, Content Analysis, Nvivo11

****

ABSTRAK

Teknologi Informasi (IT) saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor pendidikan. Pendidikan yang terjadi di perguruan tinggi memanfaatkan IT mulai dari kegiatan akademik sampai non-akademik. Aktivitas yang sangat penting dari proses pendidikan ini yaitu proses belajar mengajar. Agar prestasi mahasiswa dapat meningkat salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui inovasi pembelajaran. Salah satu Inovasi proses belajar mengajar adalah dengan memanfaatkan social media. Social media yang ada akan sangat bermanfaat bila dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan mahasiswa mengenai sosial media sebagai sarana pembelajaran di Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan kualitatif eksploratori. Data yang digunakan berasal dari wawancara dan observasi. Teknik analisis menggunakan konten analisis dengan Nvivo11. Diharapkan hasil riset ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan informasi pendahuluan kesiapan Perguruan Tinggi dalam memanfaatkan sosial media pada proses belajar mengajar.

Kata Kunci: Social Media, Pembelajaran, Konten Analisis, Nvivo11

SOSIAL MEDIA

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat sekarang ini membuat manusia dihadapkan pada banyak pilihan, kebutuhan dan kemauan. Salah satunya adalah eksistensi diri manusia dalam kehidupan maya.

Gambar 1. Sosial Media

Salah satu cara eksistensi manusia adalah dengan bergabung di kehidupan dunia sosial (maya) media. Ada banyak sekali media yang disediakan mulai dari *facebook, instagram, twitter, Linkedin, path, Whatsapp, Line*, dan lainnya. Untuk eksistensi yang berkaitan dengan riset dan publikasi, terdapat *Research Gate, Orchid, Academia*, dan seterusnya.

Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan sosial media secara umum, yaitu:

1. Sarana bersosialisasi antar individu. Sosialisasi yang dapat dilakukan kapan saja, tanpa batas ruang dan waktu, namun terbatas pada koneksi, sinyal dan kuota.
2. Tempat refleksi diri dengan menuliskan segala kegiatan, aktivitas individu tersebut layaknya sebuah buku harian.
3. Koneksi atau mencari relasi.
4. Sebagai media hiburan dan penyaluran hobi.
5. Memberikan informasi serba kekinian/update terhadap berbagai hal.

6. Sarana diskusi secara group dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.
7. Menambah ilmu pengetahuan.
8. Sebagai sarana menambah penghasilan.

Seluruh manfaat diatas mempengaruhi keinginan individu tanpa terkecuali mahasiswa yang merupakan pengguna terbanyak dalam bersosial media.

SOSIAL MEDIA PADA PENDIDIKAN TINGGI

Mahasiswa memanfaatkan sosial media untuk memperoleh informasi, sarana berinteraksi dan komunikasi, serta berbagai aspek psikologisnya. Sosial media memberikan fasilitas virtual tanpa batas ruang dan waktu. Disamping itu juga lebih praktis, efektif dan efisien dari sisi biaya dan tenaga.

Gambar 2. Sosial Media pada Pendidikan Tinggi

Mahasiswa pada penelitian ini adalah mahasiswa prodi S1 Akuntansi PDD Unair Banyuwangi. Alasan memilih mahasiswa PDD Banyuwangi adalah pertimbangan lokasi dimana mahasiswa S1 Akuntansi PDD berjumlah sedikit karena termasuk prodi baru. Meskipun baru, tidak ada perbedaan proses pembelajaran antara kampus induk di Surabaya dan Banyuwangi. Disamping itu juga karena pertimbangan waktu dan biaya.

Adapun kontribusi penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kesiapan suatu perguruan tinggi dalam menggunakan sosial media dalam proses pembelajarannya. Disamping itu juga untuk menambah pengembangan teori yang digunakan terhadap perkembangan teknologi informasi yang makin cepat. Penelitian ini ke depannya diharapkan sebagai dasar riset lanjutan dalam kajian yang lebih mendalam dengan aspek penelitian yang lebih komprehensif.

TEORI DASAR

Teori yang mendasari ide penelitian ini adalah *Uses and Gratifications Theory*. Teori ini menggambarkan kehidupan manusia yang tak pernah lepas pada suatu pilihan. Pilihan dalam hal ini adalah pilihan media yang dapat memberikan kepuasan bagi manusia itu sendiri. Teori ini berawal dari *Mass Society Theory* yang menyatakan bahwa manusia adalah korban tak berdaya dari kekuatan media masa. Kemudian teori ini digantikan oleh *Limited Effect Theory* yang menyatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu dari pribadi manusia yang membatasi kekuatan media. Ada dua pendekatan yang dimaksud yaitu: kecerdasan dan harga diri membatasi kekuatan media *(individual differences perspective)* dan kekuatan media dibatasi oleh anggotanya *(social categories model)*.

Katz, Jay G Blumler dan Michael Gurevitch mengemukakan pemikiran mereka secara sistematis dengan *Uses and Gratifications Theory* (Teori Penggunaan dan Kepuasan) berpendapat bahwa orang secara aktif mencari media tertentu dengan konten tertentu untuk menghasilkan kepuasan dengan berbagai pertimbangan dan evaluasi media dalam mencapai suatu tujuan. Teori ini muncul karena adanya teori motivasi dari Maslow.

Banyak asumsi yang digunakan pada teori ini. Katz, Jay G Blumler dan Michael Gurevitch mengemukakan 5 asumsi dasar dari *Uses and Gratifications Theory*, yakni:

1. Pengguna secara aktif dan inisiatif serta kebutuhan pemuasan dalam memilih media tertentu.

2. Media berasing dengan media lain untuk memberikan kepuasan pada pengguna.
3. Pengguna memiliki minat dan motif terhadap media yang dipilih.
4. Penilaian konten media hanya dilakukan oleh pengguna.
5. Pengguna memang diarahkan untuk mencapai kepuasan atas media yang mereka pilih.

Selain lima asumsi dasar tersebut, teori ini juga membedakan antara aktifitas dan keaktifan terhadap pemahaman. Terdapat otonomi dan kebebasan dalam berkomunikasi. Blumler mengutarakan bahwa adanya motivasi kognitif individu akan meningkatkan informasi yang tersedia, media juga bisa menjadi pengganti atau pelengkap kepuasan. Terdapat berbagai kebutuhan individu *(individuals needs)*, yaitu:

1. *Cognitive needs*, yang berhubungan dengan kebutuhan akan kepastian informasi, ilmu dan lingkungan. Terdapat hasrat memuaskan rasa penasaran dan keingintahuan terhadap lingkungan.
2. *Affective needs*, kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan emosional.
3. *Personal integrative needs*, berkaitan dengan kepercayaan, status, harga diri individu.
4. *Social integrative needs*, kebutuhan sosial kontak dengan keluarga, sahabat, dan duniawi.
5. *Escapist needs*, adalah kebutuhan menghindari tekanan hasrat keberagaman.

Zizi Papacharissi dan Alan Rubin (2000) menemukan kejelasan dalam penggunaan internet. Individu memiliki 5 kepentingan dalam penggunaan internet dan terpenting adalah pencairan informasi, hiburan dan identitas personal. Teori penggunaan dan kepuasan juga memberikan suatu kontruksi dalam mempelajari media baru.

METODE RISET

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif eksploratori dengan pendekatan konten analisis. Penelitian ini bertujuan memberi gambaran dan identifikasi tentang pandangan mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis sosial media.

Data dikumpukan melalui wawancara kepada para dosen dan mahasiswa. Disamping itu juga melakukan observasi saat perkulihan berlangsung. Hasil dari wawancara dan observasi kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis kualitatif yaitu Nvivo11.

Adapun tahapannya yaitu:

1. Mengumpulkan bukti wawancara dan observasi.
2. Transkrip hasil wawancara dan observasi.
3. Reduksi data.
4. Melakukan *coding*.
5. Analisis data

Setelah dilakukan analisis data, kemudian melakukan pembahasan. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen prodi S1 Akuntansi PDD Universitas Airlangga Banyuwangi.

HASIL PENELITIAN

1. *Mind Map*

Mind Map dari penelitian ini dimulai dari konsep pembelajaran di PDD Unair Banyuwangi yang melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, selain itu dalam operasional pembelajarannya terdapat beberapa konten seperti: materi, metode dan hasil pembelajaran. Seluruh konten pembelajaran tersebut diimplementasikan melalui penggunaan sosial media. Berikut ini adalah gambaran mind map pembelajaran.

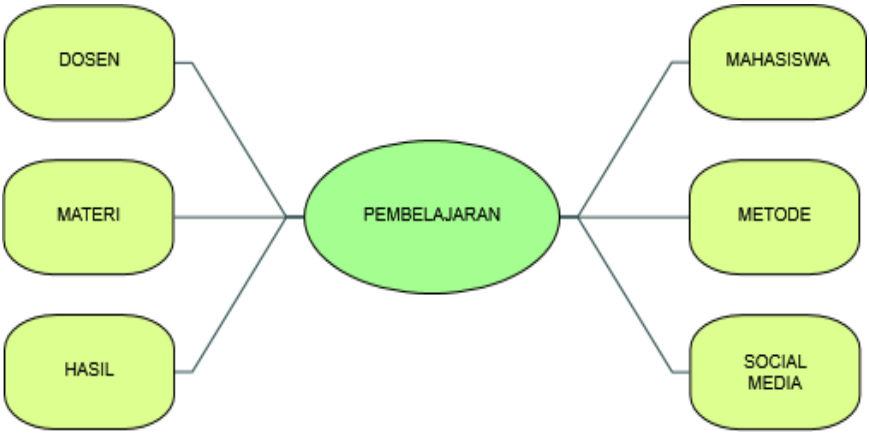

Gambar 3. Hasil Olahan *Mind Map*

2. Peran Dosen

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa pembelajaran melalui sosial media menjadi kekhawatiran bagi semua mahasiswa yakni kurang efektif komunikasi antara mahasiswa dan dosen, sulitnya berkomunikasi dengan dosen berdampak penyerapan ilmu kurang maksimal. Mahasiswa lebih senang tatap muka langsung dengan dosennya. Dosen bisa meluruskan apabila ada pemahaman yang keliru dari mahasiswa dalam penyerapan ilmu. Selain itu, dengan pembelajaran konvensional dosen tidak hanya mengajar saja namun dosen dapat menyelipkan motivasi dan pelajaran moral yang tidak akan mungkin didapat melalui sosial media. Dosen bagi mahasiswa adalah pembimbing yang berpengaruh penting dalam menuntut ilmu. Dikhawatirkan bagi mahasiswa adalah motivasi dapat turun dengan pembelajaran berbasis sosial media.

Melalui pembelajaran konvensional, mahasiswa dapat dengan mudah mereview materi kuliah melalui catatan yang mereka simpan saat penyampaian materi. Interaksi optimal antara mahasiswa dan dosen juga tercapai melalui pembelajaran konvensional. Namun, ada mahasiswa yang beranggapan dengan pembelajaran melalui sosial media dosen tidak memerlukan space untuk melakukan pertemuan selayaknya pembelajaran tatap muka langsung.

3. Peran Mahasiswa

Harapan mahasiswa terhadap dosen jika pembelajaran berbasis sosial media diimplementasikan sebelumnya. Bagi mahasiswa sendiri mengakui bahwa dengan sosial media komunikasi mahasiswa dengan dosen menjadi pasif dalam menyerap ilmu sehingga pembelajaran menjadi kurang maksimal dan materi kurang dipahami.

Dari hasil wawancara, mahasiswa juga berpendapat bahwa tidak semua mahasiswa mempunyai metode pembelajaran yang sama. Pemahaman mahasiswa juga berbeda antara satu dengan lainnya. Mahasiswa masih merasa kesulitan jika pembelajaran lewat sosial media. Hal ini juga berdampak bagi prestasi mereka sendiri. Selain itu, semangat mahasiswa dan motivasi mahasiswa untuk belajar dan melakukan hal-hal yang produktif menurun.

Selain kemampuan daya serap materi yang berbeda, secara materi tidak semua mahasiswa memiliki *gadget* yang canggih. Mahasiswa kurang fokus dalam mengimplementasikan waktu belajar online dengan berganti-ganti sosial media. Perlu banyak pertimbangan secara internal dan eksternal dari mahasiswa itu sendiri untuk pembelajaran menggunakan sosial media.

Namun ada juga mahasiswa yang setuju dengan pembelajaran melalui sosial media yang diarahkan untuk menggunakan sosial media dengan bijak, dengan demikian kembali kepada mahasiswa atau pengguna sosial media itu sendiri, bisa memperkaya ilmu atau sebaliknya. Penggunaan sosial media dapat meningkatkan semangat karena penggunaan teknologi canggih. Mahasiswa juga menjadi lebih disiplin untuk belajar.

4. Materi dan Metode Pembelajaran

Kekinian lebih praktis namun skeptis untuk eksekusi yang manis jika diterapkan saat penyampaian materi, begitu yang disampaikan salah satu mahasiswa saat wawancara. Mereka tidak menolak untuk penggunaan sosial media dalam perkulihan namun jangan sampai teknologi tersebut menjadikan mereka salah dalam

memahami dan mengartikan ilmu yang diberikan dosen. Dan, sebagian mahasiswa berpendapat bahwa bisa saja materi menjadi tidak terbaca dan tidak detail dalam penyampaian informasi.

Ada kemungkinan mahasiswa sibuk dengan *gadget* masing-masing dan materi dosen terabaikan. Dengan tatap muka langsung mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan kapan saja diinginkan. Pembelajaran berbasis sosial media memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi selain materi akademik, juga non-akademik seperti: lomba-lomba, beasiswa, kuliah sosial, organisasi profesi, dan lainnya.

Sebagian mahasiswa juga berpendapat sudah saatnya materi disampaikan secara *online* seperti banyak universitas di luar negeri yang melakukan kuliah *online.*

KESIMPULAN

Perlu persiapan matang dalam memulai suatu pembelajaran berbasis *online*, terutama kesiapan dari sisi mahasiswa. Berbagai kekhawatiran muncul saat sosial media menjadi isu akan menjadi media interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Namun tampaknya mahasiswa tidak siap apabila dilakukan kuliah *online.* Diharapkan nantinya kesiapan pembelajaran berbasis sosial media tidak hanya karena kemajuan teknologi dan informasi, namun sudah menjadi kebutuhan perguruan tinggi untuk menyediakan layanan pendidikan kepada mahasiswa agar prestasi lebih dioptimalkan.

Bahan Bacaan

Barnes, N. G., & Lescault, A. M. (2011). Social media adoption soars as higher-ed experiments and reevaluates its use of new communications tools. *Center for Marketing Research. University of Massachusetts Dartmouth, North Dartmouth, MA.*

Blankenship, M. (2011). How social media can and should impact higher education. *Education Digest*, *76*(7), 39-42.

Bogdanov, E., Limpens, F., Li, N., El Helou, S., Salzmann, C., & Gillet, D. (2012, April). A social media platform in higher education. In *Global engineering education conference (educon), 2012 ieee* (pp. 1-8). IEEE.

Chou, C., & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students case. *Computers & Education*, *35*(1), 65-80.

Davis III, C. H., Deil-Amen, R., Rios-Aguilar, C., & Canche, M. S. G. (2012). *Social Media in Higher Education: A literature review and research directions.*

Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. *The Internet and Higher Education*, *19*, 18-26.

Moran, M., Seaman, J., & Tinti-Kane, H. (2011). Teaching, Learning, and Sharing: How Today's Higher Education Faculty Use Social Media. *Babson Survey Research Group*.

Roy, S. K. (2009). Internet uses and gratifications: A survey in the Indian context. *Computers in Human Behavior*, *25*(4), 878-886.

Ruggiero, T. E. (2000). Uses and gratifications theory in the 21st century. *Mass communication & society*, *3*(1), 3-37.

Tess, P. A. (2013). The role of social media in higher education classes (real and virtual) A literature review. *Computers in Human Behavior*, *29*(5), A60-A68.

Voorn, R. J., & Kommers, P. A. (2013). Social media and higher education: introversion and collaborative learning from the student's perspective. *International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments*, *1*(1), 59-73.

Sosiawan, E. A. (2011). Penggunaan Situs Jejaring Sosial sebagai Media Interaksi dan Komunikasi di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi*, *9*(1), 60-75.

Stafford, T. F., Stafford, M. R., & Schkade, L. L. (2004). Determining uses and gratifications for the Internet. *Decision Sciences*, *35*(2), 259-288.

MODEL PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN PADA SMK TELKOM SANDHY PUTRA BANJARBARU

Oleh:
Afirus Febian

ABSTRACT

Afirus Febian. 2011. A Model of Learning Quality Assurance in SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru. School as an educational institution, which creates the development of excellent, hard-working human with a good moral, is demanded to provide a qualified education for its learning participants. SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru, as the school which is willing to go international, realizes that the learning quality is very essential to achieve it. The objective of the research was to find out the learning quality assurance conducted in SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru which included: the learning quality planning, organizing/ executing, and evaluation. The research employed a qualitative descriptive approach. Based on the data analysis and the discussion indicated that the model of learning quality assurance management in SMK Telkom Sandhy Putra Banjbaru was approaching Edward Deming model.

Keywords: *Quality Assurance, Learning Quality*

PENDAHULUAN

Sebagai suatu organisasi kependidikan, sekolah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai "*agent of change*", yang bertugas untuk membangun sumber daya manusia yang berpendidikan mampu menjawab permasalahan nasional dalam persaingan globalisasi. Penyeleng-garaan pendidikan harus berorientasi pada pem-bentukan manusia yang kompeten dan berakhlak mulia. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Mutu dalam pendidikan menjadi sangat penting karena cara terbaik untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaiangan antar sesama manusia dalam suatu daerah, wilayah, negara, bahkan negara atau bangsa lain adalah dengan menciptakan manusia-manusia yang berpendidikan dengan kualitas terbaik. Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap proses, pelaksanaan, dan pengawasan mutu pendidikan dengan menerapkan *Total Quality Management* (Sallis, 2010).

Peningkatan mutu pendidikan secara khusus dapat terlihat dari mutu pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan mutu hasil pembelajaran berarti memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran sebagai keluaran (*output*) berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan serta dampak (*outcome*) yang bisa memenuhi bahkan melebihi kebutuhan warga belajar untuk meningkatkan mutu hidup (*quality of life*), kecuali itu juga peningkatan mutu proses dan hasil belajar tidak bisa dipisahkan dari berbagai sub-sistem lainnya (Suryadi, 2009).

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik (E. Mulyasa, 2010). Sehingga tugas guru yang paling utama mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Untuk itu, seorang guru harus memahami prinsip manajemen dalam penyusunan proses pembelajaran sehingga diperoleh mutu pembelajaran yang baik dari suatu lembaga pendidikan.

Imam (2005) dalam Agon (2010) pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan di jenjang menegah yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi awal kearah suatu pekerjaan atau karier. Kepmendikbud Nomor 0490 Tahun 1992 menyatakan, Sekolah Menengah Kejurauan adalah Sekolah Menengah Tingkat Atas yang memberikan layanan pendidikan kepada siswa (peserta didik) berbagai macam keahlian dan keterampilan (kejuruan) untuk memasuki lapangan kerja.

Menurut Runkilton dalam Agon (2010) tujuan utama pendidikan kejuruan adalah meningkatkan kemampuan peserta didik sehingga dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagai lembaga yang memberikan berbagai macam keahlian dan keterampilan pada peserta didik di tingkat pendidikan jenjang menengah sudah selayaknya selalu berkembang mengikuti pesatnya perkembangan teknologi industri dan komunikasi, sehingga tercipta lulusan yang berdayasaing.

Sugiyono (2003) menyatakan manajemen pendidikan kejuruan yang professional adalah manajemen yang cerdas yaitu manajemen yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (*Planing, Doing, Checking, Reviewing*) secara sungguh-sungguh, konsisten dan ber-kelanjutan dalam mengelola sumber daya meliputi 7M (*Man, Money, Material, Methods, Machine, Market* dan *Minute*) sehingga tujuan pendidikan kejuruan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran sumber daya manusia menjadi aset yang paling berharga, karena merupakan perencana dan pelaksana dalam pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Manajemen penjaminan mutu pembelajaran menjadi penting dalam pelaksaannya, karena dengan pembelajaran yang baik maka kualitas kemampuan peserta didik dapat berdaya saing global. Dalam rangka pelaksanaan standar dan penjamin mutu pembelajaran yang baik maka diperlukan pula proses manajemen yang baik, sehingga semua tercipta kegiatan pembelajaran yang berkualitas, efisien, efektif, dan memberikan jaminan mutu atas kualitas pendidikan itu sendiri kepada peserta didik dapat terarah dan terpenuhinya target pencapaian.

SMK Telkom Sandhy Putra sebagai salah satu sekolah kejuruan bidang teknologi favorit di Banjarbaru diharuskan mampu memberikan kualitas pembelajaran yang bermutu, dapat mendorong dan mengoptimalkan keahlian dan keterampilan peserta didiknya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK. Sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang berkualitas. Karenanya perlu dilakukan peng-kajian terhadap model manajemen penjaminan mutu pembelajaran yang dilaksanakan SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru.

Penelitian ini mengacu pada pelaksanaan manajemen penjaminan mutu pembelajaran yang telah dilaksanakan SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru melalui proses pembelajaran. Sehu-bungan dengan penelitian tersebut, maka perlu menjadi perhatian penelitian ini berpedoman pada model manajemen penjaminan mutu pembelajaran yang dilihat dari proses manajemen penjaminan mutu pembelajaran yang telah dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Sandhy Putra Banjarbaru.

Berdasarkan uraian diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen penjaminan mutu pem-belajaran dari proses manajemen pembelajaran SMK Telkom

Sandhy Putra Banjarbaru yang meliputi: 1) Perencanaan mutu pembelajaran, 2) Pengorganisasian/Pelaksanaan mutu pembelajaran, 3) Evaluasi pelaksanaan mutu pembelajaran.

METODE

Peneliti dalam penelitian ini berusaha memahami subjek berdasarkan pendapat yang diperoleh dari partisipan penelitian. Peneliti tidak menilai benar atau salah data yang diperoleh berdasarkan angka-angka perhitungan, oleh karena itu semua persfektif menjadi nilai penting bagi peneliti.

Seorang peneliti perlu menentukan jenis pendekatan yang akan dipergunakannya secara cermat agar benar-benar sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini memper-gunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena (1) menurut Robert K. Yin (Bungin, 2005) bahwa studi kasus lebih banyak berkutat pada atau berupaya menjawab pertanyaan *how* dan *why* serta *what*, dalam kegiatan penelitian; (2) dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh keterangan-keterangan empiris yang detail dan aktual dari penelitian yang berhubungan dengan model manajemen penjaminan mutu pembelajaran SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kuali-tatif, merupakan perencana, pelaksana pengum-pulan data, analis, penafsir data, dan akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2010). Sehingga, peneliti harus mampu mengung-kapkan permasalahan dalam penelitiannya dengan terlebih dahulu dapat ditetima oleh responden dan lingkungan penelitiannya.

Menurut Lofland (1984) dalam Moleong (2010), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata* dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen/sumber data tertulis, foto, dan data statistik.

Penelitian ini mempergunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai rupa keadaan, tindakan yang dilakukan oleh pelaksana manajemen mutu pembelajaran pada SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru. Dengan kenyataan-kenyataan yang diperoleh akan ditindak lanjuti dengan penggalian data melalui wawancara. Pengumpulan data juga dilakukan dengan memanfaatkan dokumen yang terkait dengan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik analis komponensial (*Componential Analysis*). Sebagai-mana dikatakan Bungin (2005), teknik analisis komponensial merupakan teknik yang termudah dalam mengenal gejala-gejala sosial, karena gejala-gejala sosial dengan unsur-unsur yang sama akan mengelompokkan secara alamiah, sedangkan yang tidak memiliki kesamaan unsur akan menampakkan gejala untuk memisahkan diri.

Sebagaimana penelitian ini mempergunakan teknik observasi dan wawancara dalam melakukan penelitian, maka bentuk sampel berupa *purposive*, dimana pertanyaan selalu bergulir dan data diambil dari semua informan. Data-data yang diperoleh dikelompokkan dalam 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu bersumber dari Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan beberapa unit pelaksana kegiatan pembelajaran di SMK Telkom Sandhy Putra.
2. Sumber data sekunder, yaitu berupa data dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai dayanya jenuh (Sugiyono, 2009). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) menyatakan analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menurus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersdia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, catatan observasi, dan data dokumentasi (Moleong, 2010). Sugiyono (2009),

teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mempergunakan model analisis Miles dan Huberman (1984), yaitu melakukan *reduksi data, display data, dan verifikasi data.*

Beberapa upaya yang peneliti lakukan agar hasil penelitian memiliki keabsahan yang tinggi antara lain:

1. Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam kurun waktu yang cukup panjang.
2. Melakukan triangulasi atas hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang peneliti ketemukan.

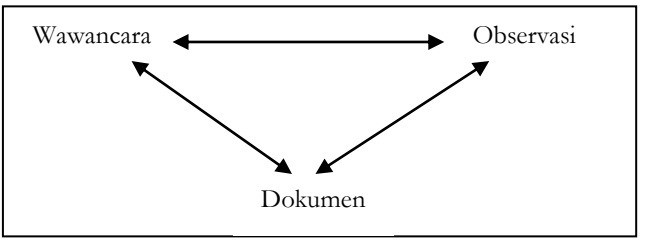

Gambar1. Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Mutu Pembelajaran

Perencanaan merupakan proses pemikiran dan penentuan aktivitas yang akan dilakukan pada masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan (Burhanuddin, 2002: 36), yaitu: (1) terarah pada pencapaian tujuan tertentu, (2) berdasarkan data yang akurat, (3) dilakukan oleh orang-orang yang kompetens, (4) melibatkan seluruh komponen sekolah, (5) jelas, rinci, dan kongkrit, (6) akomodatif terhadap perubahan dan keadaan mendesak, serta (7) berorientasi pada masalah obyektif.

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru dalam penyusunan rencana menuju sekolah yang bermutu dengan menerapkan sebuah standar mutu pada setiap bidang manajemen sekolah telah melaksanakan tujuh pedoman persyaratan perencanaan yang dibuat oleh Burhanuddin (2002).

Data dokumentasi standar mutu kurikulum yang disusun oleh SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru, terdiri atas empat prosedur mutu, yaitu: (1) prosedur perencanaan realisasi; (2) prosedur ujian dan standar kelulusan; (3) prosedur analisis kebutuhan guru; dan (4) prosedur pembagian raport. Terkait mengenai mutu pembelajaran sebagaimana dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam standar proses pasal 20 menyatakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pem-belajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Merujuk keempat prosedur mutu dari bagian kurikulum yang telah dibuat terutama prosedur perencanaan realisasi belum terdapat mengenai standar proses yang telah diamanatkan pera-turan pemerintah tersebut, dengan kata lain belum ada standar mutu dan prosedur mutu pembelajaran yang ada barulah standar mutu kurikulum dan pelaksanaan pembelajarannya diserahkan kepada masing-masing guru.

Berdasarkan observasi penulis dari silabi dan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru di SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru tidaklah berbeda dengan guru-guru di SMK lain yang sekolahnya belum memiliki standar mutu. Namun, jika dilihat dari kajian kurikulumnya memang jelas berbeda. Guru-guru SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah menyusun silabus, rencana pembelajaran, alokasi waktu, program tahunan dan program semester sesuai dengan kalender pendidikan yang telah dibuat oleh sekolah sesuai arahan Dinas Pendidikan. Merujuk dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Silabus yang dibuat oleh guru mata pelajaran, struktur muatan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun di dalamnya terdapat: (1) standar kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) alokasi waktu, (4) indikator, (5) tujuan pembelajaran, (6) materi pembelajaran, (7) metode pembelajaran, (8) langkah-langkah kegiatan, dan (9) alat dan bahan.

Namun jika merujuk rekomendasi Gagne untuk merencanakan pembelajaran yakni: (1) pembelajaran mesti direncanakan agar memperlancar belajar siswa perorangan; (2) rancangan pembelajaran disusun dalam fase pendek maupun maupun fase jangka panjang; (3) pembelajaran hendaknya dirancang secara sistematis; (4) usaha pembelajaran mesti dirancang dengan pendekatan sistem; dan (5) pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang orang itu belajar. Terkait mengenai mutu pembelajaran sebagaimana dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam standar proses pasal 20 menyatakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, terlihat pembuatan rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru belum melaksanakan Standar Proses yang telah ditetapkan. Dimana dalam rencana pembelajaran belum melaksanakan berbagai metode mengajar lain mereka lebih sering menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan pembelajaran, dan sumber-sumber belajar belum variatif. Proses pembelajaran yang baik dapat dilakukan oleh siswa baik didalam maupun diluar kelas, dan dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa diharapkan mereka mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman- temannya secara baik dan bijak.

Proses perencanaan mutu kurikulum di SMK Telkom Sandhy Putra, sebagaimana temuan penelitian melalui wawancara, diawali dengan adanya komitmen dari seluruh warga sekolah. Hal ini sesuai dengan prinsip pertama dari 14 prinsip mutu yang dikemukakan Edward Deming, yaitu bulatkan tekat untuk meningkatkan kualitas jasa pendidikan menengah secara berkesinambungan.

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru mengupayakan adanya komitmen oleh seluruh warga sekolah, dengan adanya komitmen ini maka akan terbangun rasa tanggung jawab dan kesediaan setiap warga sekolah dalam melaksanakan komitmen tersebut, model perencanaan

mutu pembelajaran yang dilakukan SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru penulis coba gambarkan dalam gambar 2.

Jika merujuk pada konsep mutu yang disampaikan Josep Juran, SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah melaksanakan pembagian tugas secara hirarki pada setiap lapisan manajerial sekolah. Dengan adanya kepala sekolah,wakil, kepala program studi, kepala tata usaha, dan lain sebagainya. Sehingga dilihat dari konsep mutu Joseph Juran 85/15, 85 persen manajerial telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh SMK Telkom Sandhy Putra. Dengan merujuk 14 prinsip Edward Deming kegiatan perencanaan mutu SMK Telkom Sandhy Putra sebagai berikut.

1) Adanya kebulatan tekat untuk meningkatkan kualitas jasa pendidikan menengah secara berkesinambungan untuk mem-persiapkan siswa menghadapi berbagai persaingan ke-hidupan dimasa depan khususnya persaingan dunia kerja.
2) Dengan komitmen bersama akan meng-hilangkan rasa takut, sehingga setiap orang bisa bekerja dengan penuh rasa percaya diri, kreatif, efektif, dan efisien.
3) Dengan masing-masing bagian mengem-bangkan prosedur mutu maka kerja sama antara satuan-satuan dalam organisasi pendidikan menengah dengan meniadakan pembatasan-pem-batasan yang kaku.
4) Mengembangkan rasa bangga atas kinerja dalam diri setiap siswa, guru, dan pegawai.
5) Melaksanakan trasnformasi dalam pendidikan menengah dan mengikut sertakan setiap orang dalam pelaksanaan tersebut.

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru memang telah me-laksanakan perencanaan mutu dengan cukup baik hal ini dapat dilihat dari prosedur mutu yang telah disusun terkait dengan pelaksanaan mutu pembelajaran, dari keempat prosedur mutu yang dibuat jika dikaji dengan konsep mutu yang disampaikan Edward Deming terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

1. Belum menganut *Total Quality Management* secara menyeluruh

Walau telah melaksanakan komitmen dengan melibatkan seluruh warga sekolah dalam penyusunan prosedur mutu namun belum mengarah pada rencana pembelajaran yang bermutu. Namun, masih menyerahkan kepada guru mata pelajaran secara personal untuk mengembangkan rencana pembelajaran berdasarkan silabi yang telah disusun oleh bagian kurikulum.

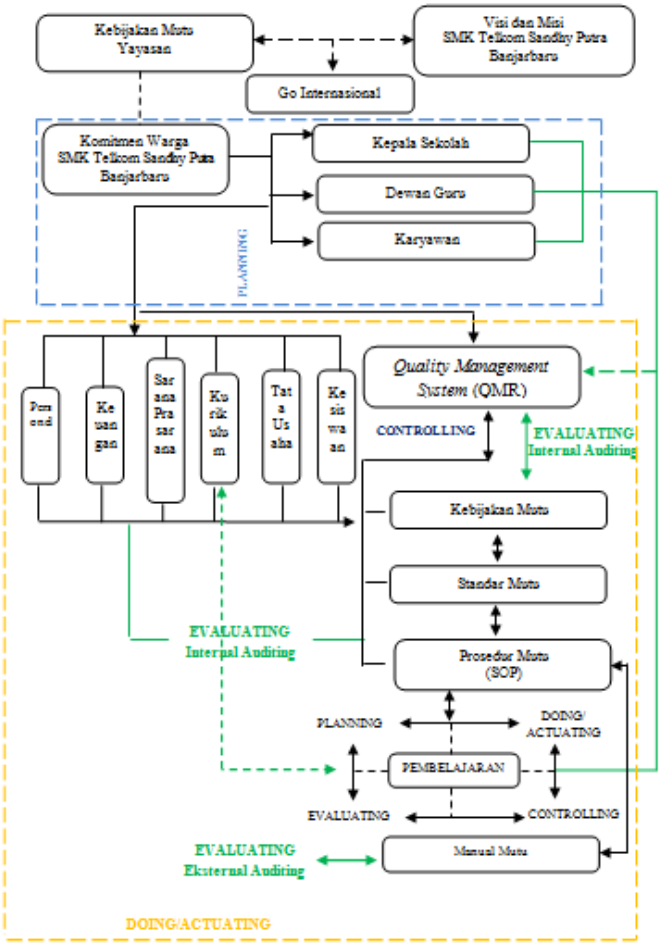

Gambar 2. Bagan Perencanaan Prosedur Mutu SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru

2. Masih adanya target berkaitan dengan siswa dan guru

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru masih memberikan target secara kuantitatif pada siswa, dan guru. Hal ini terlihat dari pemilihan siswa-siswa tertentu melalui tes-tes seleksi, hal ini bertentangan dengan konsep mutu itu sendiri. Sekolah yang bermutu dengan standar yang ada akan mampu menciptakan siswa-siswa yang bermutu dengan standar mutu pembelajarannya tanpa harus melihat mutu dari siswa itu terlebih dahulu. Pembelajaran yang bermutu akan dapat memberikan seperangkat pengetahuan atau nilai serta deskripsi keterampilan kepada seseorang agar mampu mengembangkan atau meningkatkan inteligensinya.

Namun demikian, sejauh ini proses perencanaan mutu yang telah dilaksanakan oleh SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah melaksanakan kaidah-kaidah perencanaan yang disusun oleh para ahli. Hal ini terlihat dengan diawali oleh komitmen bersama seluruh warga sekolah, adanya kerjasama dalam penyusunan prosedur mutu pada berbagai bidang manajemen sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah, adanya pembagian tugas pada setiap hierarki manajerial.

Sebagai sekolah yang telah menyusun dan melaksanakan prosedur mutu dalam kurikulumnya, guna meningkatkan kualitas peserta didiknya harus membuat prosedur mutu pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 mengenai pelaksanaan standar proses, dan dalam perencanaannya dapat merujuk rekomendasi Gagne.

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru dalam menyusun perencanaan mutu sekolah pada umumnya dan mutu pembelajaran khususnya telah mengkoordinasikan dengan seluruh warga sekolah. Hal ini, didukung dengan adanya dokumen komitmen bersama seluruh warga sekolah untuk menjadikan SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru sebagai sekolah bermutu.

Maka, SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah melaksanakan model manajemen partisipatif.

2. Pengorganisasian/Pelaksanaan Perencanaan Mutu

Pengorganisasian perencanaan mutu kurikulum di SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru, menunjukan adanya pembagian tugas manajerial yang teratur tidak hanya dipikul oleh kepala sekolah sendiri. Dimana masing-masing pembagian tugas kerja telah mengetahui tugas dan tujuan kerjanya. SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah membentuk tim *Quality Management System* (QMR) sebagai motor penggerak jalannya standar mutu.

Awal pembentukannya tim *Quality Management System* dipimpin langsung oleh Yayasan Sandhykara Makmur selaku pengelola SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru dengan diwakili oleh seorang guru yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Saat ini pengelolaan *Quality Management System* ditangani oleh guru yang menjadi wakil pada awal pembentukan tim *Quality Management System*.

Tim *Quality Management System* inilah yang merancang, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan standar mutu. Tim ini juga mendapat pengawasan oleh yayasan dan tim penilai standar mutu independen. Tim *Quality Management System* ini pula yang menentukan kapan waktu kegiatan workshop/pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya guna mengem-bangkan berbagai prosedur mutu yang telah disusun, setelah melakukan observasi dan evaluasi atas kelemahan dari prosedur mutu.

Namun dari hasil observasi penulis menemukan, pembentukan pengelola *Quality Management System* yang ada saat ini kepala sekolah tidak memiliki standar tertentu. Keputusan ini hanya didasari oleh kemampuan seorang individu yang dirasa memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keputusan bersama dalam rapat.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya pelaksanaan prosedur mutu yang telah direncanakan dan tersusun rapi telah dilaksanakan oleh seluruh pelaksana dengan tertib dan terarah. Namun, aspek *human error* tidak dapat dihindari dalam pelaksanaannya, berdasarkan observasi yang penulis lakukan terlihat kesalahan yang sering dilakukan adalah keterlambatan pelaksanaan tugas dari batas waktu yang telah ditetapkan, kelalaian dalam melakukan dokumentasi dan bukti rekaman yang merupakan unsur penting dalam pelaksanaan sehingga terjadi "rapelan" dalam penyusunannya saat dilakukan evaluasi.

Prosedur mutu kurikulum yang telah disusun dalam pelaksanaannya belum mampu menyentuh aspek dasar pelaksanaan pembelajaran, sehingga belum tampak perbedaan yang dapat dikatakan merupakan pembelajaran yang bermutu. SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru hanya mengarahkan guru untuk menyusun rencana pembelajaran namun tidak mengarahkan bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikatakan bermutu, sekolah hanya memiliki jam pembelajaran yang jauh lebih lama dibandingkan sekolah lain. SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru memang telah melakukan pengembangan KTSP kejuruan sesuai dengan permintaan pasar dan akan menyusun kurikulum yang dapat *Go Internasional* dengan ini diharapkan tidak melupakan aspek penting dalam pembelajaran adalah bagaimana penyampaian kurikulum kepada peserta didik sehingga penyajian seperangkat pengetahuan atau nilai serta deskripsi keterampilan kepada seseorang akan mampu mengembangkan atau meningkatkan inteligensinya.

Terkait mengenai mutu pembelajaran sebagaimana dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam standar proses pasal 21 menyatakan pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Merujuk dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Silabus yang dibuat oleh guru mata pelajaran struktur muatan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di dalam rencana pembelajaran yang disusun terdapat: (1) standar kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) alokasi waktu, (4) indikator, (5) tujuan pembelajaran, (6) materi pembelajaran, (7) metode pembelajaran, (8) langkah-langkah kegiatan, dan (9) alat dan bahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 20 menyatakan: "perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar". Rencana pembelajaran yang telah disusun belum sesuai denga standar proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam rencana pembelajaran yang telah disusun belum menyajikan sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Hasil observasi yang penulis lakukan dari proses pembelajaran, banyak guru yang mengandalkan metode mengajar dengan cara ceramah. Ruang kelas cukup padat karena dapat mencapai 36 orang siswa dalam satu kelasnya. Hal ini akan cukup mengganggu optimalisasi penyampaian suatu keilmuan oleh pengajar.

Berdasarkan pasal 21 PP Nomor 19 tahun 2005, terlihat pelaksaan pembelajaran yang dibuat oleh SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru belum melaksanakan Standar Proses yang telah ditetapkan pemerintah. Dimana dalam pelaksanaan pembelajaran belum melaksanakan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru dalam mengorganisasi dan melaksanakan perencanaan mutu sekolah pada umumnya dan mutu pembelajaran khususnya telah dilakukan proses kerjasama secara bersama-sama antara pimpinan tingkat atas bersama-sama dengan pimpinan kelas bawah. Hal ini, didukung dengan adanya pembentukan unit-unit kerja agar pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Maka, SMK Telkom Sandhy

Putra Banjarbaru telah melaksanakan model *Management By Objective* (MBO).

3. Evaluasi Perencanaan Mutu Pembelajaran

Evaluasi merupakan proses terakhir dalam fungsi manajemen, evaluasi berusaha mengumpulkan informasi mengenai jalannya program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diketemukan hal-hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan, kemudian memecahkannya sebelum hambatan tersebut mengganggu pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan evaluasi terhadap prosedur mutu yang telah dilaksanakan belum dilakukan secara komprehensif, selama ini SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru hanya melaksanakan evaluasi terhapap pelaksanaan prosedur mutu secara global belum mengarah pada masing-masing ruang lingkup dari prosedur mutu itu sendiri.

Selain itu baik bidang kurikulum maupun *Quality Management System* belum melakukan pengawasan dan evaluasi dari komponen-komponen pembelajaran yang dikembangkan oleh guru seperti silabus dan rencana pembelajaran yang dibuat. Dengan kata lain silabus dan rencana pembelajaran belum dapat dikatakan memiliki prosedur dan standar penyusunan, sehingga menjadi rencana pembelajaran yang bermutu.

Seharusnya pengawasan dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif terhadap semua ruang lingkup prosedur mutu yang telah disusun dan ditetapkan. Sehingga arti dari sekolah bermutu tersebut dapat benar-benar menciptakan peserta didik yang bermutu dan berdaya saing global.

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran, tampak bahwa pengajar SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru melakukan penilaian atas pelaksanaan pembelajaran berupa tes yang dilakukan oleh guru setelah menyelesaikan suatu kompetensi atau saat menyampaikan suatu materi pembelajaran, baik berupa tanya jawab

saat menjelaskan ataupun suatu tes tertulis baik berupa latihan, tugas mandiri, tugas rumah, atau tugas kelompok. Untuk sekolah sendiri melaksanakan ter sesuai dengan Prosedur Mutu dan Standar kelulusan yang telah ditetapkan. Dokumen hasil penilain juga tersusun lengkap dengan adanya dokumen penilaian dan leger nilai yang telah disusun, hal ini sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

Pengertian mutu yang disampaikan para ahli memiliki beraneka ragam definisi, perbedaan ini mengacu pada orientasi masing masing pihak mengenai objek mutu, walaupun demikian benang merah dari pengertian mutu adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dan produsen sendiri.

Terkait dengan dunia pendidikan, sebuah pendidikan yang bermutu harus mampu melayani semua pengguna pendidikan (*stekeholders*) terutama peserta didik. Pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari adanya kurikulum yang mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diterima peserta didik menjadi sebuah keilmuan yang berdampak luas, penyampaian kurikulum yang bermutu tidak terlepas dari adanya pembelajaran yang bermutu pula.

Mutu pendidikan perlu dikelola secara total dengan pendekatan sistem secara menyeluruh (bukan suatu bidang atau program terpisah) dan merupakan strategi tingkat tinggi yang melibatkan semua karyawan dari atas sampai bawah, meluas ke hulu dan ke hilir, mencakup mata rantai pemasok dan *customer*, atas semua usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru, memang telah melaksanakan manajemen mutu dengan cukup baik mulai dari perencanaan yang melibatkan seluruh warga sekolah, adanya pembagian tugas manajerial, kontrol pelaksanaan oleh *Quality Management System*. Namun, dalam pelaksanaannya menjadi sekolah yang bermutu tidak dapat hanya dengan adanya kurikulum yang

bermutu tetapi proses pembelajaran harus bermutu pula. Sehingga diperlukan prosedur mutu untuk menjalankan pembelajaran itu sendiri yang akan menghasilkan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tanpa harus mengklasifikasikan kemampuan intelegensia seorang calon siswa melalui berbagai rangkaian tes-tes seleksi masuk, tanpa mengesampingkan fungsi penilaian dari diadakannya suatu tes. Pembelajaran yang bermutu akan mampu menghantarkan seluruh peserta didiknya menjadi manusia-manusia yang berpendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika kemampuan belajar murid yang menjadi kriteria mutu pendidikan, maka segala pengaruh, baik itu dari lingkungan maupun dari dalam sekolah itu sendiri, harus diarahkan pada peningkatan, perluasan, penerapan, dan pemeliharaan kemampuan belajar murid. Pendidikan yang bermutu ialah yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaruan dan perubahan.

Sejalan dengan tujuan SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru untuk *go internasional* pada tahun 2015 dengan memiliki kurikulum pembelajaran yang dapat disetarakan dengan negara-negara tetangga Indonesia, diharapkan tidak melupakan beberapa konsep mutu yang disampaikan oleh Edward Deming:

1) Anut filosofi baru TQM dalam pendidikan menengah.
2) Jangan bergantung pada sistem evaluasi yang bersifat koparatif dan kompetitif untuk mencapai kualitas.
3) Kembangkan kerja sama yang baik dengan orang tua siswa, guru pegawai dan semua siswa yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan

4) Perbaikan dan tingkatan kualitas sistem pengajaran dan pelayanan lainnya secara efektif dan efisien.
5) Tingkatan kerja sama antara satuan-satuan dalam organisasi pendidikan menengah dengan meniadakan pembatasan-pembatasan yang kaku.
6) Hilangkan slogan, pernyataan instruktif, dan target berkaitan dengan siswa dan guru.
7) Hilangkan sistem quota (target kuantitatif), tujuan dalam bentuk angka berkenaan dengan orang dalam administrasi.

Walaupun sesuai pandangan Joseph Juran, SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah mampu melaksanakan 85 persen konsep manajerial terlaksana dengan baik. Namun merujuk pendapat Philip Crosby bahwa *quality is free*, artinya kualitas tidak mahal, konsep ini mengisyaratkan bahwa yang mahal itu pada dasarnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkualitas, seperti pekerjaan tanpa perencanaan, prosedur yang salah, dan lain-lain. Kedua, *zero defects* (tanpa cacat), konsep ini menunjukan bahwa setiap kegiatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara sempurna dari awal hingga akhir sehingga tidak ada atau hampir tidak ada kesalahan.

SMK Telkom sandhy Putra dalam menyusun indikator pencapaian mutu pembelajaran dapat merujuk pendapat Ace dan Tilaar (1994:159) indikator untuk membuat perencanaan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah (Tenaga Administrasi, Laboran dan Teknisi, Tenaga Perpustakaan), proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, implementasi kurikulum, sistem penilaian dan komponen-lainnya. Ini berarti melalui pengawasan harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Itulah sebabnya kehadiran pengawas sekolah harus menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan, agar bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya berkolaborasi membina dan mengembangkan

mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran, Fattah (1999: 25) memfokuskan tiga factor untuk meningkatkannya, yaitu: (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Dengan mempertimbangkan fakto-faktor yang dikatakan oleh Fatah dalam merancanakan sebuah ketetapan mutu maka SMK Telkom Sandhy Putr Banjarbaru akan menghantarkan pada kualitas peserta didik yang bermutu.

Perubahan paradigm di SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru harus dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan karyawan sehingga mereka mempunyai langkah dan strategi yang sama yaitu menciptakan mutu di lingkungan kerja SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (*teamwork*) yang saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target (*goals*) akan tercipta dengan baik. Adapun *teamwork* yang dibuat dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada di sekolah, seperti:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah;
2. Siswa;
3. Guru;
4. Kurikulum;
5. Jaringan Kerjasama;

Pelibatan semua warga sekolah itu harus berlangsung mulai dari planning, organizing, staffing, directing, commanding, coordinating, communicating, budgeting, leading, motivating, compensating dan sampai kepada controlling. Dengan pelibatan tersebut, maka mereka akan menjalankan tugas, peran dan fungsi serta pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh komitmen. Pelibatan semua warga sekolah menurut Goetsch dan Davis sebagai-

mana di kutip oleh Ariani adalah merupakan bentuk pemberian kepuasan kepada pelangan internal agar mereka mau dan mampu memberikan layanan pendidikan yang memuaskan bagi pelangan eksternalnya. Pelibatan warga sekolah itu dalam seluruh proses atau kegiatan (Ariani, 2003:35).

Bentuk-bentuk keterlibatan guru dan karyawan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah dapat berupa saran, baik secara pribadi maupun kelompok, baik atas permintaan pimpinan ataupun atas inisiatif sendiri, dibentuknya tim pemecahan masalah baik atas inisiatif kelompok maupun atas permintaan pimpinan, terbentuknya komite perbaikan mutu sekolah secara berkesinambungan, terbentuknya gugus kendali mutu sekolah dan terbentuknya kelompok-kelompok kerja dalam peningkatan mutu sekolah (Ariani, 2003:35). Keberhasilan pemberdayaan guru dan karyawan pada suatu sekolah ditandai bahwa pekerjaan mereka milik mereka sendiri, meraka bekerja, menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab, mereka memahami betul posisi mereka berada dan mereka memiliki pengendalian atas pekerjaan mereka (Gasperssz: 2002:89).

Maka tanpa mengesampingkan Standar Proses yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, juga berbagai konsep mutu yang telah diutarakan oleh banyak ahli tentang mutu dalam penyusunan prosedur mutu pembelajaran juga, memperhatikan arahan BSNP dalam pengembangan mutu pembelajaran di sekolah/ madrasah, yaitu:

1. Model kegiatan yang mengacu pada standar proses
2. Melibatkan peserta didik secar aktif, demokratis, mendidik, memotivasi
3. Mendorong kreatifitas dan dialogis
4. Tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi
5. Pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan men-

dalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan guru

6. Setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang di-ampunya.

Keterlibatan total semua warga sekolah berarti sekolah dalam hal ini kepala sekolah menyusun organisasi, menganlisis jabatan dan pekerjaan, menyusun uraian tugas, menempatkan orang sesuai latar belakang pendidikan dan keahliannya serta sesuai dengan beban tugas dan pekerjaannya secara merata. Semua warga sekolah diberikan tugas dan fungsi sesuai keahliannya, sesuai bakat dan minatnya. Sebesar atau sekecil apapun, semua warga sekolah harus dilibatkan, diberikan tugas, peran dan fungsi dalam peningkatan mutu sekolah, mulai dari kepala sekolah itu sendiri, komite sekolah, para guru, staf tata usaha, pustakawan, laboran, siswa dan orang tua.

Keberhasilan sebuah lembaga termasuk lembaga pendidikan seperti SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru tidak terlepas dari bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam mengorganisasi semua potensi yang dimiliki lembaga yang dipimpinnya. Perlu diingat komponen-komponen pembelajaran yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar mutu yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya menciptakan peserta didik yang bermutu, yang selanjutnya akan meningkatkan mutu SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru itu sendiri.

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru dalam menyusun perencanaan mutu sekolah pada umumnya dan mutu pembelajaran khususnya, kemudian diorganisasi, dilaksanakan, dan dievaluasi menunjukan model manajemen penjaminan mutu pembelajaran yang telah dilaksanakan mendekati model mutu yang disampaikan oleh Edward Deming.

KESIMPULAN

1. Perencanaan Mutu Pembelajaran

   Kaidah-kaidah aturan perencanaan telah dilakukan dengan baik yang meliputi seluruh aspek dari kurikulum. Namun, terkait dengan mutu pembelajaran SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru belum melaksanakan perencanaan mutu pembelajarannya dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya prosedur mutu pembelajaran. Prosedur mutu yang ada hanya menjelaskan penyusunan silabus dan rencana pembelajaran diserahkan kepada masing-masing guru, dengan kata lain belum dapat membakukan prosedur mutu pembelajaran yang bermutu. Dengan adanya komitmen bersama warga SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru, maka SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru dalam perencanaan mutu menerapkan model manajemen partisipatif.

2. Pengorganisasian/Pelaksanaan Perencanaan Mutu Pembelajaran

   Pengorganisasian perencanaan mutu di SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya pembagian tugas dan manajerial yang jelas. Pengorganisasian mutu sendiri ditangani oleh *Quality Management System* begitu pula pelaksanaannya. Namun, dalam penunjukan pengelola *Quality Management System* belum memiliki standar/kriteria mutu bagaimana seseorang dapat menjabat sebagai *Quality Management System*. Dengan adanya proses kerjasama secara bersama-sama antara pimpinan tingkat atas bersama-sama dengan pimpinan kelas bawah. Hal ini, didukung dengan adanya pembentukan unit-unit kerja agar pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Maka, SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah melaksanakan model *Management By Objective* (MBO).

3. Evaluasi Perencanaan Mutu Pembelajaran

SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru telah melaksanakan evaluasi dengan jadwal dan aturan yang jelas. Namun, evaluasi baru dilaksanakan terhadap pelaksanaan prosedur mutu secara global belum dilakukan secara komprehensif, artinya belum menyentuh terhadap ruang lingkup prosedur mutu. SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru memang telah memiliki prosedur mutu kurikulum yang ruang lingkupnya meliputi pembuatan silabus dan rencana pembelajaran, evaluasi belum menyentuh pada silabus dan rencana pembelajaran yang bermutu.

REKOMENDASI

Pertama, penulis merekomendasikan pada SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru untuk dapat menerapkan konsep mutu secara menyeluruh yang akan menghantarkan SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru menjadi sekolah bermutu, dengan menyusun suatu prosedur mutu pembelajaran. SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru diharapkan mampu membentuk pembelajaran yang bermutu sebagai implementasi kurikulum yang telah bermutu.

Kedua, bagi Yayasan Sandhykara Makmur selaku pengelola SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru dapat memberikan pembelajaran workshop/pelatihan/seminar, dan lainnya bagi sekolah-sekolah kejuruan lain, sehingga selain memberikan persaingan sehat terkait mutu sekolah juga akan menghantarkan sekolah-sekolah di Indonesia menjadi sekolah bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

Agon. 2010. *Manajemen Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Di SMK Negeri 2 Kuala Kapuas*. Tesis Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Burhanuddin. 2002. *Manajemen Pendidikan*: Wacana, Proses, dan Aplikasi di Sekolah. Malang: Universitas Negeri Malang.

E. Mulyasa. 2010. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sallis Edward. 2010. *Total Quality Management In Education* (alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi). Jogjakarta: IRCiSoD.

Sugiyono. 2003. *Profesionalisasi Manajemen Pendidikan Kejuruan di Indonesia*; *Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Negeri Yogyakarta,*30-Agustus– 2003.

_____. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.

Suryadi. 2009. *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Sarana Panca Karya Nusa.

PERAN PENDIDIKAN SEJARAH DALAM MEMBANGUN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh:
Gema Budiarto
Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Email: budiarto.gema@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang heterogen, terdiri dari beranekaragam suku, ras, bahkan agama. Isu yang terlihat saat ini adalah rendahnya toleransi beragama di Indonesia. Bermacam-macamnya berbedaan agama tidak jarang akan menimbulkan gesekan, sehingga akan mengancam toleransi antar umat beragama di Indonesia. Saling mengunggulkan dan merendahkan antar ajaran agama merupakan faktor pemicu konflik. Ancaman serius rendahnya toleransi terlihat dalam isu-isu politik yang saat ini memanas, dari isu politik melahirkan propaganda yang banyak bermunculan di media sosial sehingga dari propaganda isu politik tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial lintas agama di Indonesia. Artikel ini akan membahas tentang pentingnya pendidikan sejarah untuk memperkokoh dan memperkuat toleransi umat beragama, terutama pada generasi muda. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik studi literatur. Hasil dari penulisan ini mendeskripsikan bahwa melaui pendidikan sejarah yang mengungkap peristiwa masa lalu dapat diambil manfaat positif dari sebuah peristiwa sebagai inspirasi dan edukasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan terwujud toleransi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan sejarah, toleransi, dan umat beragama.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang sangat beragam tidak jarang akan memicu timbulnya perselisihan bahkan konflik sosial, maka dari itu toleransi yang memiliki pengertian menghormati dan menghargai pendapat atau perbedaan dan menghindari sikap-sikap menekanan dan memaksa, memiliki peranan penting. Dalam hal ini toleransi memiliki cakupan yang luas, antara lain: sosial, budaya, politik, agama, dan lain-lain. Toleransi merupakan sikap yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang dalam menjalin hubungan sosial dalam masyarakat. Toleransi tersebut tidak hanya digunakan dalam kehidupan lokal daerah dan satu negara, tetapi lebih bersifat universal atau antar negara.

Rendahnya toleransi saat ini sangat dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia, rongrongan yang berasal dari luar menjadi faktor penyebab utama rapuhnya toleransi. Krisis toleransi di Indonesia sepertinya sudah mencapai tahap akut, salah satunya adalah rendahnya toleransi beragama. Realita dilapangan sudah menunjukkan bahwa agama dijadikan kendaraan politik oleh pihak-pihak tertentu dan agama dijadikan alat untuk menindas lawan politik. Sejatinya, hal ini sangat bertentangan dengan salah satu pilar bangsa Indonesia, yakni *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan tersebut dalam konteks sejarah merupakan isi dari *Kakawin Sutasoma* karangan *Mpu Tantular*, secara lengkap dalam *Kakawin Sutasoma* semboyan tersebut bertuliskan *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*, sedangkan dalam bahasa merupakan bahasa Jawa Kuno, dan memiliki pengertian *berbeda-beda tetapi tetap satu jua* (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013).

Isu politik yang saat ini memamanas sangat mempengaruhi hubungan sosial lintas agama di Indonesia. Pengunggulan pemimpin politik yang seiman dan penerapan kebijakan agama menjadi sebuah pemicu. Politik sendiri merupakan ilmu memerintah, dalam cakupan yang lebih luas politik dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam memerintah orang lain dalam hubungannya dengan kenegaraan.

Sebutan politik, merujuk pada dua pendapat, *pertama,* merujuk pada persoalan kesejahteraan rakyat dan *kedua,* merujuk pada perilaku pemimpin atau pemerintah yang menjalankan kekuasaan untuk memerintah yang diamanatkan oleh rakyat (Purwasito, 2011). Karena politik merupakan *cara untuk memimpin orang lain*, maka ada beberapa oknum dalam agama menolak atas kepemimpinan dan sistem politik yang tidak sesuai dengan ajaran dalam agamanya. Oknum tersebut menuntut agar segala aktifitas politik disesuaikan dengan keyakinan-nya. Tidak dimungkinkan lagi, jika tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan maka kekacauan dan terror yang ditujukan kepada warga nasionalis dan warga yang berbeda keyakinan akan terjadi. Dari kekacauan politik ini dapat berkembang sentiment seseorang dalam memandang orang lain yang berbeda agama.

Pendidikan sejarah perlu diajarkan dalam rangka membangun generasi Indonesia yang sadar akan masa lalunya. Masa lalu akan memberikan cermin bagi seseorang untuk lebih bijaksana terhadap segala sesuatu yang terajadi dalam kehidupan. Masa sekarang tidak akan ada tanpa masa lalu, maka dari itu pendidikan sejarah memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan seseorang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial, yang tugasnya untuk mempelajari melalui analisis kritis suatu peristiwa atau kejadian masa lalu yang benar-benar terjadi dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya. Peristiwa tersebut mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Menurut Kuntowijoyo (2013) manfaat atau guna sejarah terdiri dari guna *intrinsik* dan guna *ekstrinsik*. Guna intrinsik dalam sejarah meliputi: 1) sejarah sebagai ilmu; 2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau; 3) sejarah sebagai pernyataan pendapat; dan 4) sejarah sebagai profesi, sedangkan guna ekstrinsik sejarah adalah sebagai pendidikan yang meliputi: 1) politik; 2) penalaran ; 3) politik; 4) kebijakan; 5) perubahan; 6) masa depan; 7) keindahan; 8) ilmu bantu. Selain

pendidikan, guna ekstrinsik sejarah antara lain: 9) latar belakang; 10) rujukan; dan 11) bukti.

KERANGKA KONSEPTUAL

Permasalahan utama yang menjadi topik penulisan adalah rendahnya toleransi umat beragama di Indonesia akibat timbulnya isu-isu politik yang menjadikan agama sebagai tameng untuk berlindung. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tindakan yang dilakukan untuk menanggulanginya melalui pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah mengajarkan agar seseorang dapat berfikir secara kontekstual melalui peristiwa atau kisah masa lalu yang benar-benar terjadi dan memiliki fakta historis. Peristiwa sejarah ada yang memiliki kaitan dengan keharmonisan antar umat beragama, sehinga dapat dijadikan rujukan untuk membangun toleransi di Indonesia. Inti dasar toleransi tersebut adalah menghargai dan menghormati segala macam perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari perbedaan pendapat, suku, bahasa, kedudukan, keyakinan, dan lain-lain. Sehingga, hasil yang diperoleh adalah terwujudnya suatu masyarakat yang memiliki keharmonisan dan kerukunan umat beragama. Jika digambarkan dalam sebuah bagan hasilnya adalah sebagai berikut:

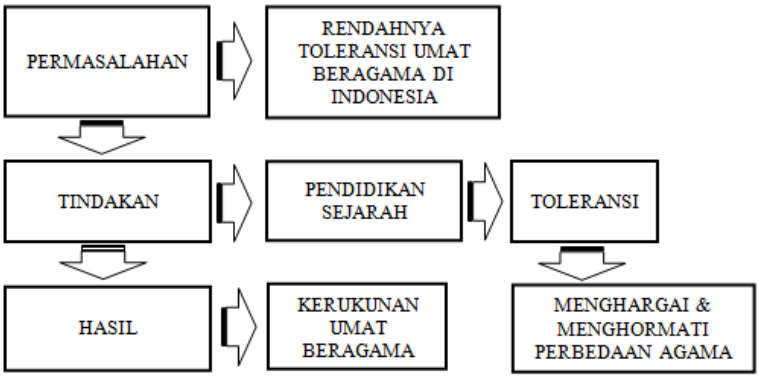

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi sebuah perubahan paradigma dalam memandang sebuah realitas/fenomena/ gelaja sosial. Penelitian ini bisa disebut juga penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Jadi, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah tersebut merupakan obyek yang apa adanya, tidak ada manipulasi oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Menurut Mukhtar (2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengungkap fakta empiris secara obyektif ilmiah. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur. Teknik studi literatur merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang memiliki hubungan dengan penelitian melalui analisis dari sumber-sumber tertulis, sedangkan data yang digunakan berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti (Kartiningrum, 2015).

PEMBAHASAN

Krisis Toleransi di Indonesia

Toleransi dalam buku pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, merupakan salah satu bagian dari 18 Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Deskripsi toleransi menurut buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2010) yakni, "Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya". Krisis toleransi menjadi fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia bisa dikatakan sudah dalam titik akut (parah). Perasaan bangga terhadap sesuatu hal seperti bangga terhadap budayanya atau agamanya memang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, karena itu merupakan identitas yang harus dijaga dan dilestarikan, tetapi

kebanggaan tersebut jangan sampai membawa dalam sifat *chauvinisme* atau rasa kesetiaan yang sangat dalam bahkan bisa dikatakan kesetiaan yang kuat (fanatisme) sehingga merendahkan pihak, keyakinan, atau hal yang lainnya dan menjunjung tinggi apa yang diyakininya. Sifat *chauvinisme* sebenarnya ditujukan pada kecintaan terhadap Negara yang berlebihan, tetapi sifat ini bisa juga merujuk pada hal-hal yang lainnya.

Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh pemerintah, yakni: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Chu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, persentase pemeluk agama di Indonesia yakni: Islam (207.176.162 Jiwa), Kristen (16.528.513 jiwa), Katholik (6.907.873 jiwa), Hindu (4.012.116 jiwa), Buddha (1.703.254 jiwa), dan Khong Hu Chu (117.091 jiwa). Dalam data tersebut menunjukkan Islam merupakan agama yang memiliki jumlah pengikut paling banyak diantara agama yang lainnya.

Konflik antar agama juga sering mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Penyebab konflik tersebut ada beberapa pendapat yang menyatakannya, yang pertama, karena paham fanatis radikal oleh pemeluk agama dan kedua, karena faktor lain seperti politik. Adanya konflik-konflik tersebut maka akan memunculkan dua pandangan terhadap agama, pertama, agama di suatu sisi mengajarakan pada umatnya untuk menegakkan perdamaian, saling mencintai, saling mengasihi, dan saling tolong menolong, dan kedua di sisi lain agama menjadi alat untuk legitimasi kekerasan terhadap agama lain (Marzuki, 2006). Hal senada dari pendapat kedua tersebut juga dijelaskan oleh Haryatmoko (2014) menjelaskan bahwa, seakan-akan agama memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis untuk mempertajam permusuhan dan memistiskan motif pertentangan menjadi perjuangan membela iman dan kebenaran atau mengatasnamakan Tuhan.

Paham fanatis radikal sangat mempengaruhi konflik yang terjadi di Indonesia, sifat tersebut merujuk pada membanggakan terhadap agamanya dan merendahkan agama lain. Memang sudah jelas

bahwa setiap agama memiliki ajaran atau doktrin yang berbeda-beda, ajaran agama yang satu tidak akan sama dengan ajaran agama yang lain. Berawal dari perbedaan inilah maka timbul perbandingan dan pengunggulan (superior) masing-masing agama. Setiap agama pasti ada sebuah janji suci yakni *siapa yang membela agamanya pasti akan mendapat surga*, dari janji suci yang dimaknai secara sempit inilah bentrokan antar agama tidak bisa dihindari. Masalah dalam kancah politik juga dapat mengakibatkan konflik antar agama. Masing-masing agama pasti akan mengambil langkah politik yang sesuai dengan ajaran agamanya, hal ini akan menyebabkan kesenjangan terhadap agama lain yang dipaksa harus mengikuti sistem politik yang digagas oleh mayoritas. Selain konflik antar agama, konflik tersebut juga merujuk pada masalah intern agama karena perbedaan pandangan, seperti konflik sunni dan syiah yang sengaja dibenturkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pesta politik di Indonesia ujung-ujungnya pasti membawa agama sebagai tema yang hangat untuk dijadikan isu dalam politik. Atas dasar untuk menegakkan ajaran agama yang diyakininya maka terbawa pula dalam suasana politik Indonesia. Suasana kehidupan di Indonesia yang heterogen, juga berdampak pada iklim politik Indonesia. Ajaran agama tertentu tidak bisa mempengaruhi dan mendominasi sistem politik, karena hal ini akan berakibat buruk untuk keberlangsungan kehidupan harmoni di Indonesia. Hakikat agama yang seharusnya mengajarkan kebaikan, kasih sayang, kedamaian dan membentuk akhlak menjadi tidak jelas karena agama masuk dalam urusan politik sehingga merubahnya menjadi sesuatu yang menakut-kan. Menurut Setowara dan Soimin (2013), berpendapat bahwa terjadi benturan nilai yang susah untuk dijelaskan antara agama dan politik, hal ini wajar, karena karakter antara agama dan politik sangat kontras. Agama memiliki nilai doktrin sakral yang harus dipatuhi oleh umatnya. Sebaliknya, politik memiliki nilai profanitas yang memberikan ruang bagi manusia untuk menyalurkan ide dan gagasan sesuai dengan kepentingannya.

Iklan politik yang tidak bertanggung jawab selalu diwarnai dengan penggunaan unsur SARA (suku, ras, agama dan antar-golongan) untuk menghalangi dan menjegal lawan politiknya. Agama dijadikan tameng untuk melawan pihak-pihak politik yang tidak sejalan dengan pendapat atau tidak sejalan dengan ajaran agamanya, jadi sudah tidak dikira-kira lagi benturan antar agama pasti terjadi jika oknum agama membawa unsur religi kedalam politik dan label *sesat* akan disematkan pada lawan politik. Penggunaan simbol-simbol agama juga sangat gencar dilakukan oleh aktor agama yang berpolitik sebagai instrument untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Sejatinya, agama adalah hal sakral yang berhubungan dengan Tuhan, jadi tidak pantas jika agama dijadikan ajang memobilisasi massa untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bagi kehidupan kemanusiaan.

Konflik agama tersebut juga muncul karena adanya sikap *stereotype* golongan terhadap golongan yang lainnya, sehingga hal ini akan diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan, contohnya seperti: pandangan agama lain terhadap Islam, bahwa Islam itu agama radikal dan intoleran yang sarat dengan kekerasan, sebaliknya pandangan Islam terhadap agama Kristen adalah agama yang agresif dan ambisius ingin menguasai segala aspek kehidupan, seperti halnya para penjajah yang memiliki konsep 3G (Gold "mencari kekayaan", Glory "mencari kejayaan" dan Gospel "menyebarkan agama Nasrani") (Yunus, 2014). Diskriminasi juga terdapat dalam agama yang saat ini tampak terlihat jelas dalam kehidupan di Indonesia. Diskriminasi tersebut akan membuat ketidakstabilan dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa menjadi agama minoritas akan terpinggirkan dan hak-haknya dikebiri, sehingga hal tersebut memunculkan rasa tidak aman dalam menjalakan aktivitas, terutama aktivitas yang menyangkut keagamaan karena ancaman-ancaman dari kelompok lain (mayoritas) (Rumagit, 2013). Mayoritas tidak selalu menjadi pemenang dalam segala hal, tetapi mayoritas juga harus bisa dan mampu untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap minoritas, memenuhi hak-

hak minoritas, melindungi dan menjamin keamanan minoritas dan yang lebih penting yakni tidak memaksa kehendak terutama yang menyangkut masalah religi.

Indonesia merupakan negara heterogen yang memiliki keanekaragaman bahasa, adat, suku, bahkan agama. Bermacam-macamnya perbedaan ini tidak jarang akan menimbulkan gesekan-gesekan antara satu dengan yang lainnya, jika gesekan tersebut tidak segera ditangani akan menimbulkan konflik yang lebih besar sehingga akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terutama berkaitan dengan keyakinan atau agama, yang memiliki sifat universal, hal ini sangat rentan sekali mengalami gesekan-gesekan. Faktor universal itulah yang menyebabkan sering terjadinya konflik, pengaruh dari luar sangat bertanggung jawab atas terjadinya konflik antar agama di Indonesia. Maka dari itu, masyarakat harus cerdas dalam memfilter isu-isu yang masuk ke Indonesia dan penguatan sikap toleransi merupakan kunci utama dalam menyukseskan keharmonisan hubungan sosial. Kerukunan umat beragama menjadi sorotan pemerintah, bahkan pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Di dalam dokumen resmi tersebut telah sangat jelas dijabarkan pada Bab I Ketentuan Umum, bahwa:

> Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945.

Sudah sangat jelas, toleransi harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Toleransi dipandang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia, agar kehidupan tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan damai dalam perbedaan (Budiarto, 2016). Membangun toleransi berawal dari keluarga, masyarkat, dan sekolah yang merupakan lembaga formal. Persamaan sejarah, kemanusiaan, dan adat ketimuran merupakan dasar untuk membangun toleransi di Indonesia. Persamaan sejarah, Indonesia dahulu pernah dijajah dan dikuasasi oleh Negara-negara imperialis, berjuang bersama tanpa memandang agama untuk membebaskan belenggu penjajahan. Kemanusiaan haruslah dijunjung tinggi dalam kehidupan, alangkah baiknya antara manusia satu dengan manusia yang dapat berlaku adil dan bijaksana, dan saling menghormati keyakinan dan pendapat. Indonesia termasuk negara timur yang memiliki adat-istiadat ketimuran, sehingga dapat mempertahankan dan melestasrikan kepribadian adat timur seperti: sopan-santun, tolong-menolong, gotong-royong, ramah-tamah dan kesopanan. Sejatinya dalam Islam juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 99, yang dapat disimpulkan tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw untuk tidak membenci siapa pun kendati mereka tidak mau beriman, dan dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah SWT memperingatkan umat Islam bahwa seandainya mereka mendendam kebencian terhadap suatu kelompok, keadilan harus tetap ditegakkan (A'la, 2014).

Peranan Pendidikan Sejarah dalam Membangun Toleransi

Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, yang memiliki tujuan untuk membantu peserta didik menguasasi tujuan pendidikan. Interaksi dalam pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga yakni antara orang tua (pendidik) dengan anak (peserta didik). Dapat pula interaksi pendidikan melalui masyarakat, yakni proses transfer ilmu dan nilai melalui lingkungan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini lebih

ditekankan praktiknya dari pada teori. Interaksi dalam pendidikan yang formal terjadi di sekolah, adanya guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Pendidikan formal memiliki tiga komponen, yakni: a) pendidikannya telah tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci; b) dilaksanakan secara formal, terencana, ada yang mengawasi dan menilai; dan c) interaksi dalam lingkungan tertentu, ditunjang dengan fasilitas dan alat-alat, serta memiliki aturan-aturan tertentu (Sukmadinata, 2013). Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 yakni:

> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara umum orang memakai istilah sejarah merujuk pada kisah/cerita sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah, yang semuanya itu merupakan arti sejarah secara subjektif (Aman, 2011), sedangkan secara obyektif, sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial yang memfokuskan kajian utamanya pada analisis peristiwa masa lampau yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, kajian sejarah meliputi: politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, militer, dan lain-lain. Kelampauan peristiwa dalam sejarah tersebut dijadikan cermin untuk melangkah ke masa depan. Sejarah adalah perjuangan panjang manusia, dengan menggunakan logikanya, untuk memahami lingkungannya dan bertindak sesuai dengan pemahaman-nya (Carr, 2014), sedangkan menurut Burckhardt dalam Carr (2014) keterputusan dengan alam yang disebabkan oleh kebangkitan kesadaran. Sejarah merupakan ilmu perkembangan manusia yang memiliki hubungan dari masa ke masa, yakni masa sebelumnya ke

masa selanjutnya, begitu pula seterusnya. Maka dari itu jika ada pertanyaan, kapan sejarah akan berakhir? Sejarah tidak akan berakhir selama peradaban manusia masih ada.

Setiap orang harus memiliki kesadaran sejarah dalam kehidupannya, Soedjatmoko dalam Aman (2011) menjelaskan bahwa, kesadaran sejarah tersebut diperlukan sebagai cara untuk melihat realitas sosial dalam masyarakat dengan segala permasalahan dan dinamikanya termasuk segi moralnya. Ilmu sejarah memiliki peran dalam membangun toleransi dan karakter. Sejarah tidak akan pernah terulang, namum pengalaman sejarah dapat digunakan untuk menghadapi krisis masa kini karena selalu memiliki persamaan, dengan menggunakan perspektif sejarah, masa kini dapat dipahami melalui perbandingan dengan masa lampau (Kartodirdjo, 2014). Melalui pembelajaran masa lampau seseorang dapat mengambil nilai-nilai positif yang bermanfaat untuk kehidupannya. Pengalaman masa lampau tidak hanya terjadi dalam konteks nasional, tetapi dapat pula merujuk pada konteks internasional.

Sesuatu yang memiliki guna pasti akan dipelajari, termasuk sejarah. Sejak dahulu sejarah dipelajari karena memiliki guna atau manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Guna sejarah menurut Kuntowijoyo telah dijelaskan di atas yang terbagi menjadi dua, yakni guna *intrinsik* dan guna *ekstrinsik*. Selain itu menurut Nugroho Notosusanto dalam Sugiyanto (2009), mengelompokkan guna sejarah menjadi empat bagian: a) *guna edukatif*, belajar sejarah dapat memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya, sejarah merupakan motivasi bagi pemecahan masalah-masalah pada masa kini dan masa selanjutnya; b) *guna intruktif* (pengajaran), sejarah memberikan pelajaran mengenai sesuatu ketrampilan atau pengetahuan; c) *guna inspiratif* (memberi ilham), tindakan kepahlawan-an dan peristiwa yang gemilang di masa lampau dapat memberikan ilham dan mengambil nilai-nilai baik dalam suatu peristiwa melalui tokoh-tokoh sejarah untuk menumbuhkan inspirasi. Sejarah juga berfungsi sebagai pembinaan moral; dan d) *guna rekreatif* (memberi

kesenangan), sejarah akan memberikan kesenangan estetis dan pesona. Posisi sejarah sebagai guna edukatif, memiliki peran penting dalam pembelajaran, dalam hal ini sejarah tidak hanya sebagai proses *transfer of knowledge* tetapi juga memiliki peranan dalam proses *transfer of value* sebagai proses pendewasaan untuk memahami identitas, jati diri dan kepribadian melalui pemahaman terhadap peristiwa sejarah (Susanto, 2014).

Berikut ini adalah kisah-kisah historis yang menunjukkan sikap saling toleransi antar pemeluk agama di Indonesia, sehingga dapat dijadikan nilai edukasi dalam membangun keharmonisan hidup dalam perbedaan keyakinan. Keanekaragaman masyarakat terdapat dalam kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di Indonesia terletak di pulau Jawa dengan agama kerajaan adalah Hindu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tanggal 15 Karttika 1215 Saka atau 10 November 1293 M (Poesponegoro & Notosusanto, 2009), yang bertepatan dengan dinobatkannya Wijaya menjadi Raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar *Krtarajasa Jayawardhana* (Soekmono, 1973). Meskipun Majapahit merupakan kerajaan Hindu, pemerintah Majapahit sangat toleran terhadap ajaran agama lain yang masuk di wilayah kerajaan Majapahit, salah satunya adalah Islam.

Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 bersamaan dengan perdagangan Internasional, sebelum itu agama Hindu dan Budhha sudah lebih dahulu masuk ke Indonesia. Khusus di pulau Jawa, agama Islam sudah ada sejak tahun 475 H atau 1082 M, dengan ditemukannya batu nisan milik Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Islam di Majapahit diperoleh dari bukti peninggalan makam Troloyo yang menunjukkan tahun 1369 M (pada masa pemerintahan Hayam Wuruk). Menurut keterangan sejarah, Islam di Majapahit dikembangkan oleh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro bukanlah orang Indonesia, beliau berasal dari Yaman (negara wilayah timur tengah) dan melakukan perjalanan dakwah di beberapa wilayah seperti Maghrib di Moroko, Kelantan di Malaysia, sedangkan di

Nusantara di Jawa dan Gowa. Jumadil Kubro menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kultural, yakni menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan batu nisan yang ditemukan terdapat paduan antara Islam dengan Hindu. Keberadaan makam-makam Islam tersebut menjadi saksi bahwa telah ada komunitas Islam dalam kerajaan Majapahit. Dari bukti-bukti sejarah telah bisa terlihat, bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal toleransi, dapatnya generasi muda mencontoh dan melestarikan tradisi toleransi yang telah diajarkan oleh para pendahulu.

Kuatnya toleransi dalam masyarakat juga akan berdampak pula pada kuatnya jiwa nasionalisme. Relevansi antara toleransi dan nasionalisme dapat ditunjukkan dalam kisah sejarah Perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari pengaruh kolonialisme dan imperialism. Usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan dilakukan oleh rakyat Indonesia melalui dua cara, yang pertama melalui *kontak fisik*, yakni pertempuran langsung dan kedua *non-fisik*, yakni melalui gerakan-gerakan politik dan diplomasi. Awalnya pertempuran yang dilakukan rakyat masih bersifat kedaerahan dan belum memiliki kesadaran nasional, pertempuran yang bersifat kedaerahan seperti: Perang Minahasa, Perlawanan Pattimura Thomas Mattulesy di Maluku Tengah, Perang Padri di Sumatra Barat, di wilayah Jawa ada perang Diponegoro dan perang Puputan Bayu, perang Bali (Poesponegoro & Notosusanto, 2009), dan masih banyak lagi perang-perang yang dilakukan secara etnik. Para pahlawan tersebut tidak berasal dari satu keyakinan, mereka berbeda-beda keyakinan, dan berbeda daerah tetapi memiliki tujuan yang sama yakni melawan penjajah dari tanah kelahirannya.

Setelah itu perlawanan dilakukan secara terorganisir dalam skala nasional karena telah terbangunnya kesadaran nasional dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, perlawanan-perlawanan yang dilakukan antara lain: Perlawanan terhadap Jepang yang dilakukan oleh kalangan kelompok Agama, Militer, dan Petani

(Poesponegoro & Notosusanto, 2009), pertempuran 10 November Surabaya, Bandung Lautan Api, Operasi Trikora Irian Barat, Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, Pertempuran Laut Aru Maluku, Operasi Dwikora Malaysia, Insiden Hotel Yamato (sekarang hotel Majapahit) Surabaya, Perang Ambarawa, Pertempuran Medan Area dan Puputan Margarana Bali. Perlawanan melalui jalur politik ditunjukkan dengan lahirnya organisasi-organisasi kebangsaan, seperti: Budi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partindo, PNI-Baru, dan Gerindo (Poesponegoro & Notosusanto, 2009).

Seperti pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran ini menolak datangnya kembali pasukan Belanda atau NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang datang bersama pasukan sekutu (Inggris) ke Indonesia. Pasukan sekutu mendarat pada 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Pasukan sekutu mengemban tugas untuk melucuti senjata dan membawa tawanan pasukan Jepang yang kalah dalam perang serta membebaskan tawanan orang-orang Barat yang sebelumnya ditawan oleh Jepang. Tanggal 26 Oktober 1945, para wakil dari pihak Indonesia dengan pihak sekutu yang dipimpin oleh Mallaby beserta dengan jajarannya. Pertemuan tersebut menghasilkan, pasukan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan tempat-tempat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Indonesia dan Inggris). Tetapi, Inggris dengan segera juga mengingkari perjanjiannya dengan menguasai beberapa objek vital lain.

Sehari setelahnya yakni tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisikan ultimatum kepada rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Surabaya pada khususnya. Pamflet tersebut berisi perintah kepada rakyat agar menyerahkan kembali senjata-senjata yang telah berhasil dirampas dari tangan tentara Jepang kepada Inggris dan mengancam jika tidak menyerahkan senjata maka tentara Ingris akan melakukan tindakan yang lebih keras yakni tembak ditempat. Brigadir Jenderal

A.W.S. Mallaby tidak tahu menahu tentang penyebaran pamphlet tersebut, menurutnya pamflet tersebut dari pusat, karena Mallaby adalah seorang tentara harus tunduk pada komando. Akhirnya, terjadilah perang antara Indonesia dengan pihak Inggris dari tanggal 28-30 Oktober 1945 yang menewaskan pula Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Kedatangan para pemimpin Indonesia, yakni: Soekarno dan Moh. Hatta beserta rombongan sedikit meredakan suasana perang di Surabaya. Setelah rombongan Soekarno kembali ke Jakarta, keadaan kembali memanas dan berbuntut sampai tanggal 10 November 1945, terjadilah perang yang sangat dahsyat antara rakyat melawan Inggris. Rakyat dibombardir oleh Inggris dari darat, laut dan udara oleh pasukan Inggris yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansergh.

Terbakarnya semangat Nasionalisme dan Patriotisme *arek-arek Suroboyo* tidak terlepas dari peran seorang pahlawan yang bernama Sutomo atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Bung Tomo. Bung Tomo, melalui pidatonya yang sangat heroic berhasil menggugah semangat tempur para pejuang untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris sampai titik darah penghabisan. Dalam pidatonya beliau, sangat jelas terdengar bahwa para pemuda pejuang dari seluruh Indonesia menjadi satu dalam pasukannya masing-masing untuk bertempur melawan penjajah. Para pemuda pejuang tersebut memiliki keragaman suku, etnis, dan keyakinan, mereka telah menunjukkan semangat toleransi yang kuat sehingga mampu untuk membangun semangat juang yang kuat pula, membulatkan tekat berjuang bersama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Nilai edukasi toleransi dapat kita ambil dari peristiwa 10 November 1945 di Surabaya ini, para perjuang tidak melihat dari mana asal rekan seperjuangannya, apa sukunya, apa bahasanya dan apa agamanya. Pejuang hanya memperhatikan dan fokus pada kemerdeka-an yang utuh untuk Indonesia. Makna toleransi sangat jelas dan sudah diajarkan oleh para pendahulu bangsa Indonesia untuk membebaskan tekanan dari bangsa asing yang akan menguasai Indonesia. Maka dari itu, dengan toleransi bangsa Indonesia akan hidup dengan kuat.

Tujuan pembelajaran sejarah secara umum menurut Widja (1989) yakni, menumbuhkan sikap menghargai berbagai aspek kehidupan masa kini dari masyarakat, karena semua itu merupakan hasil dari pertumbuhan di waktu yang lampau. Menurut Kochhar (2008) sasaran umum dalam pembelajaran sejarah salah satunya adalah mengajarkan toleransi, sejarah perlu diajarkan untuk mendidik seseorang agar memiliki sikap toleran terhadap perbedaan keyakinan, kesetiaan, kebudayaan, gagasan, dan cita-cita. Sedangkan, sasaran khusus pembelakaran sejarah adalah menumbuhkan semangat patriotisme, membangkitkan semangat akan kegemilangan di masa lampau dan masa sekarang, berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan semangat untuk mengharumkan nama bangsa dan negara (Kochhar, 2008).

KESIMPULAN

Toleransi beragama di Indonesia mencapai titik krisis, pengunggulan kebenaran sepihak dan merendahkan ajaran agama lain merupakan pemicu konflik antar agama. Hal ini merupakan gambaran dari paham radikal, paham ini menuntut adanya perubahan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Atas dasar membela agama dan janji surga, mereka rela melakukan apapun termasuk untuk melukai, menyakiti, bahkan membunuh orang yang tidak sepaham atau tidak setuju dengan pandangan mereka. Konflik agama tersebut muncul karena adanya sikap *stereotype* golongan terhadap golongan yang lainnya, sehingga hal ini akan diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan. Diskriminasi juga terdapat dalam agama yang saat ini tampak terlihat jelas dalam kehidupan di Indonesia, masyarakat yang menjadi agama minoritas akan terpinggirkan haknya, sehingga hal tersebut memunculkan rasa tidak aman dalam menjalakan aktivitas, terutama aktivitas yang menyangkut keagamaan karena ancaman-ancaman dari kelompok lain. Toleransi harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia, karena kuatnya sikap toleransi juga berdampak pula pada kuatnya nasionalisme. Toleransi dipandang sangat penting dan

dibutuhkan dalam kehidupan manusia, agar kehidupan tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan damai dalam perbedaan. Pembelajaran sejarah memiliki peranan penting dalam membangun toleransi bangsa. Kesadaran sejarah tersebut diperlukan sebagai cara untuk melihat realitas sosial dalam masyarakat dengan segala permasalahan dan dinamikanya termasuk segi moralnya. Sejarah memiliki peran penting dalam membangun toleransi, seperti kisah sejarah dalam kerajaan majapahit yang sangat toleran dengan masuknya ajaran Islam di wilayah birokrasi kerajaan dan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, para pejuang yang berbeda-beda etnis, suku, dan agama melakukan perjuangan bersama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui pembelajaran masa lampau, seseorang dapat mengambil nilai-nilai edukatif yang bermanfaat untuk kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

A'la, Abd. (2014). *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan "Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia"*. Yogyakarta: LKis.

Aman. (2011). *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Budiarto, G. (2016). *Memandang Keberagaman dari Kacamata Islam* dalam *Agama dan Negara*. Surakarta: Oase Pustaka.

Carr, Edward Hallett. (2014). *Apa Itu Sejarah?*. Diterjemahkan oleh: Gatot Triwira. Depok: Komunitas Bambu.

Haryatmoko. (2014). *Etika Politik & Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.

Kartiningrum, Eka Diah. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Mojokerto: Politeknik Kesehatan Majapahit.

Kartodirdjo, S. (2014). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa "Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa"*. Jakarta: Pusat Kurikulum.

Kochhar, S.K. (2008). *Pembelajaran Sejarah* (Purwanta & Yovita Hardiwati, Penerjemah.). Jakarta: PT Gramedia.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Marzuki. (2006). *Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya*. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Revolusi Konflik, Senin 20 November 2006 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, N. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II "Zaman Kuno" Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV "Kemunculan Penjajahan di Indonesia" Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V "Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda" Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI "Zaman Jepang dan Zaman Republik" Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.

Purwasito, A. (2011). Pengantar Studi Politik. Surakarta: UNS Press.

Rumagit, Stev Koresy. (2013). *Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia*. Jurnal Lex Administratum, Volume I, No. 2. Januari-Maret 2013, 57.

Setowara, Subhan & Soimin. (2013). *Agama dan Politik Moral*. Malang: Intrans Publishing.

Soekmono, R. (1973). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Sleman: Kanisius.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyanto. (2009). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bahan Ajar. Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah: Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Widja, I Gde. (1989). *Dasar-Dasar Pengembangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yunus, Firdaus M. (2014). *Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya*. Jurnal Substantia, Volume 16 Nomor 2, Okotber 2014, 217.

Dokumen Resmi

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DI KABUPATEN SRAGEN

Oleh:
Johan Bhimo Sukoco
Magister Administrasi Publik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
johanbhimo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Beranjak dari hal ini, maka pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran dana BOS ini mengalami perubahan mekanisme dari tahun ke tahun. Jika sebelumnya penyaluran dana dari pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima bantuan, maka mulai tahun 2011 lalu mekanisme penyaluran dirubah dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, baru kemudian ke sekolah penerima. Konsekuensi dari otonomi daerah ini menyebabkan pencairan dana BOS menjadi terlambat. Hal ini terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, riset ini menjadi penting dalam mengkaji evaluasi implementasi kebijakan BOS dalam perspektif desentralisasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Implementasi, Desentralisasi, BOS

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang (Siti Meichati, 1980). Sementara itu, fungsi pendidikan secara sosiologik ialah proses penerus nilai-nilai dari generasi dahulu ke generasi sekarang, atau disebut sosialisasi. Pendidikan mengemban fungsi sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) di masyarakat. Menurut Agus Salim (2007), gagasan pendidikan sebagai proses sosiologi bersumber dari konsep utama pendidikan sosiolog besar Max Weber. Sosialisasi merupakan proses belajar dari individu untuk menjadi anggota masyarakat.

H.M. Zainuddin (2008), menambahkan, proses sosialisasi itu tidak selalu berjalan dengan mulus, karena sering terjadi pertentangan kepentingan dari berbagai pihak mengenai isi pendidikan, alokasi status dan pemerataan kesempatan pendidikan, peranan dan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan juga akan mempengaruhi pemosisian pendidikan dalam kehidupan masyarakat dan tentunya sistem penyelenggaraan pendidikan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk itulah pemerintah mempunyai program yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Penyaluran dana BOS yang melalui beberapa tahaban menjadikan pencairan dana BOS menjadi sedikit terlambat untuk beberapa provinsi atau daerah, sehingga setiap sekolah yang bersangkutan harus menunggu hingga dana BOS ditransfer ke dalam rekening masing-masing sekolah. Hal ini terjadi pula dalam penyaluran dana BOS di Kabupaten Sragen. Pengelolaan dana BOS di wilayah Kabupaten Sragen dibawahi oleh Dinas Pendidikan sebagai lembaga daerah yang menaungi setiap sekolah di Kabupaten Sragen dan tim manajemen BOS Kabupaten Sragen sebagai pemangku tugasnya. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap sekolah mempertanggungjawabkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

Kabupaten Sragen berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, sebelum dana BOS masuk ke dalam rekening tiap-tiap sekolah penerima dana BOS, maka terlebih dahulu diwajibkan masuk dulu melalui Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu, dana kemudian dikelola terlebih dahulu oleh Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Tengah, hingga akhirnya barulah dana disalurkan ke Kabupaten Sragen. Prosedur panjang inilah yang kemudian membuat dana BOS mengalami keterlambatan penyaluran di Kabupaten Sragen. Beranjak dari permasalahan ini, maka kajian ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, dengan judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Perspektif Desentralisasi di Kabupaten Sragen.

B. DESENTRALISASI, PENDIDIKAN, EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, DAN EFISIENSI PROSEDUR

1. Desentralisasi

I Made Suwandi dkk (2004), menuliskan bahwa desentralisasi merupakan kebijakan pelimpahan kewenangan pada unit pemerintahan bawahan. Dengan demikian, secara politis desentralisasi merupakan distribusi kewenangan secara territorial. Implikasi dari konsep tersebut adalah sejauh mana kekuasaan dan kewenangan didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan menurut hierarkhi geografis dari suatu negara.

Robert A. Simanjuntak (2001) lebih lanjut, menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dapat dibedakan pada 3 (tiga) bagian besar yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal, yang ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan.

Rondilelli (I Made Suwandi dkk, 2004), menyatakan bahwa desentralisasi secara luas diharapkan untuk mengurangi kepadatan beban kerja di pemerintahan pusat. Program didesentralisasikan dengan harapan keterlambatan-keterlambatan dapat dikurangi.

Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Suwandi (2008), menyatakan filosofi desentralisasi yang bermakna devolusi menurut pengertian Rondinelli, menguraikan substansi kewenangan, khususnya di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: (a) Kewenangan absolut (*distinctive*); hanya dimiliki pusat yaitu pertahanan keamanan, agama, moneter, peradilan dan politik luar negeri, (b) Kewenangan bersama (*concurrent*) dikerjakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupeten/kota, (c) Kewenangan concurrent ada yang bersifat wajib (*obligatory*), dan ada yang bersifat optional (*core competence*), (d) Kewenangan wajib diikuti oleh standar pelayanan minimal. Pendekatan Suwandi lebih mendekati kerangka implementasi di Indonesia, dengan pembahasan selanjutnya dipilih pada kecenderungan model yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut beberapa literatur teori desentralisasi, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di negara berkembang termasuk Indonesia telah menggunakan 3 (tiga) tipe teori desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal (Litvack dan Seddon, 1999 dan Shah, 1998). Desentralisasi politik didefinisikan sebagai mekanisme yang mana pemerintah pusat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah, yang sering disebut otonomi daerah. Desentralisasi administrative adalah penyerahan wewenang administratif dari pusat kepada pemerintah daerah. Ada 3 (tiga) bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Dekonsentrasi adalah pemberian tanggung jawab pemerintah pusat untuk beberapa pelayanan kepada pemerintah daerahnya. Demikian pula delegasi dan devolusi berhubungan dengan perimbangan kepentingan pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan. penambahan tanggung jawab keuangan dan kemampuan pemerintah daerah. Selain itu, tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menciptakan pemerintah daerah yang demokratis, transparan, meningkatkan kapasitas administrasi, dan lebih mandiri dan mampu di dalam pengelolaan fiskal.

2. Pendidikan

Siti Meichati (1980), mendefinsikan pendidikan merupakan hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Sementara itu, fungsi pendidikan secara sosiologik ialah proses penerus nilai-nilai dari generasi dahulu ke generasi sekarang, atau disebut sosialisasi. Dalam hal ini, pendidikan mengemban fungsi sebagai agen perubahan sosial (*agen of change*) di masyarakat. Menurut Agus Salim (2007:106), gagasan pendidikan sebagai proses sosiologi bersumber dari konsep utama pendidikan sosiolog besar Max Weber. Sosialisasi merupakan proses belajar dari individu untuk menjadi anggota masyarakat.

Menurut H.A.R. Tilaar (2003), dalam proses pembangunan sebagai usaha pengembangan martabat manusia pendidikan tidak berdiri sendiri. Pendidikan hanya mempunyai makna apabila merupakan bagian dari usaha terpadu untuk meningkatkan martabat manusia. Oleh sebab itu, pendidikan tidak boleh terpisah dari pembangunan sektor lainnya secara terpadu. Lebih lanjut, H.A.R. Tilaar (2003), mengemukakan apabila kita definisikan inti dari pengembangan manusia adalah pengembangan martabat serta kualitas manusia, dan martabat serta kualias manusia tidak lain dari memberikan pilihan-pilihan maka tidak dapat dipungkiri peranan pendidikan dalam memberikan kemampuan kepada manusia untuk dapat memilih dan memperkaya horizon pilihan tersebut.

Pendidikan identik dengan pemberantasan kebutahurufan. Menurut A. Surjadi (1993), terdapat korelasi langsung antara kebutahurufan di satu pihak dan kemiskinan dan angka kematian yang tinggi serta penyakit di pihak lainnya, dan banyak orang berpendapat bahwa kampanye pemberantasan buta huruf itu seperti membentuk pasukan-pasukan perang untuk menghantam apatisme dan kebodohan yang oleh pemerintah dan badan-badan pembangunan internasional sedang dikikis di daerah-daerah terbelakang di dunia.

Menurut Eko Prasetyo (2006), hingga 2002 tercatat sebanyak 17.079.220 dari 220 juta lebih penduduk Indonesia atau 7,763 % yang tidak bisa baca tulis. Mereka dinyatakan buta aksara, sedangkan untuk anak-anak pra sekolah berusia 4-6 tahun yang belum tertampung pada lembaga pendidikan sebanyak 11.298.070 orang. Mereka yang mengalami putus Sekolah Dasar per tahunnya ada sekitar 3 juta orang.

Menurut Ali Imron (2002), pemerataan atau kuantitas pendidikan berkenaan dengan seberapa banyak anak-anak yang berada pada usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Kuantitas pendidikan demikian pada kurun waktu repelita pertama menjadi masalah utama, sedangkan pada kurun repelita keenam sudah hampir tidak menjadi masalah. Hanya saja, karena persoalan pemerataan ini mendapatkan makna baru, ialah sudah mengarah ke pemerataan layanan yang sama, maka hal ini tetap menjadi sebuah masalah.

Menurut Burlian Somad (1978), bahwa secara garis besar, terdapat beberapa persoalan-persoalan di bidang pendidikan, seperti: ketidakjelasan tujuan pendidikan, ketidakserasian kurikulum, ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap, adanya pengukuran yang salah ukur, serta terjadi kekaburan terhadap landasan tingkat-tingkat pendidikan.

Menurut Eko Prasetyo (2006), alokasi dana pendidikan sebenarnya masih sangat kecil. Jika pendidikan didanai 20% dari APBN mestinya pendidikan memperoleh anggaran Rp 80 Triliyun dari APBN sebesar Rp 300 Triliyun. Tapi, kenyataannya, dana untuk pendidikan hanya berkisar Rp 13,6 triliyun atau sekitar 4 % dari APBN. Bahkan, dengan alasan yang dikesankan masuk akal, alokasi 20% ini dicicil, sehingga baru pada 2009 terealisir. Padahal, amandemen UUD 1945 pasal 31 ditetapkan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar bagi tiap warga (Pasal 31 ayat 2), dan kewajiban pemerintah dan DPR memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD (Pasal 31 ayat 4). Jika kemudian ada kesepakatan mencicil anggaran itu, berarti pemerintah mengabaikan UUD 1945.

3. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Wibawa (1994) mengemukakan bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan.

Menurut Suchman (Nazir,1988:108), evaluasi yaitu penentuan (apakah berdasarkan opini, catatan, data subjektif atau obyektif) hasil (apakah baik atau tidak baik, sementara atau permanen, segera atau ditunda) yang diperoleh dengan beberapa kegiatan (suatu program, sebagian dari program dan sebagainya) yang dibuat untuk memperoleh suatu tujuan mengenai nilai atau performance.

Nugroho (2003) mengemukakan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan" dan "kenyataan".

Menurut Dunn (Nugroho, 2003) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Meter dan Horn (Wibawa, 1994) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.

Menurut Effendi (Nugroho, 2003) tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi-variasi dalam indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan pokok, yaitu:

a) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik?
b) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?
c) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?

Lester dan Steward (Nugroho, 2003) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi 4 (empat), yaitu :

a) Evaluasi proses: evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi.
b) Evaluasi impact: evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
c) Evaluasi kebijakan: evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki.
d) Metaevaluasi: berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Pal (1988) membagi evaluasi kebijakan ke dalam 4 (empat) kategori:

a) Planning and needs evaluations. Mencakup penilaian terhadap target populasi, kebutuhan sekarang dan yang akan datang, serta sumber daya yang ada.
b) Process evaluations. Evaluasi terhadap tindakan pelaksana, media pelaksana program dan sistem informasi.
c) Impact evaluations. Evaluasi dampak kebijakan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan serta perluasan hasil program.
d) Efficiency evaluations. Evaluasi efisiensi kebijakan, yang dapat dilihat dari perbandingan keuntungan biaya.

Variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Van Meter & Horn

Van Meter & Horn (Wibawa, 1994) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mem punyai pengaruh terhadap implementasi program antara lain :

(a) Standar dan sasaran kebijakan

Suatu kebijakan harus memiliki standar dan sasaran yang akan dicapai. Standar dan sasaran menjelaskan rincian tujuan kebijakan secara menyeluruh. Melalui penentuan standar dan sasaran akan diketahui keberhasilan-keberhasilan yang akan dicapai.

(b) Sumber daya

Kebijakan menuntut ketersediaan sumber daya yang akan digunakan untuk implementasi. Sumber daya dapat berupa dana dan insentif lainnya serta tenaga manusia yang akan mendukung implementasi secara efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas

Implementasi dapat berjalan dengan baik dapat diperoleh melalui jaringan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan terutama untuk menghindari adanya konflik dan juga manipulasi atau berbagai bentuk penyelewengan dalam implementasi, sehingga dengan komunikasi maka pelaksana dapat memahami apa yang diidealkan oleh suatu kebijakan yang menjadi tanggung jawab mereka.

(d) Karakteristik birokrasi pelaksana

Struktur birokrasi pelaksana meliputi karakteristik, norma, dan pola hubungan yang potensial maupun sosial akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

(e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Berkaitan dengan opini masyarakat terhadap isu kebijakan, dukungan atau perlawanan baik itu dari elit penguasa maupun warga masyarakat.

2. Grindle

Grindle (Wibawa, 1994) mengemukakan bahwa isi kebijakan dan konteks implementasi menentukan implementasi kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

   Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

   Suatu kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual dan langsung dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis akan lebih mudah diimplementasikan.

3) Derajat perubahan yang diinginkan

   Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatannya jelas dibanding yang bertujuan terjadi perubahan perilaku bagi penerima kebijakan.

4) Kedudukan pembuat kebijakan

   Kedudukan pembuat kebijakan akan mem pengaruhi implementasi selanjutnya. Pembuatan kebijakan yang mempunyai wewenang dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah mengkoordinasi organisasi dibawahnya.

5) Siapa pelaksana program

   Siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada, dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang diperoleh. Tingkat kemampuan, keaktifan, dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap proses.

6) Sumber daya yang dikerahkan

   Sumber yang digunakan dalam program, bentuk, besar, dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan.

Konteks kebijakan yang dimaksud Grindle adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

   Implementasi program akan melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkat, baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang mempunyai strategi dan kepentingan yang berbeda-beda.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

   Hasil dari implementasi merupakan hasil dari interaksi yang terjadi dalam suatu lembaga.

c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

   Pelaksana diharapkan menaati peraturan dalam suatu kebijakan dan merespon terhadap apa yang diinginkan oleh kelompok sasaran.

3. Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi-kan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

(a) Karakteristik masalah
(b) Struktur management program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan (daya dukung peraturan).
(c) Faktor-faktor diluar peraturan

4. Efisiensi Prosedur

Menurut Dwiyanto, dkk (2008) efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan antara lain : kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Teori Albrecht & Bradford (1990), yaitu: *The Cycles of Service* (lingkaran pelayanan), menuliskan bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, kita harus memandang produk/jasa layanan kita sebagaimana konsumen kita memandang produk/jasa layanan tersebut. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan karena biasanya organisasi penyelenggara pelayanan telah merumuskan system dan prosedur pelayanan.

Bagi konsumen hampir setiap detik merupakan momen kritis pelayanan yang mungkin tidak disadari oleh organisasi penyelenggara pelayanan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Konsep lingkaran pelayanan ini akan membantu kita mengidentifikasi momen-momen kritis pelayanan yang harus dikelola secara professional. Penerapan konsep lingkaran pelayanan ini dapat dilakukan untuk kepentingan survey sederhana atas kepuasan pelanggan dan metode untuk mengidentifikasikan sumber-sumber ketidakpuasan pelanggan.

C. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa

wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 11 %, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar. Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pada tahun 2012 Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk BOS, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada

beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS, antara lain :

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS.

Kebijakan BOS dikeluarkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010. Tujuan kebijakan BOS secara umum yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sementara itu, secara khusus kebijakan BOS memiliki tujuan, sebagai berikut :

a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);
b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Penggunaan dana BOS, antara lain untuk:

a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah

bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);

c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
e. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
f. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
g. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;

h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
i. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
k. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
l. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
m. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Larangan Penggunaan Dana BOS :

a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/ guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
f. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
h. Membangun gedung/ruangan baru.
i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
j. Menanamkan saham.
k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
l. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
m. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Dari Data Kementerian Pendidikan Tahun 2013, dapat dikaji bahwa baru 5 (lima) provinsi yang telah menyalurkan dana BOS, yaitu Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Jawa Tengah. Dari kelima provinsi tersebut, hanya 3 (lima) provinsi yang telah menyelurkan dana BOS secara keseluruhan (100%), yaitu Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan Sumatera Barat,. Sementara itu, 2 (dua) provinsi masih dalam proses penyaluran dana BOS ke tiap-tiap sekolah, yaitu Gorontalo dan Jawa Tengah. Provinsi-provinsi lain sama sekali belum menyalurkan dana BOS untuk Triwulan III (yaitu bulan Juli s/d September 2013) secara nasional penyaluran dana BOS hingga 3 Juli 2013 lalu. Jadi, provinsi yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah penerimadana BOS yakni Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Jawa Tengah.

Penyaluran dana BOS di Jawa Tengah sendiri baru mencapai 17,80% dari jumlah total sekolah yang ada di Jawa Tengah. Keterlambatan penyaluran dana BOS ini dikarenakan beberapa hal, termasuk didalamnya yang paling mempengaruhi adalah terkait prosedur. Mulai tahun 2011 lalu, penyaluran dana BOS mengalami perubahan mekanisme penylauran. Penyaluran dibagi menjadi 2 (dua) tahab. Tahab-tahab proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah, dilakukan ke dalam 2 (dua) tahab, yaitu:

Tahab I : Penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme dana dan pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Tahab II : Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Beranjak dari perubahan prosedur ini, dapat dikaji bahwa penyaluran dana BOS mengalami perubahan mekanisme. Namun demikian, hasil analinis penulis menunjukkan, meskipun pemerintah

telah memutuskan mengubah mekanisme penyaluran dana BOS ini, potensi keterlambatan dalam penyaluran justru besar. Hal ini disebabkan kucuran dana BOS dari pemerintah pusat terlebi dahulu mampir ke pemerintah provinsi, baru kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah melalui rekening masing-masing.

Penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat sebaiknya langsung disalurkan ke rekening sekolah-sekolah masing-masing, tanpa melalui pemerintah daerah. Jadi, penyaluran dana BOS mekanismenya dikembalikan lagi seperti sebelum tahun 2011. Hal ini dikarenakan keterlambatan dana BOS yang dirasakan selama ini akan dapat mengganggu penyelenggaraan pendidikan.

Hasil riset yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, seperti yang diuraikan Ibnu Tricahyo (2011), menyebutkan bahwa penyaluran dana BOS melalui pemerintah provinsi berpotensi lambat. Sesuai dengan hasil assessment yang dilakukan Ombudsman, keterlambatan penyaluran dana BOS menggunakan mekanisme tahun 2011 terjadi hampir di seluruh daerah. Penyebabnya, dana BOS tetap masuk ke dalam APBD provinsi. Jika dikaji, mulai tahun 2011 penyaluran dana BOS semakin panjang prosedurnya, yakni dari kas umum negara ke kas umum daerah, baru kemudian ke sekolah. Hal ini dapat dibandingkan dengan penyaluran BOS sebelum tahun 2011 lalu, dimana penyaluran dana BOS dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional ke rekening masing-masing sekolah. Mekanisme penylauran dana BOS secara langsung ini relative lebih lancar jika dibandingkan dengan mekanisme melalui pemerintah daerah. Mekanisme penyaluran dana BOS setelah tahun 2011 memang mengharuskan dana BOS tercantum dalam APBD. Hasil analisis menunjukkan keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah masing-masing dikarenakan pengesahan APBD di kabupaten atau kota berjalan lambat.

Terkait permasalahan ini, Ombudsman menyarankan agar Kementerian Pendidikan Nasional langsung mengucurkan dana BOS ke sekolah penerima. Hal ini pada dasarnya, ialah mengembalikan

mekanisme pengelolaan dana BOS seperti tahun 2005 sampai dengan 2010 lalu. Dana BOS yang ditransfer baik itu melalui pemerintah provinsi ataupun melalui pemerintah kabupaten atau kota memang berpotensi mengalami keterlambatan. Selain masalah pengesahan APBD yang terlambat, hal ini juga terkait dengan dinamika politik daerah yang terkadang dapat berimbas pada kebijakan pendidikan. Pemerintah seharusnya mengupayakan pada PBN 2012, dana BOS yang masuk pada pos anggaran dana penyesuaian (APBD), untuk masuk ke belanja pemerintah dio daerah melalui mata anggaran pemerintah pusat kementerian/lembaga. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses pencairan dana BOS.

Perubahan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melalui mekanisme baru melalui pemerintah kabupaten atau kota menimbulkan keterlambatan yang cukup signifikan. Perubahan ini tejadi, karena ada masukan bahwa pemerintah daerah harus berperan dalam penyaluran dana BOS. Pada tahun 2012, mekanisme penyaluran dana BOS memang diubah. Dana disalurkan ke pemerintah provinsi baru kemudian ke sekolah. Hal ini merupakan konsekuensi otonomi daerah, dimana didalamnya termasuk pula bidang pendidikan.

Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, sekolah diibaratkan menjadi milik pemerintah kabupaten/kota. Kementerian Pendidikan Nasional mendasari masukan tersebut dengan harapan dapat memenuhi prinsip desentralisasi. Namun demikian, pada kenyataannya justru kabupaten/kota banyak yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. Masalah keterlambatan tersebut dibuktikan oleh studi Bank Dunia bahwa pada periode tertentu (Januari-Maret dan Oktober-Desember), penerimaan BOS terlambat 1-3 bulan. Keterlambatan itu amat mengganggu kegiatan operasional sekolah. Pada satu sisi, sekolah dilarang memungut uang dari murid lagi, tapi di sisi lain dana BOS mengalami keterlambatan datang, sehingga sekolah terpaksa mencari pinjaman ke sana-sini untuk melangsungkan kegiatan belajar-mengajar.

Dana pinjaman ini merepotkan sekolah karena pengembalian-nya disertai bunga, sedangkan dana BOS tidak ada komponen membayar bunga. Kondisi semacam inilah yang membuka peluang bagi kepala sekolah memanipulasi jumlah pengeluaran yang diatur dalam BOS. Sebetulnya, jika dana BOS tidak datang terlambat, SD-SMP di pedesaan akan benar-benar dapat menggratiskan biaya pendidikan, sedangkan bagi SD-SMP di perkotaan, dana BOS yang sekarang dapat menutup 50% biaya pendidikan, sebelumnya hanya sekitar 30%. Sehingga, meskipun sudah ada dana BOS, untuk dapat bersekolah tetap ada penarikan, meskipun dengan istilah yang berbeda.

Tabel 1. Data Penyaluran Dana BOS Triwulan III Tahun 2013 Kabupaten Sragen

No	Jenis Sekolah	Jumlah		Jumlah Dana
		Sekolah	Siswa	
1.	SD/SDLB	581	81.780	Rp 11.858.100.000,-
2.	SMP/SMPLB/ SMP Terbuka	94	35.246	Rp 6.256.165.000,-
3.	SD/SDLB dan SMP/SMPLB/ terbuka	675	117.026	Rp 18.114.265.000,-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Berdasarkan data pada tahun 2013, jumlah SD/SDLB penerima dana BOS di Kabupaten Sragen adalah sebanyak 581 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 81.780 siswa dan SMP/SMPLB/Terbuka sebanyak 94 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 35.246 siswa tersebar dalam 20 kecamatan, sehingga total sekolah yang ada di Kabupaten Sragen sebanyak 615 sekolah dengan jumlah total siswa sebanyak 117.026 siswa. Penyaluran yang dilakukan secara bertahab setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali maka dana bagi tiap siswa dibagi menjadi 4 (empat) tahab yaitu Januaari s/d Maret, April s/d Juni, Juli s/d September, dan Oktober s/d

Desember. Untuk setiap siswa SD/SDLB mendapatkan dana BOS sebesar Rp 145.000,- per siswa sehingga total dana BOS untuk Kabupaten Sragen sebesar Rp 11.858.100.000,- dan untuk SMP/SMPLB/SMP Terbuka sebesar Rp 177.500 persiswa dengan total dana sebesar Rp 6.256.165.000,-. Dengan demikian total kucuran dana BOS untu kabupaten Sragen adalah sesebsar Rp 18.114.262.000,- per triwulan Juli s/d September.

Tabel 1.1. Data Keterlambatan Penyaluran Dana BOS Triwulan III Tahun 2011 Kabupaten Sragen

No	Besaran Dana BOS	Sekolah yg mengalami keterlambatan	Besaran dana talangan / pinjaman
1.	Rp 3,9 Milyar	SMPN 1 Mondokan; SMPN 1 Gesi; SMPN 1 Tangen; SMPN 2 Tangen; SMPN 1 Jenar	Rp 15 juta s/d Rp 30 juta

Keterlambatan penyaluran dana BOS di Kabupaten Sragen tahun 2011 lalu, menjadi catatan bahwa sejumlah kepala sekolah terpaksa harus mencari dana talangan sebesar kisaran Rp 15 juta sampai dengan Rp 30 juta rupiah untuk keberlangsungan operasional kegiatan belajar mengajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Joko Saryono mengatakan untuk tahun 2011 ini, pencairan dana BOS memang sedikit agak terlambat. Hal itu dikarenakan sistem pencairannya yang harus melalui mekanisme APBD tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang langsung dicairkan ke rekening sekolah. Kelemahan mekanisme ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar dapat merumuskan sistem pencairan BOS yang efektif dan tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan yang pada akhirnya menyulitkan pihak sekolah.

D. PENUTUP

Beranjak dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan prosedur atau mekanisme dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebelum tahun 2011, penyaluran dana BOS dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional ke rekening masing-masing sekolah. Prosedur ini kemudian dilakukan perubahan, dimana setelah tahun 2011 penyaluran dana BOS melibatkan pemerintah daerah. Mekanisme atau prosedur baru ini membuat dana BOS tercantum dalam APBD. Hal ini merupakan konsekuensi dari otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Mekanisme baru ini justru meniimbulkan permasalahan terkait dengan keterlambatan dalam penyaluran dana BOS ke sekolah, dikarenakan pengesahan APBD di Kabupaten atau kota juga terkadang mengalami keterlambatan.

Rekomendasi yang ditawarkan dalam paper ini ialah penyederhanaan prosedur. Penyaluran dana BOS perlu diatur ulang dan disederhanakan dengan dikembalikan prosedurnya ke mekanisme sebelum tahun 2011, dimana Kementerian Pendidikan Nasional langsung menyalurkan dana BOS ke masing-masing sekolah. Hal ini melihat prosedur penyaluran dana BOS setelah tahun 2011 yang dirasa terlalu memakan prosedur yang panjang sehingga menimbulkan resiko keterlambatan yang besar. Dana BOS yang mengalir dari pemerintah pusat terlebih dahulu mampir ke pemerintah provinsi, baru kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah melalui rekening masing-masing, dirasa tidak efisien dalam prosedur.

Tidak efisiennya prosedur penyaluran dana BOS ini menimbulkan permasalahan dalam pelayanan pendidikan. Sebagai rekomendasi, maka penulis menawarkan penerapan teori manajemen pelayanan dalam konteks penyaluran dana BOS ini, yaitu menggunakan teori Albrecht & Bradford (1990), yaitu : *The Cycles of Service* (lingkaran pelayanan). Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, kita harus memandang produk/jasa layanan kita sebagaimana konsumen kita memandang produk/jasa layanan tersebut. Hal ini

sangat sulit untuk dilakukan karena biasanya organisasi penyelenggara pelayanan telah merumuskan system dan prosedur pelayanan.

Bagi konsumen hampir setiap detik merupakan momen kritis pelayanan yang mungkin tidak disadari oleh organisasi penyelenggara pelayanan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Konsep lingkaran pelayanan ini akan membantu kita mengidentifikasi momen-momen kritis pelayanan yang harus dikelola secara professional. Penerapan konsep lingkaran pelayanan ini dapat dilakukan untuk kepentingan survey sederhana atas kepuasan pelanggan dan metode untuk mengidentifikasikan sumber-sumber ketidakpuasan pelanggan.

Menurut Dwiyanto, dkk (2008), efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik anatara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, sperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut: antara lain : kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

REFERENSI

Agus Wibowo. 2008. ***Malpraktik Pendidikan.*** Yogyakarta: Genta Press.

Ali Imron. 2002. *Kebijaksanaan* ***Pendidikan Di Indonesia (Proses, Produk, dan Masa Depannya).*** Jakarta: Bumi Aksara.

A. Surjadi. 1983. ***Pembangunan Masyarakat Desa.*** Bandung: Penerbit Alumni.

Burlian Somad. 1978. ***Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam***. Bandung: PT Al-ma'arif.

Eko Prasetyo. 2006. ***Orang Miskin Dilarang Sekolah***. Yogyakarta: Resist Book.

H.M. Zainuddin. 2008. ***Reformasi Pendidikan (Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah).*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H.A.R. Tilaar. 2003. ***Manajemen Pendidikan Indoensia***. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, *Riant. 2003*. ***Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.*** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D. 2010. ***Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan.*** Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam IImu Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Rondinelli, Deniis A and Shabir Cheema G, 1983, ***Implementing Decentralization Policies: An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countrie***s, Sage Publication, Beverly Hills.

Siti Meichati. 1980. ***Pengantar Ilmu Pendidikan***. Yogyakarta: Penerbit FIP-IKIP.

Suwandi, Made, 2002, ***Pokok-pokok Pikiran Dasar Otonomi Daerah di Indonesia***. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.

Suwandi, I Made, Dodi Riyadmaji, Drajat Tri Kartono, Qommaruddin, Makhsum Isnandi. 2004. ***Reformasi Pemerintahan Daerah***. Surakarta: Pustaka Cakra.

Wibawa, Samodra; Purbokusumo, yuyun; dan Pramusinto, Agus. 1994. ***Evaluasi Kebijakan Publik***. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

****

BIODATA

Johan Bhimo Sukoco, lahir di Sragen, pada tanggal 13 Maret 1989. Pada tahun 2010 menamatkan pendidikan vokasi pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, dengan gelar Ahli Madya (A.Md). Kemudian, pada tahun 2012 memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sebelas Maret. Pada tahun 2016, memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dari Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. Penulis dapat dihubungi di email : johanbhimo@yahoo.co.id , atau kontak person di 085642317178.

HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPUASAN KERJA GURU DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI

Oleh
Helina Apriyani
Email:helina.hld@bsi.ac.id

ABSTRAK

The objective of the reseach is to know the relationship between the transformational leadership and teacher's job satisfaction with teacher of organizational. This research was conducted in private junior high school in the district of cibinong Bogoor regency by using survey method.

The respondent of the research are six private junior high school in the district of cibinong bogor regency wich are selected by proportional random sampling.

The instrument wich is used consist of three variables. The validity of instrument was measured by using product moment correlation and oon the other side the reliability was measured by alpha cronbach formula.

The conclusion of the research are: first there is positive relationship transformational leadership (X1) with teacher's organizational commitment (Y) with correlation coefficient ry1 = 0,391, on significant level a = 0,05. With regression equation $\hat{Y} = 64,137 + 0,401\ X_1$.

Second, there is a positive relationship between teacher's job satisfaction (X_2) *with teacher's organizational commitment (Y) with correlation coefficient ry2 = 0,364, on significant level a = 0,05. With regression equation* $\hat{Y} = 69,377 + 0,303\ X_2$.

Third, there is positive relationship between the transformational leadership and teacher's job satisfaction all together with teacher of organizational with correlation coefficient ry1.2 = 0,433, on significant

level a = 0,05. With regression equation $\hat{Y} = 52{,}891 + 0{,}294\ X_1 + 0{,}199\ X_2$.

The research concludes that the teacher's organizational commitment of private junior high school in the district of cibinong bogor regency was influenced by transformational leadership and teacher's job satisfaction.

Keywords: *Transformational leadership, job satisfaction, commitment*

****

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Pendidikan formal diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kriteria tuntutan lapangan kerja yang tersedia, terlebih lagi jika lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sabagai pengaplikasian dan penguasaan ilmu yang diperolehnya dari lembaga pendidikan. Kondisi saat ini masih belum bisa terpenuhi dan itu merupakan salah satu gambaran rendahnya kualitas pendidikan kita.

Penyelenggaraan pendidikan menuntun kepada suatu sistem kerja yang tidak parsial, karena penyelenggaraan pendidikan terjadi karena adanya jaringan kerja sama dari berbagai komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan (sekolah) ataupun lembaga lain. Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah guru. Melalui guru penanaman nilai-nilai dan pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan keadaan saat ini dan masa depan dapat berlangsung.

Komitmen guru terhadap organisasi sekolah seringkali menjadi isu yang sangat penting. Begitu pentingnya hal tersebut, sampai-sampai beberapa sekolah berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang suatu jabatan/posisi yang ditawarkan. Meskipun hal ini sudah sangat umum, namun tidak jarang para guru masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh. Pemahaman tentang pentingnya kondisi kerja yang kondusif mengarahkan sekolah untuk dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Substansi peningkatan komitmen guru terhadap organisasi adalah keberhasilan interaksi pilar keberhasilan interaksi belajar mengajar, keberhasilan itu akan terwujud apabila ada kemauan yang berasal dari personal guru itu sendiri, yaitu berupa keinginan yang kuat untuk bekerja secara baik. Guru yang memiliki keinginan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya akan menyadari bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang besar dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam organisasi sekolah, guru merupakan tenaga professional yang berhadapan langsung dengan siswa, maka dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap sekolah tempat dia bekerja, sehingga akan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam dirinya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Komitmen guru terhadap organisasi pasti akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja mereka. Komitmen guru akan melancarkan pergerakan sekolah menuju perubahan yang harus merupakan peningkatan baik bersifat fisik maupun psikologis, sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi semua warga sekolah.. Dari mana pun memulainya, kepala sekolah harus lebih dulu berfokus pada guru yang menjalankan perubahan, bukan pada fasilitas yang diperoleh atau problematika yang dihadapi dengan adanya perubahan itu. Ia tidak perlu cepat-cepat masuk pada konsep-konsep perubahan sebelum memberi perhatian pada cara guru-guru berpikir.

Sebab, konsep-konsep yang hebat itu implementasinya akan terpulang pada bagaimana para guru menjalankannya. Komitmen organisasional guru harus dibangkitkan oleh kepala sekolah yang bisa menyampaikan perubahan-perubahan yang bakal terjadi agar lebih mudah diterima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey melalui pendekatan korelasional. Perolehan data primer di lapangan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang ada dalam variabel penelitian. Data yang diperlukan adalah data mengenai kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja guru dan komitmen guru terhadap organisasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru SMP Swasta di Komisariat Utara Kecamatan Cibinong yang berstatus guru tetap yayasan yang berjumlah 138 orang yang tersebar di 6 SMP Swasta.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data meliputi: mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi Data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Pendekatan korelasional digunakan untuk menguji secara statistik hipotesis penelitian, serta mendeskripsikan secara analisis, sistematis, faktual, dan teliti mengenai hubungan antar variabel penelitian yaitu kepuasan kerja guru, budaya organisasi, dan motivasi berprestasi, dengan konstelasi variabel sebagai berikut:

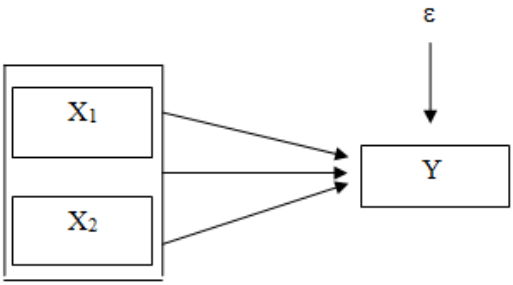

Keterangan:

Y = Komitmen Guru
X_1 = Kepemimpinan Transformasional
X_2 = Kepuasan Kerja Guru
ε = Variabel lain yang tidak diteliti

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui banyaknya data/sampel, jumlah total, skor terendah, skor tertinggi, hasil perhitungan skor rata-rata, skor tengah, skor yang paling sering muncul, kisaran antara skor terendah hingga skor tertinggi serta perhitungan simpangan baku dari setiap variabel penelitian. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dideskripsikan dalam daftar frekuensi untuk masing-masing variabel penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk histogram.

Adapun pengujian prasyarat analisis meliputi: uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas galat baku taksiran dilakukan dengan uji liliefors dimana populasi berdistribusi normal apabila $L_{hitung} < L_{tabel}$, uji homogenitas untuk mengetahui apakah varians sampel bersifat homogen atau tidak, dengan metode Bartlett dimana populasi dikatakan homogen jika nilai $x^2_{hitung} < x^2_{tabel}$.

Pada pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik uji signifikansi regresi dan korelasi sederhana, serta uji signifikansi regresi dan korelasi ganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas galat baku taksiran ($Y-\hat{Y}_1$) diperoleh nilai L_{hitung} maksimum sebesar 0,0539 sedangkan L_{tabel} sebesar 0,087. Jelas terlihat bahwa $L_{hitung} < L_{tabel}$ sehingga galat baku taksiran ($Y-\hat{Y}_1$) persamaan regresi variabel (X_1) kepemimpinan transformasional dengan variabel (Y) komitmen guru berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas galat baku taksiran ($Y-\hat{Y}_2$) diperoleh nilai L_{hitung} maksimum sebesar 0,0333 sedangkan L_{tabel} sebesar 0,087. Jelas terlihat bahwa $L_{hitung} < L_{tabel}$ sehingga galat baku taksiran ($Y-\hat{Y}_2$) persamaan regresi variabel (X_2) kepuasan kerja guru dengan variabel (Y) komitmen guru berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil uji homogenitas nilai Y yang dikelompokkan berdasarkan nilai X_1 sebesar 28,670. Sedangkan nilai $X_{2\ tabel} = 50,998$.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel terikat (Y) yang dikelompokkan berdasarkan nilai variabel bebas X_1 berasal dari populasi yang memiliki varias homogen.

Uji homogenitas sebaran data variabel terikat (Y) yang dikelompokkan berdasarkan nilai variabel bebas kepuasan kerja ($X_{2)}$ sebesar 34,304. Sedangkan nilai $X_{2\ tabel} = 53,383$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel terikat (Y) yang dikelompokkan berdasarkan nilai variabel bebas X_2 berasal dari populasi yang memiliki varias homogen.

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional (X_1) dengan komitmen guru (Y). Berdasarkan perhitungan hubungan fungsional kepemimpinan transformasional (X_1) dengan komitmen guru (Y) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut; $\hat{Y}_1 = 64,137 + 0,401X_1$. Hubungan fungsional tersebut demikian juga dengan sebaran data empirisnya dapat digambarkan dalam bentuk grafik berikut dengan diagram pencarnya, seperti tertera pada gambar 2.

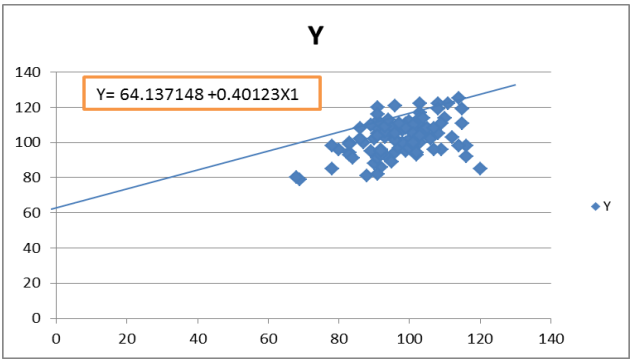

Gambar 2. Diagram Pencar dan persamaan regresi antara Kepemimpinan Transformasional (X_1) dengan Komitmen Guru (Y)

Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan ANAVA diperoleh hasil perhitungan seperti tertera pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rangkuman Analisis Varians (ANAVA) Uji Signifikansi dan Linieritas PersamaanRegresi Kepemimpinan Transformasional (X_1) dengan Komitmen Guru (Y)

Sumber Varians	dk	JK	RJK	F_{hitung}	F_{tabel}		Kesimpulan
					α (0,05)	α (0,01)	
Total	103	1105850	-	18,2814**	3,933	6,887	Sangat Signifikan
Regresi (a)	1	1095819	1095819				
Regresi (b/a)	1	1537,356	153735				
Sisa	101	8493,46	84,0936				
Tuna Cocok	35	375,144	108,43267	1,477ns	1,606	1,954	Linear
Galat	64	468,315	73,411179				

Keterangan:

dk : derajat kebebasan
JK : Jumlah Kuadrat
RJK : Rata-rata Jumlah Kuadrat
** : sangat signifikan
ns : non signifikan (linear)

Uji linearitas sebagai salah satu persyaratan untuk menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* menunjukkan bahwa regresi bersifat linear (F_{hitung} = 1,477) > $F_{tabel(\alpha=0,05)}$ =1,606). Dengan demikian korelasi *Product Moment Pearson* dapat digunakan. Uji signifikan regresi menunjukkan bahwa F_{hitung} = 18,2814) > $F_{tabel(\alpha=0,05)}$ =3,933. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi antara kepemimpinan transformasional (X_1) dengan komitmen guru (Y) yang ditunjukkan oleh persamaan regresi $\hat{Y}_1$ = 64,137 + 0,401X_1 bersifat sangat signifikan. Artinya setiap peningkatan satu unit nilai budaya organisasi akan diikuti oleh peningkatan nilai komitmen guru sebesar 0,401 unit. Hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel kepemimpinan transformasional dan kekomitmen guru dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Korelasi (r_{y1}) dan Uji Keberartian Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi (r_{y1})	t_{hitung}	t_{tabel}		Kesimpulan
		(α = 0,05;105)	(α = 0,01; 105)	
0,391	4,296**	1,983	2,625	Sangat Signifikan

Syarat signifikan: $t_{hitung} > t_{tabel}$ Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai r_{y1} sebesar 0,391 dan uji signifikansi menunjukkan bahwa korelasi antara kepemimpinan transformasional (X_1) dengan komitmen guru sangat signifikan guru (Y) adalah (t_{hitung} = 4,296 > 1,983 = $t_{tabel(\alpha=0,05)}$). Koefisien Determinasi (r_{y1}^2) = 0,153 menunjukkan

bahwa 15,3% komitmen guru dapat diterangkan oleh kepemimpinan transformasional.

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja guru (X_2) dengan komitmen guru(Y).

Berdasarkan perhitungan hubungan fungsional kepuasan kerja guru (X_2) dengan komitmen guru (Y) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut; $\hat{Y}_2 = 69{,}377 + 0{,}303X_2$.

Diagram pencar, yakni titik-titik koordinat dari nilai empiris dan persamaan regresi antara kedua variabel dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti tertera pada gambar 3.

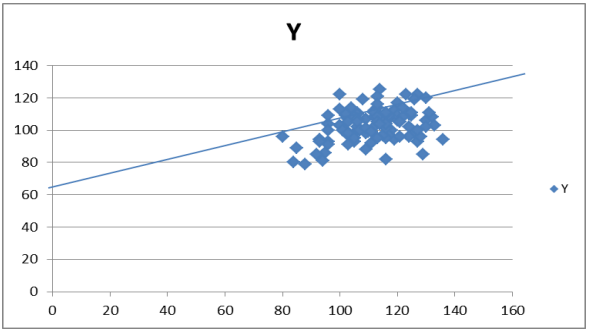

Gambar 3. Diagram Pencar dan persamaan regresi antara kepuasan kerja (X_2) dengan komitmen guru (Y)

Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan ANAVA diperoleh hasil perhitungan seperti tertera pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Rangkuman Analisis Varians (ANAVA) Uji Signifikansi dan Linieritas Persamaan Regresi Kepuasan kerja (X_2) dengan Komitmen guru (Y)

SV	dk	JK	RJK	F_{hitung}	F_{tabel}		Kesimpulan
					α (0,05)	α (0,01)	
Total	103	1111225	-	8,9005**	3,933	6,887	Sangat Signifikan
Regresi (a)	1	1095819	1095819,18				
Regresi (b/a)	1	1330,685	1330,68480				
Sisa	101	15100,03	149,506244				

Tuna Cocok	42	7434,503	177,119676	1,167^{ns}	1,589	1,982	Linear
Galat	59	89445,16	151,601963				

Keterangan :
dk : derajat kebebasan
JK : Jumlah Kuadrat
RJK : Rata-rata Jumlah Kuadrat
** : sangat signifikan
ns : non signifikan (linear)

Uji linearitas sebagai salah satu persyaratan untuk menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* menunjukkan bahwa regresi bersifat linear (F_{hitung} = 1,167) ≤ $F_{tabel(\alpha=0,05)}$ =1,989). Dengan demikian korelasi *Product Moment Pearson* dapat digunakan. Uji signifikan regresi menunjukkan bahwa F_{hitung} = 8,9005 > F_{tabel} =3,933 $_{(\alpha=0,05)}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi antara kepuasan kerja guru (X_2) dengan komitmen guru (Y) yang ditunjukkan oleh persamaan regresi $\hat{Y}_2$ = 69,377 + 0,303X_2 bersifat sangat signifikan. Artinya setiap peningkatan satu unit nilai kepuasan kerja guru akan diikuti oleh peningkatan nilai komitmen guru sebesar 0,303 unit. Hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel kepuasan kerja guru dan komitmen gurudapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Korelasi (r_{y1}) dan Uji Keberartian Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi (r_{y1})	t_{hitung}	t_{tabel}		Kesimpulan
		(α = 0,05;105)	(α = 0,01; 105)	
0,364	3,231**	1,983	2,625	Sangat Signifikan

Syarat signifikan : $t_{hitung} > t_{tabel}$

Berdasarkan tabel 4, koefisien korelasi menunjukkan bahwa nilai r_{y2} sebesar 0,364 dan uji signifikansi menunjukkan bahwa korelasi antara kepuasan kerja guru (X_2) dengan komitmen guru (Y) sangat signifikan adalah (t_{hitung} = 3,231 > 1,983 = $t_{tabel(\alpha=0,05)}$). Koefisien Determinasi (r_{y1}^2) = 0,132 menunjukkan bahwa 13,266% komitmen guru dapat diterangkan oleh kepuasan kerja guru.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional (X_1) kepuasan kerja guru (X_2) secara bersama-sama dengan komitmen guru (Y), berdasarkan perhitungan hubungan fungsional antara kepemimpinan transformasional (X_1) dan kepuasan kerja guru (X_2) secara bersama-sama dengan komitmen guru (Y) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut; $\hat{Y}$ = 52,891 + 0,294 X_1 + 0,119X_2.

Uji signifikansi dengan menggunakan analisis varians (ANAVA) persamaan regresi ganda antara kepemimpinan transformasional (X_1) kepuasan kerja guru (X_2) secara bersama-sama dengan komitmen guru(Y) memberikan hasil seperti tertera pada tabel 5.

Tabel 5. Analisis Varians (ANAVA) Regresi Ganda $\hat{Y}$ = 52,891 + 0,294 X_1 + 0,119 X_2

SV	dk	JK	RJK	F_{hitung}	F_{tabel}		Kesimpulan
					α = 0,05	α =0,01	
Total	102	10030					
Regresi	2	2004,2	1002,1	12,484**	3,087	4,823	Sangat Signifikan
Sisa	100	8026,61	80,266				

Keterangan :

SV : Sumber Varians
dk : derajat kebebasan
JK : Jumlah Kuadrat
RJK : Rata-rata Jumlah Kuadrat)
** : Regresi sangat signifikan (F_{hitung} =12,484 > 4,823 = $F_{tabel(\alpha=0,01)}$)

Berdasarkan tabel 5, uji keberartian regresi ganda kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru secara bersama-sama komitmen guru sangat signifikan (F_{hitung} = 12,848 > 4,823 = $F_{tabel(\alpha=0,01)}$). Artinya setiap peningkatan satu unit kepemimpinan transformasonal dan satu unit kepuasan kerja guru akan meningkatkan komitmen guru sebesar 0,433 unit. Kekuatan hubungan antara variabel budaya organisasi dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kepuasan kerja guru disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi Ganda dan Uji Signifikansi Korelasi Ganda Variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama dengan Variabel Y.

Koefisien Korelasi ($r_{y.12}$)	F_{hitung}	F_{tabel}		Kesimpulan
		α = 0,05	α =0,01	
0,433	12,484**	3,087	4,823	Sangat Signifikan

Syarat signifikan : $F_{hitung} > F_{tabel}$

Berdasarkan tabel 6 disimpulkan bahwa koefisien korelasi hubungan antara budaya organisasi dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kepuasan kerja guru adalah $r_{y.12}$ = 0,5433 dengan koefisien determinasi r_{y12}^2= 0,1335, hal ini dapat digunakan untuk peramalan pada populasi yaitu kontribusi skor kepemimpinan transformasional (X_1) dan kepuasan kerja guru (X_2) secara bersama-sama terhadap komitmen guru (Y) sebesar 13,350%. Hasil perhitungan koefisien korelasi parsial disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Perhitungan Korelasi Parsial

Variabel Pengontrol	Koefisien Korelasi Parsial	t_{hitung}	t_{tabel}		Kesimpulan
			$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$	
X_1	$ry_{2.1}$	2,968**	1,983	2,625	Sangat Signifikan
X_2	$ry_{1.2}$	1,829	1,983	2,625	Tidak Signifikan

Syarat Signifikan $t_{hitung} > t_{tabel}$

Berdasarkan tabel 7 disimpulkan bahwa, koefisien korelasi antara kepemimpinan transformasional (X_1) dan kepuasan kerja guru (X2) dengan komitmen guru (Y) dikontrol diperoleh nilai koefisien korelasi parsial (r_{y12}) sebesar 0,446. Syarat signifikansi adalah bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} = 2,968 lebih dari t_{tabel} (1,983) pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk 100, menunjukkan bahwa koefisien korelasi parsial antara variabel (X_1) kepemimpinan transformasional dengan variabel (Y) komitmen organisasional apabila variabel (X_2) kepuasan kerja guru dikontrol adalah signifikan ($t_{hitung} = 2,968 > 1,983 = t_{tabel(\alpha=0,05)}$). Maka, apabila variabel (X_2) kepuasan kerja guru dikontrol, terdapat hubungan positif antara variabel (X_1) kepemimpinan transformasional dengan variabel (Y) komitmen guru. Hal tersebut juga berarti bahwa hubungan antara variabel (X_1) kepemimpinan transforrmasional dengan variabel (Y) komitmen guru tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel (X_2) kepuasan kerja guru.

Koefisien korelasi kepuasan kerja guru (X_2) dengaan komitmen guru (Y) dimana kepemimpinan transformasional (X_1) dikontrol sebesar ($r_{y.21}$) = 1,829. Hasil uji menunjukkan bahwa t_{hitung} = 1,829 dengan $t_{tabel(\alpha=0,05)}$= 1,983. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja guru dengan komitmen guru dimana kepemimpinan transformasional dikontrol. Berarti hubungan antara kepuasan kerja guru dengan komitmen guru tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemimpinan transfor-masional.

1. Hubungan antara Kepemimpinan Transformasional dengan komitmen guru.

   Model hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen guru dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y}_1 = 64{,}137 + 0{,}401X_1$, artinya setiap peningkatan satu unit nilai kepemimpinan transformasional akan diikuti oleh peningkatan nilai komitmen guru sebesar 0,401 unit dengan konstanta 64,137. Persamaan regresi $\hat{Y}_1 = 64{,}137 + 0{,}401X_1$ dapat digunakan untuk memprediksi skor komitmen guru jika skor budaya kepemimpinan transformasional diketahui. Nilai koefisien korelasi (r_{y1}) sebesar 0,391 menunjukkan hubungan yang positif antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen guru. Kontribusi komitmen guru terhadap kepemimpinan transformasional ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (r_{y1}^2) sebesar 0,153 yang berarti 15,326% variasi komitmen guru (Y) dapat dijelaskan oleh variasi kepemimpinan transformasional melalui persamaan $\hat{Y}_1 = 64{,}137 + 0{,}401X_1$.

   McShane, Von Glinow berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional dipandang dari bagaimana ia mengubah anggota atau organisasi dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan menjalankan visi organisasi atau unit kerja serta memberi inspirasi para pegawai untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai visi organisasi tersebut sehingga akan menciptakan visi strategic, menyampaikan visi, menjalankan visi dan membangun komitmen kearah visi organisasi.

2. Hubungan antara Kepuasan Kerja Guru dengan Komitmen Guru.

   Model hubungan antara kepuasankerja guru dengan komitmen guru dinyatakan dalam persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y}_2 = 69{,}377 + 0{,}303X_2$, artinya setiap peningkatan satu unit nilai kepuasan kerja guru akan diikuti oleh peningkatan nilai komitmen guru sebesar 0,303 unit dengan konstantan

69,377. Persamaan regresi $\hat{Y}_2 = 69,377 + 0,303X_2$ dapat digunakan untuk memprediksi skor komitmen guru jika skor kepuasan kerja guru diketahui. Nilai koefisien korelasi (r_{y2}) adalah sebesar 0,364 menunjukkan hubungan yang positif antara kepuasan kerja guru dengan komitmen guru terhadap organisasi. Kontribusi kepuasan kerja guru terhadap komitmen guru terhadap organisasi ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (r_{y2}^2) sebesar 0,13266 yang berarti 13,266% variasi komitmen guru terhadap organisasi (Y) dapat dijelaskan oleh variasi kepuasan kerja guru (X_2) melalui persamaan regresi $\hat{Y}_2 = 69,377 + 0,303X_2$.

3. Hubungan antara Kepemimpinan transformasional dan Kepuasan kerja guru secara bersama-sama dengan Komitmen Guru.

Model hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru secara bersama-sama dengan komitmen guru terhadap organisasi dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier ganda $\hat{Y} = 52,891 + 0,294\ X_1 + 0,199\ X_2$. Hal ini berarti bahwa apabila nilai kepemimpinan transformasional (X_1) dan nilai kepuasan kerja guru (X_2) meningkat sebesar satu unit, maka nilai komitmen guru terhadap organisasi (Y) akan meningkat sebesar 0,294 dan 0,199 unit dengan konstanta 52,891.

Nilai koefisien korelasi ganda (r_{y12}) sebesar 0,433, yang berarti terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru secara bersama-sama dengan komitmen guru terhadap organisasi. Kontribusi kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru secara bersama-sama ditunjukan oleh nilai koefisien determinasi ganda (r_{y12}^2) sebesar 0,13350 yang berarti 13,350% variasi komitmen guru dapat dijelaskan oleh variasi kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru secara bersama-sama melalui persamaan regresi ganda $\hat{Y} = 52,891 + 0,294X_1 + 0,199\ X_2$.

Bila dilihat secara keseluruhan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja guru terhadap komitmen guru terhadap organisasi. Namun, hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen guru relatif lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara kepuasan kerja guru dengan komitmen guru (r_{y1}=0,391 >0,364 = r_{y2}).

Kontribusi kepemimpinan transformasional terhadap komitmen guru sebesar 15,326% dan kepuasam kerja guru terhadap komitmen guru sebesar 13,266%. Sementara itu, kontribusi kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja guru secara bersama-sama terhadap komitmen guru terhadap organisasi adalah sebesar 13,350%. Dengan demikian komitmen guru terhadap organisasi akan terwujud paling banyak dipengaruhi oleh tingkat kepemimpinan transformasional didukung oleh kepuasan kerja guru sehingga ada kesinambungan yang sangat baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen guru dengan nilai koefisien korelasi (r_{y1}) sebesar 0,391 dan didukung persamaan regresi $\hat{Y}_1 = 64{,}137 + 0{,}401X_1$. Kontribusi hubungan kepemimpinan transformasional terhadap komitmen guru adalah sebesar 15,326% yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (r_{y1}^2) sebesar 0,153.
2. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kepuasan kerja guru dengan komitmen guru dengan nilai koefisien korelasi (r_{y2}) sebesar 0,364 dan didukung persamaan regresi $\hat{Y}_2 = 69{,}377 + 0{,}303X_2$. Kontribusi kepuasan kerja guru

terhadap komitmen guru adalah sebesar 13,266% yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (r_{y2}^2) sebesar 0,132.

3. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru secara bersama-sama dengan komitmen guru dengan nilai koefisien korelasi (r_{y12}) sebesar 0,433 dan didukung persamaan regresi $\hat{Y}$ = 52,891 + 0,294 X_1 + 0,199 X_2. Kontribusi kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru secara bersama-sama terhadap komitmen guru adalah sebesar 13,350% yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (r_{y12}^2) sebesar 0,133.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru dengan komitmen guru-guru di seluruh SMP Swasta di Wilayah Komisariat Utara Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah & Cepi Triatna, *Visionary Leadership* .Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Bertocc, David. *Leadership In Organizations.* Maryland: University Press of Amerika,2009

Colquitt, J. A. Lepine, M.J Wesson. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace* .New York: McGraw-Hill Irwin, 2009

Gani, Darwis S. ,Djoehana Setyamadjaja, Sumardi. *Kepemimpinan dan Organisasi Pendidikan.* Bogor: Program Pascasarjana Pakuan, 2008.

Gibson, James L., J. H Donnelly, J.M Ivancevich, R. Konopaske, *Organizations Behavior, Structure, Processes Fourteenth Edition* . New York: McGraw-Hill Companies, Inc, 2012

Kadim, Abd & Arfan Tilome, *Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence* Bandung: ALFABETA, 2011.

Luthans, Fred. *Organizational Behavior Twelfth Edition* .New York: McGraw Hill, 2011

McShane & Von Glinow, *Organization Behavior* (Boston: McGraw-Hill International, 2008.

M.Bass, Bernard & Ronald E. Riggio, *Transformasional Leaderhip Second Edition* .New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006

Norulkamar, Ungku, Salmiah Mohd Amin, Wan Khairuzzaman. *The Impact of Technostrest On Organization Commitment among Malaysian Academic Librarians* .Singapore Journal of Library & Information Management, Vol 38, 2009

Pasolong, Harbani. *Kepemimpinan Birokrasi* .Bandung: Alfabeta, 2010

Robins, Stephen P. *Organizational Behavior 10th Edition* (San Diego: Pearson Education International, 2003

Salami, Samuel O .*Demographic and Psychological Factors Predicting Organizational Commitment among Industrial Workers* .Nigeria: Department of Guidance and Counselling, Vol 10, 2008

Schermerhorn, Jhon R. G. Hunt, Osborn, Uhl-Bien, *Organizational Behavior 11th Edition.* United States: John Wiley & Sons, Inc, 2010

Soekarso, Agus Sosro, Iskandar Putong, Cecep Hidayat, *Teori Kepemimpinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010

Sopiah, *Perilaku Organisasional* Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2008.

Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi* .Jakarta: Kencana, 2010.

Sugiarti, Euis Meirin .*Hubungan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan komunikasi interpersonal dengan komitmen organisasional guru*, Tesis .Bogor: Pascasarjana Universitas Pakuan, 2011.

****

BIODATA

Helina Apriyani, memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tahun 2008. Kemudian tahun 2016 memperoleh gelar Magister Pendidikan dari Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor. Saat ini sebagai Staf Pengajar program studi Manajemen Informatika AMIK BSI Bogor.

KESULITAN MENGIMPLEMENTASIKAN PENILAIAN AUTENTIK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA DI SMA NEGERI SEKOTA BANDA ACEH

*(*THE IN IMPLEMENTING AUTENTIC ASSESMENT PHYSICS LEARNING IN SMA Se-Kota BANDA ACEH*)*

Oleh:
Musdar
Dosen Prodi Pendidikan Fisika USM
Email: musdar_fisika@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasikan penilaian Autentik dalam pembelajaran Fisika di SMA Negeri Sekota Banda Aceh. Tujuan Khusus, Adapun yang menjadi tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesulitan Mengimplementasikan penilaian Autentik dalam pembelajaran Fisika di SMA Negeri Sekota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dan teknik dokumentasi, Subjek dalam penelitian ini adalah 12 guru Fisika dari kelas X-XII di beberapa SMA Negeri kota Banda Aceh yang telah tetapkan sebagai sampel penelit,. Pada tahun ajaran 2015/2016. (1) guru mengelami kesulitan dalam menghimpun sikap, pengetahuan, keterampilan 65 %, guru mengalami kesulitan dalam menilai perkembangan siswa 81%, guru mengalami kesulitan dalam penilaian dan penguasaan semua kompetensi 36%, dalam penilaian karakteristik materi 71%, teknik penlaian 72%, dalam teknik penilaian sesuia indikator 62%, dalam menginformasikan aspek penilaian dan karakteristik

kepada peserta didik 19%, dalam komponen penilaian 66%, dalam pendoman penskoran 74%, dalam penilaian kkm dan nilai akhir 32%.bahwa kesulitan mengimplementasikan penilaian autentik di SMAN Sekota Banda Aceh, guru fisika masih memiliki beberapa kendala dalam masalah penilaian yang dilakukan mulai dari penilaian sikap, pengetahuan,dan penilaian keterampilan. Selain itu guru fisika juga masih kurang memilih teknik penilaian sesuai karakteristik materi pada mata pelajaran fisika dan juga kesulitan dalam membuat rencana penilaian dengan mengacu pada silabus dan rencana program pembelajaran

Kata kunci: Implementasi, penilaian autentik, pembelajaran.

****

ABSTRACT

The general objective of this research was to determine implement an authentic assessment in physics learning in SMA Se-city of Banda Aceh. Special Interest, As for the specific purpose of this study was to determine the Difficulty Implementing Authentic assessment in physics learning in SMA Sekota Banda Aceh. The approach used in this study is a qualitative approach. A qualitative approach focus on the appointment of meaning, description, purification, and You keep the data in the context of each and often depicted in the form of words than in the figures, Data collection techniques in this study using questionnaire techniques and engineering documentation, subject to this study was 12 teachers of Physics from class X-XII in some SMA Negeri Banda Aceh which has been set as a sample penelit ,. In the academic year 2015/2016. (1) teachers mengelami difficulty in collecting the attitudes, knowledge, skills 65%, teachers have difficulty in assessing the development of students 81%, teachers have difficulty in the assessment and control of all competencies

36%, in the assessment of the characteristics of the materials 71%, engineering penlaian 72%, in conformity assessment techniques indicator of 62%, in informing and characteristic aspects of assessment to learners 19%, the assessment component of 66%, in pendoman scoring 74%, the KKM assessment and a final value 32%.

Keywords: *Implementation, authentic assessment, learning.*

****

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan hal penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kurikulum yang digunakan sekarang yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dinilai masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. KTSP dinilai belum tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global (Kemendikbud 2012:3). Standar penilaian KTSP dinilai belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi. Hal tersebut bertentangan dengan penjelasan pasal 35 UU nomor 20 Tahun 2003 bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Permasalahan pendidikan yang muncul membuat kemendikbud menilai perlu dikembangkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya tantangan internal maupun tantangan eksternal (Kemendikbud 2013:12). Tantangan internal terkait tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 Standar meliputi, Standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses pendidikan, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Nasional Pendidikan dan faktor perkembangan penduduk Indonesia. Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka.

Perubahan kurikulum memiliki tujuan meningkatkan rasa ingin tahu dan keaktifan siswa. Bahan uji publik kurikulum 2013 menjelaskan standar penilaian kurikulum baru selain menilai keaktifan bertanya, juga menilai proses dan hasil observasi siswa serta kemampuan siswa menalar masalah yang diajukan guru sehingga siswa diajak berfikir logis. Elemen perubahan kurikulum 2013 meliputi perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian (Kemendikbud 2012:5). Standar kompetensi lulusan dibedakan menjadi domain yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Rancangan kurikulum 2013 menyebutkan adanya pengurangan mata pelajaran di tingkat SD dan SMP. Perubahan lain yaitu penambahan jam pelajaran, komponen kurikulum seperti buku teks dan pedoman disiapkan pemerintah, adanya integrasi mata pelajaran IPA dan IPS di tingkat SD, serta rencana penjurusan lebih awal di tingkat SMA.

Selain itu, pihak yang mendukung perubahan kurikulum menganggap perubahan tersebut perlu untuk memenuhi tantang perkembangan zaman. Bila kurikulum tidak di rubah, lulusan yang dihasilkan adalah lulusan yang tidak terserap di dunia (kemendikbud 2012: 7). Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan dalam empat tahap, pertama, penyusunan ruang lingkungan internal kemendikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidika, kedua pemaparan desain kurikulum didepan wakil presiden selaku ketua komite pendidikan yang telah dilaksanakan pada 13 November 2012, serta didepan komisi X DPR RI pada 22 November 2012, ketiga, Pemerintah melakukan uji publik secara

online di *website* kemendikbud *(http://kurikulum2013.kemendikbud.go.id),* juga melalui dialog tatap muka di beberapa daerah, dan secara tertulis yang di kirim kebeberapa perguruan tinggi dan dinas pendidikan. Selanjutnya, di adakan sosialisasi di berbagai kota besar mengenai implementasi kurikulum 2013. Berdasarkan uji publik yang dilakukan 29 November – 25 Desember 2012 menunjukan bahwa sebagian besar respoden menyetujui implementasi kurikulum 2013. Sebanayak 71 % respoden menunjukan setuju terhadap justifikasi dan Standar kompetensi lulusan (SKL) kurikulum 2013. Selain itu sebanyak 81% respoden menyetujui mengenai penyiapan guru dalam impelementasi kurikulum 2013.

Berbagai pendapat yang berkembang dengan adanya perubahan kurikulum menunjukan Hal tersebut sedikit berbeda dengan kesiapan dalam implementasi kurikulum 2013 yang tidak berdasarkan tingkat satuan pendidikan. Kemendikbud (2012:10) menyatakan sedikitnya ada dua faktor besar dalam keberhasilah kurikulum 2013 yaitu:

> Faktor penentuan pertama yaitu kesesuaian kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Faktor penentu kedua yaitu faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: (i) ketersediaaan buku sebagian bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum: (ii) penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; dan (iii) penguatan manajemen dan budaya sekolah.

Selain itu, dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat menerapkan pendidikan karakter secara spontan dalam setiap proses pembelajaran agar siswa dapat memenuhi kompetensi sikap. Untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan kurikulum yang pertama mengenai kesesuaian kompetensi pendidik khususnya kompetensi

pedagogik terhadap kurikulum 2013 serta kesiapan guru melaksanakan perubahan dalam mengimplementasikan penilaian autentik dalam pembelajaran fisika.

SMA Negeri Se-kota Banda Aceh yang sudah meng-implementasikan kurikulum 2013. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana, beberapa fasilitas dan sumber belajar yang mendukung dan usaha-usaha yang sudah ditempuh di sekolah. Sejauh ini guru-guru fisika di SMA Negeri Sekota Banda Aceh telah mengikuti pelatihan tentang kurikulum 2013, namun pelatihan yang di ikuti belum maksimal. Hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan para guru tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Kesulitan Mengimplementasikan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Fisika di SMA Negeri Sekota Banda Aceh".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif-kualitatif ini berguna untuk me-ngetahui kesulitan mengimplementasikan Penilaian Autentik dalam pembelajaran Fisika di SMA Negeri Sekota Banda Aceh. Data penelitian ini diperoleh dengan instrumen kuesioner dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini teknik pengumpulan data pada suatu subjek dan objek yang dievaluasi, menggunakan skala lis (Check list). Cross dan Groundlund (1973:383) menyatakan "daftar lis, yaitu suatu set daftar karakteristik atau kriteria yang memerlukan jawaban sederhana misalkan ya, kadang-kadang, dan tidak, dengan di sertai tanda cek list, apabila setiap item dalam daftar telah terjawab atau terpenuhi". Subjek dalam penelitian ini adalah 12 guru Fisika dari kelas X-XII di beberapa SMA Negeri kota Banda Aceh yang telah tetapkan sebagai sampel peneliti. Pada tahun ajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dan teknik dokumentasi. Penulis juga melakukan studi

kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan kurikulum 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mencakup hasil pengumpulan data pada waktu penelitian berlangsung atau penelitian dilakukan di lapangan dan hasil pengolahan data setelah beberapa data terkumpul. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke sekolah-sekolah yang telat ditentukan dalam surat izin dari pihak dinas pendidikan Banda Aceh. Peneliti menemui guru-guru di beberapa SMAN kota Banda Aceh yang telah peneliti tetapkan sebagai sampel peneliti. Peneliti memberikan angket yang akan diisi sendiri oleh responden untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Tabel 4.1 Nama-nama guru sebagai responden dan sekolah

No	Nama	Sekolah
1	NR	SMAN 8 Banda Aceh
2	SR	SMAN 8 Banda Aceh
3	SY	SMAN 8 Banda Aceh
4	MA	SMAN 9 Banda Aceh
5	EJ	SMAN 11 Banda Aceh
6	ER	SMAN 11 Banda Aceh
7	UM	SMAN 11 Banda Aceh
8	NZ	SMAN 11 Banda Aceh
9	HM	SMAN 11 Banda Aceh
10	MD	SMAN 12 Banda Aceh
11	ER	SMAN 12 Banda Aceh
12	IR	SMAN 16 Banda Aceh

Sumber : SMA Negeri 8,9,11,12,dan 16 Banda Aceh

Berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang telah penulis susun, berikut ini merupakan hasil pengolahan data kinerja guru. Penelitian ini mengkaji tentang penilaian autentik yang dilakukan guru kepada peserta didik, guru mengelami kesulitan dalam menghimpun sikap peserta didik 41% , pengetahuan 66%, keterampilan 58%. Guru mengalami kesulitan dalam menilai perkembangan siswa adapun dalam mencatat perkembangan sikap 49%, mencatat perkembangan peserta didik pada bagian pengetahuan 66%, mencatat perkembangan peserta didik dalam keterampilan 66%. Guru mengalami kesulitan dalam penilaian dan penguasaan semua kompetensi mulai dari melaksanakan ulangan harian guru masih kurang dalam hal ini 16%, dalam melaksanakan ulangan tengah semester untuk menilai penguasan kompetensi guru masih kurang dalam hal ini 8%, untuk melaksanakan ulangan akhir guru masih kurang 16%. Dalam penilaian karakteristik materi dalam teknik penilaian sesuai krakteristik guru mengalami kesulitan 58%, kesulitan guru dalam membuat rencana penilaian dengan mengacu pada silabus 66%, menentukan komponen yang dinilai 41%. Guru juga mengalami kesulitan dalam teknik penilaian 41%, dalam menentukan teknik teknik yang akan digunakan 57%, menentukan kriteria pencapaian kompetensi dasar 57%. Dalam teknik penilaian sesuia indikator 62% dalam menginformasikan aspek penilaian dan karakteristik kepada peserta didik 41%, dalam komponen penilaian 66%, menuangkan semua komponen ke dalam kisi-kisi penilaian 50%. Membuat instrument penilaian berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat 41%. Dalam pedoman penskoran 66%, dalam menganalisis kualitas instrument penilaian dengan mengacu pada persyaratan intsrumen 75%, dalam menetapkan bobot dalam penilaian 49%. Dalam menetapkan rumus nilai akhir setiap peserta didik 41%, dalam menetapkan acuan kriteria berupa nilai KKM 25%, dalam melaksanakan ujian remedial atau pegayaan 16%.

Berdasarkan uraian diatas, dalam melakukan penilaian autentik terhadap peserta didik guru masih mengalami kesulitan dan kekurangan dalam proses pembelajaran fisika di beberapa SMA Negeri kota Banda Aceh.

PENUTUP

Simpulan

Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kesulitan meng-implementasikan penilaian autentik di SMAN Sekota Banda Aceh, guru fisika masih memiliki beberapa kendala dalam masalah penilaian yang dilakukan mulai dari penilaian sikap, pengetahuan,dan penilaian keterampilan. Selain itu guru fisika juga masih kurang memilih teknik penilaian sesuai karakteristik materi pada mata pelajaran fisika dan juga kesulitan dalam membuat rencana penilaian dengan mengacu pada silabus dan rencana program pembelajaran. Dari beberapa hal tersebut, guru-guru masih mengalami kesulitan dalam penilaian autentik.

Saran

Sehubungan dengan simpulan yang telah dikemukakan diatas, berikut saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca. Pertama, selain masalah kesulitan mengimplementasikan penilaian autentik, masih banyak masalah lain mengenai kurikulum 2013 yang bisa dikaji seperti masalah perangkat pembelajaran atau masalah lainya. Kedua, dalam meneliti kesulitan-kesulitan guru meng-implementasikan penilaian autentik membutuhkan ketelitian dan kesabaran, karena objek penelitianya adalah para guru jadi kita harus bisa memastikan bahwa guru-guru tersebut memberikan data penelitian yang benar dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Agung TW.2009. Motivasi kerja guru dalam mengembangkan kurikulum di sekolah. *Jurnal pendidikan penabur 8 (13):56-63*

Arikunto, Suharsismi.2010. *Prosedur Penelitian* .jakarta: Rineka Cipta.

Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamalik O. 2008. *Manajemen dan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

……..2010. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan H. 2013. *Informasi kurikulum 2013*. Bandung Universitas Pendidikan Indonesia.

Husain A, AH Dogar, M Azeem dan A Shakoor. 2011. *Evaluasi of Curriculum Development Proce4*. *International Journal of Humanities and Social Science* (14):263-271.

Iskandar H.2013. *Desain Induk Kurikulum 2013*. Jakarta: kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Kwantolo Y. 2002. Catatn kritis tentang kurikulum berbasis kompetensi. *Jurnal Pendidikan Penabur 1 (1):106-116*

Mulyasa E.2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya

…….. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum* 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya

Parwo BK. 2009. Menjadi guru pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Penabur* 8 (13):64-70

Saragih AH. 2008. Kompetensi minimal seorang guru dalam mengajar. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED* 5(1) : 23-24.

Nasution S.2008. *Asas-asas Kurikulum*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Uno HB.2009. *Profesional Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Selvie K. 2010. Teacher's competencies *Internasional Journal of Philosophy of Culture and Axiologi* 7 (1):167-175.

Yusuf A. 2007. Kesiapan sekolah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). *Lembaran Ilmu Kependidikan* 36 (2):85-95

Yasin AF.2011. Pengembangan Kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah. *Jurnal El- QUDWAH* 1 (5):157-181.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Bahan Uji Publik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

…….. 2013a. *Materi Pelatihan Gru Implementasi Kurikulum 2013 SMP/MTs Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarata: Kementerian Pendidikan da Kebudayaan.

……2013b. *Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

……..2013c. *Pedoman Pemberian Bantuan Implementasi Kurikulum Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

……..2013d. *Pegembangan Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

kill: Axplaining Introductory Procedures and Closures, Advanced Questioning. Sydney University Press.

Widodo., A. 2004. *Videos of Lessons : A mean to understand classroom reality and resource to improve science lessons*. ISTECS, 5.

Widodo. 2012. Pengembangan Kurikulum sekolah unggulan. *Jurnal Pendidikan penabur* 11 (19):38-51.

PROSES BERPIKIR KREATIF SISWA SMP DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA BERDASARKAN TAHAPAN WALLAS DITINJAU DARI *ADVERSITY QUOTIENT* (AQ)

Oleh:
Muzani Lastri[1)], Edy Bambang Irawan[2)], Santi Irawati[3)]
Pendidikan Matematika – Pascasarjana Universitas Negeri Malang
E-mail: nizanigayo@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the process of creative thinking of lower secondary level students in solving mathematical problems by Wallas stages in terms of Adversity Quotient (AQ) students. This research was conducted in class VII SMP Negeri 2 Malang. The subjects used in this study were 1 students for each AQ category (climber, camper, quitter). Based on the results obtained by the process of creative thinking of students in preparation stage: students climber tend to understand the problem better than students camper and quitter. In incubation stage: all students climber, camper, and quitter were in brood activity. In illumination stage: all students climber, camper, and quitter attempted to find ideas to solving problems. While in verification stage: students climber tended to succeed in finding another solution, while students camper and quitter tended to be less able to finding another solution of solving the problems.

Keywords: *Creative Thinking Process, Stages Wallas, Adversity Quotient (AQ).*

****

1) Mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Matematika
2) Dosen Pembimbing I
3) DosenPembimbing II

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa SMP dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari *Adversity Quotient* (AQ) siswa. Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Negeri 2 Malang. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 siswa untuk masing-masing kategori AQ (*climber,camper,quitter*). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh proses berpikir kreatif siswa pada tahap persiapan: siswa *climber* cenderung mampu memahami masalah lebih baik dari pada siswa *camper* dan *quitter*. Pada tahap inkubasi: siswa *climber, camper,* dan *quitter* melakukan aktivitas merenung. Pada tahap iluminasi: siswa *climber, camper,* dan *quitter* menemukan ide untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap verifikasi: siswa *climber* cenderung mampu menemukan cara lain dalam menyelesaikan masalah, sedangkan siswa *camper* dan *quitter* cenderung kurang mampu menemukan cara dalam menyelesaikan masalah.

Kata Kunci: Proses Berpikir Kreatif, Tahapan Wallas, *Adversity Quotient* (AQ).

Kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan dan kehidupan yang sangat penting saat ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru dalam suatu kehidupan. Pentingnya kreativitas juga tertuang dalam kurikulum 2013. Salah satu fokus utama dalam kurikulum 2013 adalah berpikir kreatif, hal ini ditunjukkan pada tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan apektif (Permendikbud No 68, 2013). Kreativitas selalu ditekankan untuk muncul di setiap kurikulum, hal ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa sangat penting untuk diperhatikan oleh guru. Guru dituntut menggali kemampuan siswanya untuk kreatif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang diberikan.

Permasalahan di dalam dunia pendidikan kita menunjukkan kemampuan siswa berpikir kreatif masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pemecahan masalah matematika oleh siswa baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Padahal kemampuan pemecahan masalah matematika menjadi kemampuan yang penting yang harus dimiliki oleh siswa (Stecey, 2013). Salah satu penyebabnya adalah kreativitas matematika yang jarang dikembangkan di lingkungan sekolah. Lie (2004) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada pengajaran yang bersifat satu arah, verbalistik, monoton, dan hapalan. Disisi lain, jarang sekali siswa dapat memahami materi atau hanya menyelesaikan masalah dengan hafalan atau prosedur saja (Yakin, 2011).

Guru sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran harus mendukung terciptanya kemampuan siswa berpikir kreatif yang tinggi dalam memecahkan masalah. Untuk membantu siswa mengembang-kan berpikir kreatifnya dalam memecahkan masalah tentu harus diberi bantuan berupa pembelajaran yang mendukung berpikir kreatif siswa. Sehingga langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengetahui bagaimana proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan setiap

masalah yang diberikan. Dengan mengetahui proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah maka akan mempermudah proses pembelajarannya.

Berpikir kreatif sangat erat hubungannya dengan pemecahan masalah matematika (Aizikovitsh, 2004). Kwon dkk (2006) mengatakan berpikir kreatif dalam matematika sebagai kreasi dari pengetahuan yang baru dan kemampuan dalam pemecahan masalah. Seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif tidak hanya mampu memecahkan masalah-masalah non rutin, tetapi juga mampu melihat alternatif dari pemecahan masalah itu. Pemecahan masalah memiliki porsi yang besar untuk diajarkan dalam pelajaran matematika untuk melatih berpikir kreatif siswa (Wheatly dalam Munandar, 2002).

Menurut Silver (dalam Siswono, 2010), untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kreativitas dalam pemecahan masalah, umumnya digunakan tiga aspek yaitu aspek kefasihan (*fluency*), aspek fleksibilitas (*fleksibility*) dan aspek kebaruan (*novelty*). Kefasihan mengacu kemampuan memberikan banyak jawaban yang benar, fleksibilitas mengacu kepada cara-cara yang digunakan dalam memecahkan masalah, sedangkan kebaruan mengacu pada jawaban atau cara yang diberikan tidak biasa dilakukan pada tingkat pengetahuannya atau bisa juga dengan menggabungkan cara yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu cara yang baru. Dengan demikian, kegiatan pemecahan masalah yang meninjau kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kreativitas sebagai produk berpikir kreatif seseorang.

Proses berpikir kreatif merupakan gambaran nyata dalam menjelaskan bagaimana kreativitas terjadi. Siswono dan Kurniawati (2004) mengatakan bahwa untuk mengetahui proses berpikir kreatif siswa, pedoman yang digunakan adalah proses kreatif yang dikembangkan oleh Wallas karena merupakan salah satu teori yang paling umum dipakai untuk mengetahui proses berpikir kreatif seseorang. Wallas (1926) menyatakan bahwa proses berpikir kreatif meliputi empat tahap yaitu tahap persiapan (*preparation*), tahap

inkubasi (*incubation*), tahap iluminasi (*illumination*) dan tahap verifikasi (*verification*).

Pada tahap persiapan, seseorang (siswa) mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang relevan, dan mencari pendekatan untuk menyelesaikannya. Pada tahap inkubasi, seseorang (siswa) seakan-akan melepaskan diri secara sementara dari masalah tersebut. Pada tahap illuminasi, seseorang (siswa) mendapatkan sebuah pemecahan masalah yang diikuti dengan munculnya inspirasi dan ide-ide yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi dan gagasan baru. Pada tahap verifikasi, seseorang (siswa) menerapkan ide yang didapatkan pada masalah dan memeriksa solusi pemecahan masalah tersebut terhadap realitas. Pada tahap verifikasi ini, siswa memerlukan pemikiran kritis dan konvergen.

Mengingat setiap siswa memiliki kemampuan mengatasi kesulitan yang berbeda, tentu hal ini memberi dampak yang berbeda dalam proses berpikir kreatif ketika siswa menyelesaikan masalah matematika. Menurut Joel Barker (dalam Stoltz, 2000) kreativitas juga muncul dari keputusasaan. Oleh karena itu kreativitas menuntut kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh hal-hal yang tidak pasti. *Adversity Quotient* (AQ) adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan (daya juang) (Stoltz, 2000). Stoltz mengelompok-kan orang dalam 3 kategori AQ, yaitu: *quitter* (AQ rendah), *camper* (AQ sedang), dan *climber* (AQ tinggi).

Quitter merupakan kategori AQ yang menunjukkan seseorang yang kurang memiliki kemauan untuk menerima tantangan dalam hidupnya. Orang dengan kategori ini cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis saja dan cenderung pasif, memilih untuk menghindari masalah, mudah putus asa dan menyerah. *Camper* merupakan kategori AQ yang menunjukkan seseorang yang sudah memiliki kemauan untuk berusaha menghadapi masalah dan tantangan yang ada, namun berhenti karena merasa sudah tidak mampu lagi. Sedangkan *climber* merupakan kategori AQ yang menunjukkan seseorang yang memilih terus bertahan untuk berjuang

menghadapi berbagai macam hal yang akan terus menerjang, baik itu dapat berupa masalah, tantangan, hambatan, serta hal-hal lain yang tidak biasa dikerjakan.

Siswa dengan kategori AQ tinggi (*climber*) selalu berupaya memecahkan masalah dan pantang menyerah serta menggunakan segala cara untuk memperoleh solusi dari pemecahan masalah yang dikerjakan, siswa pada kategori ini cenderung sangat kreatif dalam memecahkan masalah matematika. Menurut Stoltz (2000) mereka (*climber*) bisa memotivasi diri sendiri, memiliki semangat tinggi, dan berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup. Siswa dengan kategori AQ sedang (*camper*) berupaya memecahkan masalah namun menyerah jika masalah tersebut tidak bisa lagi dikerjakan atau siswa mengalami kesulitan ditengah-tengah pengerjaannya, siswa pada kategori ini cenderung kreatif dalam memecahkan masalah matematika. Menurut Stoltz (2000) seseorang dengan AQ sedang (*camper*) bisa melakukan pekerjaan yang menuntut kreativitas dan mengambil resiko dengan penuh perhitungan, tetapi biasanya mereka mengambil jalan yang aman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa SMP dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari *Adversity Quotient* (AQ) siswa. Tujuan ini dapat dijabarkan lebih khusus yaitu untuk mendeskripsikan (1) Proses berpikir kreatif siswa *climber* dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas. (2) Proses berpikir kreatif siswa *camper* dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas. Dan (3) Proses berpikir kreatif siswa *quitter* dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif berupaya untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah yang ditinjau dari *adversity quotiens* siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Malang. Subjek dalam

penelitian ini adalah enam siswa kelas VII SMP Negeri 2 Malang tahun ajaran 2014/2015 dengan rincian 1 orang siswa *climber*, 1 orang siswa *camper* dan 1 orang siswa *quitter*. Pemilihan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Instrumen utama penelitian ini peneliti sendiri, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumber data dibantu dengan instrumen penunjang berupa angket *Adversity Quotient* (AQ), tes tertulis pemecahan masalah dan pedoman wawancara. Proses pemilihan subjek dilakukan dengan cara peneliti menetapkan kriteria pemilihan subjek yaitu menentukan *Adversity Quotient* (AQ) siswa, dengan menggunakan instrumen penunjang pertama yang berbentuk angket AQ, akan diketahui apakah siswa berada pada *quitter* (AQ rendah), *camper* (AQ sedang), atau *climber* (AQ tinggi). Subjek yang dipilih adalah siswa dengan AQ tinggi (*climber*), AQ sedang (*camper),* dan AQ rendah (*quitter*) dengan meminta pertimbangan dari guru diambil satu subjek dari masing-masing tingkatan AQ tersebut. Untuk lebih mempertajam analisis proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah, tanpa adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin siswa maka diambil seorang siswa laki-laki dan seorang siswa perempuan untuk setiap tingkatan AQ. Masalah matematika dalam penelitian ini merupakan soal *open-ended* yang memiliki banyak cara dan jawaban. Soal pemecahan masalah merupakan soal pokok bahasan pecahan kelas VII semester 1. Masalah yang diberikan adalah sebagai berikut.

Perhatikan gambar di bawah ini !

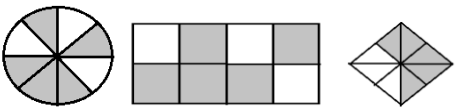

Bentuk pecahan pada gambar di atas adalah $\frac{5}{8}$.

Buatlah **dua** gambar yang menunjukkan bentuk pecahan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah $\frac{5}{8}$.

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan minimal dua tahap, yaitu data tes tulis dan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid. Proses pengumpulan data dimulai melalui pengerjaan tugas pemecahan masalah. Tes tulis pemecahan masalah diberikan kepada keenam subjek penelitian yang telah ditentukan. Setelah siswa menyelesaikan soal tugas pemecahan masalah yang diberikan, peneliti meneliti dan mencermati hasil pengerjaan tugas pemecahan masalah oleh siswa. Hasil jawaban siswa tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator berpikir kreatif yakni kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya selang beberapa hari dari siswa mengerjakan tes pemecahan masalah langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan masing-masing subjek penelitian berkaitan dengan tes hasil penyelesaian pemecahan masalah yang telah dikerjakan oleh subjek penelitian. Adapun proses analisisnya melalui tahap reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Berpikir Kreatif Siswa *Climber*

Subjek FF mewakili siswa dengan kategori AQ tinggi (*climber*) pada proses penyelesaian masalah mampu memenuhi aspek kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. FF mampu memahami masalah dan menggali informasi dari masalah dengan baik, FF juga mampu memberikan cara lain untuk menyelesaikan masalah dan memiliki ide berbeda dalam menyelesaikan masalah dengan subjek kategori lainnya. Seperti pada saat FF ingin menemukan dua pecahan yang jika dijumlahkan sama dengan $\frac{5}{8}$, subjek tidak hanya mampu menemukan pecahan dengan penyebut yang sama seperti $\frac{2}{8} + \frac{3}{8}$, namun subjek juga mampu menemukan pecahan lain dengan penyebut yang berbeda dengan cara mengurangi $\frac{5}{8}$ dengan pecahan lain yang lebih kecil dari pecahan tersebut.

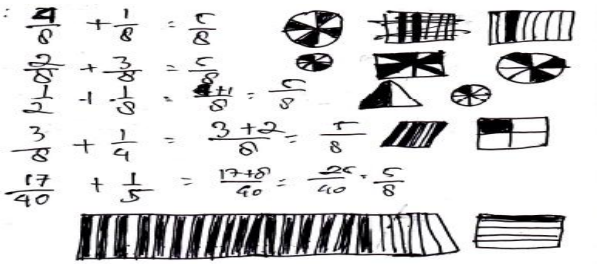

Gambar 1. Penyelesaian Masalah FF

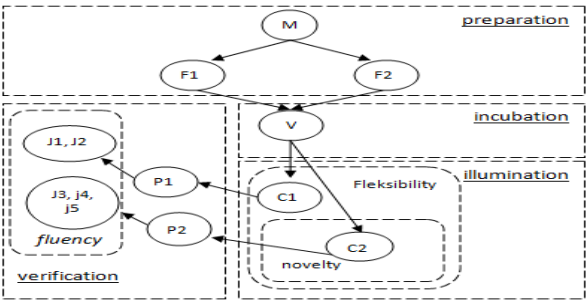

Gambar 2. Proses Berpikir Kreatif Subjek FF Dalam Menyelesaikan Masalah

Kode	Keterangan
M	Memahami Masalah
F1	Petunjuk 1, Gambar berbentuk pecahan $\frac{5}{8}$
F2	Petunjuk 2, dua gambar yang jika dijumlahkan hasilnya $\frac{5}{8}$
V	Melakukan aktivitas merenung
C1	Menemukan ide 1, memilih pecahan dengan penyebut yang sama.
C2	Menemukan ide 2, mengurangkan $\frac{5}{8}$ dengan pecahan yang lebih kecil
P1	Menerapkan ide 1, memilih $\frac{4}{8}+\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{8}+\frac{3}{8}$
P2	Menerapkan ide 2. $\frac{5}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$, $\frac{5}{8}-\frac{3}{8}=\frac{1}{4}$, dan $\frac{5}{8}-\frac{1}{5}=\frac{17}{40}$

J1	Jawaban 1, menggambar bentuk pecahan $\frac{4}{8}$ dan $\frac{1}{8}$
J2	Jawaban 2, menggambar bentuk pecahan $\frac{2}{8}$ dan $\frac{3}{8}$
J3	Jawaban 3, menggambar bentuk pecahan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{8}$
J4	Jawaban 4, menggambar bentuk pecahan $\frac{3}{8}$ dan $\frac{1}{4}$
J5	Jawaban 5, menggambar bentuk pecahan $\frac{17}{40}$ dan $\frac{1}{5}$

Merujuk proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Wallas (1926), pada tahap persiapan untuk masalah yang diberikan siswa *climber* mampu memahami masalah dengan baik. Subjek FF dapat menerima informasi dengan membaca soal dengan cermat dan teliti. Kemampuan FF dalam mengumpulkan informasi menunjukkan bahwa subjek memberikan perhatian yang baik terhadap tugas yang diberikan. informasi yang dikumpulkan bersumber dari informasi yang ada dalam masalah matematika serta dari apa yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tahap inkubasi siswa *climber* melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ada sehingga dapat menemukan konsep yang akan digunakan, siswa cenderung untuk diam sejenak dan merenung atau mengistirahatkan pikiran untuk mendapatkan ide suatu pemecahan masalah. Pada tahap iluminasi yaitu tahapan ketika siswa mulai menemukan ide yang tepat untuk dihubungkan dengan masalah, dalam menyelesaikan masalah siswa *climber* dapat memberikan jawaban yang benar secara fasih. Pada tahap verifikasi, siswa *climber* menerapkan ide dengan yakin bahkan siswa cenderung dapat menemukan cara atau jawaban yang lainnya serta mampu memberikan jawaban yang berbeda dengan jawaban siswa pada umumnya.

Siswa *climber* memiliki sikap tidak mudah patah semangat, subjek dalam kategori ini berusaha menemukan pemecahan masalah dengan mencoba memahami masalah sebaik mungkin dan menggali informasi dengan baik, pemahaman terhadap masalah tentu menjadi

tolak ukur siswa mampu atau tidak untuk menyelesaikan masalah dengan benar dan berpikir kreatif. Mereka berusaha memahami permasalahan secara keseluruhan dan menemukan petunjuk yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengaitkan dengan pelajaran yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stolzt (2000) yaitu mereka (*climber*) bisa memotivasi diri sendiri, memiliki semangat tinggi, dan berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup.

Proses Berpikir Kreatif Siswa *Camper*

Subjek EIA mewakili siswa dengan kategori AQ sedang (*camper*) pada proses penyelesaian masalah hanya memenuhi salah satu indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan. EIA dalam menyelesaikan masalah, mampu memahami masalah dengan baik, namun EIA cenderung kurang mampu menggali informasi secara mendalam dari masalah, EIA juga tidak mampu memberikan cara atau jawaban lain dari masalah, EIA tidak memahami maksud dari $\frac{1}{15}$ sampai $\frac{1}{2}$ dan tidak mengetahui ada pecahan lain yang ada antara $\frac{1}{15}$ sampai $\frac{1}{2}$. EIA hanya menggetahui pecahan $\frac{1}{15}$ dan $\frac{1}{2}$ saja, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.

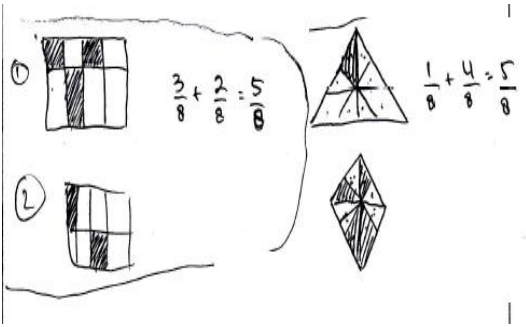

Gambar 3. Penyelesaian Masalah EIA

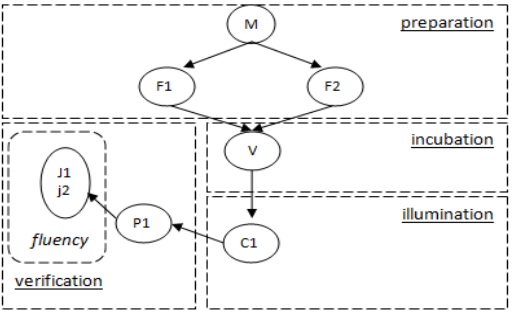

Gambar 4. Proses Berpikir Kreatif EIA Dalam Menyelesaikan Masalah

Kode	Keterangan
M	Memahami Masalah
F1	Petunjuk 1, Gambar berbentuk pecahan $\frac{5}{8}$
F2	Petunjuk 2, dua gambar yang jika dijumlahkan hasilnya $\frac{5}{8}$
V	Melakukan aktivitas merenung
C1	Menemukan ide 1, memilih pecahan dengan penyebut yang sama
P1	Menerapkan ide 1. $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ dan $\frac{1}{8}+\frac{4}{8}$
J1	Jawaban 1, menggambar bentuk pecahan . $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$
J2	Jawaban 2, menggambar bentuk pecahan $\frac{1}{8}+\frac{4}{8}$

Merujuk proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Wallas (1926), pada tahap persiapan siswa *camper* mampu memahami masalah dengan baik, namun cenderung kurang mampu menggali lebih dalam petunjuk atau informasi yang diberikan dalam masalah. siswa mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah, meski cenderung bahasa yang digunakan adalah bahasa soal.Pada tahap inkubasi, siswa *camper* melakukan aktivitas merenung, dengan bekal pemahaman dan informasi yang diperoleh sebelumnya siswa

memikirkan bentuk penyelesaian yang dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap iluminasi, siswa *camper* mampu memunculkan idenya dan menetapkan ide, meskipun ide yang diberikan cenderung sama dengan ide yang diberikan siswa lain pada umumnya. Pada tahap verifikasi, siswa *camper* menerapkan ide secara yakin dan pada umumnya benar, siswa *camper* cenderung mampu memberikan solusi lain dari penyelesaiannya. ketika peneliti bertanya apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, EIA bersedia untuk mencari solusi lain, meskipun pada akhirnya siswa cenderung menyerah karena merasa sulit untuk menemukan ide lain untuk menyelesaikan masalah.

Proses Berpikir Kreatif Siswa *Quitter*

Subjek ASN mewakili siswa dengan kategori AQ rendah (*quitter*) pada proses penyelesaian masalah hanya mampu memenuhi salah satu indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan. ASN dalam menyesaikan masalah kurang mampu memahami masalah dengan baik, ASN tidak mampu menemukan cara atau jawaban lain dari masalah dan memberikan jawaban yang salah dalam penyelesaiannya, ASN tidak mampu menemukan cara lain untuk menemukan dua pecahan yang jika dijumlahkan sama dengan $\frac{5}{8}$. ASN hanya menemukan penyelesaian dengan penyebut yang sama seperti $\frac{2}{8}+\frac{3}{8}$.

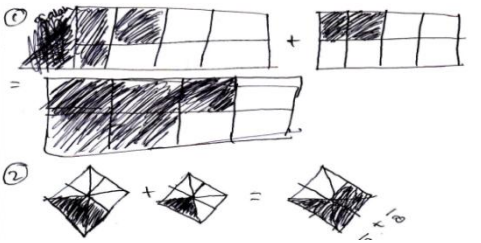

Gambar 5. Penyelesaian Masalah ASN

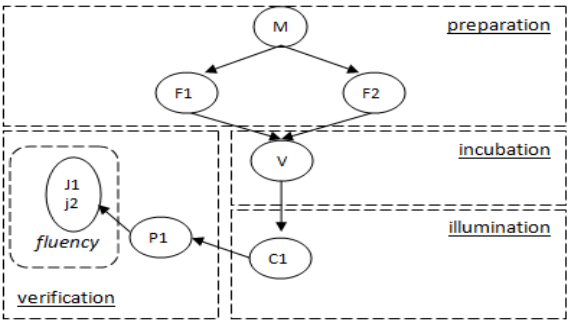

Gambar 6. Proses Berpikir Kreatif ASN Dalam Menyelesaikan Masalah

Kode	Keterangan
M	Memahami Masalah
F1	Petunjuk 1, Gambar berbentuk pecahan $\frac{5}{8}$
F2	Petunjuk 2, dua gambar yang jika dijumlahkan hasilnya $\frac{5}{8}$
V	Melakukan aktivitas merenung
C1	Menemukan ide 1, memilih pecahan dengan penyebut yang sama
P1	Menerapkan ide 1. $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$
J1	Jawaban 1, menggambar bentuk pecahan $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$
J2	Jawaban 2, menggambar bentuk pecahan $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ dengan bentuk berbeda dari jawaban 1

Merujuk proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Wallas (1926), pada tahap persiapan siswa *quitter* cenderung kurang mampu memahami masalah dengan baik, siswa hanya menggunakan informasi yang tertera di dalam masalah dan tidak bisa menggali lebih jauh dari informasi tersebut. Pada tahap inkubasi, siswa melakukan aktivitas merenung. Namun dalam perenungannya tidak terlalu berarti. Pada tahap illuminasi, siswa *quitter* menemukan ide untuk menyelesaikan

masalah namun siswa cenderung hanya menjawab untuk sekedar menyelesaikan masalah tersebut. Dengan berbekal pemahaman terhadap masalah yang kurang, siswa *quitter* cenderung tidak mampu memberikan solusi-solusi pemecahan masalah dengan benar atau ide yang diperoleh biasanya sama dengan ide yang diperoleh siswa lain pada umumnya. Pada tahap verifikasi, siswa *quitter* tidak mampu memberikan solusi lain untuk menyelesaikan masalah, dan siswa kurang bisa menjelaskan hasil penyelesaian masalahnya dengan baik.

Karakter dari siswa *quitter* terlihat pada saat wawancara, ketika peneliti bertanya apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, siswa enggan untuk mencoba dengan alasan "*sulit*" atau "*belum tahu*" dan menyerah. Hal ini disebabkan karena kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Stoltz (2000) seseorang dengan AQ rendah (*quitter*) bekerja sekedar untuk hidup, mereka mengambil resiko sesedikit mungkin dan biasanya kurang kreatif. Orang dengan AQ rendah mempunyai kemampuan yang kecil atau bahkan tidak mempunyai sama sekali, itulah yang menyebabkan mereka berhenti dan menyerah.

Dalam memecahkan masalah siswa *quitter* hanya mampu memenuhi aspek berpikir kreatif hanya sampai kefasihan saja atau bahkan tidak kreatif, siswa dalam kategori ini memiliki tingkat berpikir kreatif rendah dengan kemampuan memecahkan masalah tidak baik (*poor problem solver*). Ruggeiro (dalam Siswono, 2004) menjelaskan ciri pemecah masalah tidak baik yaitu seorang pemecah masalah yang tidak baik tidak dapat membaca suatu masalah dan memutuskan bagaimana memulai, meyakini bahwa mereka sendiri mempunyai kekurangan atau ketidakmampuan pengetahuan, bekerja loncat-loncat pada bagian masalah-masalah lain, sering tidak percaya diri, kurang kritis dan cepat puas. Hal ini sesuai dengan karakteristik *quitter* yang tidak percaya diri dan mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah (Stolzt, 2000).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan wallas dan ditinjau dari *adversity quotient*. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini.

1. Proses berpikir kreatif siswa *climber* dalam memecahkan masalah matematika adalah sebagai berikut: (a) Tahap persiapan (*preparation*), siswa mampu memahami masalah dan informasi yang diberikan dengan membaca masalah secara cermat. Subjek juga mampu menggali informasi lebih dalam dari masalah. (b) Tahap inkubasi (*incubation*), siswa cenderung diam sejenak dengan mengamati, membaca kembali dan mengingat materi yang pernah diterima untuk menemukan ide penyelesaian. (c) Tahap iluminasi (*illumination*), siswa menemukan ide yang tepat untuk dihubungkan dengan masalah, mampu memberikan jawaban yang benar secara fasih. (d) Tahap verifikasi (*verification*), siswa menerapkan ide dengan yakin dan bahkan cenderung dapat menemukan cara atau jawaban yang lainnya serta mampu memberikan jawaban yang berbeda dengan jawaban siswa pada umumnya.
2. Proses berpikir kreatif siswa *camper* dalam memecahkan masalah matematika adalah sebagai berikut: (a) Tahap persiapan (*preparation*), siswa mampu memahami masalah dengan baik, namun cenderung kurang mampu menggali lebih dalam petunjuk atau informasi yang diberikan dalam masalah. (b) Tahap inkubasi (*incubation*), siswa melakukan aktivitas merenung, dengan bekal pemahaman dan informasi yang diperoleh sebelumnya siswa memikirkan bentuk penyelesaian yang dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah. (c) Tahap iluminasi (*illumination*), siswa mampu memunculkan idenya dan menetapkan ide, meskipun ide yang diberikan cenderung sama dengan ide yang diberikan siswa lain pada umumnya. (d) Tahap verifikasi *(verification*), siswa

camper menerapkan ide secara yakin dan pada umumnya benar, siswa *camper* cenderung mampu memberikan solusi lain dari penyelesaiannya atau mau mencoba untuk mencari solusi lain meskipun pada akhirnya siswa cenderung menyerah.

3. Proses berpikir kreatif siswa *quitter* dalam memecahkan masalah matematika adalah sebagai berikut: (a) Tahap persiapan (*preparation*), siswa cenderung kurang mampu memahami masalah dengan baik, siswa hanya menggunakan informasi yang tertera di dalam masalah dan tidak bisa menggali lebih jauh dari informasi tersebut. (b) Tahap inkubasi (*incubation*), siswa melakukan aktivitas merenung, namun dalam perenungannya tidak terlalu berarti. (c) Tahap iluminasi (*illumination*), siswa menemukan ide untuk menyelesaikan masalah namun siswa cenderung hanya menjawab untuk sekedar menyelesaikan masalah tersebut. Ide yang diperoleh biasanya sama dengan ide yang diperoleh siswa lain pada umumnya. (d) Tahap verifikasi (*verification*), siswa tidak mampu memberikan cara lain dalam menyelesaikan masalah, langkah siswa dalam menyelesaikan masalah juga tidak jelas dan siswa kurang bisa menjelaskan hasil penyelesaian masalahnya dengan baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka dapat disarankan beberapa hal terkait pembelajaran matematika sebagai berikut: (1) *Adversity quotient* sangat mempengaruhi proses berpikir kreatif siswa dalam belajar matematika. Untuk itu agar peneliti dan guru dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat memberikan hasil belajar yang positif bagi siswa. (2) Guru dalam merancang pembelajaran hendaknya memperhatikan siswa dengan kategori *camper* dan *quitter*. Dengan memberikan tantangan berupa pemecahan masalah sehingga siswa *camper* dan *quitter* dapat lebih termotivasi. Hal ini juga dimaksudkan agar kemampuan siswa *camper* dan *quitter* dalam memecahkan masalah dan berpikir kreatif meningkat

dan sama dengan siswa *climber*. (3) Kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah dapat ditingkatkan dengan sering berlatih memecahkan masalah, untuk itu agar peneliti dan guru pada setiap kompetensi yang diajarkan, siswa diberi kegiatan pemecahan masalah.

DAFTAR RUJUKAN

Aizikovitsh, U. E. 2014. The Extent of Mathematical Creativity and Aesthetics in Solving Problems among Students Attending the Mathematically Talented Youth Program. *Creative Education,* Vol, 5, pp. 228-241.

Kwon, O, N., Park, J.S., & Park, J.H. 2006. Cultivating Divergent Thinking in Mathematics Through an Opend-Ended Approach. *Asia pacific Education Review,*Vol 7, pp. 51-61.

Lie, A. 2004. *Cooperative Learning, mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas*. Jakarta: Gramedia.

Munandar, Utami S. C. 2002. Kreativitas dan Keberbakatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013.

Siswono, TYE dan Kurniawati, Y. 2004. Penerapan Model Wallas untuk Mengidentifikasi Proses Berpikir Kreatif Siswa dalam Pengajuan Masalah Matematika dengan Informasi Berupa Gambar. *Jurnal Nasional "MATEMATIKA, Jurnal Matematika atau Pembelajarannya*", Tahun 2004 ISSN: 0852-7792.

Siswono, TYE. 2004. Identifikasi Proses Berpikir Kreatif Siswa dalam Pengajuan Masalah (Problem Posing) Matematika Berpandu dengan Model Wallas dan Creative Problem Solving (CPS*). Buletin Pendidikan Matematika*. Vol. 6 No. 2.

Siswono, TYE. 2010. Level of Student's Creative Thinking in Classroom Mathematics. *Educational research and review*. Vol 6, No 7, pp. 548-553.

Stacey, K. 2013. *What is Mathematical Thinking And Why is Important?*. Australia: University Of Melbourne.

Stoltz, P.G. 2000. *Adversity Quotient, Mengubah Hambatan Menjadi Peluang*. Alih Bahasa: Hermata, T. Jakarta: Grasindo.

Wallas, G. 1926. *The art of thought*. New York: Harcourt, Bruce and Company.

Yakin, M. H. A. 2011. *Diagnosis Kesulitan Siswa dalam Menyederhanakan Pecahan Aljabar dan Upaya Mengatasinya dengan menggunakan Scaffolding*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

PEMODELAN PENGGUNAAN DANA BOS TERHADAP RATA-RATA NILAI RAPOT

Oleh:
Sugiarto[1], Rezzy Eko Caraka[2]
[1] Kepala Sekolah SMAN 1 Moro, Tanjung Balai Karimun, Indonesia
[2] Department of Statistics, Diponegoro University, Indonesia
e-mail: rezzyekocaraka@gmail.cm

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dana BOS terhadap nilai rata-rata rapot siswa. Aspek dana BOS yang diperhatikan antara lain adalah pengembangan perpustakaan, pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, langganan daya dan jasa, dan membantu siswa miskin. Nilai rapot siswa merupakan salah satu indicator dalam pencapaian belajar maupun prestasi belajar. Instrumen penelitian ini adalah catatan rapot siswa, observasi lapangan dan angket siswa berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sebesar 77,33% rata-rata nilai rapot siswa (Y) dapat dijelaskan oleh variabel X_1,X_2,X_3,X_4, dan X_5 sedangkan 22,67% lain dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis.

Keywords: *BOS; Regresi Berganda; Prestasi; Pendidikan*

****

ABSTRACT

This study aimed to analyze the relationship of school operational assistance (BOS) funds to the value of the average rapport students. Aspects of BOS funds that are considered include the development of libraries, learning and extracurricular student, services, and helping poor students. Student's rapport is one indicator of the achievement of learning. The instrument of this study is rapport students and questionnaire of student's character, field notes, and observation sheets. Based analysis concludes that 77.33% the average value of rapport student (Y) can be explained by variables X_1, X2, X3, X4, and X_5, while 22.67 % are influenced by other factors outside this research. Education has an important role in creating a society that is intelligent, peaceful, open, and democratic.

Keywords: *BOS; Regression Multivaribale; Achievement; Education*

****

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan guna menjadikan manusia berkualitas dan merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat, lembaga pendidikan maupun pemerintah. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyediakan fasilitas pendidikan hingga satuan administrasi terkecil. Pemerintah juga melaksanakan wajib belajar sembilan tahun guna mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam sekolah. Pendidikan yang ditamatkan merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat atau

ijazah dari jenjang SD, SMP, SMA, dan PT. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas SDM, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pendidikan merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi pekerti). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan, bukan saja penting, bahkan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Perkembangan dunia pendidikan yang maju tidak dipungkiri menjadi kebutuhan yang primer. Selain itu pendidikan merupakan suatu usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional, pendidikan juga merupakan indikator yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia, dalam arti semakin baik pendidikan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Dengan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas maka hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pendidikan.

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri dan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor yang terdapat dalam diri siswa adalah intelegensi, motivasi, minat, bakat, kondisi fisik, sikap dan kebiasaan siswa, sedangkan yang termasuk faktor yang berasal dari luar diri siswa adalah keadaan sosial ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana, guru dan cara mengajarnya. Kemampuan ekonomi orang tua juga sangat berpengaruh tehadap prestasi belajar peserta didik. Orang tua dengan kemampuan ekonomi baik tentunya akan mampu menjamin kelancaran pembiayaan proses belajar dari putra-putrinya. Dampaknya tentunya pada kenyamanan siswa dalam belajar. Jadi dapat diasumsikan bila semakin rendah rasio siswa tidak mampu dalam suatu sekolah maka akan semakin rendah

prestasi siswa di sekolah tersebut. Namun dengan hadirnya dana bantuan operasional sekolah sekarang ini diharapkan dapat mengubah asumsi tersebut. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Lebih lanjut, tujuan utama di cetuskannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka siswa atau orang tua siswa tidak dipusingkan lagi dengan masalah-masalah pendanaan atau biaya sekolah. Sehingga pada akhirnya prestasi belajar siswa akan tercapai dengan lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Bantuan Operasional Sekolah

Dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa tujuan dari program BOS antara lain :

1) Secara umum, program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
2) Secara khusus, program BOS ini bertujuan agar murid ditingkat dasar dan menengah, yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu dapat membiayai keperluan sekolahnya, sehingga :
    a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekoah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan

nirlaba, sehingga pungutan/sumbangan tidak boleh berlebihan.

b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegitan berikut:

1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
2) Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
3) Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.
4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakulikuler, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).
5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/ penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

6) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
7) Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan barujika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
10) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
11) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll).
12) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

13) Pembelian komputer dekstop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer.
14) Jika komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah, dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran atau satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

2. Prestasi Belajar

Beberapa pendapat para ahli tentang definisi tentang belajar. Cronbach, Harold Spears dan Geoch dalam Sardiman A.M (2005:20). Cronbach memberikan definisi : "*Learning is shown by a change in behavior as a result of experience*". "Belajar adalah memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman". Harold Spears memberikan batasan: *"Learning is to observe, to read, to initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction"*Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk/arahan dan Geoch, mengatakan *"Learning is a change in performance as a result of practice"*. Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek. Belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan,

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik kalau si subyek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan demikian terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang individu dapat dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. Prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh siswa berdasarkan kemampuan belajarnya yang di nyatakan dalam nilai. Dengan nilai yang diperoleh seorang guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menerima materi yang di sampaikan, dengan begitu guru bisa mengetahui tingkat prestasi siswa apakah ada perubahan dari sebelumnya atau tidak. Dimana prestasi siswa ini dapat diukur melalui nilai dari raport selama satu semester.

3. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Jika peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.

Uji validitas menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sujarweni dan Endrayanto, 2012):

$$r_{xy} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} xy - \left(\sum_{i=1}^{n} x \sum_{i=1}^{n} y\right)}{\sqrt{\left[n\sum_{i=1}^{n} x^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x\right)^2\right]\left[n\sum_{i=1}^{n} y^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y\right)^2\right]}} \qquad (2.5)$$

Keterangan:

n = Banyaknya sampel

x = Skor masing-masing variabel pengamatan

y = Skor total

Hasil r_{xy} dibandingkan mengetahui signifikansi koefisien korelasi dengan t tabel di mana df=n-2, jika t tabel < t hitung maka instrumen pertanyaan dikatakan valid. Berikut uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui signifikansi dari koefisien korelasi (Walpole dan Myers, 2012):

a. Hipotesis

H_0 : $\rho = 0$

H_1 : $\rho \neq 0$

b. Statistik uji

$$t_{hit} = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}{}^2}} \quad (2.6)$$

c. Kriteria uji

H_0 ditolak jika $t_{hit} > t_{\alpha/2,n-2}$, dengan n adalah banyaknya sampel dalam penelitian. Jika nilai t_{hit} lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan signifikan dan dinyatakan valid.

4. Uji Reliabilitas

Sujarweni dan Endrayanto (2012) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,6 maka butir pertanyaan reliabel. Berikut formula untuk uji reliabilitas:

$$r = \left[\frac{m}{m-1}\right]\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}\sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right]$$

Keterangan:

r = Reliabilitas Instrumen

m = Banyaknya variabel

$\sum_{i=1}^{n}\sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

σ_t^2 = Varians Total

5. Analisis Regresi Berganda

Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton tahun 1886 dan diperkuat oleh Karl Pearson tahun 1903. Menurut definisi Montgomery (1992), analisis regresi merupakan teknik statistik untuk menyelidiki dan memodelkan hubungan antar variabel. Dalam mengkaji hubungan antara beberapa variabel menggunakan analisis regresi terlebih dahulu menentukan satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (Y) dan satu atau lebih variabel bebas (X). Jika ingin mengkaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tak bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi linier berganda (*multiple linier regression model*). Analisis regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Perluasan tersebut dapat dilakukan dengan penambahan variabel bebas.

Untuk memahami model regresi linier berganda digunakan model regresi yang dinyatakan dalam persamaaan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + ... + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i \quad (2.1)$$

Di mana

Y_i = variabel tak bebas untuk pengamatan ke-*i*, dimana $i = 1,2,...,n$

X_{ki} = variabel bebas ke-*k* untuk pengamatan ke-*i*,

β_0 = intersep (titik potong garis regresi terhadap sumbu y) atau nilai Y pada saat $X = 0$

$\beta_1, \beta_2, ..., \beta_k$ = kemiringan (slope) garis regresi yang menunjukkan besarnya perubahan nilai Y jika X berubah 1 unit.

ε_i = variabel error ke-*i*, diasumsikan $\{\varepsilon \sim \text{NID}(0, \sigma^2)\}$

6. Asumsi Model Regresi Linier

Delam melakukan pemodelan regresi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut

1. Normalitas

Apabila asumsi ini dipenuhi berarti data yang diambil berasal dari populasi normal yang berarti bahwa $\varepsilon_i \sim NID\ (0, \sigma^2)$. Asumsi kenormalan data diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya dengan membandingkan taraf signifikansi dari variable dependen pada output yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang digunakan. Jika taraf signifikansi dari variable dependen lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan maka data tersebut berdistribusi normal.

2. Linieritas dan Kesamaan Varian

Linieritas adalah tidak terdapatnya hubungan antara harga-harga prediksi dengan harga residual. Metode yang digunaka untuk memeriksa asumsi ini adalah dengan melihat plot residual terhadap harga-harga prediksi. Jika asumsi dipenuhi maka residual-residual akan didistribusikan secara random dan terkumpul di sekitar garis lurus yang melalui titik nol.

3. Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mendeteksi data yang ada apakah terjadi autokorelasi, artinya bahwa terjadi ketergantungan antara error yang ada, sedangkan pada asumsi kenormalan dinyatakan bahwa error (ε_i) pada variable-variabel random tidak saling berkorelasi (independen). Salah satu cara mengetahui apakah error berkorelasi atau tidak adalah dengan pengujian statistic Durbin-Watson.

4. Non Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variable-variabel bebas Xi dan yang terjadi hubungan yang cukup erat. Sehingga informasi yang dihasilkan dari variable-variabel yang saling berhubungan (kolinieritas) sangat sulit dan sulit dipisahkan pengaruhnya.

5. Uji Hipotesis dalam Regresi Linier Berganda

a. Uji Signifikansi Regresi (Uji kecocokan Model / uji F)

Hipotesis

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = 0$ (Model tidak cocok)

H_1 : Minimal ada 1 i dengan $\beta_i \neq 0$ (Model cocok)

Taraf Signifikansi

α yang sering digunakan adalah 5 % = 0.05

Statistik Uji

F =

Daerah Penolakan

Manual : H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{\alpha, k, n-k-1}$

Tabel analisis variansi regresi linier berganda

Sumber Variasi	Db	JK	KT	F_{hitung}	F_{tabel}
Regresi	K	JKR	KTR	KTR / KTS	$F_{\alpha, k, n-k-1}$
Sesatan	n – k - 1	JKS	KTS		
Total	n – 1	JKT			

b. Pengujian koefisien Regresi secara individual (Uji t)

Hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$ (Variabel tidak berpengaruh)

H_1 : Minimal ada 1 i dengan $\beta_i \neq 0$ (Variabel berpengaruh)

Taraf Signifikansi

α yang sering digunakan adalah 5 % = 0.05

Statistik Uji

t = dengan *Se (* =

Daerah Penolakan

H_0 ditolak jika $|t_{hitung}| > t_{1-\alpha/2,\ n-k-1}$

6. Ukuran Kecocokan Model dalam Regresi Linier Berganda

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai atau ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kecocokan dari suatu model regresi. Nilai R^2 menyatakan besar sumbangan variable bebas X_j terhadap variable tak bebas Y.

$R^2 = JKR / JKT = 1 – JKS / JKT$ dengan $JKT = JKR + JKS$

Sifat-sifat koefisien determinasi:

1. Merupakan besaran non negatif.
2. Batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari subjek penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap siswa kelas XI dengan banyak responden sebanyak 60.Adapun instrument penelitian sebagai berikut:

Variabel	Dimensi variabel	Indikator variabel	Pertanyaan
Dana bantuan operasional sekolah (petunjuk teknis dana BOS (2014 :16-19)	Penggunaan dana BOS (penunjang keberhasilan prestasi belajar)	• Penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan	1,2,3,4,5,6
		• Penggunaan dana BOS untuk pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	7,8,9,10,11
		• Penggunaan dana BOS untuk langganan daya dan jasa	12,13,14
		• Penggunaan dana BOS untuk membantu siswa miskin	15,16,17
		• Pengunaan dana BOS untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru	18,19,20

ANALISIS PEMBAHASAN

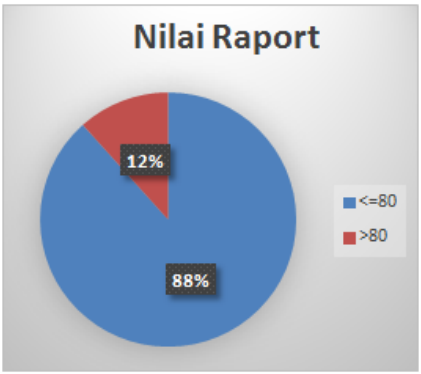

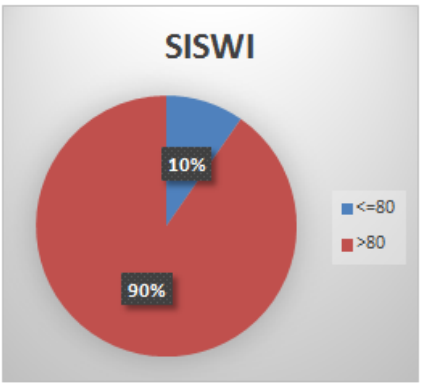

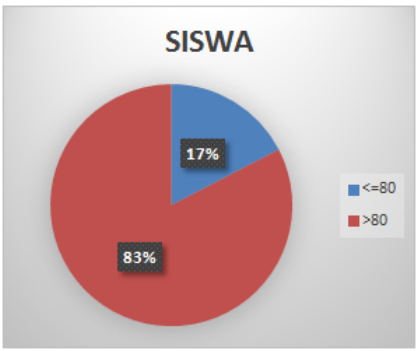

Gambar 1. Rata-rata nilai raport

Berdasarkan analisis dengan jumlah responden adalah 60 siswa dimana 32 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Dapat dilihat bahwa 88% siswa memiliki nilai raport >=80 dan 12% siswa memiliki nilai raport <80. Untuk jenis kelamin perempuan sebesar 90% memiliki nilai raport diatas 80 dan sebesar 10% perempuan memiliki nilai raport dibawah 80. Untuk Siswa sebesar 83% memiliki nilai rapor diatas 80 dan sebesar 17% memiliki nilai rapor dibawah 80. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada dibawah ini

Tabel.1 Statistika Deskriptif

Variable	Jumlah	Mean	StDev	Variance	Minimum	Median	Maximum
Siswa	32	81.531	3.436	11.805	76	81	93
Siswi	28	81.857	2.965	8.794	75	82	88

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai ragam terbesar ada pada kategori siswa yakni sebesar 11.805 hal ini terindikasi bahwa terdapat siswa yang memiliki nilai yang kecil dan nilai yang besar sehingga pada kategori ini terdapat nilai keragaman yang besar. Nilai rata-rata raport tertinggi terdapat pada kategori Siswa yakni sebesar 93 dan nilai terendah terdapat pada kategori Siswi yakni sebesar 75.

Pengujian validitas terhadap kuisioner dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana kuisioner tersebut mengukur apa yang akan diukur. Pengujian dilakukan menggunakan analisis butir dengan mengkorelasikan skor masing-masing variabel dengan skor total pada masing-masing dimensi. Variabel-variabel pertanyaan diuji validitasnya. Hasil pengujian validitas untuk tiap-tiap variabel dalam masing-masing dimensi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Korelasi *Pearson*	p-value	Kesimpulan
pertanyaan_1	-0,115	0,019	Valid
pertanyaan_2	0,176	0,008	Valid
pertanyaan_3	0,225	0,009	Valid
pertanyaan_4	-0,187	0,042	Valid
pertanyaan_5	0,378	0,001	Valid
pertanyaan_6	0,393	0,001	Valid
pertanyaan_7	0,232	0,038	Valid
pertanyaan_8	0,375	0,002	Valid
pertanyaan_9	0,526	0,000	Valid
pertanyaan_10	0,223	0,043	Valid
pertanyaan_11	0,540	0,000	Valid
pertanyaan_12	0,441	0,000	Valid
pertanyaan_13	0,504	0,000	Valid
pertanyaan_14	0,486	0,000	Valid
pertanyaan_15	-0,173	0,003	Valid
pertanyaan_16	-0,082	0,000	Valid
pertanyaan_17	0,189	0,000	Valid
pertanyaan_18	0,292	0,012	Valid
pertanyaan_19	0,341	0,004	Valid
pertanyaan_20	0,292	0,012	Valid

Berdasarkan Tabel 2, nilai p_value < alpha (0.05) dianggap valid dan apabila lebih dari alpha dinyatakan tidak valid. Untuk masing-masing variabel terhadap total skor masing-masing dimensi memiliki nilai yang beragam dan didapat semua variabel adalah valid. Setelah itu dilakukan uji reliabilitasJawaban-jawaban responden harus konsisten sehingga dapat dikatakan reliable.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Dimensi (D_i)	Nilai Alpha Cronbach	Kesimpulan
D_1	0,688	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Alpha Cronbach* untuk dimensi bernilai lebih dari 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa jawaban-jawaban responden untuk tiap-tiap pertanyaan konsisten atau reliabel. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemodelan Regresi dimana rata-rata nilai raport adalah (Y) dan X_1 adalah penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan, X_2 Penggunaan dana BOS untuk pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, X_3 Penggunaan dana BOS untuk langganan daya dan jasa, X_4 Penggunaan dana BOS untuk membantu siswa miskin, dan X_5 adalah Pengunaan dana BOS untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Sehingga didapatkan model regresi sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Asumsi

Uji Asumsi	Kriteria Pengujian	Kesimpulan
Normalitas	Hipotesis : H0: Residual tidak berdistribusi normal H1: Residual berdistribusi normal Nilai Statistika Uji : Nilai KS-Test=0,926 ; Asymp.sig=0.358 Keputusan :H0 ditolak jika nilai signifikan < α	H0 ditolak karena nilai sig (0,358)>0,05 sehingga uji asumsi normalitas terpenuhi
Linieritas	Asumsi Linieritas terpenuhi apabila data memencar disekitar angka 0 (nol) pada sumbu Y serta tidak membentuk pola atau kecenderungan tertentu	Berdasarkan Gambar.1 Asumsi Linieritas terpenuhi
Homoskedastistias	Asumsi Homoskedastistias terpenuhi jika data menyebar secara acak	Tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data bersifat homogen

Autokorelasi	Nilai dW=1,666 dengan N=60 dan K=5 Sehingga nilai dL(1,248) dan dU(1,598) du<d<4-dl 1,598<1,666<2,752	Tidak terjadi autokorelasi
Multikolinieritas	Asumsi terpenuhi apabila nilai VIF<5 VIF X_1 = 1,046 VIF X_2 = 1,653 VIF X_3 = 1,403 VIF X_4 =1,218 VIF X_5 = 1,180	Kelima variabel tersebut menghasilkan nilai VIF<5 dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi ini

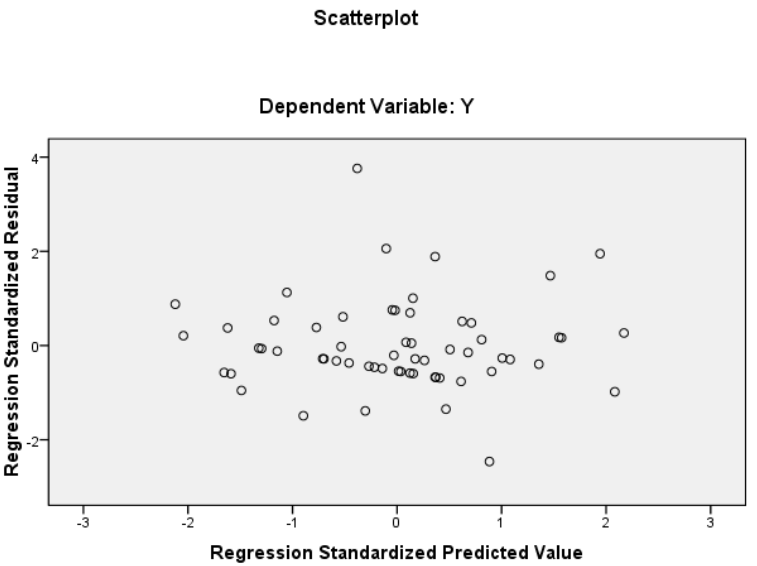

Gambar 2. Uji Linieritas

Berdasarkan analisis dengan Tabel.3 dapat disimpulkan bahwa semua asumsi terpenuhi langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi koefisien (uji-t) dan uji kecocokan model (uji-F) dapat dilihat pada Tabel.5

Tabel.5 Uji Siginfikansi dan Kecocokan Model

Uji		Keputusan	Kesimpulan
Uji-t	Hipotesis: H0 : Koefisien regresi tidak signifikan H1: Koefisien regresi signifikan Taraf Signifikansi: α=5% Statistik Uji: sig X1 = 0,000 sig X2 = 0,000 sig X3 = 0,000 sig X4 =0,000 sig X5 = 0,000	H0 ditolak jika nilai signifikan < α. Berdasarkan nilai signifikansi kelima variable tersebut memiliki nilai sig =0,000<0,005 sehingga H0 diterima	Kelima variabel tersebut signifikan sehingga dapat digunakan dalam pemodelan
Uji-F	Hipotesis: H0: Model yang digunakan tidak cocok H1: Model yang digunakan cocok Statistik uji: Nilai sig= 0.000	H0 ditolak jika nilai signifikan < α. Nilai sig= 0.000 <0,005 sehingga H0 ditolak	Moel yang digunakan cocok

Berdasarkan uji tersebut didapatkan nilai R^2 sebesar 77,33% dan model Regresi untuk melihat hubungan antara rata-rata nilai raport (Y) terhadap X_1 adalah penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan, X_2 Penggunaan dana BOS untuk pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, X_3 Penggunaan dana BOS untuk jasa, X_4 Penggunaan dana BOS untuk membantu siswa miskin, dan X_5 adalah Pengunaan dana BOS untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

$$Y = 75.0 + 0.514\ X_1 + 0.038\ X_2 - 0.006\ X_{3\,+}\ 0.220\ X_4 - 0.163\ X_5$$

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai rapot siswa dan siswi memiliki hubungan yang positif apabila dana BOS digunakan untuk penggunaan perpustakaan, pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, dan siswa miskin. Sedangkan hubungan jasa dan penerimaan siswa baru memiliki hubungan yang negative. Selain itu didapat nilai R^2 sebesar 77,33% hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata nilai rapot siswa (Y) dapat dijelaskan oleh variabel X_1,X_2,X_3,X_4, dan X_5 sedangkan 22,67% lain dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Gujarati, D. *Dasar-dasar Ekonometrika.* Alih Bahasa: Julius A. Mulyadi. Jakarta : Erlangga. 2007

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan *, Pedoman Operasional BOS provinsi Jawa Barat*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2009.

Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Press,1995.

Saroni, Mohammad. Orang Miskin Harus Sekolah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2010.

Slameto. Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Bina Aksara,Cet. I, 1988.

Sudjana, Nana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru AlGensindo,1995.

Supranto, J. *Ekonometri Buku Kedua.* Jakarta : Ghalia Indonesia.2004

Supranto, J. 2005. *Ekonometri Buku Kesatu.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

PSIKOLOGI

PEMAHAMAN KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM KELUARGA

Oleh:
Atem, Annisa Sintha Putri Nusantara, Nikodemus Niko
Program Studi Sosiologi, Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran
Jalan Bukit Dago Utara, No. 25, Bandung, Jawa Barat
Email: nicoeman7@gmail.com

ABSTRAK

Isu kekerasan seksual terhadap anak semakin marak di Indonesia. Banyak kasus yang telah terungkap dan banyak pula yang tidak terungkap. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan fenomena gunung es. Mirisnya yang menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut adalah orang-orang terdekat dari anak itu sendiri. Konteks kekerasan seksual terhadap anak belum dipahami sepenuhnya oleh orangtua, hal tersebut berpotensi dalam menyuburkan praktek kekerasan seksual terhadap anak. Penulisan paper ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan teknik studi literatur dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal ilmiah, dan media online yang relevan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Perlu dilihat sejauh mana pemahaman orang tua mengenai konteks kekerasan seksual terhadap anak. Pemahaman orangtua tersebut dapat bermanfaat sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, orangtua dengan pemahaman konteks kekerasan seksual anak yang tepat juga diharapkan dapat mentransfer pemahaman tersebut kepada anaknya agar dapat melindungi diri dari perbuatan kekerasan seksual dari orang-orang di sekitarnya. Paper ini menjelaskan konteks kekerasan seksual terhadap anak yang perlu dipahami orang tua.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Keluarga

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dewasa ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Hal ini menuntut kita untuk tidak menutup mata atas berbagai kasus yang terjadi. Di Kepulauan Riau misalnya, terdapat 38 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dicatat oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Kupulauan Riau hingga Oktober 2016.[1] Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah, baik kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia sudah mengumumkan bahwa negeri ini darurat kejahatan seksual.[2] Kasus Yuyun, anak perempuan yang diperkosa dan dibunuh menjadi bukti bahwa negeri ini darurat kejahatan seksual.[3] Padahal kejahatan seksual sudah sangat lama menjadi mimpi buruk bagi sebagian anak-anak di negeri ini. Tahun-tahun sebelumnya pun sudah banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang *ekstreem*. Seperti kasus Babe yang memutilasi beberapa anak laki-laki, yang mana sebelum dibunuh, korban disodomi secara paksa.[4]

Kekerasan seksual menurut Yowono, didefinisikan sebagai semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.[5] Lebih lanjut, Yuwono menyebutkan bentuk kekerasan seksual bermacam-macam seperti: perkosaan, sodomi, oral seks, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, dan sunat klirotis pada adank perempuan. Hal ini yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat luas, terlebih di dalam keluarga, dimana tempat yang seharusnya paling aman bagi setiap anak.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja. Faller menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual bisa saja orang dewasa dan anak-anak, tetapi adakalanya pelaku dan korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang mungkin saja sesama umur.[6] Demikian pula dengan jenis kelamin, baik anak perempuan maupun anak laki-laki memiliki kerentanan menjadi korban kekerasan seksual. Niko

menegaskan bahwa anak laki-laki yang bekerja di sektor berbahaya seperti pelacuran, memiliki kerentanan lebih besar menjadi korban kekerasan seksual.[7]

Pada tahun 2006, kasus kekerasan seksual berbentuk *incest* (berupa pemerkosaan) di Banyumas korbanya 90% adalah anak perempuan sedangkan pelakunya 100% adalah laki-laki yang merupakan orang terdekat korban (ayah, paman, kakak).[8] Sebagian besar status pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban.[9] Kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga ini lah yang berbahaya, karena korban tidak memiliki kekuasaan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua atau anggota keluarga terhadap tindak kekerasan seksual juga menjadi pemicu tumbuhnya praktik kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Eksistensi kekerasan seksual di berbagai belahan dunia sudah ada sejak berabad-abad silam. Dalam tulisannya Person mengemukakan bahwa anak-anak perempuan di Warsaw Ghetto dilacurkan untuk 'survival' kehidupan keluarga.[10] Kenyataan ini juga banyak terjadi di Indonesia. Tetapi balutan budaya masih sangat tabu membicarakan 'seks' kepada anak-anak, sehingga 'ketidak-tahuan' anak ini yang akan berpotensi menjadikan mereka sebagai korban. Bahkan sering ditemukan pekerja seks komersial, termasuk anak-anak didalamnya, lebih mendapatkan stigma dan tudingan sebagai pelaku kriminal dan orang pesakitan.[11] Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum sepenuhnya melindungi korban kekerasan seksual secara memadai.

Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, ada yang ditindaklanjuti dan ada pula yang tidak ditindaklanjuti hingga ke pengadilan. Adanya Undang-undang tentang Perlindungan Anak, tidak serta merta menjamin anak-anak memperoleh hak-hak mereka. Anak-anak Indonesia masih banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiwi.[12] Kenyataan inilah yang penting untuk diketahui setiap

orang tua, bahwa anak-anak mereka rentan terhadap tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab.

Dampak yang kemudian muncul pada anak-anak korban kekerasan seksual, kemungkinan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, dan curiga terhadap orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama.[13] Dalam penelitiannya tentang anak jalanan, Sakalasastra dan Herdiana menyebutkan bahwa anak-anak hidup di jalanan karena kemiskinan dan keluarga (WHO) menyebutkan penyebab anak hidup di jalanan karena menghindar dari kekerasan dalam keluarga).[14]

Kekerasan seksual terhadap anak masih kerap kali terjadi hingga saat ini, baik yang dilaporkan korban atau tidak. Institusi keluarga memiliki peran penting dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan pelaku kekerasan itu berasal dari keluarga itu sendiri. Oleh karena itu penting kiranya untuk memberikan pemahaman konteks kekerasan seksual anak pada lembaga keluarga dan masyarakat luas, sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di dalam keluarga. Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan konteks kekerasan seksual terhadap anak yang penting untuk diketahui setiap orang tua.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah penelitian kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif dapat menelaah secara holistik dan menyeluruh permasalahan penelitian ini, baik permasalahan yang bersifat general maupun spesifik dan kompleks. Penyajian data dalam paper ini secara deskriptif dan naratif. Metode dalam pengumpulan data melalui studi literatur, dengan menelusuri jejak fenomena mengenai kekerasan seksual anak dari berbagai media. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan media lain sesuai dengan topik pembahasan pada paper ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak-anak hingga saat ini masih menjadi generasi yang rentan mengalami tindakan kekerasan. Kekerasan yang dialami tidak hanya sebatas kekerasan fisik, namun juga secara mental atau psikologi. Beberapa tahun terakhir kekerasan anak yang sering terjadi berbentuk kekerasan seksual. Kasus-kasus yang sering muncul di media memperlihatkan bahwa kasus kekerasan seksual anak tidak hanya terjadi pada anak-anak perempuan saja namun juga banyak terjadi pada anak laki-laki.

Beberapa waktu lalu misalnya, kekerasan seksual yang sempat menghebohkan media seperti kasus Jakarta International School, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP oleh 14 orang pelaku dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan seksual lainnya. Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari sekian banyak rententan kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Oleh karena itu fenomena kekerasan seksual merupakan fenomena gungung ice *(iceberg)* terutama di Indonesia, banyak kekerasan seksual yang terjadi tidak dilaporkan sehingga data valid jumlah kasus kekerasan seksual hingga saat ini belum ada.

Kekerasan seksual anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang termasuk bentuk penyimpangan seksual, seperti pendapat Wahid dan Irfan (2001) memandang kekerasan seksual adalah istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau bentuk hubungan seksual yang menyimpang.[15] Sementara itu Lyness[16] lebih spesifik menyebutkan tindakan yang mangacu pada kekerasan seksual terhadap anak seperti tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Indonesia telah memberikan perhatian khusus terkait masalah-masalah anak, seperti dengan meratifikasi konvensi Hak Anak (*Convetion on the Right of the Child*) dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang melalui Keputusan Presiden Tahun 1990 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.[17] Semua bentuk hukum tersebut mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak.

Hingga saat ini Indonesia masih belum mampu menyelesaikan penghapusan kekerasan seksual anak karena masih cukup sulit menelusuri sumber pemicunya. Faktor-faktor terjadinya kejahatan tersebut faktor juga sangat beragam, akan tetapi yang perlu diketahui ialah setiap orang akan berpontesi menjadi pelaku kekerasan seksual anak, meminjam pemikiran Sigmund Freud tentang teori libido menurutnya setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang setiap saat menuntut untuk dilampiaskan akan tetapi manusia tidak dapat setiap saat melampiaskan nafsu tersebut karena terhalang oleh norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan dan hukum.[18] Terhalang-nya hasrat untuk melampiaskan nafsu birahi karena norma-norma yang ada semakin membuat nafsu tersebut memberotak untuk dikeluarkan sehingga sangat sulit untuk dikendalikan.[19] Orang-orang yang tidak mampu membendung nafsu tersebut akan melampiaskankan melalui berbagai cara termasuk melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Siapa saja beresiko menjadi korban kekerasan seksual, dapat terjadi dimana pun dan kapan pun. Para pelaku kejahatan kekerasan seksual anak itu sendiri tidak dapat di identifikasi begitu saja, karena setiap orang berpotensi menjadi pelaku termasuk orang tua kandung sekalipun. Permasalahan yang tak berujung ini karena cendrung pelaku adalah orang yang dikenal korban dan sangat dekat dengan korban sehingga akan menjadi tatangan sendiri dalam upaya menuntaskan akar permasalahan-

nya. Banyak kasus-kekerasan seksual menjadi tenggelam dan tidak terlaporkan karena seringkali pelakunya adalah keluarga sendiri.

Pada umumnya masyarakat atau keluarga masih beranggapan masalah tersebut sebagai aib hingga tidak jarang mereka menyembunyikan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga mereka. Pandangan tersebut tidak lain karena kejahatan seksual masih dianggap sebagai kejahatan asusila yang bernaung pada aspek moralitas semata, meskipun kekerasan seksual ini terjadi berulang dan terus menerus, banyak masyarakat yang belum memahami dan peka terhadap persoalan ini.[20]

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan seksual anak

Kejahatan seksual setiap saat dapat mengancam kehidupan anak-anak, kejahatan ini semakin diperparah karena pelakunya tidak dapat diduga atau dipastikan, namun sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui pemahaman terhadap konteks dan bentuk kekerasan seksual itu sendiri. keluarga adalah media pertama yang wajib memberikan pemahaman dan pengenalan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual oleh karenanya anggota keluarga itu sendiri juga harus mengetahui bagaimana kekerasan seksual itu, meskipun mereka juga beresiko menjadi pelaku, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga tetap menjadi pelindung utama dan media sosialisasi pertama bagi anak-anak.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak perlu diketahui sebagai upaya preventif untuk meredam terjadinya tindak kejahatan berbasis seksual tersebut. Anak-anak harus mampu memahami dan diberi pengetahuan mengenai perilaku ataupun perbuatan yang mengacu pada tindak kekerasan seksual. Selain mengenal bentuk kekerasan seksual anak, setidaknya perlu diketahui bentuk kekerasan seksual secara umum terjadi pada perempuan. Menurut Banyard, Williams & Siegel[21] menyebutkan anak perempuan lebih sering mengalami kekerasan seksual dalam

keluarga jika dibandingkan dengan anak lai-laki, karena anak perempuan lebih sering meminta pertolongan daripada anak laki-laki.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti dirangkum oleh Komnas Perempuan[22] terdapat 15 bentuk kekerasan seksual: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual seperti: pemaksaan busana dan deskriminasi perempuan lewat aturan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan sebutan pelecehan seksual, Pendapat lain mengelompokan pelecehan seksual kedalam tiga bentuk umum yakni pelecehan secara verbal berupa ucapan ataupun ungkapan yang diarahkan pelaku terhadap anak-anak sebagai korban; pelecehan seksual nonverbal adanya tindakan-tindakan atau gesture seksual yang sengahja diperlihatkan membuat anak-anak tidak nyaman; dan pelecehan seksual fisik,bentuk pelecehan yang paling fatal karena sudah terjadinya kontak fisik secara langsung. Lebih rinci jenis-jenis pelecehan seksual terhadap anak diuraikan sebagai berikut:[23]

a. Pelecehan Seksual verbal: Seperti menggoda, bercanda, berkomentar, bercerita, menyatakan, memberikan sindiran atau hal-hal yang bersifat seksual sehingga membuat lawan bicara merasa terganggu dan tidak nyaman; juga menyebarkan, memberitakan, memberitahukan atau mengarang gossip tentang kehidupan seksual sesual sesorang tanpa persetujuan orang tersebut; dan memberi komentar seksual yang tidak diinginkan tentang cara berpakaian, bentuk tubuh, atau gaya seseorang.

b. Pelecehan seksual nonverbal: Seperti menggesekkan alat kelamin ke tubuh korban; memperlihatkan gerak-gerik seksual yang tidak diinginkan; memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di depan orang lain yang tidak menginginkan; dan menatap seseorang dengan pandangan ke arah bagian tubuh tertentu secara seksual
c. Pelecehan Seksual Fisik: Seperti Pemerkosaan atau peneyerangan seksual; Meraba atau menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa seizin korban atau korban tidak dapat memberikan izin karena dalam kondisi tidur; memberikan sesuatu ke anak atau orang lain untuk mengaharapkan imbalan secara seksual; memeluk, merangkul, mencium, menepuk, dan membelai tanpa izin yang membuat korban tidak nyaman.

Thamrin dan Farid[24] memberikan beberapa contoh bentuk-bentuk kekerasan seksual yang biasanya terjadi tehadap anak-anak seperti perkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), seksual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klentit pada anak perempuan termasuk juga memperlihatkan tontonan berbentuk pornografi pada anak, eksploitasi anak-anak untuk tujuan pornografi.[25]

Kekerasan seksual anak biasanya dikategorikan kedalam dua bentuk berdasarkan identitias pelakunya.[26] *Pertama* ialah kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, kekerasan seksual ini disebut incest, yang mana korban masih memiliki hubungan darah dengan pelaku dan menjadi bagian dari keluarga inti, termasuk juga ayah atau ibu tiri. *Kedua* kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Biasanya pelaku tersebut telah dikenal oleh korban maupun keluarga dan cendrung telah telah memiliki relasi yang baik dengan sang anak. kondisi ini akan memungkinkan sang anak menjadi dekat dengan

pelaku sehingga korban mudah diarahkan pelaku kedalam situasi-situasi seksual.

Seringkali pelaku kekerasan seksual memberikan imbalan yang tidak didapatkan oleh anak untuk membujuk anak agar mau mengikuti keinginan pelaku. Hal ini sebagai modus bagi predator kekerasan seksual. Kemudian anak-anak korban kekerasan seksual akan cenderung diam setalah terjadinya tindak kekerasan seksual, hal ini dikarenakan takut orang tua marah atau orang tua sendiri kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada anak mereka, sehingga hal tersebut akan memicu pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

3. Pemahaman Konteks Kekerasan Seksual Terhadap Orang Tua

Keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Orang tua memiliki peran dan fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan anak-anak. Terjadinya fenomena kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus untuk mengembalikan peran dan fungsi keluarga secara utuh untuk mendampingi anak-anaknya. Bagaimanapun, peran keluarga merupakan yang paling utama harus diperbaiki dalam mencegah kasus kekerasan seksual semakin berkembang di Indonesia.

Pada dasarnya fungsi keluarga adalah sebagai pelindung, pemberi kasih sayang, pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan sosialisasi. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi yang tidak dapat tergantikan oleh lembaga manapun. Keluarga tidak hanya merujuk kepada kumpulan orang-orang yang tinggal bersama melainkan di dalamnya juga terdapat seperangkat hubungan sosial yang mana akan saling mempengaruhi satu sama lain. Ahmadi menyatakan bahwa perkembangan seorang anak di dalam keluarga itu sangat ditentukan oleh kondisi situasi keluarga dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya oleh orang tuanya.

E. Merrill (dalam Ahmadi) menyebutkan definisi keluarga sebagai "*in functional terms, the family may be viewed as an enduring relationship of parents and children that perfoms such functions as the proection, rearing, and socialization of children and the providing of intimate responses between its members*".[27] Dalam definisi tersebut tergambar jelas bahwa keluarga bukan saja mengenai keberadaan orang tua dan anak namun lebih dari itu bahwa keluarga merupakan tempat berbagi perlindungan, kasih sayang, sosialisasi dan terdapatnya keintiman diantara hubungan antar anggota keluarga. Sehingga menjadi wajar bahwa keluarga menjadi pondasi utama sebuah struktur sosial masyarakat yang lebih luas. Pondasi ini harus diperkuat sebagai gerbang awal pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga, tingkat stress yang tinggi, kurangnya komunikasi, kurangnya pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, tidak mendengarkan keinginan anak, kurangnya kontrol orangtua terhadap anak di lingkungan sekitar hingga kurangnya kedekatan antara orangtua dengan anak.[28]

Sebagian orangtua ternyata tidak bersikap antisipatif terhadap perlakuan yang termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual masih dianggap pembahasan tabu yang dibicarakan dalam ranah keluarga. Banyak orangtua tidak peka terhadap kondisi anaknya dan tidak membekali anaknya dengan pemahaman untuk melindungi diri dari hal-hal yang mengarah pada kekerasan seksual. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan seksual memiliki jenis yang beragam, tidak hanya sebatas sentuhan fisik melainkan juga hal-hal non fisik seperti mempertontonkan adegan seksual kepada anak. Pentingnya kemampuan orangtua dalam memahami konteks kekerasan seksual akan berdampak pada keterbukaan anak kepada orangtua

apabila anak ternyata mulai menghadapi perlakuan yang menjurus pada kekerasan seksual.

Noviana menyatakan bahwa kedekatan antara orangtua dan anak dapat sangat membantu dalam mengungkapkan apa yang dialami oleh anak.[29] Orangtua tidak boleh menjadi pihak yang tidak paham mengenai kekerasan seksual karena hal tersebut akan meminimkan kontrol terhadap anak. Pengetahuan mengenai kekerasan seksual dapat membuat orangtua lebih peka terhadap hal tersebut dan berupaya melindungi anaknya dari kekerasan seksual.

Menurut Lisdiya keluarga harus dapat menjadi sumber informasi utama bagi anak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oranglain terhadapnya. Jangan sampai media lain menjadi sumber informasi utama bagi anak, sehingga kontrol orangtua melemah dan tanpa disadari ternyata anaknya sudah menjadi korban kekerasan seksual.[30] Untuk mengawalinya, komunikasi dan keterbukaan antara orangtua dan anak sangat diperlukan. Orangtua harus menjadi sumber kepercayaan anak. Kepercayaan dari orangtua yang dirasakan anak akan memberikan arahan, bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh orangtua menjadi sinergis dan akan memudahkan anak untuk menangkap apa yang sedang diusahakan oleh orangtuanya.[31]

Mengkomunikasikan mengenai hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual kepada anak bukanlah hal mudah dan tidak dapat dilakukan sembarangan. Maria Advianti, wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa anak (usia 0-18 tahun) cukup bekali mereka informasi mengenai kesehatan reproduksi untuk dikenali dan dipahami[6.] Informasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak. Anak dapat dipahamkan secara perlahan mengenai siapa dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oranglain terhadapnya. Pencegahan dengan komunikasi yang terbuka tersebut akan

sangat efektif untuk mencegah berkembangnya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini peran orangtua jelas menjadi sumber perlindungan dan pendidikan bagi anaknya. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan orangtua untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anaknya:[32]

1. Mengajarkan dan mencontohkan kepada anak bahwa materi bukanlah segalanya. Banyak korban kekerasan seksual yang akhirnya terjerumus disebabkan oleh iming-iming materi yang diberikan oleh pelaku. Penting bagi orangtua untuk mengajarkan kepada anak untuk tidak mengukur segala sesuatu dengan materi. Menghabiskan waktu bersama anak dalam suasana yang penuh kasih sayang dapat menjadi cara untuk memahamkan anak mengenai hal tersebut.
2. Memberikan pendidikan seks kepada anak. Meski hal ini masih tabu untuk dibicarakan oleh sebagian besar orangtua namun hal ini adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenalkan seks kepada anak harus disesuaikan dengan tingkatan usia mereka. Selain itu dalam pendidikan seks ini anak harus diberi tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika ada oranglain yang menyentuh area intim anak dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik.
3. Hindari melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Tindakan kekerasan kepada anak hanya akan membuat anak menjadi takut dan tidak terbuka kepada orangtuanya.

Selama ini permasalahan dalam kehidupan keluarga terutama yang mencakup kekerasan seksual terhadap anak masuk ke dalam ruang privasi sehingga cukup sulit untuk diintervensi oleh lembaga lain. Maka dari itu, upaya pencegahan menjadi suatu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghambat berkembangnya kasus tersebut. Keluarga dapat dibina dan disosialisasikan mengenai konteks kekerasan seksual

terhadap anak sehingga mereka dapat menjadi agen pencegahan kekerasan seksual dalam keluarganya sendiri. Sosialisasi menjadi hal yang penting untuk memahamkan penyebab dan dampak kekerasan seksual terhadap anak dalam kehidupan keluarga. Pemahaman konteks kekerasan seksual kepada orangtua dapat menimbulkan suatu pengetahuan baru bagi orangtua, pengetahuan tersebut dapat menjadi dasar pembentukan nilai-nilai baru dalam keluarga yang dapat mencegah perbuatan kekerasan seksual terjadi.

Konsep sosialisasi itu sendiri menurut Soekanto dapat diartikan sebagai suatu proses dimana warga masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, menaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama dalam proses sosialisasi. Apa yang diperlakukan orangtua akan berdampak pada anak begitupun sebaliknya.[33] Proses sosialisasi ini dapat dilakukan untuk memahamkan orangtua mengenai apa sebenarnya yang termasuk perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dan apa saja dampak yang ditimbulkan jika perbuatan tersebut terjadi kepada anak.

Untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada orangtua maka peranan lembaga pemerintah sangatlah dibutuhkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghidupkan potensi kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di wilayah-wilayah. PKK menjadi lembaga yang paling dekat dengan lingkungan keluarga diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi mengenai pemahaman orangtua dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak.[34] Berikut ini beberapa upaya preventif yang dapat menjadi kontribusi PKK dalam mensosialisasikan pemahaman konteks kekerasan seksual terhadap anak:[35]

1. Menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.

2. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Orangtua didorong untuk terbuka dan dijamin kerahasiaan laporannya jika tindakan kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam keluarganya.
3. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan pemahaman konteks kekerasan seksual terhadap anak.
4. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak.
5. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak.
6. Melakukan *filter* terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan seksual terhadap anak.
7. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
8. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yan terkena kasus kekerasan seksual terhadap anak, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban.
9. Mendorong dan menfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada di lingkungannya.

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama. Keluarga menjadi pihak utama dalam mencegah hal tersebut terjadi kepada anak. Maka dari itu, orangtua dituntut untuk dapat memahami berbagai issu yang berkembang di masyarakat yang dapat

mengancam keselamatan anaknya termasuk issu kekerasan seksual terhadap anak.

CATATAN BELAKANG

[1] Anonim. *Kejahatan Seksual Anak Masih Marak di Kepualauan Riau.* Diakses tanggal 19 Desember 2016

[2] Anonim. *Perkosaan Berjamaah: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual.* Diakses 29 Desember 2016

[3] Anonim. *Kasus Yuyun Bukti Indonesia Darurat Kejahatan Seksual.* Diakses 29 Desember 2016

[4] Anonim. *Mutilasi Anak, Babe Senang Korbannya Menderita.* Diakses 29 Desember 2016

[5] yuwono, I. D. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

[6] Mather, J. H., & Lager, P. B. 2000. *Child Welfare: A Unifying Model of Practice.* USA: Thomson Learning.

[7] Niko, N. 2016. *Boy Prostitute: Kemiskinan dan Life Style.* Yogyakarta: Deepublish.

[8] Retnaningrum, D. H. 2009. Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum.* Vol. 9, No. 1. Hal. 19-28.

[9] Suyanto, B. 2013. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

[10] Person, K. 2015. Sexual Violence during the Holocaust—the Case of Forced Prostitution in the Warsaw Ghetto. *Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewis Studies.* Vol. 33, No. 2. P. 103-121.

[11] Eveline, R. 2010. Perlindungan vs Penghakiman Anak Perempuan Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Perempuan*. No. 68, Hal. 69-83.

[12] Solihin, L. 2004. Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*. No. 3, Hal. 129-139.

[13] Fuadi, M. A. 2011. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Suatu Studi Fenomenologi. *PSIKOISLAMKA, Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 8, No. 2. Hal. 191-208.

[14] Sakalasastra, P. P., & Herdiana, I. 2012. Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Kekerasan Seksual Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*. Vol. 1, No. 02. Hal. 68-73.

[15] Nainggolan, L. H. 2008. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal EQUALITY*. VOL. 13, No. 1 Hlm.73-81.

[16] Noviana, I. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*. Vol Vol. 01, No. 1. Hlm 13-28.

[17] Hidayati, N. 2014. Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 14 No. 1. Hlm. 68-73.

[18] Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

[19] Atem. 2016. *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara Yang Abai terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak*. Diakses tanggal 19 Desember 2016

[20] Anonim. *Dokumen Komnas Perempuan*. Diakses tanggal 19 Desember 2016

[21] Paramastri, I., & Supriyati, P. M. A. 2010. Early Prevention toward Sexual Abuse on Children. *JURNAL PSIKOLOGI*. V OLUME 37, NO. 1, Hlm: 1 – 12.

[22] Arrista, T. 2015. Menanti Tuntutan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal RechtsVinding Online*. Diakses tangga 20 Desember 2016

[23] Anonim. *Jenis-jenis Pelecehan Seksual*. Diakses tanggal 20 Desember 2016

[24] Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

[25] Anonim. _____. Diakses tanggal 20 Desember 2016

[26] Noviana, I. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling. *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1. Hal. 13-28.

[27] Ahmadi, Abu. (2004) *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

[28] Hasanah, U., & Raharjo, S. (2016). Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Masyarakat. *Social Work Journal, Vol.6 No.1*, 80-92.

[29] Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap anak : Dampak dan Penanganannya. *Socio Informa, Vol.1 No.1*, 13-28.

[30] Shochib, M. (2010). *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta.

[31] Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

[32] Syakrani, & Bhakti, M. S. (2005). *Kaji Tindak Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

[33] Advianti, M. (2014). *Lindungi Anak Indonesia Dari Kekerasan Seksual.* Diakses tanggal 20 Desember

[34] Lisdiya, N. 2013. *Sex Education Untuk Anak-anak, Why Not?* Diakses tanggal 20 Desember 2016

[35] Wahab, R. 2016. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Diakses tanggal 20 Desember 2016

TEKNIK

PRINSIP DASAR TATA KELOLA TIK DI PEMERINTAHAN TINGKAT NASIONAL INDONESIA

Oleh:
Rika Yuliana
Dosen Kementerian Agama RI, unit kerja UIN Ar-Raniry

ABSTRAK

Lembaga-lembaga yang bernaung di bawah pemerintahan indonesia dituntut mampu menghasilkan layanan dan kebijakan kepada publik secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan *IT governance*. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan karena beberapa kesalahan. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menjelaskan sesederhana mungkin sebagai tahap awal dalam menggali/menemukan cara memperbaiki pelaksanaan *IT governance* di pemerintahan indonesia secara nasional. Dengan memperhatikan posisi indonesia sebagai negara berkembang, perlu ada penyesuaian bagi indonesia dalam mengimplementasikan *IT governance* di pemerintahan dalam skala nasional. Ada tiga komponen utama dalam penerapan *IT governance* di Indonesia, yaitu struktur, proses dan mekanisme relasional dari *IT governance*.

****

LATAR BELAKANG

Paradigma yang muncul di benak sebagian besar masyarakat indonesia adalah indonesia sudah menerapkan *IT governance* melalui penerapan *e-goverment*. Padahal, hal ini tidak lebih dari sekedar men-digital-kan prosedur di dalam masing-masing organisasi pemerintahan karena digital transformation berbeda dengan *IT governance*. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa berdasarkan survey yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menempati peringkat EGDI (*E-goverment* Development Index) ke 116, turun 10 peringkat dari tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dalam mengimplementasikan *e-goverment*, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan asia tenggara seperti Malaysia (peringkat ke 60), Filipina (peringkat ke 70), dan Brunei Darussalam (peringkat ke 83). Disamping itu, fakta lainnya mengatakan bahwa Indonesia memiliki nilai Online Service Index (OSI) sebesar 0,3623 dan Telecommunication Infrastructure Index (TII) sebesar 0,3016, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara, yaitu 0,4598 OSI dan 0,306 TII. Meskipun demikian, Indonesia memiliki nilai Human Capital Index (HCI) yang mampu melampaui nilai rata-rata regional Asia Tenggara (0,6233), yaitu pada angka 0,6796. Hal ini mengindikasikan bahwa indonesia mampu memperbaiki aplikasi *e-goverment* beserta infrastrukturnya agar lembaga-lembaga publik yang bernaung di dalamnya dapat memberikan layanan dan kebijakan kepada publik secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. (Widowati, 2016) Sebuah riset yang dilakukan oleh Wang et all membuktikan bahwa kapabilitas tata kelola *e-goverment*, kesiapan lingkungan, dan dukungan organisasi berkorelasi positif dengan efektivitas pelaksanaan *e-goverment*. Oleh karena itu, *IT governance* menjadi hal yang penting karena memiliki peran sebagai sebagai *enabler* utama juga untuk menerapkan solusi e-government (Klischewski, 2014) sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerapan *e-goverment* di indonesia. Artikel ini mencoba menjelaskan sesederhana mungkin sebagai tahap awal dalam menggali/

menemukan cara memperbaiki pelaksanaan *IT governance* di pemerintahan indonesia secara nasional.

PENGERTIAN *IT GOVERNANCE*

Pada dasarnya, teknologi informasi berperan sebagai alat bantu yang digunakan oleh individu atau organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya baik dalam level operasional, level taktis sampai level strategis. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus berjalan beriringan dengan organisasi melalui business/IT strategic alignment. Salah satu cara untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam organisasi adalah penerapan *IT governance*. Dalam perspektif organisasi pemerintahan, *IT governance* diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memberikan layanan yang memuaskan dan kebijakan yang bernilai (mampu meningkatkan perekonomian nasional) dari investasi bisnis yang mendukung teknologi informasi. Menurut (Picazo-Vela, Gutiérrez-Martínez, Duhamel, Luna, & Luna-Reyes, 2015) *public value* tersebut mencakup efisiensi, keadilan, efektivitas, kepuasan pelanggan (masyarakat) dan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi warga negara, dan juga satu set tujuan yang lebih luas yang berkaitan dengan ekonomi dan kualitas hidup.

IT governance atau Tata Kelola IT Perusahaan merupakan *enabler* penting bagi penyelarasan bisnis dengan teknologi informasi. Keselarasan Bisnis/IT adalah konstruksi kompleks seperti yang didefinisikan oleh Henderson dan Venkatraman pada tahun 1993. Model ini menekankan pentingnya menyeimbangkan bisnis dan IT strategis dan isu-isu operasional untuk mendapatkan keselarasan. (Haes & Grembergen, 2015)

Pencapaian tingkat tinggi dari penyelarasan bisnis / TI pada gilirannya akan memungkinkan tercapainya nilai bisnis dari IT. IT dengan sendirinya tidak akan menghasilkan nilai bagi bisnis. Nilai hanya akan terwujud dengan sendirinya terhadap IT dan bisnis yang terlibat (selaras). Tantangannya masih pada tahap untuk mengukur

dan menunjukkan nilai IT. Untuk ini, pendekatan lanjutan dapat dimanfaatkan seperti menerapkan teknik balanced scorecard untuk mengukur dan mengelola penciptaan nilai dari investasi yang mendukung teknologi informasi. (Haes & Grembergen, 2015)

Pemerintah adalah salah satu aktor dalam pemerintahan. Aktor lain yang terlibat dalam pemerintahan bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan yang sedang dibahas. Di daerah pedesaan, misalnya, aktor lain mungkin termasuk tuan tanah yang berpengaruh, asosiasi petani, koperasi, LSM, lembaga penelitian, tokoh agama, lembaga keuangan, partai politik, militer, dan lain-lain. Situasi di wilayah perkotaan jauh lebih kompleks. Gambar 1 menyediakan interkoneksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan kota. Di tingkat nasional, di samping aktor di atas, media, pelobi, donor internasional, perusahaan multi-nasional, dan lain-lain mungkin memainkan peran dalam pengambilan keputusan atau dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Semua aktor selain pemerintah dan militer dikelompokkan bersama sebagai bagian dari "masyarakat sipil." Di beberapa negara selain masyarakat sipil, sindikat kejahatan terorganisir juga mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya di daerah perkotaan dan di tingkat nasional. (Sheng)

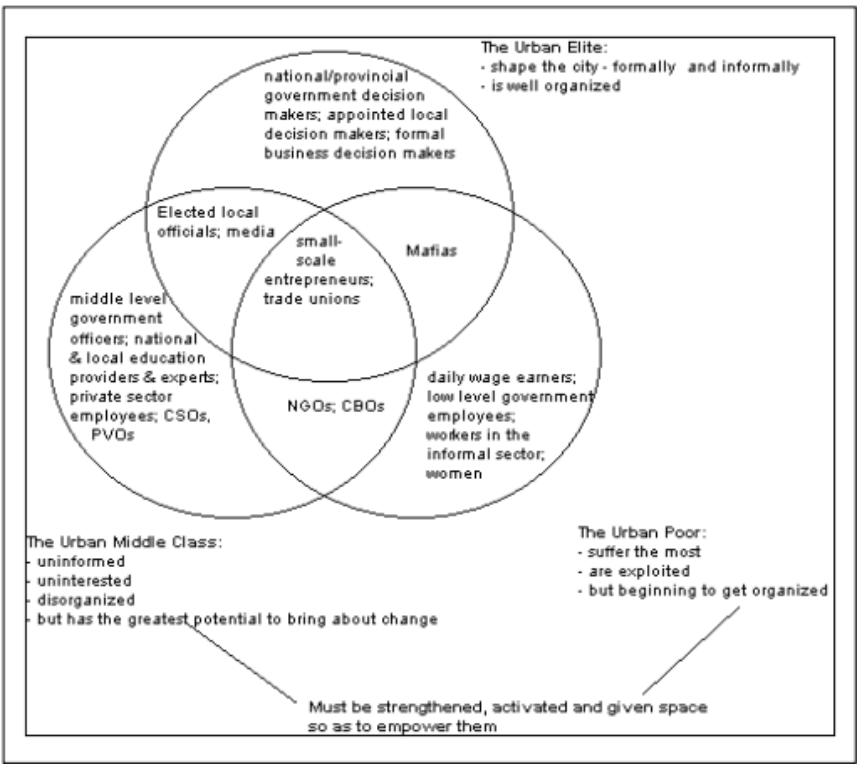

Gambar 1 Urban Actors

Tata Kelola berarti proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). Good governance memiliki 8 karakteristik utama. Karakteristik tersebuti adalah partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Tata kelola menjamin bahwa korupsi diminimalkan, pandangan minoritas diperhitungkan dan bahwa suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga responsif terhadap kebutuhan sekarang dan masa depan dari masyarakat. (Sheng).

BEST PRACTICE *IT GOVERNANCE* DI INDONESIA

Ada dua hal penting yang harus diperbaiki oleh pemerintah indonesia untuk mendukung terwujudnya peningkatan implementasi *IT governance*, yaitu birokrasi/SOP dan kebijakan/peraturan. Dalam hal birokrasi, pemerintah indonesia harus membuat proses bisnis di seluruh kementerian/lembaga sesuai dengan prinsip good corporate governance. Dengan birokrasi/SOP yang terstuktur secara clear and consice, maka pengintegrasian teknologi informasi ke dalam bidang pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Di samping birokrasi, pemerintah juga harus menjaga agar mampu memberikan kebijakan/peraturan yang reliable tanpa mengurangi fleksibilitas dari aktivitas proses bisnis di masing-masing kementerian/lembaga. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kebijakan/peraturan yang terlalu kaku dapat mengurangi inovasi/kreativitas stakeholder terkait sehingga pertumbuhan perekonomian pun ikut turut terkena dampaknya.

Kebijakan merupakan pernyataan arahan secara umum. Kebijakan menyediakan pedoman sehingga karyawan memahami batas-batas di mana mereka harus beroperasi. kebijakan yang ditulis dengan baik dapat memberikan kebebasan dalam bertindak, mendorong inisiatif, dan memfasilitasi delegasi wewenang ke seluruh bagian organisasi. Kebijakan juga mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dalam organisasi. Kebijakan menjelaskan apa dan mengapa segala sesuatu dilakukan. Kebijakan memiliki karakteristik sebagai berikut: diterapkan secara menyeluruh, jarang berubah, menjelaskan isu-isu utama operasional, disajikan dalam arti luas. Kebijakan merepresentasikan pedoman manajemen terkait situasi harus ditangani. Kerangka kerja ini memberdayakan pekerja untuk membuat keputusan dan menindaklanjutinya tanpa terus-menerus mengacu pada otoritas yang lebih tinggi.

Prosedur adalah pernyataan spesifik yang dirancang untuk memberikan arahan mengenai tindakan yang diperlukan untuk memberi dukungan terhadap kebijakan organisasi. Prosedur

menjelaskan bagaimana hal tersebut dilakukan. Prosedur memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diaplikasikan dalam lingkup sempit
2. Rentan berubah seiring perubahan sistem perasional
3. Menjelaskan proses
4. Biasanya sangat rinci. (Wallace & Webber, 2015)

Sebuah riset membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara budaya organisasi dengan performa *IT governance*, seperti: penggunaan IT yang hemat biaya, meningkatkan pertumbuhan organisasi, optimalisasi pemanfaatan aset, dan fleksibilitas organisasi terhadap perubahan. Khususnya karakteristik dari jenis budaya organisasi yang melibatkan gaya komunikasi, inovasi dan penghargaan terhadap kreativitas menunjukkan mampu mempengaruhi sebagian besar kinerja *IT governance*. (Aasi, Rusu, & Han, 2016)

Riset lainnya yang dilakukan oleh Ali et all menunjukkan bahwa etika/budaya kepatuhan dalam teknologi informasi secara signifikan mampu mempengaruhi tingkat *IT governance*. Dua faktor kontributor utama terhadap hal tersebut, yaitu: sistem komunikasi organisasi dan keterlibatan manajemen senior dalam TI. (Ali, Green, & Parent, 2009) Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang IT dan bisnis harus bekerja sama dalam semua level organisasi dalam keseluruhan proses IT Governence dengan peran dan tanggung-jawabnya masing-masing.

Scholl et all menemukan bahwa tata kelola TI perlu dibangun kembali dalam setiap kasus tunggal lintas sektor dan lintas tingkat interoperabilitas. Dari perspektif konstitusi, ini adalah informasi yang baik. Namun akan tetap diperlukan untuk memeriksa jaringan layanan elektronik (e-services) yang baru sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing untuk menegakkan "interoperabilitas demokratis." (Scholl, Kubicek, & Cimander, 2011) Hasil riset lain mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang memiliki tingkat pengetahuan tentang *IT governance* di organisasi yang lebih rendah sehingga perlu memperbaiki struktur, proses dan mekanisme relasional dari *IT*

governance yang akan mempromosikan akuntabilitas proyek TI dan berkontribusi terhadap efektivitas implementasi *IT governance* dalam organisasi tersebut. (Qassimi & Rusu, 2015) Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai framework yang terkait, seperti COBIT, ITIL, ISO 38500, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan posisi indonesia sebagai negara berkembang, perlu ada penyesuaian bagi indonesia dalam mengimplementasikan *IT governance* di pemerintahan dalam skala nasional. Ada tiga komponen utama dalam penerapan *IT governance* di Indonesia, yaitu struktur, proses dan mekanisme relasional dari *IT governance*. Dengan tingkat sumber daya manusia indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain di asia tenggara, maka tidaklah mustahil bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan implementasi *IT governance* sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi di berbagai Kementerian/Lembaga dan juga mampu meningkatkan perekonomian nasional.

WORKS CITED

Aasi, P., Rusu, L., & Han, S. (2016). The Influence of Organizational Culture on *IT governance* Performance: Case of The IT Department in a Large Swedish Company. 49th Hawaii International Conference on System Sciences: IEEE.

Ali, S., Green, P., & Parent, M. (2009). The Role of a Culture of Compliance in Information Technology Governance. *Proceedings of GRCIS (International Workshop on Governance, Risk and Compliance -Application in Information System)*. France: 1613-0073.

Haes, S. D., & Grembergen, W. V. (2015). *Enterprise Governance Of IT: Achieving Alignment and Value, Featuring COBIT5*. Switzerland: Springer International Publishing AG .

Klischewski, R. (2014). From E-Government Strategy to Services: Challenges of Inter-organizational *IT governance* in Egypt. *8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.* Portugal: DOI: 10.1145/2691195.2691257.

Picazo-Vela, S., Gutiérrez-Martínez, I., Duhamel, F., Luna, D. E., & Luna-Reyes, L. F. (2015). Interorganizational collaboration and value creation in digital government projects. *Proceedings of the 16th Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 133-139). Phoenix, Arizona: ACM.

Qassimi, N. A., & Rusu, L. (2015). *IT governance* in a Public Organization in a Developing Country: A Case Study of a Governmental Organization. *Procedia Computer Science* (pp. 450-456). doi: 10.1016/j.procs.2015.08.541.

Scholl, H. J., Kubicek, H., & Cimander, R. (2011). Interoperability, Enterprise Architectures, and *IT governance* in Government. *10th International Conference on electronic goverment.* Delft, The Netherlands: 10.1007/978-3-642-22878-0_29.

Sheng, Y. K. (n.d.). Retrieved November 22, 2016, from www.unescap.org/pdd: www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

Wallace, M., & Webber, L. (2015). *IT governance: Policies and Procedures, 2016 Edition.* New York: Wolters Kluwer.

Widowati, D. P. (2016, September 9). *Inilah Peringkat E-Government Indonesia Berdasarkan Survei PBB 2016*. Retrieved November 13, 2016, from http://bpptik.kominfo.go.id: http://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/

PELATIHAN BASIC DESIGN KAPAL UNTUK GALANGAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN SOFTWARE MAXSURF

Oleh:
Budianto*, Hariyanto Soeroso
PPNS
**E-mail: budianto.structure@gmail.com*

ABSTRAK

Untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk dari galangan tradisional yang ada, dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dibidang desain kapal. Dimana dengan dilakukannya pembuatan rencana desain kapal maka mampu diperkirakan dalam bentuk visual, bagaimana bentuk, ukuran, stabilitas, effisiensi biaya, hingga lamanya pengerjaan kapal yang akan dibangun. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan tentang basic design dengan menggunakan aplikasi maxsurf. Pemilihan penggunaan maxsurf menjadi aplikasi yang digunakan dalam pelatihan ini, karena maxsurf merupakan salah satu aplikasi dasar desain kapal, selain itu dapat digunakan untuk mendesain berbagai jenis kapal secara cepat, serta dapat digunakan untuk melihat stabilitas, konstruksi, kekuatan memanjang dan beberapa aspek desain kapal yang lain.

Kata Kunci: Galangan Tradisional, Maxsurf, Desain Kapal

PENDAHULUAN

Kawasan Tanjung Perak memiliki kondisi geografis yang mendukung untuk berkembangnya industri dibidang perkapalan, sehingga banyak tumbuh dan berkembang galangan tradisional baik yang bergerak dibidang reparasi maupun pembuatan kapal. Namun, berkembangnya galangan tradisional ini tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni. Sehingga banyak dari galangan – galangan ini, melakukan pembangunan dan perbaikan kapal hanya dengan menggunakan kemampuan otodidak, insting, dan pengalaman membangun kapal. Hal ini membuat pekerjaan mereka kurang efektif dan efisien, mereka tidak mampu memperkirakan dengan pasti, bagaimana kondisi jadi dari kapal yang mereka bangun, tidak jarang kapal yang mereka bangun mengalami trim, atau stabilitas dari kapal yang kurang baik, sehingga diperlukan penggunaan ballast tetap pada kapal, hal ini tentunnya menimbulkan komplain dari pemesan kapal. Selain itu, mereka tidak mampu memperkirakan dengan akurat lamanya pembangunan, dan juga efisiensi pembelian material yang dibutuhkan dalam membangun kapal.

Galangan tradisional membutuhkan pelatihan dan penyuluhan mengenai basic design dikarenakan banyaknya proyek baik pembangunan maupun perbaikan kapal yang mencapai 10 proyek tiap tahun dimasing-masing galangan. Dengan adanya pelatihan basic design, diharapkan galangan tradisional yang ada diwilayah Perak Surabaya, mampu mengalami peningkatan, baik segi kualitas dan kuantitas dari proyek pembangunan maupun reparasi kapal itu sendiri, karena semakin banyaknya galangan yang berkembang maka semakin banyak pula, persaingan antar galangan sehingga dibutuhkan kecepatan dan ketepatan perhitungan desain kapal. Selain itu, mereka juga dapat menekan biaya produksi dan mengurangi kesalahan dalam pembangunan maupun dalam perbaikan kapal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada basic design stage ini dikembangkan hasil dari tahap conceptual dengan menetapkan alternatif kombinasi yang jelas, sehingga pada akhirnya didapatkan gambaran utama kapal dan kecepatan servicenya, begitu juga daya motor yang diperlukan, demikian pula dengan daftar sementara peralatan permesinan. Selama basic design, perancangan kapal dikembangkan untuk mendapatkan tingkatan tertentu untuk menjamin secara teknis bahwa semua persyaratan perancangan kapal dapat terpenuhi. Dalam mendesain kapal, langkah awal dimulai dengan basic design, menentukan banyaknya tim desain, dan biaya pendesainan. berikut adalah tujuan dari fase ini:

1. Menentukan ukuran kapal dan konfigurasi keseluruhan
2. Memilih sistem utama kapal
3. Mengukur performa kapal
4. Menyaring modal dan perkiraan biaya operasi
5. Menentukan perencanaan sesuai Build Strategy

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Maxsurf profesional

Teori Maxsurf professionals merupakan sistem pemodelan 3 dimensi surface yang digunakan sebagai marine design Dimana disediakan toolbar yang sangat mudah dalam application marine design dengan optimasi dan sistematik dalam membuat design baru kapal.

Kemampuan hasil yang akurat mengenai output:

1. Lines plan bentuk lambung (hull line surface)
2. Curve of Area
3. Table offset
4. Hydrostatic
5. Transfer file ke program lain

Berikut gambar simulasi maxurf untuk kapal patrol, dimana akan memberikan hasil simulasi yang memberikan gambaran bentuk lambung dan akomodasi kapal.

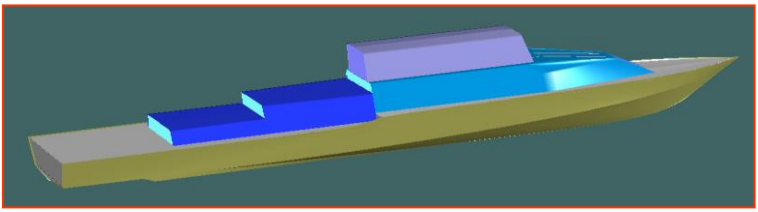

Gambar 3.1 gambar simulasi fast patrol

Sedangkan untuk memberikan gambar rencana garis pada kapal berikut ini ditunjukan rencana garis dari simulasi menggunkan sofware maxsurf, dengan diberikan data data ukuran utama sebagai berikut:

LWL	100.067	m
Beam	18	m
Draft	6.6	m
Height	12	m
Cb	0.658	
Displaced volume	7825.444	m^3

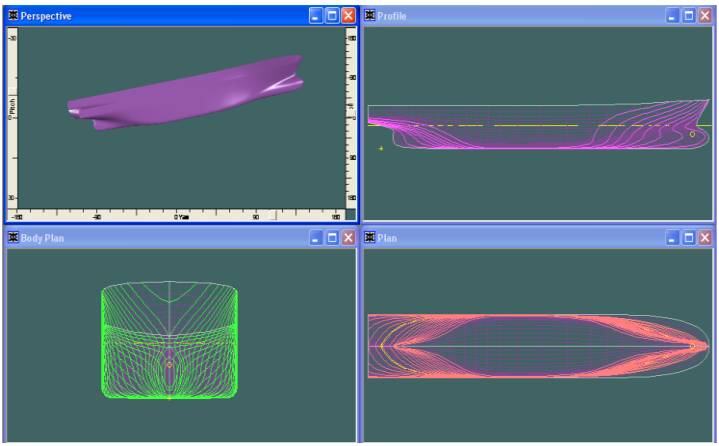

Gambar 3.2. Simulasi untuk rencana garis

KESIMPULAN

Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat disekitar galangan Perak Surabaya tersebut, dapat dirasakan dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dimana peserta penyuluhan dapat memahami basic design dalam proses pembangunan kapal kayu bangunan baru, maupun perawatan dan perbaikan kapal kayu. Disamping itu, juga dapat menerapakan prinsip dasar standart Klasifikasi dalam pembuatan, perawatan dan perbaikan kapal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Chandra, Ahmad. 2007. Gambar kerja industri. Jakarta: Sinar Jaya Lestari

[2] Santoso Adji, 2001. Gambar teknik, Jakarta

[3] Sighner, Daniel, dr. 2001. Assembly method procedure. Finland.

[4] J. Kimura and H. Shibasaki, "Recent Advances in Clinical Neurophysiology", Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, Kyoto, Japan, **(1995)** October 15-19.

BIODATA

Biodata singkat penulis 1

Nama lengkap : Budianto
Profile pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Ploso Timur No.24-A Surabaya
Nomor HP. : 08121748348

Biodata singkat penulis 2

Nama lengkap : Hariyanto soeroso
Profile pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Taman Cenderawasih 72
Rewwin Waru Sidoarjo
Nomor HP. : 08123018924

EKONOMI

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN MODERNISASI PERTANIAN DAN INDUSTRIALISASI

Oleh:
Matdio Siahaan.SE.MM
matdiosiahaan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims how to the state and the growth up of Indonesia to level up the Competition in the world especially in Asean Economic Community (AEC) of the culture.

The development objectives not only want to see change in the sense of an increase in GDP but also a change in the structure. Certain changes in terms of economic structure revolve around the accumulation (gdp development of quantitative and qualitative), in terms of allocation (gdp usage patterns), in terms of institutional (institutional economics in public life), in terms of distribution (distribution pattern of national income) Indonesia is the largest archipelago in the world, consisting of 13,677 islands.Indonesia has a large - small (new 6044 has the name of the island, including 990 islands inhabited by humans); Stretched from 60LU until 110LS along 61 146 km., has economic potential that vary due to differences in natural resources, human resources, soil fertility, rainfall (Sutjipto, 1975).

Indonesian territory covering an area of 5.19325 million km2, 70 percent (± 3,635,000 km2) consists of oceans (being a maritime nation) is strategically located because: it has a cross position (between the Asian continent and Australia), into a traffic lane of the world (between the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean) and into the lungs of the world (has the largest tropical forests).

Faced with the difficulty of communication and transport between islands (areas) for the transportation of goods and passengers; the

flow of goods is not smooth; sharp difference in price of goods; differences in educational opportunities and opportunities (field) work; all of which are potential gaps, therefore the Indonesian nation must be a hardworking man to build a more advanced Indonesia

Keyword: *Development of Goverment, GDP of People, Culture, Distributions in Indonesia as cross position (between the Asian continent and Australia.*

****

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat. Pada gilirannya pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal itulah yang akan dicoba diidentifikasikan dan dibahas dalam makalah ini ;

1. Bagaimana Pembangunan Ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional?
2. Bagaimana Strategi Pembangunan ekonomi di Indonesia?
3. Mengapa industrialisasi dijadikan sebagai alternative?
4. Mengapa pembangunan ekonomi harus berhasil?

TUJUAN

1. Memahami Pembangunan Ekonomi sebagai Prioritas pembangunan nasional
2. Mengetahui strategi yang dipakai dalam pembangunan ekonomi di Indonesia
3. Menjelaskan mengenai Industrialisasi sebagai alternatif

4. Menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi yang harus berhasil

PEMBAHASAN

A. Pembangunan Ekonomi sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

Ketika berbagai negara baru memperoleh kembali kemerdekaannya, apakah melalui perang kemerdekaan atau melalui jalan damai di meja perundingan, kemerdekaan tersebut bukan hanya menyangkut bidang politik, akan tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan dan penghidupan yang lain. Salah satu implikasi dari persepsi demikian ialah bahwa suatu negara, bangsa bebas untuk menentukan dan memilih sendiri cara-cara yang ingin ditempuhnya dalam upaya mencapai tujuan negara, bangsa yang bersangkutan.

Terlepas dari cara dan pendekatan yang dilakukan, berbagai tindakan yang diambil, termasuk kebijaksanaan dan prioritas pembangunannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Itulah sebabnya berkembang pandangan yang mengatakan bahwa suatu negara modern merupakan suatu negara kesejahteraan (welfare state). Meskipun di banyak negara industri maju konsep "negara kesejahteraan tidak lagi menonjol seperti halnya di masa-masa lalu karena biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi para warganya, kiranya masih relevan menekankan bahwa bagi negara-negara yang tergolong miskin dan sedang membangun konsep tersebut masih wajar untuk diwujudkan dan mekanisme untuk mencapai tujuan itu ialah dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan.

Siapapun akan mengakui bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang rumit karena sifatnya multifaset dan multidimensional. Karakteristik demikian merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara.Itulah sebabnya bidang-bidang yang menjadi "objek" pembangunan termasuk bidang politik, ekonomi, pertahanan dan

keamanan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan administrasi pemerintahan negara.

Akan tetapi karena berbagai faktor keterbatasan yang dihadapi oleh suatu negara bangsa seperti keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, keterbatasan daya, dan keterbatasan waktu pada umumnya suatu negara dihadapkan pada keharusan untuk menentukan skala prioritas pembangunannya. Kemampuan yang dimiliki tidak memungkinkan penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara simultan dengan intensitas yang sama.

Tuntutan dalam penentuan prioritas dalam pembangunan bagi negara-negara yang sedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi.Tuntutan demikian mudah dipahami dan diterima karena memang kenyataan menunjukan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut paling terlihat dalam bidang ekonomi. Seperti dimaklumi, berbagai ciri negara terbelakang atau sedang berkembang dalam bidang ekonomi antara lain ialah :

1. Banyaknya rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut. Memang benar bahwa berbagai negara menggunakan kriteria yang berbeda-beda tentang batas garis kemiskinan tersebut.Ada yang menggunakan pendapatan perkapita penduduk.Ada yang menggunakan konsumsi kalori 2000 unit dan protein 50 gram perhari sebagai tolak ukur yang kemudian diterjemahkan ke uang. Dewasa ini makin banyak negara yang menggunakan kriteria Bank Dunia sebagai patokan, yaitu apabila seseorang berpenghasilan sampai dengan $300 Amerika Serikat setiap tahunnya, yang bersangkutan dikategorikan sebagai orang yang hidup dibawah garis kemiskinan.
2. Di pihak lain, terdapat sejumlah kecil warga negara yang dengan standar internasional sekalipun tergolong sebagai orang yang kaya raya, terutama mereka yang menjadi usahawan pada tingkat konglomerat bahkan ada diantaranya yang menguasai perusahaan yang bersifat oligopoly. Kesenjangan antara orang-orang berada

seperti itu dengan warga masyarakat yang tergolong miskin sangat besar.Kesenjangan tersebut mengundang "bibit" kecemburuan sosial yang tidak mustahil menjurus kepada keresahan bahkan terganggunya ketertiban dan keamanan umum.

3. Produk Domestik Kotor (Gross Domestic Product) yang rendah antara lain disebabkan oleh produktivitas nasional yang rendah sebagai salah satu konsekuensi dari sumber daya manusia yang tidak terampil.
4. Tingkat pendidikan rakyat yang belum tinggi dan bahkan banyak diantara penduduk yang masih buta aksara. Seperti dimaklumi, jika pendidikan rata-rata warga masyarakat dalam suatu negara adalah lulusan Sekolah Dasar, negara tersebut digolongkan sebagai negara terbelakang.Jika pendidikan warga sudah mencapai lulusan sekolah menengah pertama, negara dikategorikan sebagai negara berkembang.Suatu negara disebut negara maju apabila pendidikan rata-rata para warganya sudah mencapai lulusan sekolah menengah atas. Meskipun pendidikan merupakan bidang diluar ekonomi, hal ini perlu diperhatikan, berkaitan langsung dengan tersedia tidaknya tenaga kerja yang terampil
5. Perekonomian yang masih bersifat tradisional, dalam arti berkisar pada kegiatan pertanian. Tingkat produktivitas pertanianpun pada umumnya rendah antara lain karena :
   a) Teknik bertani yang sudah using
   b) Penggunaan pupuk, insektisida, dan pestisida yang rendah, baik karena para petani yang tidak mengetahui cara-cara menggunakannya dengan tepat maupun karena ketidakmampuan para petani untuk membelinya.
   c) Rendahnya pengetahuan para petani tentang pertanian modern sehingga mereka sering "terpukau" hanya pada satu jenis komoditi tertentu seperti padi dan belum memahami pentingnya tekhnik yang lebih mutakhir seperti diversifikasi dan intensifikasi.

6. Kegiatan perekonomian lainnya, seperti perikanan, peternakan, holtikultura, sering hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan tidak ditujukan pada kebutuhan pasar.
7. Alhasil, kalaupun ada komoditi yang dihasilkan untuk dijual kepasaran, termasuk untuk diekspor, bentuknya masih berupa bahan mentah dan bukan berupa produk jadi. Salah satu faktor penyebabnya ialah tidak dikuasainya tekhnik-tekhnik pengolahan mutakhir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk tersebut
8. Infrastruktur yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi seperti jalan, sarana transportasi dan sarana komunikasi yang tidak memadai. Kondisi prasarana yang ada pun sering pada kondisi tidak atau kurang terpelihara.
9. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sering tidak terkendali seperti dikatakan seorang pakar ekonomi bahwa "Di negara-negara terbelakang yang kaya makin kaya dan yang miskin dapat anak" juga karena prevalennya pandangan bahwa kekayaan seseorang diukir dari jumlah anaknya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu juga terjadi karena keluarga yang tidak mampu ingin mempunyai banyak anggota keluarga yang ikut serta dalam mencari nafkah keluarga.
10. Tingkat kewirausahaan yang rendah yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
    a) Menjadi pegawai terutama di pemerintahan diapandang sebagai profesi yang jauh lebih terhormat ketimbang menjadi "pedagang"
    b) Tidak adanya modal dan sulitnya memperoleh kredit
    c) Keengganan mengambil risiko
    d) Lokus of control yang bersifat eksternal dalam arti terdapatnya persepsi bahwa "nasib seseorang tidak berada di tangan sendiri melainkan ada kekuatan diluar dirinya yang mengaturnya"
    e) Tidak dimilikinya kemahiran dalam berbagai fungsi manajerial seperti produksi, pemasaran, promosi, dan keuangan

Dengan perkataan lain, penduduk miskin di negara-negara terbelakang dihadapkan kepada "lingkaran setan" yang mengandung komponen sebagai berikut :

1. Pendapatan perkapita yang rendah
2. Yang berakibat pada ketidakmampuan menabung
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal (no capital formation)
2. Tidak terjadinya pemupukan modal berarti tidak adanya investasi
3. Tidak adanya investasi, berarti tidak terjadinya perluasan usaha
4. Tidak adanya perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja
5. Sempitnya kesempatan kerja, berarti tingginya tingkat pengangguran
6. Pengangguran berarti tidak adanya penghasilan
7. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesernya posisi seseorang dibawah garis kemiskinan

Situasi seperti ini yang dihadapi oleh sebagian besar warga negara secara individual pasti tercermin pada perekonomian secara makro atau pada tingkat nasional.

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Kiranya mudah untuk menerima pendapat bahwa tidak ada satu pun strategi pembangunan ekonomi yang cocok digunakan oleh semua negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan materiil para warganya. Dikatakan demikian karena strategi yang mungkin dan tepat ditempuh dipengaruhi oleh banyak faktor seperti : (a) persepsi para pengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang berkaitan dengan slfat keterbelakangan yang dihadapi oleh masyarakat, (b) luasnya wilayah kekuasaan negara, (c) jumlah penduduk, (d) tingkat pendidikan masyarakat, (e) topografi wilayah kekuasaan negara —apakah negara kepulauan atau daratan *(landlocked country)*—, (f) jenis dan jumlah kekayaan alam yang dimiliki, dan (g) sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Berbeda halnya dengan beberapa dekade yang lalu, dewasa ini kategorisasi negara-negara terbelakang dan sedang membangun sudah berbeda berkat pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini, Kategorisasi dimaksud ialah: (1) Negara-negara terbelakang yang masih ditandai oleh perekonomian yang agraris sifatnya. (2) Sebaliknya negara-negara yang sedang berkembang ada yang sudah mulai melakukan industrialisasi meskipun baru pada tahap permulaan dengan objek-objek yang masih saugat terbatas seperti di bidang agrobisnis. (3) Befaerapa negara sudah digolongkan sebagai *"Newly Industrializing Countries "—NIC s*—karena tahap industrialisasinya sudah demikian jauh sehingga banyak sektor perekonomian yang sudah menerapkan teknologi tinggi. Di Benua Asia, khususnya, negara-negara tersebut terakhir ini adakalanya dikenal dengan istilah "Macan Asia" seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Dengan menyimak kategorisasi seperti dikemukakan di atas dan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dihadapi, dapat disimpulkan adanya dua bentuk strategi pembangunan yang biasa ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang ialah modernisasi pertanian dan industrialisasi.

Modernisasi Pertanian. Pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang paling sedikit dari dua sisi.Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan.Sisi kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai komiditi untuk ekspor.

Mengenai sisi yang pertama —yaitu pemuasan kebutuhan dalam negeri sendiri— dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: Yang ingin dihilangkan ialah ketergantungan suatu negara kepada negara-negara lain untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhannya. Menghilangkan segala bentuk ketergantungan merupakan sasaran yang sangat penting karena apabila tidak, akibatnya dalam berbagai bidang lain seperti bidang politik, persenjataan, pinjaman luar negeri, teknologi, dan berbagai bidang lain pasti immcul. Dalam kaitan itulah

mengapa sebagian besar negara-negara terbelakang dan sedang membangun pernah terlibat dengan apa yang dikenal sebagai "revolusi hijau" *(green revolution).*Seperti dimaklumi, revolusi hijau pada dasarnya bertitik tolak dari dan berorientasi pada peningkatan produksi bahan pangan. Semangat tinggi untuk terlibat dalam revolusi ini didorong oleh keinginan kuat dari negara-negara tersebut untuk paling sedikit mengurangi ketergantungannya pada negara-negara lain untuk penyediaan bahan pokok tersebut dengan sasaran akhir swasembada. Hasilnya memang sangat menggembirakan bahkan dapat dikatakan mengaguinkan. Ada beberapa negara yang demikian suksesnya melaksanakan revolusi tersebut sehingga negara-negara yang tadinya harus mengimpor sebagian bahan pangan yang dibutuhkannya, dapat mencukupi kebutuhannya dan bahkan ada yang sudah mampu mengekspornya ke negara lain. Akan tetapi meskipun demikian, masalah yang dihadapi di sektor pertanian cukup banyak dan rumit.

Pernah disinggung bahwa struktur perekonomian dari negara-negara terbelakang bersifat agraris sentris.Hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduk adalah masyarakat tani yang pada umumnya tinggal di daerah pedesaan.Telah dicatat pula bahwa sebagian petani tersebut masih menggunakan cara-cara bertani yang tradisional karena cara-cara itulah yang sudah mereka kuasai dan diwarisinya secara turun-temurun dari nenek inoyang mereka. Cara-cara demikian terbukti tidak produktif antara lain karena (a) bibit yang digunakan tidak tinggi mutunya, (b) cara mengolah tanah yang kurang *baik,* (c) sistem irigasi yang tidak memadai, (d) penggunaan pupuk yang terbatas pada pupuk alami, (e) kurangnya penggunaan insektisida dan pestisida untuk memberantas hama, dan (f) kegiatan pasca panen yang berakibat pada tidak sedikitnya hasil produksi yang terbuang.

Faktor-faktor itulah yang menuntut harus terjadinya modernisasi pertanian. Dalam kaitan ini hams ditekankan bahwa hambatan yang sering dihadapi dalam modernisasi pertanian bukan semata-mata masalah penguasaan teknik bertani secara mutakhir. Bukan pula hanya karena kemampuan ekonomi yang rendah. Yang

jauh lebih penting untuk mendapat perhatian ialah menemukan cara yang paling lepat untuk merubah sikap mental dari para petani tersebut.

Para pakar pertanian sering mengemukakan paling sedikit tujuh hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya modernisasi pertanian.

Pertama: Memperkenalkan cara bertani yang modern seperti penggunaan mesin-mesin yang sesuai dengan topografi wilayah pertanian tertentu. Misalnya traktor dalam pengolahan tanah, alat penuai masinal, dan alat penyemprot hama. Hal'ini sering dikenal dengan istilah mekanisasi pertanian.

Kedua: Menggunakan bibit unggul yang telah dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pertanian dan telah terbukti membuahkan hasil yang jauh lebih inemuaskan dibandingkan dengan bibit yang selama ini dikenal oleh para petani. Pada dekade enam puluhan dan tujuh puluhan, misalnya, di sektor pertanian padi, ditemukan dan dikembangkan PB5 dan PB8 oleh *"International Rice Research Institute"* di Los Banos, Filipina yang ternyata menghasilkan padi dalam jumlah yang jauh lebih besar per hektar dibandingkan dengan bibit-bibit yang biasa digunakan oleh para petani di berbagai negara Asia. Dewasa ini upaya untuk menemukan dan mengembangkan varietas unggul lain terus berlanjut sebagai bagian dari revolusi hijau tersebut di muka yang memungkinkan hasil pertanian lebih besar lagi.

Ketiga: Penggunaan insektisida dan pestisida untuk memberantas hama yang sering merusak tanaman dan pada gilirannya menurunkan produksi hasil pertanian. Ternyata melakukannya jauh lebih sulit daripada membicarakan. Para petani di negara-negara agraris menghadapi paling sedikit tiga jenis masalah dalam kaitan ini, yaitu: (a) kemampuan ekonomi yang rendah yang tidak memungkin-kan mereka untuk secara mudah menyisihkan dana untuk membeli obat-obat tersebut dan oleh karena itulah pemerintah di berbagai negara berkembang memberikan subsidi kepada para petani, (b) para

petani sering kurang pengetahuan tentang manfaat penggunaan dan pemerintah berusaha untuk menyediakan tenaga-tenaga penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani tersebut, dan (c) juga ternyata bahwa hasil pertanian menjadi terkontarainasi dengan bahan-bahan pemberantas hama yang pasti tidak baik untuk kesehatan manusia.

Keempat: Penggunaan sistem irigasi yang lebih baik agar tanaman meinperoleh air yang diperlukannya untuk tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Masalah irigasi pun bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Masalah irigasi bukanlah masalah yang berdiri sendiri akan tetapi berkaitan dengan masalah erosi, penebangan kayu di hutan secara tidak bertanggung jawab, berkembang pesatnya penduduk yang memerlukan lebih banyak lahan untuk pemukiman dan bahkan juga "terambilnya" tanah pertanian yang produktif untuk kepentingan industri, bahkan juga untuk kegiatan olahraga kaum mapan seperti golf, Akan tetapi terlepas dari itu, sistem irigasi tetap merupakan aspek penting dari modernisasi pertanian.

Kelima: Penggunaan pupuk yang lebih intensif. Berbagai jenis pupuk, termasuk pupuk kimiawi dan pupuk alam, diperlukan baik untuk kepentingan mempertahankan kesuburan tanah maupun untuk meningkatkannya.Masalah kemampuan ekonomi dan sikap timbul lagi dalam hal ini seperti tampak pada segi-segi lain dari modernisasi pertanian.

Keenam: Intensifikasi pertanian. Jika hal-hal yang telah disinggung di muka terlaksana dengan baik, salah satu hasilnya ialah dimungkinkannya intensifikasi. Pada, dasarnya intensifikasi berarti pertanian yang meningkatkan produktivitas tanah —per hektar misalnya— dengan tetap menanam satu jenis tanaman andalan tertentu, apakah itu tanaman pangan untuk konsumsi dalam negeri atau tanaman lain untuk diekspor.

Ketujuh: Diversifikasi dan ekstensifikasi. Kiranya telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi dan ekstensifikasi

pertanian ialah upaya yang sistematik untuk menganekaragamkan jenis-jenis tanaman pertanian dan tidak terpukau hanya pada satu tanaman andalan.Sasarannya pun ber-macam-macam seperti penyuburan tanah, peningkatan produktivitas, dan peningkatan penghasilan para petani.

Di muka telah disinggung bahwa masalah modernisasi pertanian tidak hanya berkisar pada posisi ekonomi para petani yang rendah yang tidak serta merta memungkinkan mereka menggunakan pupuk, obat hama, dan mekanisasi pertanian. Masalah-masalah tersebut memang merupakan masalah nyata.Akan tetapi tidak kalah pentingnya ialah mengatasi masalah rendahnya pengetahuan dan keterampilan pertanian modern, yang pada umumnya mengarah kepada masalah sikap mental yang berkisar pada kecenderungan menolak perubahan. Empat masalah yang tampaknya menonjol ialah:

1. Masalah tradisi dan adat istiadat yang demikian mengakarnya sehingga menjadi penghalang bagi peningkatan produktivitas pertanian. Yang dimaksud ialah bahwa pada umumnya di negara-negara terbelakang dan sedang membangun, tanah milik seseorang dipandang sebagai wujud kekayaan dan simbol status yang sangat penting. Demikian pentingnya status tanah sebagai wujud kekayaan seseorang sehingga suatu keluarga akan berupaya keras agar tanah yang dimilikinya jangan sampai berkurang dan bahkan jika mungkin bertambah. Orang tua tidak akan puas jika tidak mewariskan sebidang tanah kepada anaknya yang sudah menikah. Memang luas tanah milik seseorang akan kecil karena orang tua mewariskan tanah miliknya kepada semua anak-anaknya. Berkurangnya luas tanah yang dimiliki dianggap sebagai hal yang wajar. Akan tetapi terdapat satu implikasi pewarisan tanah yang tidak menguntungkan bagi modernisasi pertanian, yaitu sulitnya melakukan mekanisasi pertanian yang merupakan salah satu sebab turunnya produktivitas pertanian.
2. Harus diakui bahwa hasil pertanian —temiasuk hasil perkebunan, perikanan, dan peternakan— untuk ekspor dari negara-negara

terbelakang dan sedang membangun sebagian besar merupakan komoditi lemah dalam pasaran internasional dan sering tidak mampu bersaing dengan negara-negara maju yang juga mengekspor produk pertaniannya. Misalnya, dengan ditemukannya karet sintesis, karet alam menghadapi persaingan yang sangat berat di pasaran internasional. Demikian juga halnya dengan kopra dan kelapa sawit *(Crude Palm Oil—CPO)* yang merupakan bahan baku utama untuk berbagai jenis produk jadi seperti minyak goreng, mentega, sabun, dan lain-lain, Seperti dimaklumi, kini terdapat bahan baku substitusi untuk membuat produk-produk tersebut. Untuk minyak goreng dan mentega, misalnya, kacang-kacangan dan biji-bijian makin banyak digunakan. Produknya bahkan makin disukai banyak orang karena kandungan lexnak dan kolesterol yang lebih rendah ketimbang kopra d.an kelapa sawit. Sabun pun makin banyak berupa detergen. Oleh karena itu, meskipun secara kuantitatif para petani dapat meningkatkan produktivitasnya, tidak .dengan sendirinya berakibat pada peningkatan penghasilan riil para petani. Mereka dihadapkan kepada masalah peningkatan mutu dan pengetahuan tentang pemasaran karena hanya dengan demikianlah produk tersebut dapat dipasarkan, baik di dalam negeri dalam rangka swasembada mau-pun untuk kepentingan ekspor.

3. Kalaupun para petani bersedia untuk merubah sikap dan caranya bertani, mereka menghadapi kendala dalam bentuk ketidakadaan modal yang diperlukan untuk modernisasi pertanian. Memang benar di berbagai negara terdapat lembaga keuangan dan perbankan tempat di mana para petani dapat meminta kredit, Akan tetapi memperoleh kredit bukanlah hal yang mudah dan sederhana karena sebagai organisasi yang mencari laba, lembaga tersebut ingin memperoleh kepastian bahwa kredit yang diberikan akan kembali pada waktunya, dalam arti pinjaman dan bunganya. Seperti dimaklumi, bank pada umumnya menggunakan

lima "C" dalam mempertimbangkan mengabulkan atau tidak pennohononan kredit dari para nasabahnya —temiasuk para petani—yaitu *Capital, Character, Capability, Condition,* dan *Collateral,* Di sainping itu, para petani pada umumnya belum "bank-minded." Pemerintah memang membantu dalam mengatasi pennasalahan ini, antara lain melalui pemberian subsidi dan kebijaksanaan , perkreditan yang ditujukan untuk mempermudah para petani memperoleh kredit, seperti misalnya meniadakan keharusan memberikan agunan *(collateral),*

4. Sering di negara-negara terbelakang dan sedang berkembang tuan tanah menguasai areal tanah pertanian yang luas sedangkan para petani hanya sekedar sebagai penggarap. Di samping itu, para tengkulak yang pada umumnya terdiri dari para pedagang besar hasil pertanian yang tinggal di kota memaksakan sistem ijon. Jelas bahwa kedua sistem tersebut sangat merugikan para petani. Untuk menghilangkan atau paling scdikil mengurangi dampak negatif dari kedua sistem tersebut, hampir semua negara terbelakang dan sedang berkembang melaksanakan *landreform.* Seperti diketahui dua sasaran utamanya ialah: (a) membatasi jumlah areal tanah yang dimiliki oleh seseorang, dan (b) agar para petani memiliki tanah yang memungkinkannya memperoleh penghasilan yang wajar dari kegiatan pertanian yang ditekuninya.

INDUSTRIALISASI SEBAGAI ALTERNATIF

Industrialisasi merupakan alternatif lain yang dapat ditempuh dan memang ditempuh oleh negara-negara terbelakang dan sedang berkembang. Dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi perlu diketahui berbagai masalah yang harus dipecahkan, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagian besar penduduk terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki keterampilan teknis yang dituntut oleh proses industrialisasi karena kalau pun mereka memiliki keterampilan tertentu, terbatas pada keterampilan bertani secara tradisional.

2. Karena latar belakang pendidikannya, tidak banyak orang yang memiliki kterampilan manajerial, baik yang bersifat umum maupun yang fungsional seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen promosi, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen logistik dan lain sebagainya.
3. Sangat terbatasnya modal yang mutlak diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan roda orgnisasi niaga. Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah adanya sekelompok kecil warga masyarakat yang menguasai sebagian besar modal dan sarana produksi lainnya.
4. Tingkat kewirausahaan yang sangat rendah dikalangan mereka yang bergerak dalam kegiatan bisnis, antara lain karena adanya pandangan bahwa "berdagang" tidak menempati skala teratas dalam kehidupan kekaryaan seseorang.
5. Tidak dikusainya keterampilan teknis oleh sebagian besar warga masyarakat padahal industrialisasi di samping bersifat padat modal juga menggunakan teknologi canggih karena hanya dengan demikianlah dunia usaha dapat menciptakan dunia usaha dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

Adanya berbagai masalah tersebut tidak berarti bahwa negara-negara terbelakang dan sedang membangun tidak usah mempertimbangkan jalan industrialisasi untuk membangun ekonominya.Adanya berbagai masalah tersebut hanya berarti bahwa para pengambil keputusan kunci dalam pembangunan ekonomi harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

Orientasi Industrialisasi. Suatu negara yang ingin mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada umumnya menempuh "jalur" industrialisasi.Orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi, yaitu orientasi produk berbagai barang dan jasa untuk konsumsi di dalam negeri dan orientasi ekspor. Sektor-sektor perekonomian yang dapat digarap tergantung antara lain pada terpecahnya atau tidaknya masalah-masalah yang telah di-

identifikasikan di atas. Secara teoretis, sektor-sektor itu antara lain ialah :

Sektor ekstraktif atau barang tambang seperti batu bara, minyak dan gas bumi, emas, timah, perak, uranium, dan lain-lain, Sektor otomotif, baik dalam arti kendaraan niaga maupun yang lainnya seperti sedan dan sepeda motor,Sektor transportasi,Sektor komunikasi,Sektor teknologi informasi,Elektronika,Sektor pariwisata, Sektor perhotelan, Jasa perbankan, Agrobisnis, Dll.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, proses industrialisasi tidak harus ditempuh sendiri oleh pemerintah dan dunia usaha di negara yang bersangkutan.Memang benar bahwa sangat ideal jika hal itu ditempuh. Akan tetapi jika ternyata kemampuan untuk melakukannya belum mencukupi, berbagai cara yang dapat ditempuh antara lain ialah :

a. Mengundang kehadiran korporasi multinasional,
b. Mendorong penanaman modal asing,
c. Mendirikan usaha-usaha patungan,
d. Menngimpor teknologi canggih, dan
e. Memperkerjakan tenaga ahli asing untuk menangani berbagai kegiatan yang belum dapat ditangani sendiri.

Dengan demikian, proses industrialisasi dapat dipercepat dan berhasil karena produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasaran lokal, regional, dan global. Akan tetapi kiranya jangan dilupakan bahwa dengan tersedianya jalur seperti di atas pun, langkah-langkah untuk akselarasi pengembangan kemampuan sendiri harus diambil.

Pentingnya "Human Invesment".Betapapun kayangya suatu negara dalam arti sumber daya alamnya yang mungkin melimpah, aspek terpenting yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusia. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa "*other resoures make things possible, but only human resoures make things happen*". Pentingnya sumber daya manusia sebagai unsur yang paling strategis dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, secara khusus disoroti dalam karya tulis ini bukan karena sumber daya dan

dana lainnya kurang penting, akan tetapi karena efektivitas sumber daya dan dana itu ditentukan oleh unsur manusia yang menglaola dan menggunkannya. Itulah sebebnya pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan harus dilihat sebagai *sine qua non* bagi keberhasilan pembangunan.

Theodore Shultz, seorang ahli ekonomi pembangunan terkenal dari Universitas Chicago, yang pernah mengatakan bahwa tiga faktor utama yang menjadi penyebab mengapa proses pembangunan ekonomi di negara-negara terbelakang tidak berlangsung secepat yang diharapkan ialah:

1. Adanya sikap mental yang menolak perubahan yang melanda sebagian besar warga negara baik di bidang pertanian maupun di bidang-bidang lainnya. Akibatnya ialah meskipun alternatif pembangunan ekonomi yang dipilih adalah moderenisasi pertanian, produktifitas para warga tetap rendah karena tidak mau mengubh cara-cara bertani yang secara terdisional dikuasai dan ditekuninya itu. Kiranya tidak sulit membanyangkan bahwa para warga masyarakat yng sama akan cenderung menolak kebijkan dan langkah-langkah industrialisasi yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Adanya kecenderungan di negara-negara terbelakang untuk "meloncat" dari suatu masyarakat agraris ke masyaraat industri tanpa didukung oleh pengetahuan, keterampilan, insfraktuktur, dan sarana yang memang mutlak diperlukan. Salah satu "hasilnya" ialah langsung mendirikan berbagai industri barat, seperti pabrik baja dan industri otomotif.
3. Kurangnya pengertian di kalangan masyarakat, termasuk dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, tetang pentingnya *"human investment"* dalam proses pembangunan. Kenyataan tersebut terbukti dari rendahnya angggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan. Lain halnya dengan negara-negara industri maju yang biasaya mengalokasikan sekitar

25% nggaran belanja negara untuk membiayai program pendidikn dan pelatihan secara nasional.Padahal hanya dengan investasi manusia yang memadailah tenaga kerja yng kapabel dan terampil dan disiapkan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh kegiatan pembangunan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa melakukan investasi manusia bukanalah hal yang mudah. Alasan-alasannya pun beraneka ragam seperti :

a. Adanya berbagai prioritas nasional yang menutut alokasi dana yang memang terbatas dan yang pada gilirannya tidak menempatkan pendidikan dan pelatihan pada peringkat teratas,
b. Tidak adanya rencana ketenagakerjaan nasional (nsional manpower plan) sehingga tidak diketahui jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan apa yang diperlukan untuk kepentingan apa, dimana, oleh siapa, bilamana, dan mengapa,
c. Lebaga-lembaga pendidikn formal yang tidak melihat keterkaitan program pendidikan yang diselenggarakannya dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu sebab kurikulum yang disodorkan kepada mereka tidak kondusif untuk melihat ketrkaitan tersebut,
d. Perlunya waktu yang cukup lama untuk menilai apakah suatu program pendidikan dan pelatihan menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan atau tidak.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di muka ialah bahwa sambil melaksanakan kebijakan industrialisasi ---dalam arti mencakup berbagai sektor industri yang menghasilkan barang dn jasa dengan pemanfaatan tenologi canggih--- dua langkah harus pula diambil secara bersamaan. Yang *pertama* ialah pengembangan *knowedge* industries, yaitu lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal, seperti berbgai balai latihan kerja yang terkait dengan kebutuhan pasaran kerja.Yang *kedua* ialah menyadari pentingnya kegiatan penelitian dan pengembangan. Merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bhwa kemajuan yang dicapai oleh negra-negara industri

maju antara lain adalah berkat terjadinya dana yang besar dan tercipta serta terpliharanya iklim yang kondusif untuk melakukan kegiatan penelitin dan pengembangan, baik yang bersifat dasar, terapan, dan bahkan sosial. Senang atau tidak, harus diaakui bahwa terlalu sering di negara-negara terbelkang dn sedangn berkembang penelitiaan tidak diberikan tempat yng "terhormat" dalam organisasi dan tidak memperoleh dukungan dana yang diperlukan. Padahal industrialisasi menuntut tersalurnya kreaativitas dan inovasi para warga masyarakat antra lain melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan akan sangat mendorong percepatan proses industrialisasi karena dapat diterapkan untuk berbagai bidang.

MENGAPA PEMBANGUNAN EKONOMI HARUS BERHASIL ?

Pernyataan bahwa pembagunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhan kebijaksanaan dan penyelengaraan pembangunan nasional, sebenarnya secara implisit sesunggguhnya berarti bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus berhasil.Berikut ini disajikan berbagai alasan fundamental untuk mengatakan demikian.

1. Mengentaskan Kemiskinan

Jika diterima pendapat bahwa masih banyak warga masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, tersirat bahwa suatu negara bangsa bertekat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Mengentaskan kemiskinan antara lain berarti bahwa warga negara yang tidak mampu memuaskan berbagai kebutuhan primernya secara wajar. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak cukup melihat mengentaskan kemiskinan semata-mata meningkatkan kemampuaan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang bersifat materiil. Jika hanya terbatas hanya pada hal itu saja, berarti yang dibicarakan hanya peningkatan taraf hidup orang per orang. Dengan kata lain, pengentasan kemiskinan harus pula meningkatkan mutu hidup.

Peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi lain yang bukan berupa segi ekonomis, seperti peningkatan kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial, menyekolahkan anak, pengobatan dalam hal sesorang dan anggota keluarganya yang diserang penyakit, tersedianya dana untuk rekreasi, serta peningkatan kemampuan menabung. Singkatnya mejadikan para warga negara menjadi insan yang mandiri.

2. Menghilangkan Kesenjangan Sosial

Merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di masyarakat bangsa,terdapat segelintir manusia yang (sangat) kaya raya di samping para warga negara yang tergolong tidak mampu. Berarti adanya kesenjangan sosial.Pembangunan ekonomi harus berhasil menghilangkan atau paling sedikit memperkecil kesenjangan tersebut. Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi kesenjangan sosial antara lain ialah sebagai berikut:

Penciptaan lapangan kerja. Para usahawan yang berhasil memupuk kekayaan yang melimpah berkat penguasaan dan pemilikan berbagain perusahaan dalam bentuk konglomerat dan sejenisnya, tidak sepantasnya hanya berfikir untuk terus melebarkan sayap usahanya dan memupuk kekayaan yang lebih besar lagi.Memang tidak ada yang salah bila mereka berfikir dan bertindak demikian.Akan tetapi di samping itu, mereka harus menyadari adanya tanggung jawab sosial yang dipikulnya. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial tersebut ialah dengan menciptaka*n* lapangan kerja bagi warga negra lain yang memerlukan pekerjaan. Memikul tanggung jawab demikian antara lain berarti bahwa para usahawan besar jangan hendaknya berfikir semata-mata untuk menekan biaya menjalankan usaha –biaya berproduksi, pemasaran, promosi dsb. Misalnya dengan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi canggih yang pada giliranya akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang di perlukan. Dengan kata lain, orientasi penyelanggaraan bisnis hendaknya tidak semata-mata padat modal.Ada tempat untuk menjalankan usaha dengan pendekatan

padat karya. Dengan demikian dunia usaha turut berperan aktif dalam mengatasi pengangguran yang menjadi salah satu sumber kesenjangan sosial termasuk dengan cara menggunakan tenaga kerja yabng bermukim di sekitar perusahaan jika tersedia tenanga kerja setempat yang memenuhi persyaratan organisasi atau perusahaan.

Peningkatan mutu kehidupan kekayaan mengurangi kesenjangan sosial tidak cukup hanya dengan penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang berusaha meningkatkan mutu hidupnya denga jalan bekerja bagi orang lain berkarya tidak sekedar untuk mencari nafkah akan tetapi sebagai upaya untuk mengangkat harkat martabatnya sebagai insan yang terhormat. Oleh karena itu, mereka ingin diperlukan secara manusiawi di ntempat pekerjaan. Para pengusaha dapat menjalankan perlakuan demikian dengan

1. Penyilaan (supervisi)yang simpatik dengan menggunakan gaya manejerial yang sesuai dengan kepribadian para bawahanya.
2. Kondisi fisik yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di tempat tugas.
3. Pemberdayaan di tempat pekerjaan dalam arti pemberian kesempatan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan dan karir serta penghasilanya.
4. Pekerjaan yang menuntut rasa tanggung jawab yang lebih besar.
5. Jenis dan sipat pekerjaan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan yang di miliki.
6. Sistem imbalan yang efektif berdasarkan prinsip keadilan, kewajaran, kesetaraan dengan imbalan orang lain yang melakukan tugas pekerjaan sejenis dan tanggung jawab yang sama yang disesuaikan dengan golongan perusahaan.

Peningkatan kepedulian sosial. proses pengurangan kesenjangan sosial dapat dipercepat apabila para warga negara mampu menunjukan sikap kepedulian sosial tinggi. Berbagai bentuknya antara lain ialah penyediaan fasilitas umum,turut serta membiayai pendirian rumah-rumah ibadat,mendirikan pusat-pusat kesehatan masyarakat,partisifasi dalam perayaan hari-hari besar nasional yang diselenggarakan rakyat

setempat pemberian beasiswa kepada anak-anak karyawan dan masyarakat sekitar yang berprestasi,dan mungkin bentuk-bentuk lain yang menunjukan bahwa perusahaan nerupakan bagian dari masyarakat lingkunganya dan bukan suatu masyarakat yang bersifat ekslusif

Pasokan bahan secara lokal dalam menghasilkna baerang atau jasa tertentu perusahaan pasti memerlukan bahan, baik merupakan bahan mentah maupun bahan baku .sepanjang dimungkinkan –dalam arti memenuhi persrtankuantitas, kualitas, dan kontinuitas pemasokan– mengunakan pasokan secra lokal dapat pula mengurangi keswenjangan karena para memasok dapat meningkatkan kegiatan ekonominya dan dengan demikiannya juga penghasilannya. Bahkan mungkin turut serta menciptakan lapangan pekerjan bagi orang lain, meskipun dalam jumlah besar.

Sistem perpajakan yang progresif tidak sedikit bagian dari upaya peningkatan kesejahtraan rakyat menjadi tangguang jawab pemerintah, seperti memelihara anak-anak terlantar, memelihara orang-orang lanjut usia, jaminan sosial, mendirikan gedung-gedung sekolah, pengadaan tenaga pengajar,penyediaan pasiliatas umum dibidang kesehatan – seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik rumah sakit beserta peralatannya- tenaga medis dan para medis , analis, laboran dan lain sebagainya. Kesemuanaya itu memerlukan dana yang besar karena bidang-bidang tersebut harus pula dibagun sebagai bagian integral pembanguna nasional. Jelas bahwa makin maju masyarakat bangsa, makin besar dana yang diperlukan pemerintah. Salah satu sumebr penerimaan negar untuk membiayai berbagai kegiatan maksud pajak disoroti khusus dari segi pengurangan kesenjangan antar berbagai kelompok di masyarakat pajak mempunyai ”fungsi pemerataan dan keadilan“ artinya para warga negara yang mampu dikinakan pajak yang secara pogresif lebih tinggi dan digunakan untuk meningkat kan mutu hidup masyarakat yang kuarang mampu, oleh karena itu , kesediaan para warga negara yang mampu dan kaya untuk membayar berbagai jenis pajaknya.- seperti pajakkekayaan, pajak tanah

dan bagunan ,pajak penghasilan perorangan , pajak penghasilan badan pajak penghasilan badan pajak pertambahan nilai pajak barang-barang mewah- dengan jujur dan tepat waktu akan mempunyai arti yang sangat penting dalam memperkecil kesenjangan tersebut.

Jika kesemuanya itu dilakukan oleh dunia usaha, akan terwujudlah solidaritas sosial yang pada gilirannya akan mempunyai dampak positif dalam bidang-bidang kehidupan lainnya.

3. Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Bidang-Bidang Lain

Siapapun akan menerima pandangan bahwa menyelenggara-kan kegiatan pembangunan yang mencakup seluruh segi 'kehidupan dan penghidupan suatu masyarakat bangsa memerlukan dana yang besar. Di bidang politik,, misalnya, dana dalam jumlah besar diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pembiayaan kegiatan lembaga-Iembaga konstitusional, melaksanakan pendidikan politik, menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, melaksanakan politik luar negeri, dan lain sebagainya. Di bidang pertahanan dan keamanan diperlukan dana yang tidak kecil untuk membangun angkatan bersenjata yang andal karena kepada angkatan bersenjatalah tugas penjagaan keamanan umum, keutuhan wilayah, eksistensi negara, dan keselamatan nasional dipercayakan. Pembangunan ekonomi harus berhasil karena dengan peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, semakin banyak sumber dana yang dapat digarap dan dimanfaatkan. Peranan berbagai sumber dana tersebut semakin penting karena suatu negara bangsa bertekad untuk mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya. Memang benar bahwa melalui kerja sama luar negeri, suatu negara mungkin memperoleh bantuan berupa hibah dan pinjaman. Jika dana bantuan seperti itu berupa bantuan tidak mengikat *(untied aid)*pemerintah penerima bantuan dapat meng-gunakannya untuk kepentingan yang dipandangnya paling tepat. Akan tetapi ada pula bantuan yang hanya boleh digunakan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan tertentu yang sudah disepakati bersama.Penting pula untuk disadari bahwa dalam hal mengusahakan pinjaman, suatu pemerintah biasanya sangat hati-hati sepanjang menyangkut jumlahnya, bunganya, dan waktu pengembaliannya dan persyaratan-persyaratan lainnya. Kehati-hatian itu mutlak diperlukan beban yang harus dipikul oleh masyarakat bangsa, baik sekarang maupun masa depan berada dalam batas-batas kemampuan memikulnya.

TERPELIHARANYA KETERTIBAN UMUM

Di kalangan aparat keamanan sering terdapat persepsi bahwa berkurangnya, apalagi hilangnya, kesenjangan sosial akan melicinkan jalan untuk terpeliharanya ketertiban umum yang mantap. Semata-mata dilihat dari sudut pandang makin banyaknya warga negara yang mampu mempertahankan tingkat dan mutu hidup yang layak bagi manusia dengan harkat dan martabatnya, semakin berkurang pula alasan untuk menampilkan perilaku yang disfungsional.Disoroti dari sudut pandang itu saja, kemutlakan keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam pada itu kenyataan di hampir semua negara di dunia, termasuk di negara-negara industri paling maju sekalipun, menunjukkan bahwa berbagai jenis kejahatan dan tindakan kriminal bukan hanya pada skala kecil —seperti pencopetan, pencurian, penipuan, dan perampokan— yang selalu terjadi. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis tindak kriminal dan kejahatan makin canggih sehingga "predikatnya" pun makin beraneka ragam seperti kejahatan terorganisasi *(organized crime)* oleh *mafia*dan *gang* dan tindak kejahatan orang berdasi *(white collar crime),* dengan berbagai bentuk seperti pemalsuan kartu kredit, transfer dana —kadang-kadang dalam jumlah besar dengan menggunakan "PIN" orang lain, perdagangan senjata gelap, penjualan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya.

Dari contoh-contoh di muka terlihat bahwa memang tidak ada pilihan lain bagi suatu negara kecuali mengerahkan segala kemampuan yang ada dan mcnggali potensi yang masih terpendam agar tujuan didirikannya negara yang bersangkutan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Dengan menyimak pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa, adanya dua bentuk strategi dalam pembangunan ekonomi yang biasa ditempuh oleh negara-negara yang sedang berkembang. Yaitu *pertama* **Modernisasi pertanian**, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri.Dan yang *kedua* **Industrialisasi y**ang dapat ditempuh dan memang ditempuh oleh negara-negara terbelakang dan sedang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementrian Luar Negeri Republik (BPPK Kemelu-RI),2008. "*ASEAN Economic Blueprint, 2015*". Jakarta.
2. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.2009, "*Menuju ASEAN Economic Community 2015*", Jakarta
3. KPPN/Bappenas.2012."*Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013"*.Buku I.
4. KPPN/Bappenas.2013."*Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013"*.Buku II.
5. https://www.unpand.ac.id/membangun-wirausaha-yang-kreatif-dan-inovatif-menuju-indonesia-mandiri.html

HUMANIORA

KANDUNGAN MINYAK DALAM BITUMEN PADAT DAERAH LASALIMU, KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA

OIL CONTENT FROM SOLID BITUMEN AT LASALIMU AREA, BUTON REGENCY SOUTHEAST SULAWESI

Oleh:
R.M. Kindi Karsmono
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton
Perumnas Waruruma 218-219 BAU-BAU Sulawesi Tenggara
HP : 081341531530
Email : churasanny@ *yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi dan kandungan organik, tingkat kematangan serta kandungan minyak dalam batuan yang mengandung aspal dari daerah Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan menggunakan analisis petrografi organik dan analisis "retorting". Hasil pengamatan singkapan dan data *coring* bor menunjukkan terdapat lapisan-lapisan bitumen padat dalam bentuk aspal *impregnated* kedalam batu gamping dan batupasir halus gampingan yang berselang-seling dengan napal. Pengambilan conto dilakukan secara *grab sampling* yang mewakili seluruh lokasi penelitian. Hasil analisis petrografi menunjukkan bahwa semua conto mengandung lamalginit (0,5%-50%). Tingkat kematangan batuan menunjukkan *immature* yang diperlihatkan oleh vitrinit reflektan R_o 0,31-0,52%. Pengamatan juga menunjukkan bitumen mengisi pori-pori dari batu gamping dan batu pasir. Kandungan minyak dalam conto berkisar antara 10-210 liter per ton batuan, dengan berat jenis 0,88-0,98, minyak tersebut digolongkan kedalam *normal crude oil-*

heavy crude oil .

Kata Kunci : Aspal, *Lamalginit* , *Immature* .

****

ABSTRACT

This study aims to determine disperse organic matter, maturity level, and oil content from asphalt rocks at Lasalimu area, Buton regency, Southeast Sulawesi. The samples were analyzed by using Organic Material Petrographic and Retort analysis method. Outcrops and borehole data obsevation reveal that there are layers of solid bitumen in the form of asphalt impregnated into limestone and fine grained lime-sandstone alternating with marl. The samples were taken by using grab sampling method representing all research locations. Organic petrographic analysis implies that all samples contained lamalginit, "common-major" (0.5%-49.99%)."Immature" rock maturity level is shown by vitrinite reflectance R_o *0.31% to 0.52%. Observation has also shown bitumen infilling pores limestone and sandstone. The result of Retort analysis implies that the oil content ranges from 10-210 liters/ton with oil specific gravity 0.88 to 0.98. The oil can be classified as normal crude oil - heavy crude oil.*

Keywords : *Bitumen, Liptinite, Immature.*

****

PENDAHULUAN

Bitumen padat merupakan batuan sedimen klastik dan karbonat yang mengandung material organik dalam jumlah yang signifikan, sehingga apabila dilakukan ekstraksi dengan dipanaskan pada temperatur tertentu dapat menghasilkan minyak dan gas. Setelah mengalami pemanasan pada suhu tertentu material organik te rsebut mengalami dekomposisi dan melepaskan hidrokarbon dalam bentuk uap dan setelah melalui proses pendinginan akan berubah menjadi minyak atau gas (Dyni, 1999).

Penelitian bitumen padat sebelumnya menyebutkan terdapat endapan bitumen padat yang memiliki nilai ekonomis di Pulau Buton. Bitumen padat ditemukan dalam Formasi Winto berupa lapisan *shale* dan formasi-formasi tersier yang mengandung bahan organik yang melimpah. Biasanya dijumpai dalam bentuk aspal *impregnated*. Pada daerah Pasarwajo, kandungan minyak berkisar antara 14 liter/ton-68 liter/ton pada Formasi Winto dan Formasi Ogena, sedangkan pada Formasi Tondo dan Formasi Sampolakosa kandungan minyaknya 97 liter/ton-248 liter/ton (Subarnas, 2001). Penelitian kandungan minyak dari bitumen padat di daerah Lawele dan Kapontori menyebutkan kandungan minyak 30 liter/ton-90 liter/ton pada batupasir gampingan Formasi Sampolakosa (Suryana, 2003). Sedangkan penelitian di daerah Sampolawa kandungan minyak antara 5 liter/ton-40 liter/ton (Tobing, 2005). Penelitian-penelitian bitumen padat tersebut berada pada suatu jalur *Asphalt Belt* atau yang lebih dikenal dengan jalur graben Lawele. Aspal merupakan hasil degradasi minyak bumi yang berasal dari Formasi Winto (Trias) yang terendapkan pada lingkungan marine (Davidson, 1991; Tobing dan Widiarto, 2007). Berdasarkan uraian di atas menarik untuk mengetahui karakteristik aspal/bitumen padat pada sayap lipatan sebelah timur penelitian-penelitianm sebelumnya yang terdapat pada Formasi Sampolakosa dan Formasi Tondo. Sehingga penelitian ini dapat mengetahui komposisi dan kandungan oranik, tingkat kemata ngan ba tuan, serta kandungan minyak bitumen padat di daerah penelitian.

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut adalah analisis petrografi organik dan analisis retort.

GEOLOGI REGIONAL

Seperti kebanyakan pulau di busur kepulauan Banda, Pulau Buton dianggap sebagai fragmen rifting dari Benua Australia-New Guinea yang merupakan bagian tektonik ka wa san timur Indonesia. Pulau ini diduga berasal dari dua fragmen mikrokontinen yang tersendiri dan terpisah; pertama meliputi bagian timur Pulau Buton dan Pulau Tukang Besi; kedua meliputi bagian barat Pulau Buton dan Pulau Muna (Davidson, 1991). Pulau Buton dan Pulau Muna dipisahkan oleh Selat Buton, yang terdiri dari satu sikuen tebal strata Neogen. Kompresi dari tumbukan Buton-Muna/Sulawesi Tenggara berlangsung sejak Oligosen hingga Miosen Akhir. Efek tumbukan Pulau Buton-Pulau Muna/Sulawesi Tenggara meng-akibatkan terbentuknya sikuen sesar anjakan *thin-skinned* dan lipatan. Syn-orogenic klastik diendapkan pada cekungan Neogen sebagai akibat dari sesar anjakan berarah timur dan erosi dari pengangkatan lapisan berumur Trias hingga Oligosen. Tumbukan mikrokontinen Buton-Tukang Besi diperkirakan berlangsung sejak Pliosen-Pliestosen. Tumbukan oblique dari duamikrokontinen mengakibatkan pergera kan *strike-slip* dan *dip-slip* pada sesar yang curam dengan pengangkatan dan penunjaman lokal. Struktur sesar terdiri dari sesar naik, sesar normal dan sesar geser mendata r, umumnya struktur sesar anjakan berarah timur laut-barat daya di Pulau Buton bagian selatan sepanjang umur Miosen, berarah utara-selatan di Pulau Buton bagian tengah dan di Pulau Buton bagian utara, kebanyakan deformasi diakibatkan oleh pergerakan strike-slip mengiri sepanjang (Davidson, 1991).

Pulau Buton disusun oleh satuan batuan yang dapat dikelompokkan kedalam batuan Mesozoikum dan Kenozoikum. Kelompok batuan Mesozoikum berumur T rias-Kapur Akhir hingga Paleosen. Sedangkan kelompok Kenozoikum berumur Miocen hingga

Pleistosen. Kelompok batuan Mesozoikum terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu, dan FormasiTobelo. Kelompok batuan Kenozoikum kemudian menutupi sebagian besar Pulau Buton yang terdirimatas Formasi Tondo, Formasi Sampolakosa, dan Formasi Wapulaka. Daerah penelitian menc akup kelompok batuan Mesozoikum yang diwakili Formasi Tobelo, dan kelompok batuan Kenozoikum yang diwakili Formasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Formasi Wapulaka. Batuan termuda pada sikuen sedimen Pra-Neogen merupakan bagian dari Formasi Tobelo yang berumur Kapur Awal–Oligosen. Litologinya berupa batu gamping masif atau berlapis dengan lensa -lensa atau nodul rijang. Formasi Tobelo kemungkinan diendapkan pada tatanan laut dangkal. Stratigrafi kelompok Tondo di Pulau Buton bagian selatan didominasi oleh himpunan batuan klastik Miosen Tengah-Miosen Akhir. Unit batugamping Miosen Tenga h–Miosen Akhir berkembang secara lokal pada tinggian purba. Litologi dominannya adalah batulumpur, batu lempung, batu lanau dan batu pasir. Semua sedimen ini berlaminasi tipis dan mengandung lapisan tipis karbonan dan hancuran tumbuhan. Batu pasirnya berbutir halus dan tersemenkan denga n baik oleh kalsit atau dolomit. Foraminifera planktonik sangat banyak dan menunjukkan suatu pendalaman bertahap selama pengendapan di nerithic luar–bathyal atas pada Miosen Akhir. Formasi Sampolakosa terdiri dari napal dan kalkarenit. Batuan yang menutupi Formasi Sampolakosa diendapkan pada lingkungan *nerithic* luar–bathyal dengan sedikit sampai tidak ada input *terrigenous*. Batuannya berumur Pliosen dan me nandakan berhentinya pengisian cekungan-cekungan Neogen, mungkin akibat erosi dan pe nurunan lokal pada tinggian purba. Formasi Wapulaka (Pleistosen) terdiri dari batugamping koral, sering membentuk teras-teras dan merupakan hasil dari pengangkatan terakhir pada blok sesar yang diendapkan pada lingkungan penge ndapan laut dangkal, neritik dalam, dan terumbu a tau dekat terumbu (Davidson, 1991).

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Daerah administratif penelitian merupakan kecamatan Lasalimu dan Lasa limu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan koordinat; 123º00'BT -123º03'BT dan 5º09' LS - 5º15'LS (gambar 1).

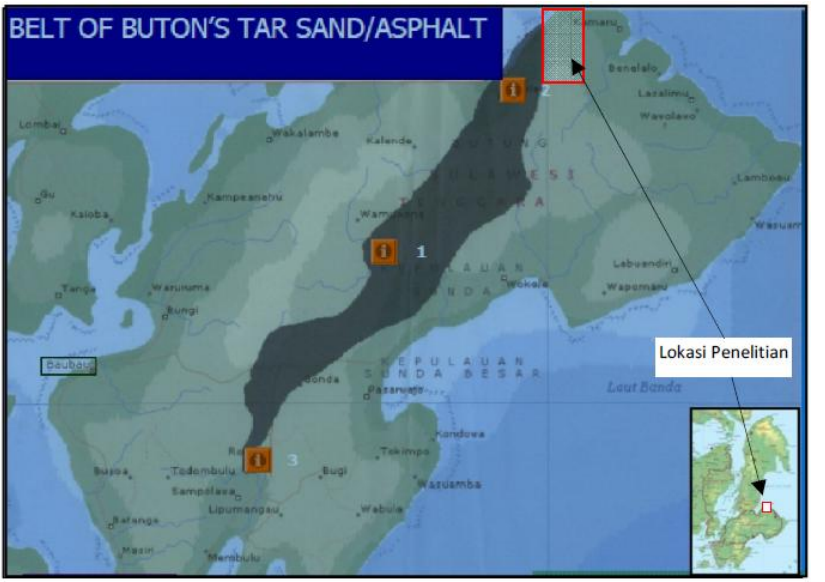

Gambar 1. Peta Tunjuk Lokasi Penelitian (sumber: Hadiyanto, dkk., 2010)

Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni peta geologi regional (Sikumbang dkk., 1995), peta rupa bumi Indonesia lembar Matanauwe (2310-41) dan lembar Kamaru (2310-43). Peralatan yang digunakan dalam penelitian lapangan adala h kompas, *global positioning system* (GPS), kamera dan a lat tulis-menulis. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam analisis laboratorium adalah *Axioskop Mikroskop with carl zeiss photan* yang sudah terinstal ke komputer dengan pembesaran 500x (*objective magnification* x10 dan *oculars magnification* x50) dan *EPECO Assay Bench (Model 07-1195B).*

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Kegiatan pengumpulan data ini terdiri dari kegiatan pengamatan geologi lapangan dan penelitian laboratorium. Peta geologi dan pengambilan *grab sampling* dan inti bor di daerah penelitian (gambar 2). Conto yang representativ dan dianggap layak dibawa ke laboratorium Pusat Sumber Daya Geologi Bandung, untuk di analisis. Ana lisis laboratorium terdiri dari analisis petrografi organik dan analisis *retorts*. Hasil analisis laboratorium untuk petrografi organik (7 conto; OBB-1, OBB-5, OW-1, OK-1, OS-1, BS-1 dan BS-2) dan analisis *retorting* (8 conto; OBB-1, OBB-4, OBB-5, OW-1, OK-1, OS-1, BS-1 dan BS-2), dibuat dalam bentuk deskriptif dan diagram yang kemudian di analisis secara komprehensif.

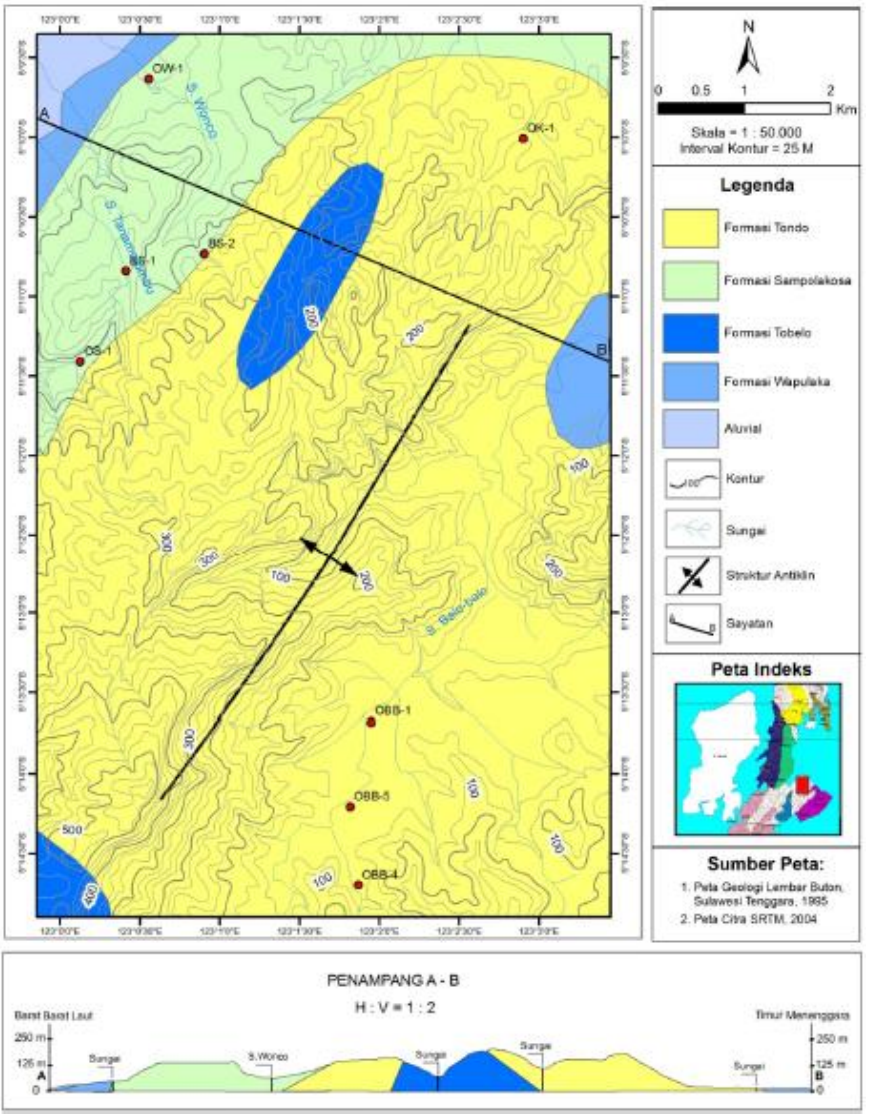

Gambar 2. Peta Geologi Regional Daerah Penelitian

Analisis petrografi untuk mengetahui *Disperse Organic Matter* (DOM) dan tingkat kematangan bitumen padat, denga n mengunakan standar pengamatan *Australian standart* (AS 2856.1-2000). Analisis *retort* digunakan untuk mengetahui kandungan minyak yang dihasilkan

melalui proses pemanasa n hingga suhu 500^{o}C (±20^{o}C) dengan me nggunaka n standar perlakuan ASTM-D 3904-80 dan ISO 647-1974.

HASIL

Lokasi penelitian mempunyai satuan geomorfologi yang tersusun atas dataran rendah (27,95%), perbukitan landai (47,78%), perbukitan berge lombang (22,72%) dan perbukitan tinggi (1,42%). Kondisi geologi daerah penelitian secara umum didominasi batu gamping pasiran, batu pasir gampingan, napal,konglomerat dan kerikil. Aspal mengisi pori batu gamping (Formasi Sampolakosa) dan batu pasir (Formasi Tondo) yang bersela ng-seling dengan lapisan na pal. Arah penyebaran aspal Barat daya-Timur laut dan hanya berada pada sayap antiklin, sedangkan pada sumbu antiklin tidak ditemukan indikasi bitumen padat.

Hasil analisis petrografi, *Disperse Organic Matter* (DOM) menunjukkan batuan aspal disusun oleh mineral dan maseral liptinite yang dominan. Maseral liptinite berupa alginite dengan jenis lamalginit DOM "*common-major*" (0,5%-49,99%). Reflektansi vitrinit memberikan nilai 0,31-0,52. (Tabel 1).Hasil analisis *Retort* memperlihatkan kandungan minyak pada bagian utara 60-210 liter/ton sedangkan pada bagian selatan daerah penelitian hanya 10-30 liter/ton dengan *Specific Gravity* minyak 0,88-0,98, (Tabel 2).

Tabel 1. Hasil Analisis Petrografi Material Organik

No. Lab. / Conto	Rvmean (%)	Kisaran & Std. Dev. (%)	Juml.	Pemerian
BS-1	0,34	0,335-0,337 (0,001)	2	*Lamalginit* 'abundant'. **Batuan karbonat > Batulanau > Batupasir.** Dom 'abundant', Bitumen (impregnated) 'abundant' kuning sampai jingga. *Vitrinite* 'rare' dan inertinit 'rare'. Oksida besi 'rare'. Pirit 'sparse'.
BS-2	0,52	0,51-0,53 (0,013)	2	*Lamalginit* 'abundant' **Batuan karbonat > Batulanau > Batupasir.** Dom 'abundant', Bitumen (impregnated) 'abundant' kuning sampai jingga. *Vitrinite* 'rare' dan inertinit 'rare'. Oksida besi 'rare'. Pirit 'sparse'.
0BB-1	-	-	-	*Lamalginit* 'common'. **Batupasir > Batuankarbonat > Batulanau.** Dom 'common', Bitumen (impregnated) 'common', kuning sampai jingga. *Vitrinite* 'absent' dan inertinit 'rare'. Oksida besi 'rare'. Pirit 'sparse'.
0BB-5	-	-	-	*Lamalginit* 'common'. **Batupasir > Batuankarbonat > Batulanau.** Dom 'common', Bitumen (impregnated) 'common' kuning sampai jingga. *Vitrinite* 'absent' dan inertinit 'absent'. Oksida besi 'rare'. Pirit 'sparse'.
0K-1	0,33	0,32-0,35 (0,015)	3	*Lamalginit* 'major'. **Batupasir > Batuankarbonat > Batulanau.** Dom 'major', Bitumen (impregnated) 'major' kuning sampai jingga. *Vitrinite* 'rare' dan inertinit 'rare'. Oksida besi 'rare'. Pirit 'abundant'.
0S-1	0,48	0,35-0,58 (0,069)	8	*Lamalginit* 'abundant'. **Batuankarbonat > Batupasir > Batulanau.** Dom 'abundant', Bitumen (impregnated) 'abundant' kuning sampai jingga. *Vitrinite* 'sparse' dan inertinit 'rare'. Oksida besi 'rare'. Pirit 'sparse'.
0W-1	0,31	-	1	*Lamalginit* 'abundant'. **Batuankarbonat > Batupasir > Batulanau.** Dom 'abundant', Bitumen (impregnated) 'abundant' kuning sampai jingga. *Vitrinite* 'rare' dan inertinit 'absent'. Oksida besi 'rare'. Pirit 'abundant'

'Qualitative abundance'	% volume 'organic matter'
Absent	0
Rare	< 0.1
Sparse	0.1 – 0.49
Common	0.5 – 1.99
Abundant	2.0 – 9.99
Major	10.0 – 49.99
Dominant	> 50.0

Tabel 2. Kandungan Minyak Hasil Analisis Retort

kode conto	kandungan air	kandungan minyak	Berat jenis minyak
OW-1 *(outcrop)*	20 l/ton	80 l/ton	0,92 gr/ml
OK-1 *(outcrop)*	10 l/ton	210 l/ton	0,88 gr/ml
BS-1 *(coring)*	80 l/ton	60 l/ton	IS
BS-2 *(coring)*	80 l/ton	130 l/ton	0,98 gr/ml
OS-1 *(outcrop)*	50 l/ton	110 l/ton	0,92 gr/ml
OBB-1 *(outcrop)*	60 l/ton	30 l/ton	IS
OBB-4 *(outcrop)*	70 l/ton	10 l/ton	IS
OBB-5 *(outcrop)*	60 l/ton	20 l/ton	IS

Keterangan IS: *Insuficient Sample*

PEMBAHASAN

Penyebaran bitumen padat berupa aspal yang mengisi pori-pori batu gamping dan batu pasir denga n arah relatif Barat daya - Timur laut. Arah umum kemiringan relatif berarah utara barat laut pada sebelah barat wilayah penelitian dan berarah selatan menenggara pada bagian timur wilayah penelitian. Lapisan aspal dalam batuan gamping dan batu pasir berselang-seling dengan napal.

Perselingan ini sangat intensif terlihat dari conto inti bor (BS-1 dan BS-2) serta pengamatan singkapan (OW-1, OK-1, OS-1, OBB-1, OBB-4 dan OBB-5) dengan ketebalan batuan aspal antara 0,2-3 meter. Semua conto yang dianalisis menghasilkan minyak, kandungan minyak yang terdapat dalam lapisan bitumen padat diinterprestasikan sebagai hasil dari material organik dalam batuan, yang besar kecilnya kandungan minyak dalam conto dipengaruhi oleh abundansi maseral dan ketebalan la pisan. Hasil analisis petrografi organik menunjukkan bahwa semua conto mengandung maseral liptinit dengan jenis lamalginit yang berkisar 0,5%-50%. Lama lginit adalah salah satu sub maseral dari alginit (berasal dari ga nggang) yang menjadi ciri bitumen padat dari batuan aspal seperti ditunjukkan hasil penelitian sebe lumnya (Subarnas, 2001, Sur yana 2003, Tobing, 2005).

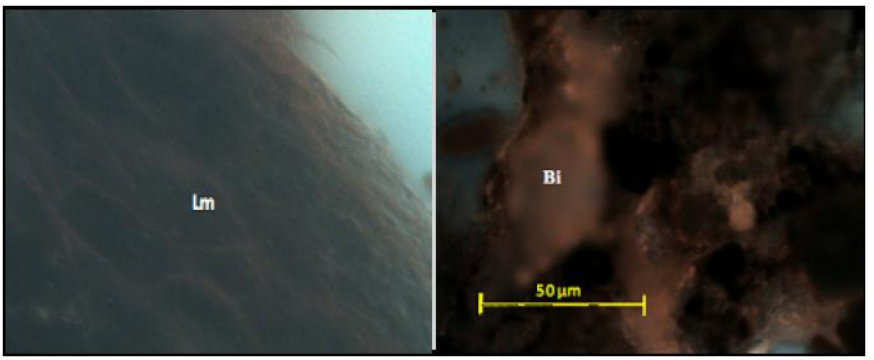

Gambar 3. Maseral lamalginit dan Bitumen dari conto wilayah penelitian

Conto dari bagian utara (OW-1, OS-1, BS-1, BS-2 dan OW-1) memiliki komposisi lamalginit yang lebih banyak (abundant-major) dibandingkan conto dari bagian selatan yang common (OBB-1,OBB-4 dan OBB-5). Lama lginit memperlihatkan bentuk perlapisan bergelombang yang paralel. Bentuk ini berasal dari planktonik, koloni atau unice lular algae, acritarchs dan dinoflagellata (Hutton, et.al.,1992). Panjang perlapisan yang ditunjukkan lamalginit antara 0,01-0,05 mm. Menurut Peters dan Cassa (1994) lamalginit berasal dari sub maseral Alginit yang merupakan jenis kerogen tipe I yang sangat *oil prone*. Bitumen mengisi celah antar butiran dan menutupi mineral. Bitumen diamati di bawah sinar flourescence dengan warna kuning-orange. Kehadiran bitumen ini menyebabkan warna flourescence dari materia l organik menjadi lemah. Bitumen terbentuk karena mole kul material organik menjadi lebih kecil kare na naiknya tingkat kematanga n dan bitumen masih berada pada batuan sumbernya. Sedangkan maseral vitrinit hanya ditemukan pada bagian utara (conto OK-1, OW-1, OS-1, BS-1 dan BS-2) dengan jumlah *rare-sparse* (0,1-0,5%). Sedangkan pada bagian selatan tidak dijumpai maseral vitrinit. Minimnya kehadiran vitrinit dan banyaknya mineral pirit fra mboidal yang muncul pada semua conto menunjukka n bahwa bitumen padat ini terendapkan pada lingkungan *marine*.

Tingkat kematangan bitumen padat diperoleh dari vitrinit reflektan yang berkisar antara 0,31-0,52%. Nilai ini menunjukkan bahwa batuan aspal/bitumen padat belum matang. Rendahnya tingkat kematangan ini disebabkan oleh rendahnya gradien geothermal ditempat penelitian, yang menurut Davidson (1991)adalah 1,4^{o}F/100fet. Sehingga jika diasumsikan bahwa *oil window* berada pada kisaran suhu 150^{o}F-350^{o}F dan suhu permukaan 30^{o}C, maka hidrokarbon akan ditemukan pada zone kata genesis pada kedalaman 1380-5000 meter. Berdasarkan diagram korelasi umum indeks kematangan organik (Kantsler, 1978) maka terlihat bahwa conto-conto tersebut belum berada pada zona katagenesis atau zona terbentuknya minyak, namun dari kemunculan bitumen pada pengamatan dengan

mikroskop menunjukkan bahwa batuan yang mengandung aspal tersebut sudah mulai memasuki zona tersebut atau *oil birthline*, namun karena tektonik yang terjadi sejak pliosen-pliestosen menga kibatkan batuan ini terlipat dan terangkat ke permukaan sehingga tidak mencapai kedalaman yang dipersyaratkan oleh *oil window*. Bitumen merupakan pre-oil sehingga batuan aspal akan sangat menghasilkan minyak jika dilakukan pirolisis, ini juga disebabkan oleh kandungan organik, lamalginit yang berlimpah.

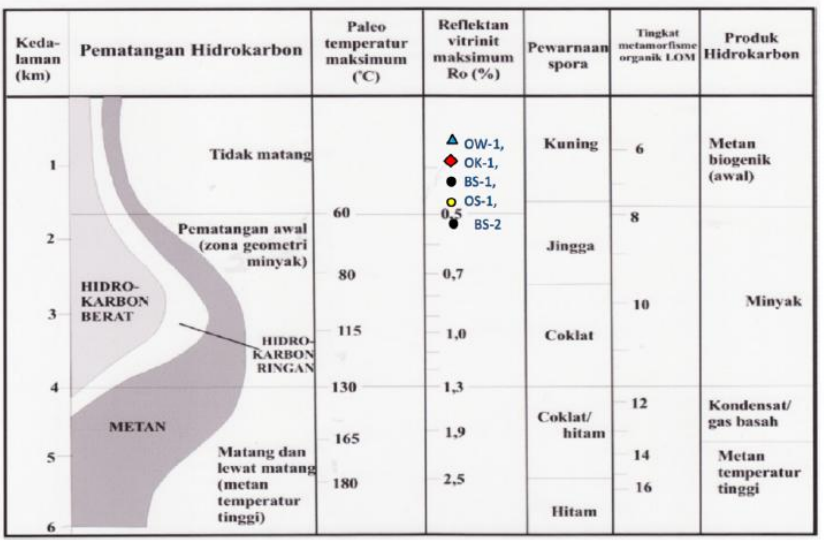

Gambar 4. Korelasi Umum Inde ks Kematangan Organik (Kanstler, 1978)

Hasil analisis Retort memperlihatkan kandungan minyak dalam batuan aspal berkisar antara 60–210 liter/ton batuan di bagian utara wilayah penelitian, pada Formasi Tondo dan Sampolakosa. Untuk 2 conto inti bor pada kedalaman 3 meter kandungan minyaknya 60 liter/ton batuan (BS-1) dan 130 liter/ton batuan (BS-2). Kandungan minyak pada conto OK-1 dari Formasi Tondo adalah 210 liter/ton batuan. Sedangkan pada bagian se latan daerah penelitian (OBB-1, OBB-4 dan OBB-5) kandungan minyak berkisar antara 10 - 30 liter/ton batuan pada Formasi Tondo.

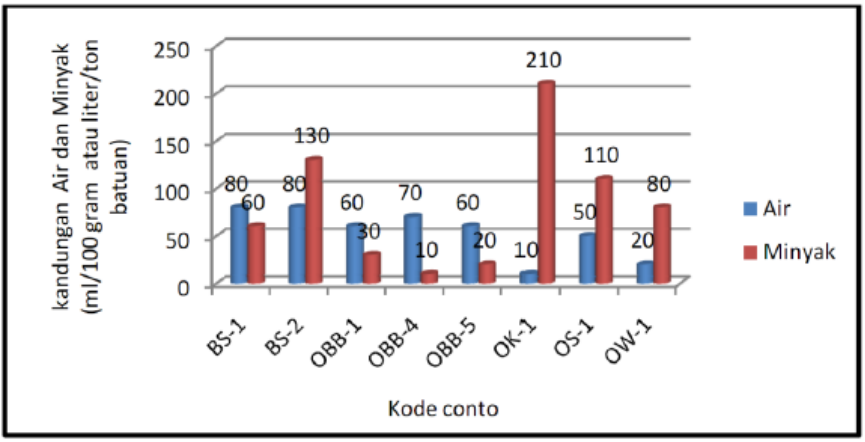

Gambar 5. Grafik kandungan minyak dan air hasil analisis retort

Apabila semua kandungan minyak di dalam conto dire rata (n= 8) diperoleh sekitar 81,25 liter per ton batuan dengan ketebalan lapisan batuan aspa l/ bitumen padat ya ng terlihat dipermukaan 0,2 - 3 meter. Nilai yang dianggap ekonomis dari minyak dalam batuan (shale oil) adala h 25 liter per-ton batuan (Tissot dan Welte, 1984). Analisis retort telah memberikan jawaban secara visual te ntang jumlah kandungan minyak dalam batuan, perbedaan kandungan minyak dapat terlihat pada jumlah material organik yang dikandungnya (Tabel 3).

Tabel 3. Hubungan Antara Hasil Analisis Petrografi Organik Dan Analisis Retort

Kode conto	Maseral	Kandungan minyak	R_o
OW-1	Liptinit-Alginit Lamalginit (abundant)	80 liter/ton	0,48
OS-1	Liptinit-Alginit Lamalginit (abundant)	110 liter/ton	0,31
OK-1	Liptinit-Alginit Lamalginit (major)	210 liter/ton	0,33
BS-1	Liptinit-Alginit Lamalginit (abundant)	60 liter/ton	0,34
BS-2	Liptinit-Alginit Lamalginit (abundant)	130 liter/ton	0,52
OBB-1	Liptinit-Alginit Lamalginit (common)	30 liter/ton	-
OBB-4	-	10 liter/ton	-
OBB-5	Liptinit-Alginit Lamalginit (common)	20 liter/ton	-

Dari hasil penelitian ini maka jumlah kandungan minyak pada Formasi Tondo dan Formasi Sampolakosa memiliki kemiripan dengan pene litian yang dilakukan Subarnas (2001) pada formasi yang sama. Jika melihat hasil petrografi organik dan analisis retort dari Formasi Winto (Tobing, 2005 dan Triono, 2004) maka diprediksi bahwa maseral liptinit Formasi Tondo dan Formasi Sampola kosa lebih bagus kualitasnya untuk menghasilkan minyak dibandingkan dengan Formasi Winto. Oleh sebab itu sangat mungkin ada 2 jenis bitumen padat dari Pulau Buton, yaitu bitumen padat dari pre-Neogen yang diwa kili oleh Formasi Winto dan bitumen padat dari umur Neogen yang diwakili oleh Formasi Tondo dan Sampolakosa.

KESIMPULAN

1. Kandungan organik bitumen padat (disperse organic matter) didominasi oleh grup maseral Liptinite, dari jenis maseral Alginit, tipe maseral Lama lginit dengan kategori "common-major". Pengamatan petrografi juga memperlihatkan bentuk bitumen impregnated yang mengisi ruang antara butir dalam bentuk

amorf, yang menunjukkan bitumen "impregnated" berasal dari sapropelic organic matter. Jenis maseral Liptinite sangat dominan dibanding maseral Vitrinite dan Inertinite. Untuk conto dari daerah selatan wilayah penelitian tidak dijumpai maseral Vitrinite. Kematanganconto dari daerah utara penelitian menunjukkan tingkat kematangan yang rendah "immature" (R_o= 0,31-0,52).

2. Kandungan minyak pada Formasi Tondo dan Sampolakosa daerah penelitian adalah 10-210 liter/ton batuan, lebih bagus dibanding kandungan minyak dari Formasi Winto.

DAFTAR PUSTAKA

Davidson W.J. (1991). *The Geology And Prospectivity Of Buton Island, S. E. Sulawesi, Indonesia*. Indonesian Petroleum Association, 20th Annual Convention Proceeding.

Dyni J.R. (1999). *Coal, Oil Shale, Natural Bitumen, Heavy Oil and Peat,* Origin and Resources of World Oil Shale – Vol. II. US Geological Surve y: Denver USA

KARAKTERISTIK BITUMEN PADAT DAERAH LASALIMU SELATAN, KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA, BERDASARKAN PYROLISIS ROCK-EVAL DAN ANALISIS RETORT

CHARACTERISTIC OF SOLID BITUMEN AT SOUTH LASALIMU AREA, BUTON REGENCY SOUTHEAST SULAWESI, BASED ON ROCK EVAL PYROLISIS AND RETORT ANALYSIS

Oleh:
R.M. Kindi Karsmono
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton
Perumnas Waruruma 218-219 BAU-BAU Sulawesi Tenggara
HP : 081341531530
Email : churasanny@*yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan dan peringkat batuan sumber dari bitumen padat serta kandungan minyak bitumen padat setelah dilakukan pemanasan. Hasil pengamatan singkapan dan data *coring* bor menunjukkan terdapat lapisan-lapisan bitumen padat dalam bentuk aspal *impregnated* kedalam batu gamping dan batu pasir halus gampingan yang berselang-seling dengan batu lanau. Pengambilan conto dilakukan secara *grab sampling* yang mewakili seluruh lokasi penelitian. Conto dianalisis denganmetode *Rock-Eval Pyrolisis* dan *Total Organic Carbon*serta analisis Retort Hasil Rock-Eval Pyrolisis dan TOC menujukkan nilai HI >700 dan OI< 15, Plot HI-OI menunjukkan material organik berasal dari kerogen Type I (Liptinit-Alginit), hasil plot HI-T menyatakan bahwa kerogen type I tersebut berada pada kondisi kematangan *immature,* kandungan TOC semua conto yang dianalisis (3,07%-17,49%) memperlihatkan batuan sebagai sumber hidrokarbon " *very good-excelent* ". *Pyrolisis yield* (S1+S2)

menunjukan kemampuan *oil generation* yang *excellent*. Hasil analisis Retort memperlihatkan kandungan minyak 10-210 liter/ton dengan berat jenis minyak 0,88-0,98, minyak tersebut digolongkan kedalam *normal cru de oil- heavy crude oil* . Tingginya nilai TOC, jenis kerogen Type I dan tingkat kematangan yang rendah menunjukkan aspal *impregnated* bersifat sebagai Bitumen Padat. Nilai *Production Index* (<0,2) menunjukkan bitumen padat masih berada pada tahap diagenesis menuju *early* catagenesis.

Kata Kunci: Aspal, *Liptinite* , *Immature* , Kerogen *, Pyrolisis*

****

ABSTRACT

This study aims to determine maturity level, rank of source rocks and oil content from solid bitumen. The samples were taken by using grab sampling method representing all research locations. The samples were analyzed by using Organic Material Petrographic, Rock-Eval Pyrolisis, Total Organic Carbon, and Retort analysis method. Outcrops and borehole data obsevation reveal that there are layers of solid bitumen in the form of asphalt impregnated into limestoneand fine grained lime-sandstone alternating with marl. The result of Rock-Eval Pyrolisis and TOC reveal HI value> 700 and OI <15. Plot HI-OI showsan organic material derived from Type I kerogen (Liptinit-Alginit), while the result of HI-Tmax plot implies that the type I kerogen is in immature thermal condition. TOC content of all samples (3.07% to 17.49%) reveal rock as "very good-excelent" hydrocarbon source. Pyrolisis yield (S1 + S2) shows excellent ability of oil generation. The result of Retort analysis implies that the oil content ranges from 10-210 liters / ton with oil specific gravity 0.88 to 0.98. The oil can be classified as normal crude oil - heavy crude oil. High TOC values, Type I kerogen and low-maturity degree reveal that impregnated asphalt has the

characteristic of solid Bitumen. The production index (<0.2) indicates that the solid bitumen was still at diagenetic to early catagenetic stage.

Keywords: *Bitumen, Liptinite, Immature, Kerogen, Pyrolisis*

****

PENDAHULUAN

Bitumen padat merupakan batuan sedimen klastik dan karbonat yang mengandung material organik dalam jumlah yang signifikan, sehingga apabila dilakukan ekstraksi dengan dipanaskan pada temperatur tertentu dapat menghasilka n minyak dan gas. Setelah mengalami pemanasan pada suhu tertentu material organik tersebut mengalami dekomposisi dan melepaskan hidrokarbon dalam bentuk uap dan setelah me alui proses pendinginan akan berubah menjadi minyak atau gas (Dyni, 1999).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian bitumen padat di Pulau Buton, diketahui bahwa terdapat endapan bitumen padat yang memiliki nilai ekonomis. Bitumen padat di daerah Pasarwajo, kandungan minyak yang ditemukan melalui analisis *retorting* berkisar antara 14 liter/ton sampai 68 liter/ton pada Formasi Winto dan Formasi Ogena, sedangka n pada Formasi Tondo dan Formasi Sampolakosa kandungan minya knya mencapai 97 liter/ton sampai 248 liter/ton (Subarnas, 2001). Penelitian endapan bitumen padat di Buton Selatan, menyebutkan bahwa keterdapa tan bitumen padat tidak hanya pada Formasi Winto tapi juga terdapat pada Formasi Sampolakosa dan Formasi Tondo berupa rembesan-rembesan aspal. Kandungan minyak 30 liter/ton sampai 90 liter/ton pada batupasir

Formasi Sampolakosa (Suryana, 2003). Penelitian di daerah Sampolawa menyebutkan bahwa terdapat banyak lapisan bitumen padat di daerah tersebut pada Formasi Winto. Kandungan minyak

pada daerah Sampolawa menunjukkan nilai antara 5 liter/ton sampai 40 liter/ton (Tobing, 2005). Penelitian-penelitian kandungan bitumen padat tersebut berada pada *Asphalt Belt* atau yang lebih dikenal dengan jalur graben Lawele. Aspal merupakan hasil degradasi minyak bumi yang berasal dari Formasi Winto (Trias) dengan jenis kerogen tipe II yang terendapkan pada lingkungan marine (Davidson, 1991; Tobing dan Widiarto, 2007). Berdasarkan uraian di atas menar ik untuk me ngetahui karakter istik aspal/ bitumen padat pada saya p lipatan sebelah timur penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat pada Formasi Sampolakosa dan Formasi Tondo. Sehingga penelitian ini dapat mengetahui tingkat kematangan, peringkat batuan sumber, transformasi material organiknya serta kandungan minyak bitumen padat di daerah penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut adalah analisis Rock-Eval yang dirangkaikan dengan *Total Organic Carbon* dan ana lisis Retort.

GEOLOGI REGIONAL

Pulau Buton disusun oleh satuan batuan yang dapat dikelompokkan kedalam batuan Mesozoikum dan Kenozoikum. Kelompok batuan Mesozoikum berumur Trias-Kapur Akhir hingga Paleosen. Sedangkan ke lompok Kenozoikum berumur Miocen hingga Pleistosen. Kelompok batuan Mesozoikum terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu, dan Formasi Tobelo. Kelompok batuan Kenozoikum kemudian menutupi sebagian besar Pulau Buton yang terdiri atas Formasi Tondo, Formasi Sampolakosa, dan Formasi Wapulaka. Daerah penelitian mencakup kelompok batuan Mesozoikum yang diwakili Formasi Tobelo, dan kelompok batuan Kenozoikum yang diwakili Formasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Formasi Wapulaka. Batuan termuda pada sikuen sedimen Pra-Neogen merupakan bagian dari Formasi Tobelo yang berumur Kapur Awal–Oligosen. Litologinya berupa batu gamping masif atau berlapis dengan lensa-lensa atau nodul rijang. Formasi Tobelo kemungkinan diendapkan pada tatanan laut dangkal. Stratigrafi kelompok Tondo di

Pulau Buton bagian selatan didominasi oleh himpunan batuan klastik Miosen Tengah-Miosen Akhir. Unit batugamping Miosen Tengah–Miosen Akhir berkembang secara lokal pada tinggian purba. Litologi dominannya adalah batulumpur, batu lempung, batu lanau dan batu pasir. Semua sedimen ini berlaminasi tipis dan mengandung lapisan tipis karbonan dan hancuran tumbuhan.Batupasirnya berbutir halus dan tersemenkan dengan baik oleh kalsit atau dolomit. Foraminifera planktonik sangat banyak dan menunjukkan suatu pendalaman bertahap selama pengendapan di nerithic luar–bathyal atas pada Miosen Akhir. Formasi Sampolakosa terdiri dari napal dan kalkarenit. Batuan yang menutupi Formasi Sampolakosa diendapkan pada lingkungan *nerithic* luar–bathyal dengan sedikit sampai tidak ada input *terrigenous*. Batuannya berumur Pliosen dan mena ndakan berhentinya pengisian cekungan-cekungan Neogen, mungkin akibat erosi dan penurunan lokal pada tinggian purba. Formasi Wapulaka (Pleistosen) terdiri dari batugamping koral, sering membentuk teras-teras dan merupakan hasil dari pengangkatan terakhir pada blok sesar yang diendapkan pada lingkungan pengendapan laut dangkal, neritik dalam, dan terumbu atau dekat terumbu (Davidson, 1991).

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Daerah administratif penelitian merupakan kecamatan Lasalimu dan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan koordinat; 123°00BT - 123° 03'BT dan 5°09' LS - 5°15'LS (gambar 1).

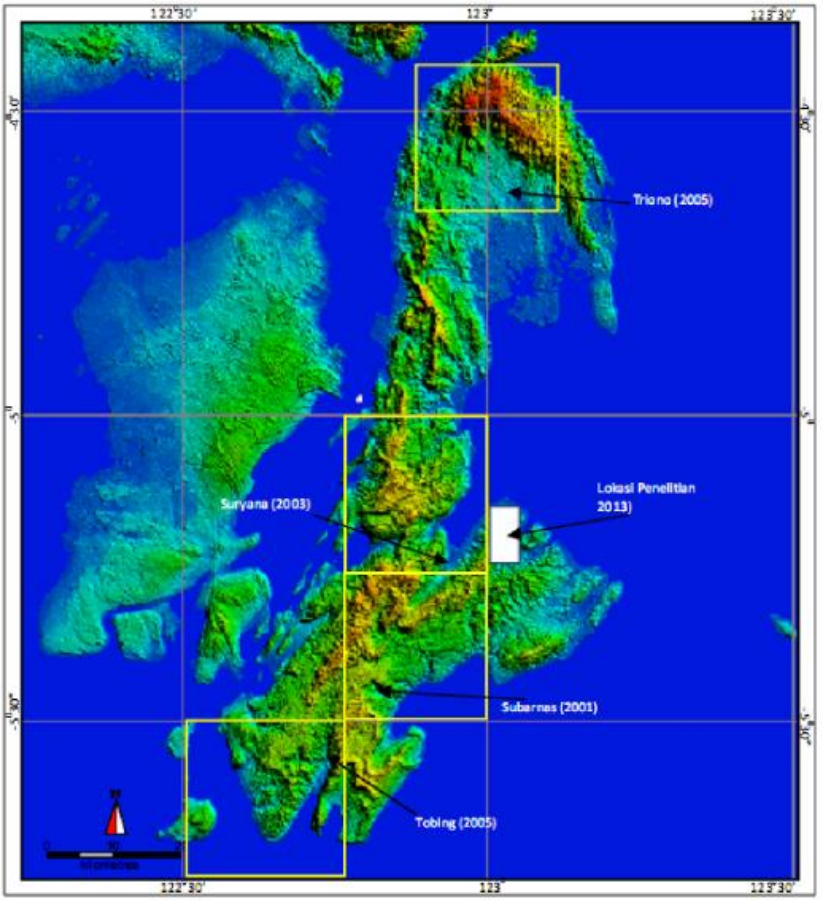

Gambar 1. Peta Tunjuk Lokasi Penelitian

BAHAN DAN PERALATAN

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni peta geologi regional (Sikumbang dkk., 1995), peta rupa bumi Indonesia lembar Matanauwe (2310-41) dan lembar Kamaru (2310-43) dan peta tematik lainnya. Peralatan yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah kompas, *global positioning system* (GPS), kamera dan ala t tulis-menulis. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam analisis laboratorium adalah *Source rock analyzer TPH/TOC* dan *EPE CO Assay Bench (Model 07-1195B).*

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Kegiatan pengumpulan data ini terdiridari kegiatan pengamatan geologi lapangan dan penelitian laboratorium.Peta geologi dan pengambilan *grab sampling* dan inti bor di daerah penelitian (ga mbar 2). Cont yang representatif dan dianggap layak di bawa ke laboratorium Pusat Sumber Daya Geologi Bandung, untuk di analisis. Analisis laboratorium terdiri dari analisis *retort dan Rock Eval Pyrolisis* . Hasil analisis laboratorium untuk *retorting* (8 conto; OBB-1, OBB-4, OBB-5, OW-1, OK-1, OS-1, BS-1 dan BS-2), *Pyrolisis Rock Eval* dan *Total Organic Carbon* (4 conto; BS-1, OBB-5, OK-1 dan OW-1) dibuat dalam bentuk deskriptif, diagram, dan tabulasi yang kemudian di analisis secara komprehensif.

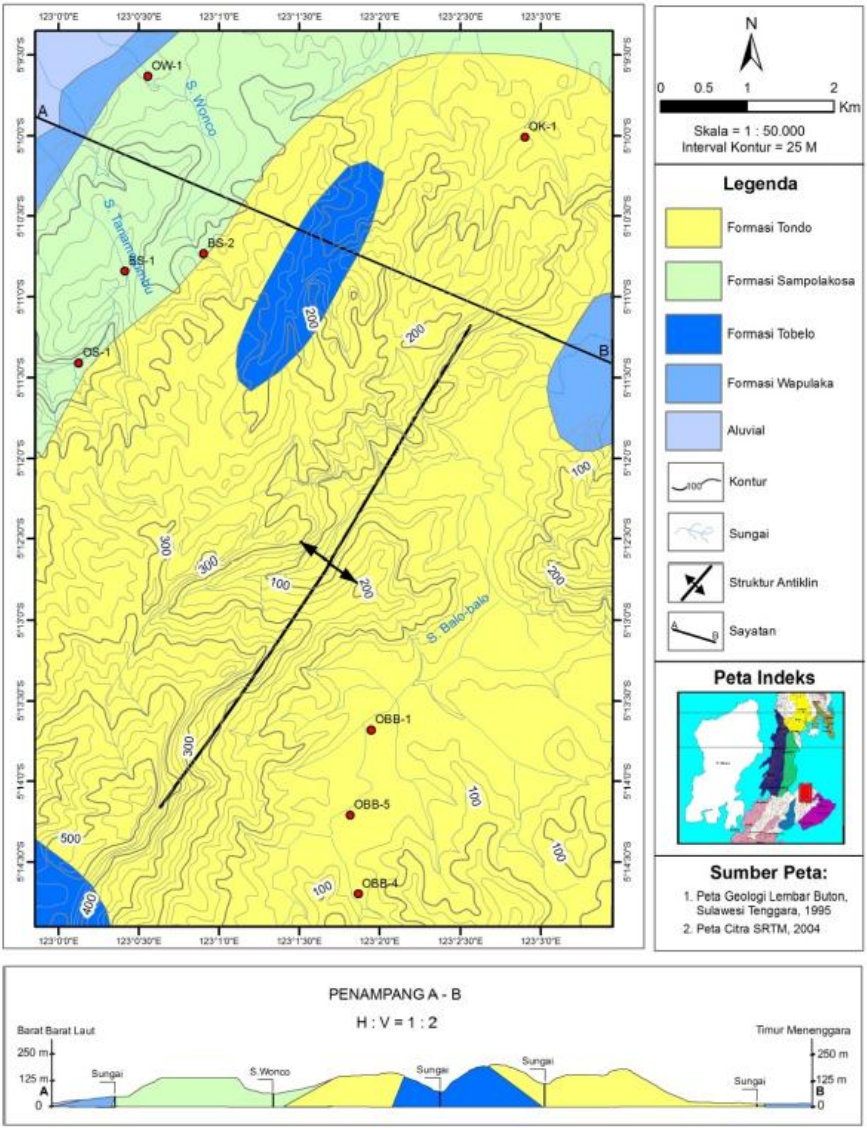

Gambar 2. Peta Geologi Regiona l Daerah Penelitian

Analisis *retort* digunakan untuk mengetahui kandungan minyak yang dihasilkan melalui proses pemanasan hingga suhu 500ºC (±20ºC) dengan menggunakan standar perlakuan ASTM-D 3904-80 dan ISO 647-1974. Analisis *Rock Eval Pyrolisis* dan *Total Organic Carbon* untuk mengetahui kandungan hidrokarbon bebas dan hidrokarbon yang bisa diperoleh melalui *cracking* kerogen. Data-data analisis *Rock Eval Pyrolisis* ini sangat berguna untuk mengetahui *oil generation* , tingkat kematangan dan peringkat batuan sumber.

HASIL

Hasil pengamatan dilapangan menunjukan lokasi penyelidikkan mempunyai satuan geomorfologi (berdasarkan van Zuidam, 1985) yang tersusun atas dataran rendah (27,95%), dataran rendah pedalaman dan perbukitan landai (47,78%), perbukitan bergelombang (22,72%) dan perbukitan tinggi (1,42%). Kondisi geologi daerah penelitian secara umum didominasi batu gamping, batu pasir, napal, konglomerat dan kerikil. Aspal mengisi pori batu gamping (Formasi Sampolakosa) dan batu pasir (Formasi Tondo) yang berse lang-seling dengan lapisan napal. Arah penyebaran aspal relatif Barat daya-Timur laut dan hanya berada pada sayap antiklin, sedangkan pada sumbu antiklin tidak ditemukan indikasi bitumen padat. Hasil analisis *Retort* memperlihatkan kandungan minyak 10-210 liter/ton dengan Specific gravity minyak 0,88-0,98, minyak tersebut digolongkan kedalam *normal crude oil - heavy crude oil* (Tabel 1).

Tabel 1. Kandungan Minyak Hasil Analisis Retort

kode conto	kandungan air	kandungan minyak	Berat jenis minyak
OW-1 *(outcrop)*	20 l/ton	80 l/ton	0,92 gr/ml
OK-1*(outcrop)*	10 l/ton	210 l/ton	0,88 gr/ml
BS-1*(coring)*	80 l/ton	60 l/ton	IS
BS-2 *(coring)*	80 l/ton	130 l/ton	0,98 gr/ml
OS-1*(outcrop)*	50 l/ton	110 l/ton	0,92 gr/ml
OBB-1*(outcrop)*	60 l/ton	30 l/ton	IS
OBB-4 *(outcrop)*	70 l/ton	10 l/ton	IS
OBB-5 *(outcrop)*	60 l/ton	20 l/ton	IS

Keterangan IS: *Insuficient Sample*

Hasil *Rock Eval Pyrolisis* dan *Total Organic Carbon* (TOC) menunjukkan kandungan hidrokarbon bebas (S1) dan kerogen (S2) yang tinggi (Tabel 2). Dari hasil analisis secara langsung di dapatkan kandungan TOC >5%, kandungan kerogen yang signifikan dan kemampuan menghasilkan minyak yang potensial, maka batuan sedimen yang kaya akan kandungan organik tersebut tergolong ke dalam jenis bitumen padat.

Tabel 2. Hasil Pyrolisis Rock Eval, Bitumen Padat Lasa limu Selatan

No.	Kode Conto	S1 (mg/g)	S2 (mg/g)	S3 (mg/g)	TOC (%)	T max (°C)	HI	OI	PY	PI
1.	BS-1	19.97	120.50	0.88	15.84	422.8	761	6	140.47	0.14
2.	OBB-5	1.24	21.57	0.45	3.07	410.0	702	15	22.81	0.05
3.	OK-1	23.71	163.57	0.72	17.49	428.0	935	4	187.28	0.13
4.	OW-1	5.07	82.48	0.02	8.25	428.2	1000	0	87.55	0.06

Keterangan

S1 = Jumlah hidrokarbon bebas dalam batuan yang terurai ketika suhu maksimum 300°C (mg hidrokarbon/g rock)

S2 = Hidrokarbon yang terbentuk oleh *cracking* kerogen ketika suhu 300 °C -650°C, dengan kenaikan suhu 25°C/menit (mg Hydrokarbon from kerogen pyrolisis/g rock)

S3 = Jumlah CO_2 yang dihasilkan selama pyrolisis kerogen (mgCO_2/g rock)

TOC = Kandungan material organik dalam batuan (% berat)

T_{max} = Temperatur maksimum ketika puncak hidrokarbon yang dihasilkan melalui pemecahan kerogen (S2)

HI = Perbandingan jumlah hidrokarbon (S2) terhadap TOC (mg Hydrokarbon (S2)/g TOC)

OI = Perbandingan jumlah CO_2 yang dihasilkan (S3) terhadap TOC (mg CO_2 (S3)/g TOC)

PY = Jumlah hidrokarbon yang bisa dihasilkan dari batuan (S1+S2) (mg hidrokarbon/g rock)

PI = Perbandingan jumlah hidrokarbon yang diproduksi terhadap jumlah hidrokarbon yang dapat dihasilkan oleh conto (mg hidrokarbon/g rock)

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa batuan sedimen yang mengandung aspal *impregnated* di lokasi penelitian dikelompokkan ke dalam bitumen padat, berdasarkan hasil analisis *retort, Pyrolisis Rock Eval* dan *Total Organic Carbon* (TOC). Hasil analisis *retort, Pyrolisis Rock Eval* dan *Total Organic Carbon* (TOC) menunjukkan korela si yang positif. Hasil ana lisis *Rock Eval* dengan cara korelasi silang a ntara nilai Hidrogen Index (HI) terhadap Oksigen Index (OI) menunjukkan material organik dari jenis kerogen tipe I (gambar 3a), yang berasal dari *lipid* alga setelah mengalami degradasi oleh bakteri, alterasi oleh proses dekomposisi, kondensasi dan polimerisasi.

Kerogen tipe I ini didominasi olehmasera l *Liptinite-Alginit* (ditunjukkan dengan nilai HI yang sangat tinggi >700 mg HC/TOC) dan kaya kandungan TOC, sehingga akan menghasilka n kandungan minyak yang signifikan (Waples, 1985; Peters dan Cassa, 1994). Tipe *Alginit* diya kini sebagai indikator suatu lingkungan pengendapan laut dangkal hingga ke transisi. Keberadaan maseral *Liptinite* yang dominan *Alginit* menunjukkan hubungan wilayah penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya ya ng menyatakan bahwa aspa l berasal dari lingkungan pengendapan marine carbonate (Tobing dan Widiarto, 2007). *Alginit* merupakan salah satu *source* hidrokarbon dan dikategorikan sebagai *very oil prone* (sangat menghasilkan minyak).

Hasil T_{max} yang ditunjukkan oleh pembacaan hasil *Rock Eval* adalah: T_{max}= 410°C - 428,2°C. Korelasi silang antara Hidrogen Index dan Temperatur maksimum saat *cracking* kerogen (T_{max}) menunjukkan tingkat kematangan yang *immature*.

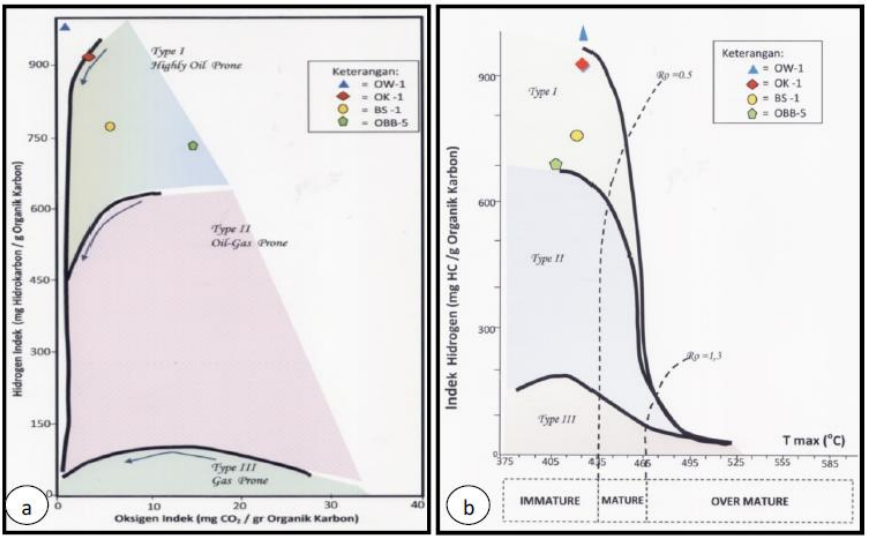

Gambar 3. Hasil *Rock Eval Pyrolisis; crossplot* (a) HI vs OI, (b) HI vs T_{max}

Korelasi silang antara Hidrogen Index (HI) dan TOC dari analisis Rock-Eval menunjukkan batuan merupakan batuan sumber penghasil minyak dengan kategori "*very good-excellent*" sedangkan *plotting* antara *pyrolisis yield* (PY) dan TOC menunjukkan potensi pembentukan minyak yang *excellent* (gambar 4 , hal ini sesuai dengan hasil analisis *retort* yang ditunjukkan oleh kandungan minyak 10-30 l/ton di bagian selatan wilayah penelitian, pada Formasi Tondo dan 60-210 l/ton di bagian utara wilayah penelitian, pada Formasi Sampolakosa. Untuk 2 conto inti bor pada kedalaman 3 meter kandungan minyaknya 60 liter/ton batuan (BS-1) dan 130 liter/ton batuan (BS-2).

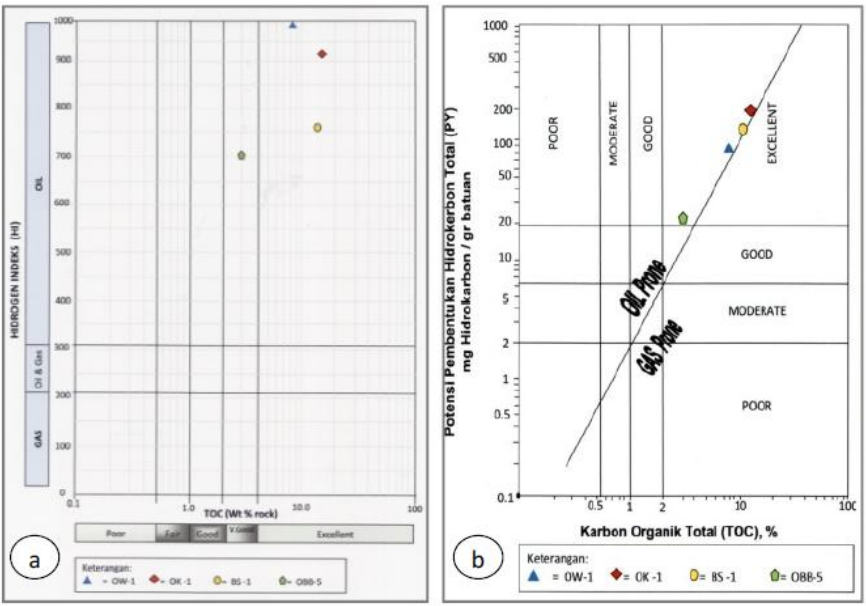

Gambar 4. Hasil *Rock Eval Pyrolisis; crossplot* (a) HI vs TOC, (b) PY vs TOC

Sedangkan diagram kandungan minyak hasil analisis retort dapat dilihat pada gambar dibawah.

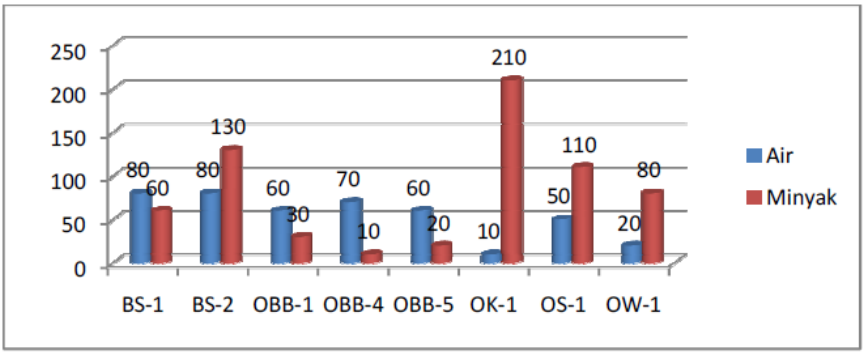

Gambar 5. Grafik Kandungan Minya k dan Air Hasil Analisis *Retort.*

Akan tetapi, bila semua kandungan minyak di dalam conto direrata (n = 8) diperoleh sekitar 81,25 liter per-ton batuan dengan ketebalan lapisan bitumen padat yang tersingkap dipermukaan 0, 3 -5 meter. Analisis retort memberikan jawaban secara visual tentang jumlah kandungan minyak dalam batuan. Hasil analisis Rock Eval memperlihatkan bahwa kandungan minyak dipengaruhi oleh *Total Organic Carbon*. Sedangkan *Total Organic Carbon* sebagai indika tor peringkat batuan sumber berkorelasi positif dengan *peak* S2 Rock Eval Pyrolisis (gambar 6 dan 7) yang hubungannya akan bermuara ke Hidrogen Index yang akan menentukan tipe kerogennya.

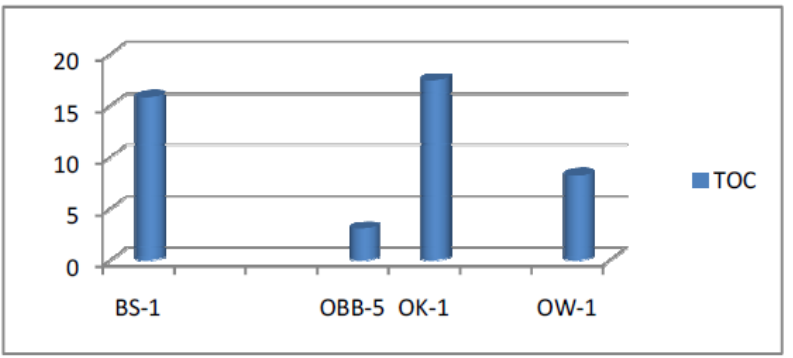

Gambar 7. Persentase ka ndungan TOC dalam conto (BS-1, OBB-5, OK-1 dan OW-1)

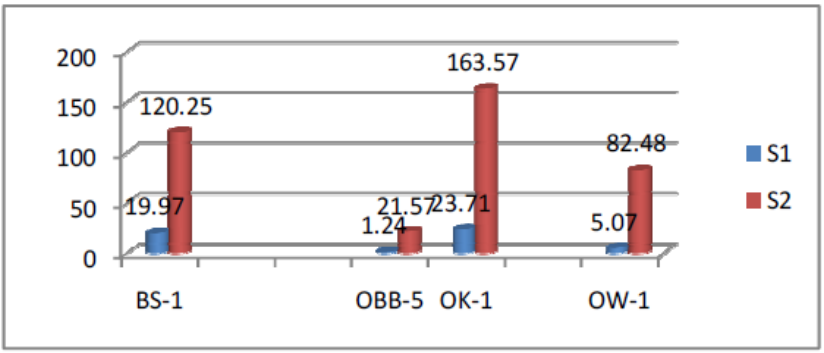

Gambar 8. Perbandingan S1 dan S2 bitumen padat (BS-1, OBB-5, OK-1 dan OW-1)

Dari ketiga gambar diatas dibuat hubungan ketiganya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hubungan antara analisis Retort dan Rock Eval Pyrolisis.

Kode Conto	Tipe Kerogen	Kandungan Minyak	TOC	S2 (mg HC/g rock)
OK-1	Tipe I *(Liptinit-Alginit)*	210 l/ton	17,49	163,57
OW-1	Tipe I *(Liptinit-Alginit)*	80 l/ton	8,25	82,48
BS-1	Tipe I *(Liptinit-Alginit)*	60 l/ton	15,48	120,50
OBB-5	Tipe I *(Liptinit-Alginit)*	20 l/ton	3,07	21,57

Kandunga n minya k selaras dengan tingginya nilai TOC dan S2 (pyrolisis Rock Eval). Anomali untuk conto BS-1 adalah inti bor yang sudah tersimpan selama ± 10 bulan, sehingga kemungkinan sudah terjadi kontaminasi, oksidasi dan mengalami banyak perekahan yang menyebabkan penyimpangan dalam hal kandungan minyak setelah *retorting.* Sehingga dengan jelas terlihat bahwa untuk dapat terjadi *oil generation* dipengaruhi tipe kerogennya. Jikakerogen merupakan jenis tipe I atau tipe II dengan kandungan hidrogen yang tinggi atau dominan berasal dari kelompok liptinit, maka cenderung akan menghasilkan minyak.

Kemudian analisis retort menghasilkan minyak dengan berat jenis 0,88-0,98 gram/ml. Minyak jenis ini termasuk normal *crude oil - heavy oil. Heavy oil* adalah produk hidrokarbon ya ng masih terdapat dalam batuan berpori (batu pasir, karbonat) setelah degradasi hidrokarbon tersebut. Kategori *immature heavy oil* ini, terdiri atas senyawa yang beraneka ragam (resin dan aspal) yang disebabkan oleh penguraian kerogen. Jenis ini memiliki kandungan nitrogen dan sulphur yang tinggi. Kondisi yang memungkinkan untuk jenis *immature heavy oil* ini adalah ketika *source rock* berfungsi ganda sebagai *reservoar* atau sebagai *fracture* batu gamping (Tissot dan Welte ,1984). Berdasarkan diagram korelasi pengamatan mikroskopis dan parameter kimia (Hunt, 1996), nilai *Production Index* (S1/S1+S2) dan nilai T_{max} dari pyrolisis *Rock Eval* menunjukkan batuan yang me ngandung aspal masih berada pada tahap diagenesis menuju *early* catagenesis. Tahapan diagenesis berada pada kedalaman < 2000 meter dengan nilai Ro =0,5% (Waples 1985; Kantsler *et.al.* , 1978). Nilai *production index* (PI) <0,2 menunjukkan bahwa batuan sedimen tersebut kemungkinan sudah mulai mendekati *oil birth line* terutama untuk conto OK-1 dan BS-1, akan tetapi sec ara kese luruhan masih bersifat *immature,* dengan paleotemperatur < 70^{o}C (Gambar 9).

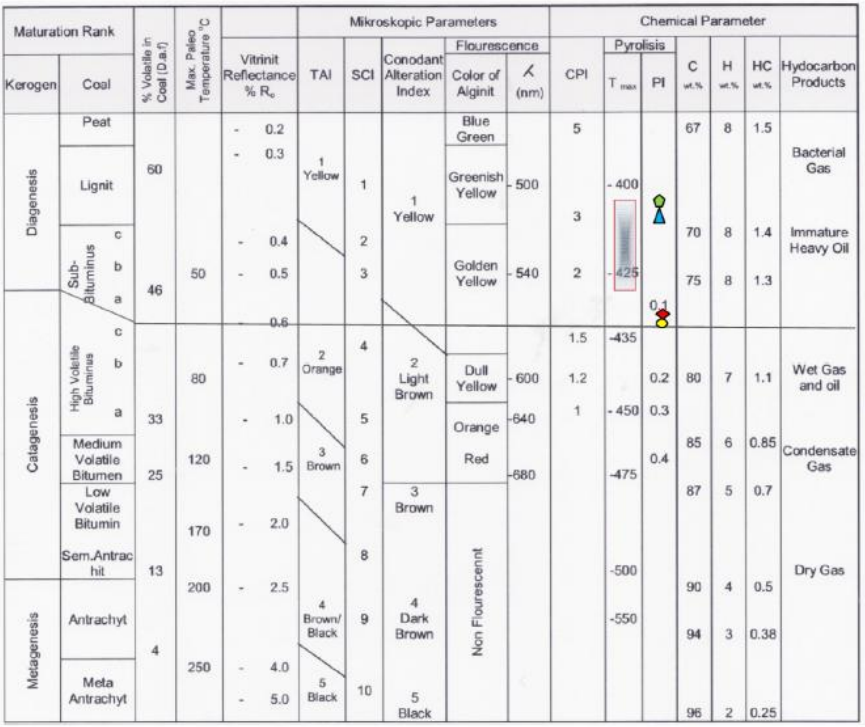

Gambar 9. Diagram Korelasi Pengamatan Mikroskopis dan Parameter Kimia (Hunt, 1996)

(keterangan : ⬟ OBB-5, ▲OW-1, ◆OK-1, ⬭BS-1)

Apabila gradien geothermal di wilayah tersebut diasumsikan 1,4°F/100 feet (Davidson, 1991), dan suhu permukaan 30°C, maka *oil window* akan berada pada kedalaman 1380 meter sampai 5700 meter. Sehingga bitumen padat atau aspal *impregnated* tersebut besar kemungkinan belum berada pada *burial depth* untuk mencapai *oil window*. Keberadaan aspal yang mengisi pori batuan diprediksi berasal dari kerogen yang *immature* menuju *early mature* tanpa me ngalami masa *catagenesis* untuk menjadi minyak berdasarkan prediksi *paleotemperatur* yang pernah dialaminya, yang kemudian oleh proses tektonik Pulau Buton mengalami *uplift* , perlipatan dan erosi yang mengakibatkan batuan aspal berada dekat permukaan dan tersingkap.

Kemudian satu hal lagi, bahwa perbandingan antara nilai S1 dan TOC dapat menunjukkan perbedaan *nonindigenous* dan *indigenous hydrocarbon* (Hunt dalam Shiri *et.al.,* 2013) seperti pada gambar dibawah ini.

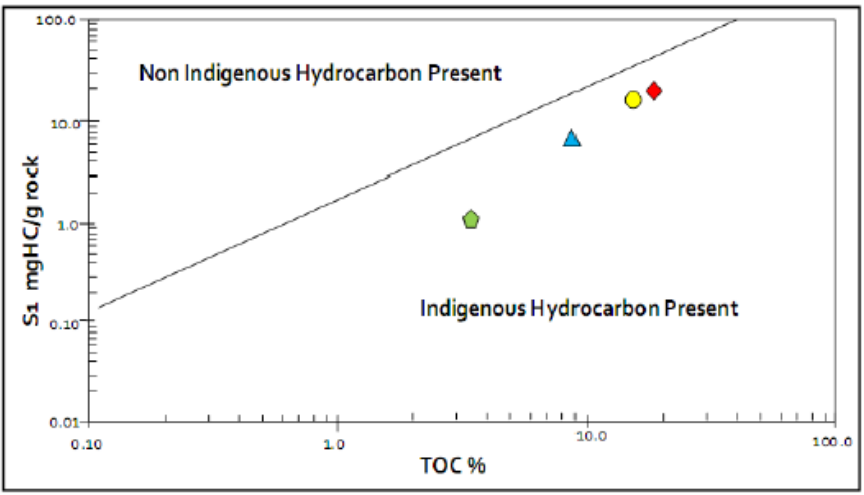

Gambar 10. Hasil *Rock Eval Pyrolisis; crossplot* S1 vs TOC
(keterangan := ⬟ OBB-5, ▲ OW-1, ◆ OK-1, ● BS-1)

Indigenous hydrocarbon atau *primary authigenic* bitumen merupakan bentuk bitumen padat yang terbentuk langsung dari materia l organik di dalam shale atau batuan karbonat. Tipe ini biasanya mengisi pori-pori batuan, rekahan dan tektonik *cracks*. Indigenous hydrocarbon membuktikan bahwa tidak terjadi migrasi hidrokarbon dalam skala besar karena belum terjadi kematangan untuk merubah kerogen menjadi bitumen (Yen dan Chillingarian, 2000). Dari 4 conto yang dilakukan analisis Rock Eva l, semuanya menunjukkan indigenous hydrocarbon yang berarti bahwa aspal di daerah penelitian merupakan produk insitu, sehingga aspal yang terdapat didaerah penelitian merupakan *primary authigenic* bitumen atau proto-bitumen.

Bitumen padat berbeda dengan source rock pada *oil generation*, karena pada bitumen padat tidak diperlukan kedalaman seperti oil window, kerogen berada pada tahap *immature* menuju *early mature*, dan

terutama memiliki kandungan zat organik yang tinggi. Conto dengan kode OK-1, OW-1 dan BS-1 menunjukkan nilai TOC > 5% dari berat batuan dan menghasilkan minyak melalui *retort* analisis sebanyak 60-210 liter/ton. Sedangkan conto dengan kode OBB-5 menunjukkan TOC < 5%, dan menghasilkan minyak kurang dari 30 liter/ton batuan. Menurut Tissot dan Welte (1984), nilai ambang batas kandungan organik pada batua n sumber bitumen padat adalah 5% dengan kemampua n mengalirkan minya k 25 liter/ton batuan.

Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *thermal maturity* di luar graben lawele (daerah penelitian) dalam kondisi *immature* sama dengan sebagian besar *thermal maturity* didalam graben lawele. Namun kerogen tipe II dari Formasi Winto (Davidson, 1991; Tobing dan Widiarto, 2007) besar kemungkinan bukan merupakan sumber dari aspal/bitumen padat pada wilayah tersebut karena batuan sumber dari aspal/ bitumen padat daerah pene litian berasal dari kerogen tipe I yang secara teori lebih bagus jika dibandingkan dengan kerogen tipe II dalam potensi menghasilkan minyak. Dari semua hasil analisis pene litian ini maka aspal adalah proto-bitumen pada Formasi Tondo dan Formasi Sampolakosa karena tingkat kematangan yang rendah dan memiliki kerogen dalam jumlah signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disarikan;

1. Hasilanalisis *rock eval pyrolisis* menunjukkan kematangan bitumen padat "*immature*" dengan jenis kerogen Tipe I (Liptinit-Alginit) dan peringkat batuan sumber dalam kategori "*very good-excellent* " untuk menghasilkan minyak selaras dengan hasil analisis *retort* yang menunjukkan kandungan minyak 10 -210 l/ton.
2. Batuan sedimen yang kaya akan material organik (TOC >5%) tersebut berasal dari *marine sediment* ditunjukkan oleh nilai HI >700. Bitumen padat (kerogen tipe I) belum mengalami *burial*

depth yang tepat untuk masuk ke *oil window*, dan akhirnya mengalami *uplift* dan erosi akibat proses tektonik yang mengakibatkan proto-bitumen tersingkap dekat permukaan.

3. Batuan aspal didaerah penelitian tergolong bitumen padat karena memiliki kandungan organik yang tinggi dari jenis kerogen tipe I (Alginit-Lamalginit),tingkat kematangannya *immature*, dan berada di kedalaman yang relatif dangkal serta mampu menghasilkan minyak bila di pirolisis.

DAFTAR PUSTAKA

Davidson, W.J. (1991). *The Geology And Prospectivity Of Buton Island, S. E. Sulawesi, Indonesia*. Indonesian Petroleum Association, 20th Annual Convention Proceeding.

Dyni, J.R. (1999). *Coal, Oil Shale, Natural Bitumen, Heavy Oil and Peat,* Origin and Resources of World Oil Shale – Vol. II. US Geological Survey: Denver USA

Hunt, J.M. (1996). *Petroleum Geochemistry and Geology. 2nd edition*. W.H, Freeman, New York.

Kantsler, A.J., Cook, A.C., and Smith, G.C. (1978), *Rank variation, calculated paleotemps in understanding oil, gas occurrence* . Oil and Gas Journal, Nov. 20, p.196-205.

Peters, K.E. and Cassa, M.R. (1994), *Applied Source Rock Geochemistry.* Mobil Exploration and Producing Technica l Centre. Dallas, Texas, USA. AAPG Memoir 60

Shiri, M., Karami, R.R., Harami, R.M., Rezaee M. (2013), *Evaluation of organic carbon content and source rock maturity using petrophysical logs and geochemical data: Case study of Horn Valley Siltstone source rock, Amadeus Basin, Central Australia.* Journal of Zankoy Sula imani-Part A (JZS-A), 2013, 15 (3)

Sikumbang, N., Sanyoto, P., Supandjono, R.J.B. dan Gafoer, S. (1995), *Peta Geologi Lembar Buton, Sulawesi Tenggara* skala 1:250.000. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi: Bandung

Subarnas, A. (2001). *Laporan Inventarisasi Pendahuluan Endapan Bitumen Padat Di Daerah Pasar Wajo dan Sekitarnya, Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Peta: 2210-62)*. Direktorat Inventaisasi Sumber Daya Mineral: Bandung.

Suryana, A. (2003). *Laporan Inventarisasi Endapan Bitumen Padat dengan 'Outcrop Drilling' di Daerah Buton Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.* Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Minera l: Bandung.

Tissot, B. P., and Welte, D. H. (1984). *Petroleum Formation and Occurrence*. Second Revised and enlarged edition. Springer–Verlag, Berlin. 699 pp.

Tobing S.M. (2005). *Inventarisasi Endapan Bitumen Padat di Daerah Sampolawa dan sekitarnya, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara***.** Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral: Bandung.

Tobing S.M dan Widiarto F.X. (2007). *Aspal Buton: Analisis dan Kajian Geokimia Hidrokarbon.* Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung.

Van Zuidam, R.A. (1985). *Aerial Photo-Interpretation Terrain Analysis and Geomorphology Mapping.* Smith Publisher The Hague, ITC.

Waples, D.W. (1985), *Geochemistry in Petroleum Exploration*. Geological Sciences Series. International Human Resources Development Corporation, Boston

Yen, T.F, and Chilingarian, G.V. (2000). *Asphalthene and Asphalt 2*, Scholl of engineering University Southern California, Los Ange le s USA.

KESEHATAN

DETERMINAN PERILAKU PENERAPAN GIZI SEIMBANG PADA LANSIA DI PUSKESMAS TANJUNG PINANG

Oleh:
Herdianti[1], Asmah[2], Erris Siregar[3]

[1]Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKES Harapan Ibu, Jambi
[2]Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKES Harapan Ibu, Jambi
[3]Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKES Prima, Jambi

ABSTRAK

Pola makan merupakan perilaku penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Pola makan yang baik adalah berpedoman pada gizi seimbang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang berkunjung ke puskesmas Tanjung Pinang sebanyak 6063 kunjungan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 April sampai 20 April 2016 sebanyak 95 responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden.Hasil Distribusi frekuensi hubungan pengetahuan, sikap dan peran keluarga dengan perilaku pedoman gizi seimbang, Hasil uji statistik di peroleh *p-value* < 0,05. Hasil uji ini menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan (p-value = 0,000), sikap (p-value = 0,000) dan peran keluarga (p-value = 0,010) dengan perilaku pedoman gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016.

Kata kunci: pengetahuan, sikap, keluarga, gizi

ABSTRACK

Diet is an important behavior that may affect nutritional status. The state of good nutrition can improve the health of individuals and communities. A good diet is based on the balanced nutrition. This research is a quantitative research with cross sectional study design. The population in this study were all elderly people who visit the health center cape nut as much as 6063 visit. This study was conducted on 06 April to 20 April 2016 as many as 95 responden. Sampling using accidental sampling technique. The process of data collection is done by distributing questionnaires to the respondents. The frequency distribution of the correlation between knowledge, attitude and behavior of the role of families with balanced nutrition guidelines, statistical test result was obtained p- value < 0.05. The results of this test showed that there is a relationship between knowledge (p - value = 0.000), attitude (p - value = 0.000) and the role of the family (p - value = 0.010) with behavioral guidelines for balanced nutrition in the elderly in Puskesmas Tanjung Pinang city of Jambi in 2016.

Keywords: *knowledge, attitude, family, nutrition*

PENDAHULUAN

Pedoman Gizi Seimbang (PGS) telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1955. Pedoman tersebut menggantikan slogan "4 sehat 5 sempurna" yang telah dikenalkan sejak yahun 1952 dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Tahun 1990-an kita sudah punya Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Lebih dari 15 tahun lalu pedoman gizi seimbang telah dikenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, namun masih banyak masalah dan kendala dalam sosialisasi Gizi Seimbang sehingga harapan untuk merubah perilaku gizi masyarakat kearah perilaku gizi seimbang belum sepenuhnya tercapai. Konsumsi pangan belum seimbang baik kuantitas maupun kualitasnya, dan perilaku hidup bersih dan sehat belum memadai[4].

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa di tahun 2050 jumlah warga lansia akan mencapai sekitar 60 juta jiwa, yang menyebabkan Indonesia berada pada peringkat ke 4 penduduk lansia terbanyak setelah China, India dan Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah lansia menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan lansia. Masalah tersebut jika tidak ditangani akan berkembang menjadi masalah yang kompleks dari segi fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka[10].

Lanjut usia merupakan proses menua pada manusia yang tidak dapat dihindarkan, salah satu tanda penurunan fungsi tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan dan merupakan tahap akhir dari siklus kehidupan manusia, sering ditandai dengan kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini merupakan beban berat bagi lansia yang dapat menimbulkan depresi[5].

Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi: perubahan penampilan pada bagian

wajah, tangan, dan kulit. Perubahan bagian dalam rubuh seperti sistem saraf, otak, isi perut, limpa, hati. Perubahan panca indera, pengelihatan, pendengaran, penciuman, perasa. Dan perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan. Kecepatan di dalam bergerak. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang secara umum berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari[8].

Gizi (nutrisi) adalah diet berimbang dengan memasukkan unsur makanan empat sehat. Lansia memerlukan nutrisi yang baik, bahan bergizi seperti protein, mineral, kalsium, dan vitamin harus tersedia dalam jumlah yang cukup, kebutuhan gizi lansia hampir sama dengan kebutuhan gizi dari generasi yang lebih muda[3].

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Jambi jumlah lansia yang paling banyak berada di Puskesmas Tanjung Pinang dengan jumlah 14232 jiwa. Pada tahun 2014 di Puskesmas Tanjung Pinang jumlah lansianya hanya 5280 jiwa. Meningkatnya jumlah lansia yang ada di Puskesmas Tanjung Pinang menyebabkan masalah Indeks Masa Tubuh (IMT) menduduki urutan teratas paling banyak diderita lansia di Puskesmas Tanjung Pinang dibandingkan puskesmas lainnya[1].

Berdasarkan data dari Puskesmas Tanjung Pinang diketahui bahwa terdapat 5 penyakit yang sering di derita lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pinang yaitu diantaranya Indeks Masa Tubuh (IMT), Tekanan darah, Anemia, Kencing Manis, dan Gangguan Ginjal. Yang mana masalah IMT menduduki urutan teratas yaitu dengan jumlah 2314 yang menjadi permsalahan pada lansia. IMT merupakan salah satu indikator yang dapat dipercayai untuk mengukur lemak tubuh seseorang. Terbukti bahwa di Puskesmas Tanjung Pinang banyak terdapat lansia yang IMT nya berlebih, hal tersebut disebabkan oleh perilaku konsumsi pangan yang tidak baik[7].

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Peran Keluarga Dengan Perilaku Penerapan Gizi Seimbang Pada Lansia Di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2016.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan peran keluarga dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi dimulai dari tanggal 06 sampai dengan 20 April Tahun 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang berkunjung ke Puskesmas Tanjung Pinang yang berjumlah 6063 kunjungan di tahun 2015.

Pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental sampling*. Data dikumpulkan dengan cara menanyakan kepada responden yang dibantu dengan kuesioner. Hasil penelitian ini di analisis secara univariat dan bivariat dengan bantuan computer (*Chi square-test*).

HASIL

Hasil Univariat

1. **Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan pengetahuan**

   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dimana yang termasuk pengetahuan rendah berjumlah 50 responden (52,6%). Sedangkan 45 responden (47,4%) dikategorikan kedalam pengetahuan tinggi. (Tabel 4.3).

2. **Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan sikap**

   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dimana yang termasuk sikap negatif berjumlah 50 responden (52,6%), sedangkan 45 responden (47,4%) dikategorikan kedalam sikap negatif. (Tabel 4.4).

3. **Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan peran keluarga**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dimana yang termasuk kurang baik berjumlah 48 responden (50,5%). Sedangkan 47 responden (49,5%) di kategorikan kedalam peran keluarga yang baik. (Tabel 4.5).

4. **Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan pedoman gizi seimbang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dimana yang termasuk perilaku buruk berjumlah 48 responden (50,5%). Sedangkan 47 responden (49,5%) dikategorikan kedalam perilaku baik. (Tabel 4.6).

Tabel 1: Analisa Univariat Pengetahuan, Sikap Dan Peran Keluarga Dengan Perilaku Penerapan Gizi Seimbang Pada Lansia Di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2016

Variabel	n		%
Pengetahuan			
Rendah	50		52,6 %
Tinggi	45		47,4 %
Sikap			
Negative	50		52,6 %
Positif	45		47,4 %
Peran Keluarga			
Kurang baik	48		50,5 %
Baik	47		49,5 %
Perilaku Penerapan Gizi Seimbang			
Perilaku buruk	48		50,5 %
Perilaku baik	47		49,5 %

Hasil Bivariat

1. **Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Penerapan Gizi Seimbang**

   Hasil distribusi frekuensi hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan gizi seimbang diketahui bahwa dari 50 responden dengan pengetahuan rendah terhadap penerapan gizi seimbang sebesar 33 responden (68,8%) mempunyai perilaku buruk terhadap penerapan Gizi Seimbang dan yang memiliki perilaku baik sebanyak 17 responden (36,2%). Sedangkan dari 45 responden dengan pengetahuan tinggi 15 responden (31,2%) memiliki peilaku buruk dan 30 responden (63,8%) memiliki perilaku baik terhadap penerapan gizi seimbang. (Tabel 4.7).

   Hasil uji statistic diperoleh *p-value* (p<0,000). Hasil uji ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016.

2. **Hubungan sikap Dengan Perilaku Penerapan Gizi Seimbang**

   Hasil distribusi frekuensi hubungan sikap dengan perilaku penerapan gizi seimbang diketahui bahwa dari 50 responden dengan sikap negatif terhadap penerapan gizi seimbang sebesar 39 responden (82,2%) mempunyai perilaku buruk terhadap penerapan gizi seimbang dan yang memiliki perilaku baik sebanyak 11 responden (23,4%). Sedangkan dari 45 responden dengan sikap positif 9 responden (18,8%) memiliki peilaku buruk dan 36 responden (76,6%) memiliki perilaku baik terhadap penerapan gizi seimbang. (Tabel 4.8).

   Hasil uji statistic diperoleh *p-value* (p<0,000). Hasil uji ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016.

3. Hubungan Peran Keluarga Dengan Perilaku Penerapan Gizi Seimbang

Hasil distribusi frekuensi hubungan peran keluarga dengan perilaku penerapan gizi seimbang diketahui bahwa dari 48 responden dengan peran keluarga kurang baik terhadap penerapan gizi seimbang sebesar 31 responden (64,6%) mempunyai perilaku buruk terhadap penerapan gizi seimbang dan yang memiliki perilaku baik sebanyak 17 responden (36,2%). Sedangkan dari 47 responden dengan peran keluarga baik 17 responden (35,4%) memiliki perilaku buruk dan 30 responden (63,8%) memiliki perilaku baik terhadap penerapan gizi seimbang. (Tabel 4.9).

Hasil uji statistic diperoleh *p-value* (p<0,010). Hasil uji ini menunnjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara peran keluarga dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016.

Tabel 2: Analisa Bivariat Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Peran Keluarga Dengan Perilaku Penerapan Gizi Seimbang Pada Lansia Di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2016

Variabel	perilaku penerapan gizi seimbang				Total		*p-value*
	perilaku buruk		perilaku baik				
	n	%	n	%	n	%	
Pengetahuan							
Rendah	33	68,8	17	36,2	50	52,6	0,000
Tinggi	15	31,2	30	63,8	45	47,4	
Sikap							
Negatif	39	81,2	11	23,4	50	52,6	0,000
Positif	9	18,8	36	76,6	45	47,4	

peran keluarga							
Kurang baik	31	64,6	17	36,2	48	50,5	0,010
Baik	17	35,4	30	63,8	47	49,5	

PEMBAHASAN

1. Hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan gizi seimbang

Dari uraian kuesioner di ketahui pengetahuan responden masih rendah tentang perilaku gizi seimbang, dari hasil penelitian diketahui dari 50 responden dengan pengetahuan rendah sebagian besar (52,6%).

Hasil uji statistik diperoleh *p-value* =0,000 (p-value <0,05). Hasil uji ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016.

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini setelah orang melakukan pengenderaan terhadap suatu obyek tertentu. Peng-inderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera pengelihatan, indera pendengaran, indra rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga[11].

Menurut Siti Pentingnya pengetahuan gizi seimbang didasarkan pada tiga kenyataan yaitu status gizi yang cukup penting bagi kesehatan, pengetahuan mempengaruhi dalam penyediaan makanan sesuai kebutuhan tubuh, dan peneraan ilmu gizi dalam sehari-hari sebagai usaha perbaikan gizi[9].

Dari 95 responden terdapat 65 responden yang tidak mengetahui jika mengkonsumsi ikan dan susu dapat menambah kepadatan tulang, kemudian dari 95 responden terdapat 75 responden yang tidak mengetahui jika mengkonsusmsi sayuran dan buah-buahan dapat mencegah penyakit tidak menular kronik.

Menurut peneliti hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah ketikdatahuan lansia akan manfaat dari mengkonsumsi pangan seperti kedele, tempe, ikan, susu, sayuran dan buah-buahan, ketidaksukaan lansia untuk meminum susu, sehingga hal ini mencerminkan ketidaktahuan lansia dalam mengkonsumsi beranekaragam pangan yang merupakan indikator dalam mewujudkan gizi seimbang. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak responden yang memiliki pengetahuan rendah terhadap penerapan perilaku penerapan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tentang rendahnya pengetahuan lansia terhadap penerapan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari adalah diharapkan kepada pihak Puskesmas Tanjung Pinang untuk memberikan informasi secara detail tentang susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu berpedoman pada gizi seimbang yang merupakan anjuran penting untuk mewujudkan gizi seimbang.

2. Hubungan sikap dengan perilaku penerapan gizi seimbang

Dari uraian kuesioner di ketahui sikap responden masih negatif tentang perilaku gizi seimbang, dari hasil penelitian diketahui dari 50 responden dengan sikap negatif sebagian besar (52,6%).

Hasil uji statistik diperoleh *p-value* =0,000 (p-value <0,05). Hasil uji ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016.

Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau obyek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya)[6].

Menurut Siti Sikap gizi adalah sikap manusia terhadap makanan dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan sosial, kesukaan dan berbagai pengalaman yang diperoleh menentukan individu untuk menyatakan sikap suka atau tidak suka terhadap makanan. Selain itu respons seseorang terhadap makanan juga dipengaruhi oleh makanan yang sehat dan kenyamanan seseorang terhadap makanan[9].

Dari 95 responden terdapat 24 responden yang menunjukkan sikap sangat tidak setuju dalam membatasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Dan dari 95 responden terdapat 21 responden yang memiliki sikap sangat tidak setuju dalam melakukan aktifitas fisik untuk mempertahankan berat badan normal.

Menurut peneliti hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah jumlah pangan asin, manis, dan berlemak yang dikonsumsi lansia perharinya, selain itu sikap negatif lansia yang sangat tidak setuju dalam melakukan aktifitas fisik untuk mempertahankan berat badan normal dapat disebabkan oleh keadaan tubuh lansia yang semakin menurun atau terkena penyakit seperti rematik, anemia, biabetes dan lain-lain.

Maka dari itu upaya yang perlu dilakukan oleh Pihak Puskesmas Tanjung Pinang adalah memberikan informasi tentang batasan mengkonsumsi pangan manis, asin dan berlemak agar lansia terhindar dari berbagai penyakit dan supaya lansia tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar lansia dapat mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi.

3. Hubungan peran keluarga dengan perilaku penerapan gizi seimbang

Dari uraian kuesioner di ketahui peran keluarga responden masih kurang baik tentang perilaku penerapan gizi seimbang, dari hasil penelitian diketahui dari 48 responden

dengan peran keluarga yang kurang baik sebagian besar (50,5%).

Hasil uji statistik diperoleh *p-value* = 0,010. Hasil uji ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara peran keluarga dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016.

Keluarga merupakan peranan yang sangat penting dalam upaya perawatan orang tua dengan penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan bagi agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anggota keluarga salah satunya lansia menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat memenuhi kebutuhan insane (manusia) terutama kebutuhan bagi perkembangan kepribadian dan pengembangan ras manusia[2].

Dari 95 responden yang memiliki peran kelurga untuk menyarankan agar mengkonsumsi air minum 6 gelas perhari terdapat hasil 49 responden menjawab selalu, 35 responden menjawab sering, dan 21 responden lainnya menjawab kadang-kadang. Dari hasil kuesioner tentang peran keluarga yang terdiri dari 10 pertanyaan, peran keluarga dalam menyarankan lansia untuk mengkonsunsi air minum sebayak 6 gelas perhari adalah kategori jawaban kadang-kadang paling tinggi diantara lainnya.

Menurut peneliti hal ini terjadi karena keluarga mengerti keadaan lansia yang kurang dalam mengkonsusmsi air minum sebanyak 6 gelas perhari, selain itu keluarga juga tidak ingin memaksakan lansia untuk mengkonsumsi pangan yang telah disediakan. Hal ini membuktikan bahwa peran keluarga sangat dibutuhkan dan berhubungan dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia dalam mengkonsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lansia sehari-hari.

Maka dari itu upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga adalah agar lebih cermat dan teliti dalam memilih pangan kemasan untuk lansia. Dan untuk pihak para pengusaha pangan olahan kemasan diwajibkan mencantumkan informasi nilai gizi pada label pangan agar masyarakat dapat memilih makanan sehat sesuai kebutuhan setiap anggota keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2016 didapat kesimpulan bahwa:

1. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dangan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang dengan *p-value* 0,000.
2. Ada hubungan yang bermakna antara sikap dangan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang dengan *p-value* 0,000.
3. Ada hubungan yang bermakna antara peran keluarga dangan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia di Puskesmas Tanjung Pinang dengan *p-value* 0,010.

Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Jambi agar terus meningkatkan pengawasan ke puskesmas dan rutin melaksanakan evaluasi program/kegiatan khususnya pada lansia. Kemudian untuk Puskesmas Tanjung Pinang agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan terkait masalah perilaku penerapan gizi seimbang bagi lansia dan untuk ilmu kesehatan masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi ilmu kesehatan masyarakat khususnya tentang hubungan pengetahuan, sikap dan peran keluarga dengan perilaku penerapan gizi seimbang pada lansia kemudian untuk peneliti selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan, sikap dan peran keluarga dengan perilaku penerapan

gizi seimbang pada lansia serta dapat memberikan pandangan untuk penelitian lanjut dengan metode yang berbeda dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dinas Kesehatan Kota Jambi, (2015). Pencapaian kegiatan kesehatan kelompok usia lanjut tahun 2015. Jambi
2. Hadi. irvinda (2009). Gambaran peran keluarga terhadap perilaku hidup sehat lanjut usia di wilayah kerja di puskesmas di darussalam kecamatan medan petisah tahun 2009. Skripsi
3. Ikbal, Wahit. (2009). Ilmu keperawatan komunitas konsep dan perilaku. Salemba Medika
4. Irianto, Koes. (2014). Gizi seimbang dalam kesehatan reproduksi. Alfabet Bandung
5. Kristyaningsih, Dewi. (2011). Hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat depresi pada lansia. Vol 01. No 01.
6. Notoatmodjo. (2014). Ilmu perilaku kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
7. Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun (2015). Pencapaian hasil kegiatan kesehatan kelompok usila. Jambi
8. Simanullung, Poniyah. (2011). Pengaruh gaya hidup terhadap status kesehatan lanjut usia (lansia) di wilayah kerja puskesmas Darussalam medan.
9. Siti, Isnaini, (2011). Hubungan antara pengetahuan dan sikap perilaku gizi seimbang pada lansia. Tesis
10. Sutikno, Ekawati. (2011). Hubungan fungsi keluarga dengan kualitas hidup lansia. Tesis
11. Wawan, A. (2010). Teori & pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia. Yogyakarta: Nuha Medika

PERAWATAN METODE KANGGURU DENGAN *SIMPLE SUPPORT BINDER* TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI IBU MERAWAT BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR)

Oleh:
Bina Melvia Girsang
Universitas Sriwijaya Palembang
Email/No Hp: binamelvia@gmail.com/ 081389244100

ABSTRAK

Ibu merasa takut dan tidak percaya diri dalam melakukan perawatan metode kangguru karena fasilitas dan peralatan dalam perawatan metode kangguru dirancang belum memberikan perasaan nyaman. Ketersediaan fasilitas dan rancangan peralatan yang diperlukan saat memulai perawatan masih sangat minimal dan belum memperhatikan kenyamanan dan kesesuaian dengan kultur daerah setempat. Aplikasi perawatan metode kangguru diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi berat lahir rendah, sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi berat lahir rendah dengan fasilitas *simple support binder* yang dirancang dengan memperhatikan kenyamanan ibu dalam melakukan perawatan metode kangguru di wilayah kerja puskesmas 26 Ilir Palembang. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quasi experiment* dalam satu kelompok (*one group pre test post test design*) dengan jumlah populasi sebanyak 18 ibu dengan BBLR. Jumlah sampel penelitian sebanyak 16 ibu dengan dengan teknik pengambilan *purposive sample* dengan kriteria inklusi Ibu dengan bayi dengan berat lahir ≤ 2500 gram, tidak ada kegawatan nafas, sirkulasi,

dan suhu stabil,sedangkan kriteria ekslusi adalah ibu dengan bayi berat lahir > 2500 gram, kondisi tidak stabil (pernafasan, sirkulasi, suhu), dan kelainan kongenital. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner penilaian kepercaya-an diri ibu dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik *wilcoxon* dengan hasil statistik didapatkan nilai *significancy* 0,000 ($p < 0,05$). Pemanfaatan *simple support binder* dapat membantu ibu dengan bayi berat lahir rendah lebih percaya diri dalam melakukan perawatan metode kangguru sehingga dapat men-dukung kontinuitas perawatan selama di rumah dan menekan tingkat morbiditas dan mortalitas bayi berat lahir rendah.

Kata kunci: Berat lahir bayi, percaya diri, metode kangguru, *simple support binder*

ABSTRACT

Mother felt scared and not confident in doing kangaroo care method for facilities and equipment in the kangaroo care method is designed not give a comfortable feeling. The availability of facilities and design tools needed to start treatment is very minimal and not pay attention to comfort and compliance with local culture. Applications kangaroo care method is required to increase the confidence of the mother in the care of low birth weight babies, so that the study was conducted to look at the mother's confidence in the care of low birth weight infants with simple facilities support binderyang designed with attention to comfort the mother in the treatment method of kangaroos in the working area 26 health centers Ilir Palembang. The research design used in this study is Quasi-experimental in one group (one group pretest posttest design) with a total population of 18 mothers with low birth babies. Total sample of 16 mothers with a purposive sample retrieval techniques with the inclusion criteria mothers with babies with birth weight ≤ 2500 grams, no gravity breathing,

circulation, and temperature stable, while the exclusion criteria were mothers with infant birth weight > 2500 grams, the condition is not stable (breathing, circulation, temperature), and congenital anomalies. Data collected by using a self-assessment questionnaire maternal confidence and analyzed using the wilcoxon statistical test results obtained statistical significancy value of 0.000 (p <0.05). Utilization simple binder support can help mothers with low birth weight babies are more confident in doing kangaroo care method that can support the continuity of care for the home and reduce the level of morbidity and mortality low birth weight babies.

Keywords: *confidence, kangaroo method, low birth babies, support simple binder*

****

PENDAHULUAN

Pada laporan WHO yang dikutip dari *State of the world's mother* 2007 (data tahun 2000-2003) dikemukakan bahwa 27% kematian neonatus disebabkan oleh Bayi Berat Lahir Rendah (WHO, 2003). Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang ketika dilahirkan mempunyai berat badan kurang dari 2500 gram (Yulifah, 2009). Sedangkan menurut Protokol Asuhan Neonatal bahwa semua bayi yang lahir dengan berat sama atau kurang dari 2500 gram disebut bayi berat lahir rendah (BBLR) (Neonetal, 2008). Selama ini banyak RS yang masih menerapkan metode konvesional, dimana ruangan khusus untuk bayi terpisah dari ibunya sehingga kontak ibu-bayi kurang dan mempengaruhi masalah menyusui (Anderson, 1989; Bergman, 2004). Penggunaan inkubator dinilai menghambat kontak dini ibu-bayi dan pemberian air susu ibu (ASI), serta berakibat ibu kurang percaya diri dan tidak terampil merawat bayi BBLR (Yamauchi, 1990).

Hasil penelitian membuktikan bahwa jika tidak terdapat masalah medis, maka tidak ada alasan untuk memisahkan ibu dari bayinya (Buranasin, 1991; A. Osliso, 2000; N. Hurst, 1997). Semakin seringnya ibu melakukan kontak fisik langsung (*skin-to-skin contact*) dengan bayi akan membantu menstimulasi hormon prolaktin dalam memproduksi ASI (Mary et al, 2007), dengan demikian fenomena tersebut diatas perlu disiasati dengan sosialisasi manfaat perawatan metode kangguru (PMK) pada Ibu yang sedang hamil pada kunjungan antenatal.

Perawatan metode kanguru (PMK) adalah perawatan untuk BBLR dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu *(skin-to-skin contact)*. Metode ini sangat tepat dan mudah dilakukan guna mendukung kesehatan dan keselamatan BBLR (Kaur et al, 2002). Bayi dibiarkan menyusu sambil dipeluk dan diselimuti. Menyusui bayi dengan metode tersebut juga akan merangsang reflek menyusu bayi serta kontak kulit menstabilkan suhu tubuh bayi, kadar gula darah bayi lebih tinggi, lebih jarang menangis, lebih mudah untuk menyusui untuk jangka panjang, dan menimbulkan perasaan aman bagi bayi (Paramita, 2007; Peninasia, 2003; Bard, l.k, 2005)

Penelitian lainnya dilakukan dengan membandingkan antara ibu yang melakukan PMK dengan ibu yang tidak melakukan PMK. Hasil penelitian menemukan, ibu yang melakukan perawatan metode kanguru merasa lebih percaya diri dalam merawat bayinya dibandingkan dengan ibu yang tidak melakukan perawatan metode kanguru (Bobak, I.M., 2005). Kepercayaan diri ibu didefinisikan sebagai persepsi ibu tentang kemampuannya untuk merawat dan memahami bayinya (Tesrier R, et al, 1998). Definisi yang lainnya yaitu percaya diri adalah merupakan keyakinan ibu terhadap kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan perawatan pada bayinya. Jadi kepercayaan diri akan membaik seiring dengan peningkatan kemampuan seorang ibu dalam merawat bayinya yang prematur (Marriner. T., 2006). Perawatan metode kanguru juga meningkatkan kedekatan ibu dengan bayinya, mengurangi perasaan

stres pada ibu sebagaimana halnya pada bayi, serta membuat ibu dan bayi lebih tenang dan rileks (Charpak N., 2004; Dood V.L., 2005). Kepercayaan diri ibu akan membaik seiring dengan peningkatan kemampuan ibu dalam merawat bayinya. Ibu yang telah melahirkan bayi prematur mengatakan bahwa terdapat perasaan tidak mampu memberikan perawatan yang adekuat, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya (Gillis, 2006). Rasa percaya diri ibu dalam merawat bayi diperlukan, agar terbinanya hubungan yang positif antara ibu dan bayi, sehingga tumbuh kembang bayi dapat optimal (Ludington, 1993).

Ibu merasa takut dan tidak percaya diri dalam merawat BBLR dan tidak memiliki privasi dalam melakukan perawatan metode kangguru (Rao, et.al). Perawatan metode kangguru harus juga di-dukung oleh ketersediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan saat akan memulai perawatan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dihadapkan pada masalah kekurangan tenaga terampil, biaya pemeliharaan alat, serta logistik (Arora. S., 2008). Selama ini fasilitas yang digunakan dalam melakukan perawatan metode kangguru dirancang dan disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing (Usman A., 1996). Salah satu peralatan penting yang di-perlukan adalah *support binder (*Ikatan/balutan penahan bayi). Pada penelitian ini alat *simple support binder* yang digunakan dirancang dengan memperhatikan kenyamanan, sederhana, mudah dalam pemakaiannya, dan kesesuaian dengan kultur budaya, untuk menilai kepercayaan diri ibu dalam melakukan perawatan metode kanguru yang dinilai dengan menggunakan kuesioner kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quasi experiment* dalam satu kelompok (*one group pre test post test design*). Perawatan metode kangguru dilakukan pada satu kelompok dengan penilaian kepercayaan diri menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah memakai alat *simple support binder*.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu dengan bayi berat lahir rendah yang di rawat di rumah di wilayah kerja puskesmas 26 Ilir Palembang sebanyak 18 orang ibu, Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian dengan kriteria inklusi sampel pada penelitian ini adalah : Ibu dengan bayi berat lahir ≤2500 gram, tidak ada kegawatan pernapasan dan sirkulasi, suhu stabil (minimal 36^{o}C) tidak ada kelainan kongenital yang berat, dan mampu bernapas sendiri, sedangkan kriteria eksklusi, ibu dengan berat badan bayi > 2500 gram, kondisi tidak stabil (suhu, pernafasan, sirkulasi), dan mengalami kelainan kongenital. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan (April – November 2014) dan didapatkan sebanyak 16 orang ibu sesuai dengan kriteria.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner. Kepercayaan diri ibu dalammerawat bayi yang diisi oleh responden. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa univariat dan bivariat. Analisa univariatdigunakan untuk mendeskripsikan besarnya presentase pada seluruh variabel penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi. Analisis bivariat merupakan kelanjutan dari analisa univariat dengan cara melakukan tabulasi silang antara variabeldependen pada kelompok kontrol dengan kelompok intervensi pada semua variabel penelitian dengan menggunakan uji statistik *wilcoxon*.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 26 Ilir Palembang pada tahun 2014 maka data yang telah dikumpulkan dari 16 ibu dengan BBLR dikumpulkan dan dibuat dalam bentuk teks dan tabel.

Distribusi kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi sebelum dan sesudah dilakukan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder* mencakup nilai *mean*, median, standard deviasi (SD), nilai minimum, dan *confidence Interval* (95%).

Tabel.1.
Gambaran Distribusi Kepercayaan Diri Ibu dalam Merawat BayiSebelum dilakukan Perawatan Metode Kangguru Dengan Meggunakan S*imple Support Binder* Di Wilayah Kerja Puskesmas 26 Ilir, Palembang

n = 16

Variabel	Mean-Median	SD	Min-Max	95% CI
Kepercayaan Diri Ibu melakukan Perawatan Metode kangguru (PMK) Sebelum Menggunakan *Simple Support Binder*	23,50 -23,00	2,944	18 – 28	21,93 – 25,07
Kepercayaan Diri Ibu melakukan **Perawatan Metode kangguru (PMK)** **Setelah Menggunakan *Simple Support Binder***	45,00 -42,94	5,285	30 – 48	21,93 – 25,07

Hasil yang didapatkan bahwa rata-rata nilai kepercayaan diri dalam melakukan PMK sebelum memakai *simple support binder* 23,50, dan rata-rata nilai kepercayaan diri dalam melakukan PMK setelah memakai *simple support binder* 45,00. Berdasarkan hasil penelitian bahwa

skor tertinggi kepercayaan diri ibudengan BBLR sebelum melakukan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder* adalah 28, sedangkan skor tertinggi kepercayaan diri ibu dengan BBLR setelah melakukan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder* meningkat dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan hasil perbedaan kepercayaan diri ibu dengan BBLR sebelum dan sesudah melakukan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder*.

Tabel. 2.
Perbedaan Kepercayaan Diri Ibu dalam Merawat Bayi Sebelum dan Setelah dilakukan Perawatan Metode Kangguru Dengan Meggunakan S*imple Support Binder* Di Wilayah Kerja Puskesmas 26 Ilir, Palembang

n = 16

Variabel		N	Mean Rank	*P value*
Kepercayaan Diri Ibu melakukan Perawatan Metode kangguru (PMK) Sebelum Menggunakan *Simple Support Binder*	*Negative Ranks*	0[a]	0,0	0,000
Kepercayaan Diri Ibu melakukan Perawatan Metode kangguru (PMK) Setelah Menggunakan *Simple Support Binder*	Positive Ranks	16[b]	8,5	
	Ties	0[c]		
	Total	16		

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat ibu dengan BBLR yang hasil kepercayaan dirinya setelah melakukan perawatan metode kangguru dengan alat *simple support binder* lebih rendah dari pada sebelum memakai *simple support binder*, dan terdapat 16 orang ibu yang memiliki kepercayaan diri lebih baik dari sebelum perawatan metode kangguru dengan *simple support binder*. Hasil uji statistik didapatkan nilai *significancy* 0,000 ($p < 0,05$), dengan demikian maka terdapat perbedaan yang bermakna antara kepercayaan diri ibu sebelum dan sesudah melakukan perawatan metode kangguru dengan *simple support binder*.

PEMBAHASAN

Hasil proses adaptasi digambarkan sebagai kondisi kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan konsep sentuhan antara kulit ibu dan bayi dalam perawatan metode kanguru (PMK). Bayi beradaptasi dengan lingkungan eksrauterin, dan sentuhan kulit ke kulit mempermudah bayi untuk cepat beradaptasi dan bertumbuh. Selanjutnya dalam konsep PMK bayi akan berusaha untuk merangkak untuk mencari puting susu ibunya untuk mendapatkan ASI pertama dalam kehidupanya. Hal ini sesuai dengan paradigma yang dikemukakan oleh Orem dalam teori*"selfcare",* bahwa manusia mampu untuk memenuhi dan mempertahankan kehidupannya.

Pada penelitian ini bahwa bayi berat lahir rendah dengan syarat kondisi stabil dilakukan perawatan metode kangguru (PMK) oleh ibunya. Penilaian kepercayaan diri ibu dengan menggunakan kuisioner menunjukkan hasil bahwa sebelum ibu melakukan PMK dengan menggunakan *simple support binder* didapatkan nilai skor kepercayaan ibu dalam rentang 18-28. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini diantaranya bahwa ibu merasa takut menggendong bayinya karena ukuran bayi yang kecil, sehingga ibu takut bayinya tidak nyaman, kontak ibu dan bayi yang jarang mengakibatkan ibu kurang percaya diri untuk menggendong bayinya, dan dukungan

yang minim serta PMK yang belum tersosialisasi dengan baik membuat ibu ragu untuk melakukan PMK di rumah.

Hasil penelitian yang didapatkan setelah dilakukan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder* bahwa skor nilai tingkat kepercayaan diri ibu berubah dari nilai skor sebelumnya. Nilai skor menunjukkan peningkatan dari sebelumnya. Skor tertinggi kepercayaan diri ibu dengan BBLR setelah melakukan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder* meningkat dari sebelumnya. Gillis, menyatakan dalam penelitiannya bahwa orangtua yang mendapatkan intervensi edukatif secara signifikan dapat menurunkan tingkat stres kecemasannya dalam merawat bayi yang prematur. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam melakukan perawatan dikarenakan dalam perawatan metode kangguru terjalin interaksi secara terus menerus yang dapat berpengaruh terhadap perasaan ibu sehingga meningkatkan rasa percaya diri ibu untuk merawat bayinya

Peningkatan nilai rasa percaya diri ibu juga terjadi karena kedekatan antara ibu dan bayi yang dirasakan saat melakukan perawatan metode kangguru. Ibu memiliki perasaan bahwa dirinya tidak terpisahkan lagi dengan bayinya, dimana sebelumnya bayinya hanya dapat dilihat di dalam inkubator di rumah sakit. Pada penelitian ini kedekatan antara ibu dengan bayi yang telah dimanifestasikan dengan perawatan metode kangguru membuat ibu lebih memahami kebutuhan bayi dan mengalami peningkatan rasa percaya diri untuk merawat bayinya sendiri.

Pada penelitian ini setelah dilakukan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder* dari keseluruhan ibu (16 ibu) mengalami peningkatan rasa percaya diri dalam merawat BBLR. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan metode kangguru dapat meningkatkan kedekatan ibu dan bayi sehingga memberikan dampak terhadap kemampuan ibu untuk melakukan perawatan pada bayi. Ibu yang melakukan perawatan metode kangguru merasa lebih percaya diri dibandingkan ibu yang tidak melakukan perawatan

metode kangguru. Perawatan metode kangguru juga dapat mengurangi perasaan stres pada ibu maupun pada bayi.

Ludington, menyatakan bahwa kebutuhan akan metode praktis sebagai alternatif pengganti alat inkubator untuk perawatan BBLR sangat diperlukan. Perawatan metode kangguru dinilai merupakan intervensi yang ekonomis dan efisien dalam memberikan perawatan pada BBLR. Perawatan metode kangguru merupakan satu revolusi yang bermanfaat dalam membantu pertumbuhan BBLR melalui *skin toskin contact* antara ibu dan bayi yang dapat juga diaplikasikan dengan menggunakan alat. Tubuh ibu adalah inkubator yang terbaik bagi bayi BBLR dan membantu ibu memahami BBLR sehingga percaya diri merawat bayi.

Hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ibu dengan BBLR yang hasil kepercayaan dirinya setelah melakukan perawatan metode kangguru dengan alat *simple support binder* lebih rendah dari pada sebelum memakai *simple support binder*, dan terdapat 16 orang ibu yang memiliki kepercayaan diri lebih baik dari sebelum perawatan metode kangguru dengan *simple support binder*. Hasil uji statistik didapatkan nilai *significancy* 0,000 ($p < 0,05$), dengan demikian maka terdapat perbedaan yang bermakna antara kepercayaan diri ibu sebelum dan sesudah melakukan perawatan metode kangguru dengan *simple support binder*.

Perawatan metode kangguru yang dilakukan oleh ibu memberikan hasil yang cukup bermakna. Perubahan rasa percaya ibu terjadi dikarenakan dengan melakukan perawatan metode kangguru stres ibu menurun, ibu merasakan kepuasan berada lebih dekat dengan bayinya, sehingga meningkatkan rasa percaya diri ibu karena Ibu telah melakukan sesuatu yang postif untuk bayinya dan untuk dirinya sendiri dalam menjalankan perannya sebagai ibu.

Perbedaan kepercayaan ibu dengan BBLR sebelum dan sesudah dilakukan PMK dengan *simple support binder* terjadi karena adanya dukungan tenaga kesehatan dalam membantu ibu dalam menerapkan PMK dengan *simple support binder*.Usman, menyatakan

bahwa dalam melakukan PMK ibu memerlukan dukungan. Banyak ibu mengalami rasa tidak percaya diri yang cukup besar untuk memulai merawat bayi pada awal kehidupannya, sehingga membutuhkan dukungan dari keluarga, teman, dan petugas kesehatan. Dukungan edukasi dalam penerapan perawatan metode kangguru sangat penting sehingga ibu memahami bahwa PMK dan manfaat PMK lebih bermakna dilakukan.

KESIMPULAN

Pemanfaatan simple support binder dapat memberikan rasa percaya diri pada ibu dalam melakukan perawatan metode kanggguru. Hal ini dapat membantu ibu dan menekan tingkat morbiditas dan mortalitas bayi dengan berat lahir yang rendah. Ibu tidak merasa takut, merasa nyaman dan perawatan metode kangguru dengan menggunakan *simple support binder* dapat membantu ibu lebih percaya diri dari sebelumnya dalam melakukan perawatan. Keseluruhan ibu sebanyak 16 orang ibu mengalami peningkatan rasa percaya diri untuk melakukan perawatan metode kangguru pada bayi berat lahir rendah di rumah.

SARAN

Masyarakat dapat lebih mengetahui tujuan dan manfaat dari perawatan metode kangguru sejak masa kehamilan, sehingga ibu dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan perawatan pada bayi berat lahir rendah (BBLR). Pelayanan antenatal pada ibu hamil perlu ditingkatkan dan memberikan edukasi yang aplikatif dalam melakukan perawatan pada bayi berat lahir rendah di rumah. Perawatan konvensional sebaiknya sudah beralih pada perawatan yang lebih memberikan keuntungan dan manfaat terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi berat lahir rendah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi Ilmu Keperawatan-Fakultas Kedokteran dan Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan pada terlaksananya penelitian ini (**Nomor: 023-04.2.415112/2014)**.

DAFTAR PUSTAKA

World Health Organization. (2003). Kangaroo mother care: A practical guide. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.

Yulifah, Yuswanto. (2009). Asuhan Kebidanan Komunitas. Jakarta: Salemba Medika

Neonatal, Protokol Asuhan. (2008). Paket Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). JNPKKR

Anderson, GC. (1989). Risk in mother-infant separation post birth. Image.21:196-199

Bergman, LL Linley, SR Fawcus. Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator for physiological stabilization in 1200- to2199-gram newborns. Acta Paediatr. 93:779-785. 2004.

Yamauchi Y. and Yamanouchi, I. The relationship between rooming-in/not rooming-in and breast-feeding variables. *Acta Paediatr Scand* 1990; 79:1017-22.

Buranasin, B. The effects of rooming-in on the success of breast-feeding and the decline in abandonment of children. *Asia Pac J Public Health* 1991; 5(3):217-Oslislo, A. and Kaminski, K. Rooming-in: a new standard in obstetrics and neonatology. *Ginekol Pol Apr* 2000; 71(4):202-7.

Hurst, N., Valentine, C., Renfro, L. et al. Skin-to-skin holding in the neonatal intensive care unit influences maternal milk volume. *J Perinatol* 1997; 17(3):213-17.

Mary., et al. (2007). *Kangaroo care at birth for full term infants: A pilot study. The American Journal of Maternal/ Child Nursing.* 32(6): 375-381. http://www.nursingcenter.com. Diambil pada tanggal 20 Januari 2014

Paramita., P Rahadian. (2007). *The Importance of skin to skin.* http://asipasti.blogspot.com/feeds/comments/default, diakses pada tanggal 20 Januari 2014

PERINASIA. (2003). *Perawatan bayi berat lahir rendah dengan perawatan metode kanguru.* Jakarta: Perinasia.

Badr, L.K. (2005). Further psychometric testing and use of the maternal confidence questionnaire. *Comprehensive Pediatric Nursing,* 28:163–174 http://www.proquest.umi.com diperoleh tanggal 20 Januari 2014

Bobak, I.M., Lowdermik, D.L., & Jensen, M.D. (2005*). Keperawatan maternitas.* (Edisi 4). Jakarta: Penerbit EGC

Tessier, R., et al. (1998). Kangaroo mother care and the bonding hypothesis *Pediatrics*, 102: 1-8 dalam PERINASIA. (2003).

Charpak N, Ruiz-Pelaez JG. Sources of resistance to kangaroo mother care (KMC) implementation indeveloping and proposed solution. 2004

Marriner-Tomey & Alligood (2006). *Nursingtheorists and their works*. Ed. 6 th. St.Louis: Mosby Elsevier, Inc

Dood VL.Implication of kangaroo care for growth and development in preterm infants. J.Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2005;34:218-232

Gillis.,L., A., Fairbanks., E., F., Crean., H., Small.,L., Sinkin., R., & Xin T., et al (2006).Early InterventionProgramme Improves Health Of Babies And Parents. Diaksesdari http://www.urmc.rochester.edu. Diperoleh tanggal 29 September 2014

Ludington-Hoe SM, Golant SK. Kangaroo care, the best you can do to help your preterm infant. New York: Bantam Books; 1993:3-30.

Rao, et al. Kangaroo mother care for low birth weight infants: a randomized controlled trial. Indian Pediatricts

Arora., S.(2008). Kangaroo mother care. Nursing Journal of India, 99 (11):248-250. Diambil dari http://www.proquest.umi.com diakses pada tanggal 26 September 2014

Usman A, Irawaty S, Triyanti A, Alisjahbana A. Pencegahan Hipotermia pada Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Rumah dengan Metoda Kanguru. Unit Penelitian FK Unpad/RSHS. Bandung: FK Unpad; 1996.

ANALISIS KEPUASAN PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DENGAN MATRIKS *IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS* DAN *CUSTOMER SATISFACTION INDEX*

(Studi Di Enam Puskesmas Kabupaten Sleman, DIY)

Oleh:
Imam Jayanto [1], Achmad Fudholi [2], Diah Ayu Puspandari [3]

[1] Magister Manajemen Farmasi, Universitas Gadjah Mada
[2] Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
[3] Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

ABSTRAK

Puskesmas di Kabupaten Sleman adalah penyelenggara pelayanan kesehatan dengan kualitas pelayanan sebagai indikator kinerja. Hal ini bisa memuaskan pasien tergantung kepada persepsi setiap individu. Tujuan penelitian untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional pengguna puskesmas di kabupaten Sleman dengan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) dan *Customer Service Index* (CSI) Pengambilan sampel penelitian ini memakai teknik *accidental sampling* yang sesuai dengan konteks penelitian. Sampel diambil pada bulan Februari – Mei 2016 yang berjumlah 343 orang terdiri dari puskesmas Berbah, puskesmas Depok I, puskesmas Seyegan, puskesmas Mlati I, puskesmas Sleman, puskesmas Gamping I. Analisanya dengan uji *gap* untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap setiap pertanyaan. Analisa lainnya dengan uji Cartesian untuk mengetahui rerata dari tingkat kepuasan dan tingkat kinerja sehingga bisa diketahui pelayanan yang baik serta yang

perlu perbaikan. Cara analisa memakai analisa *univariate* sehingga akan dihasilkan nilai persentase.

Pengukuran dari responden menunjukkan angka *gap* -0,26. Analisa IPA menunjukkan atribut ketepatan waktu dengan nilai kinerja 3,66 dan nilai harapan 3,90 sehingga berada di kuadran I. Analisa CSI menunjukkan nilai 73,34% yang terdapat pada rentang 66,00% - 80,99% menunjukkan nilai puas.

Secara kinerja, atribut ketepatan waktu menjadi prioritas pertama dalam perbaikan serta secara keseluruhan pasien JKN pengguna puskesmas menyatakan puas terhadap kinerja puskesmas di kabupaten Sleman.

Kata kunci: *Importance Performance Analysis*, *Customer Satisfaction Index*, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, Puskesmas.

****

ABSTRACT

Sleman Regency Health Centers are healthcare providers with service quality as a performance indicator. It can be satisfy the patient depends on the perception of each individual. The aim of research to measure the level of service quality and patient satisfaction participants of a national health insurance in the healthcenters at Sleman regency with the methods of Importance Performance Analysis (IPA) and Customer Service Index (CSI).

The sampling of this research uses accidental sampling technique appropriate to the context of research. The samples were taken in February - May 2016 totalling 343 peoples consist of health centers of Berbah, health centers of Depok I, health centers of Seyegan, health centers of Mlati I, health centers of Sleman, health centers of Gamping I. Analysis with gap test to determine the level of patient satisfaction with every question. Another analysis with Cartesian test to determine the average level of

satisfaction and performance levels so it can be known the good service and which need improvement. The way of analysis use univariate analysis that will produce a percentage value.

The measurement of respondents showed the number gap -0.26. Analysis of IPA showed that timeliness attribute with the value performance of 3.66 and the expected value of 3.90 so it is in quadrant I. CSI analysis showed the value of 73.34% found in the range of 66.00% - 80.99% indicates the value are satisfied.

In performance, attributes timeliness is the first priority into the overall improvement and the national health insurance patients of healthcenter users are satisfied to the performance of Sleman Regency health centers.

Keywords: *Importance Performance Analysis, Customer Satisfaction Index, service quality, customer satisfaction, public health centers.*

****

PENDAHULUAN

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan *output* selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (*intangible*) bagi pembeli pertamanya (Hurriyati, 2010). Model kualitas jasa dari Zeithaml (1994) menunjukkan bagaimana berbagai *gap* dalam penyelenggaraan jasa bisa mempengaruhi perkiraan konsumen terkait pelayanan/jasa (Faraby, 2010). Model yang dimaksud ada 5 kesenjangan (*gap*) berdasarkan penyampaian jasa kepada konsumen dari penyedia layanan yang diperlukan industri jasa mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa (Kotler, 2009). Kepuasan pelanggan sebagai evaluasi pelanggan setelah membeli pada tempat dan waktu tertentu. Kepuasan pelanggan juga akan berpengaruh secara signifikan terhadap

kemampuan operasional dari perusahaan itu sendiri (Yu dkk., 2006). Kepuasan pelanggan merupakan tujuan dari perusahaan yang memiliki komitmen terhadap kualitas. Dengan kepuasan pelanggan berarti akan diperlukan upaya secara berkesinambungan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan terhadap suatu barang dan jasa (Tjiptono, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kementerian Kesehatan, 2014). Terdapat beberapa macam pengukuran kepuasan masyarakat yang didasarkan pada cakupan wilayah kepuasan masyarakat itu sendiri. Salah satu cara peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai UU nomor 25 tahun 2000 tentang PROPENAS (Program Pembangunan Nasional), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data indeks kepuasan masyarakat bisa menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2004). Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menilai kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2003. Hal ini berdasarkan waktu tunggu, kemudahan kunjungan, keramahan petugas, kejelasan informasi, kebebasan memilih fasilitas, kecepatan pengambilan keputusan dan kebersihan fasilitas kesehatan (Fajar dkk., 2010). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat unsur "relevan", "valid", dan "reliabel" sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Yunevy dan Haksama, 2013).

Berdasarkan pada penelitian di atas, kepuasan pasien terhadap pelayanan jasa di puskesmas harus sesuai dengan fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk itu, peneliti ingin meneliti bagaimana kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di puskesmas kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang berobat di puskesmas kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif (*descriptive*) tentang kepuasan pasien yang menerima pelayanan kesehatan di puskesmas. Subjek diambil dari enam puskesmas yang ada di kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel memakai teknik *accidental sampling* dengan kuisioner sebagai alat pengambilan datanya. Lalu dilakukan pengamatan untuk penelitian kuantitatif ini dengan metode *Importance Performance Analysis* untuk menganalisa tingkat kesesuaian seberapa besar pasien merasa puas terhadap kinerja puskesmas serta seberapa besar puskesmas memahami yang diinginkan pasien terkait pelayanan mereka. Penelitian ini juga memakai metode *Customer Service Index* untuk menganalisa tingkat kepuasan pasien berdasarkan persepsi & harapan pasien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Dasar Subjek Penelitian

Karakteristik hal ini meliputi nama pasien, jenis kelamin, nama puskesmas, kepesertaan JKN, pendidikan terakhir, pekerjaan, usia, penghasilan perbulan, frekuensi kunjungan, jenis pelayanan. Karakteristik dasar subyek penelitian diperoleh melalui analisa deskriptif dengan memasukkan 343 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil analisa deskriptif pada tabel 1 memperlihatkan bahwa karakteristik berdasarkan puskesmas terbanyak di puskesmas Depok I (25,07%); proporsi wanita lebih banyak (67,64%); berdasarkan pendidikan terakhir terbanyak SMA/SMK (46,36%); berdasarkan pekerjaan terbanyak pegawai swasta (72,01%); terbanyak usia 20 – 39 tahun (58,31%); penghasilan perbulan terbanyak kurang dari satu juta rupiah (46,65%); frekuensi terbanyak di tahun 2016 ialah 1-3 kali (54,23%); jenis pelayanan yang sering didatangai ialah poli umum (84,8%).

Tabel 1. Sebaran Responden Hasil Penelitian

Puskesmas	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Berbah	26	7,58
Sleman	50	14,58
Seyegan	56	16,33
Mlati I	57	16,62
Gamping I	68	19,83
Depok I	86	25,07
Total	**343**	**100,00**

2. Analisa Demografi Pasien

Tabel 2 menyajikan dengan jelas karakteristik terbanyak dari setiap bagian. Informasi jenis kelamin terbanyak dari wanita (67,64%); pendidikan terakhir terbanyak dari SMA/SMK (46,36%); pekerjaan terbanyak dari pegawai swasta/wirausaha (72,01%); usia terbanyak

dari 20-39 tahun (58,31%); penghasilan perbulan terbanyak ialah kurang dari satu juta rupiah (46,65%); frekuensi kunjungan selama 2016 terbanyak ialah 1-3 kali (54,23%); pelayanan yang dituju terbanyak ialah poli umum (84,8%). Karakteristik ini menggambarkan responden yang berobat di puskesmas selama masa penelitian.

Tabel 2. Karakteristik Responden Peserta JKN Pengguna Puskesmas

Informasi Demografi	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)	Total (%)
Jenis Kelamin			
1. Pria	1. 111	1. 32,36	100
2. Wanita	2. 232	2. 67,64	
Pendidikan Terakhir			
1. SD	1. 29	1. 8,45	
2. SMP	2. 50	2. 14,58	100
3. SMA/SMK	3. 159	3. 46,36	
4. Perguruan tinggi	4. 105	4. 30,61	
Pekerjaan			
1. Pelajar/mahasiswa	1. 60	1. 17,49	
2. Petani/pedagang/nelayan	2. 15	2. 4,37	
3. Pegawai negeri/ABRI	3. 21	3. 6,12	100
4. Pegawai swasta / wirausaha	4. 247	4. 72,01	
Usia (tahun)			
1. 0 – 19	1. 28	1. 8,16	
2. 20 – 39	2. 200	2. 58,31	100
3. 40 – 59	3. 103	3. 30,03	
4. ≥ 60	4. 12	4. 3,5	

Penghasilan Perbulan			
1. < Rp. 1.000.000,-	1. 160	1. 46,65	
2. Rp. 1.000.001,- - Rp. 3.000.000,-	2. 141	2. 41,11	100
3. Rp. 3.000.001,- - Rp. 5.000.000,-	3. 34	3. 9,91	
4. > Rp. 5.000.000,-	4. 8	4. 2,33	
Frekuensi (kali)			
1. 1 – 3	1. 186	1. 54,23	
2. 4 – 5	2. 57	2. 16,62	100
3. 6 – 7	3. 25	3. 7,29	
4. > 7	4. 75	4. 21,87	
Pelayanan			
1. Poli Umum	1. 291	1. 84,8	100
2. Poli Gigi	2. 48	2. 14	
3. Pelayanan Obat Saja	3. 4	3. 1,2	

Karakteristik dasar subjek penelitian secara umum ada beberapa perbedaan dari jumlah yaitu wanita lebih mendominasi dikarenakan wanita lebih sering memeriksakan kesehatannya daripada pria sehingga yang tampak sebagai pasien puskesmas ialah wanita. Dari segi pekerjaan, pegawai swasta lebih banyak karena mereka bekerja tidak terikat waktu sehingga bisa sesering mungkin dengan waktu yang fleksibel untuk berobat ke puskesmas sesuai anjuran dokter masing-masing. Dari jenis pelayanan yang sering ialah poli umum. Poliumum menjadi tempat yang sering dituju pasien puskesmas untuk berobat karena bisa melayani segala macam penyakit pasien apalagi sekarang memakai sistem JKN. Sedangkan karakteristik yang lain tidak terlalu jauh berbeda karena persentasinya ± 50%

3. Uji Validitas Kuisioner

Dengan jumlah sampel uji coba 343 kuesioner, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total didapatkan hasil yang valid jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih dari r-tabel (nilai r_{xy} > 0,112) pada setiap pertanyaan.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner

No	Pertanyaan	*Corrected Item-Total Correlation* Kinerja		*Corrected Item-Total Correlation* Harapan		r-tabel	Status
		A	B	A	B		
1	Kompetensi Teknik	0,543	0,502	0,646	0,587	0,112	Valid
2	Keterjangkauan	0,385	0,452	0,534	0,490	0,112	Valid
3	Efektifitas	0,522	0,439	0,602	0,550	0,112	Valid
4	Efisiensi	0,483	0,470	0,616	0,581	0,112	Valid
5	Kesinambungan	0,427	0,442	0,533	0,535	0,112	Valid
6	Keamanan	0,664	0,687	0,717	0,758	0,112	Valid
7	Kenyamanan	0,631	0,587	0,688	0,672	0,112	Valid
8	Informasi	0,685	0,684	0,691	0,698	0,112	Valid
9	Ketepatan Waktu	0,562	0,554	0,596	0,554	0,112	Valid
10	Komunikasi	0,509	0,495	0,561	0,562	0,112	Valid

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat nilai r_{xy} atau koefisien korelasi (r-tabel) yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Dari tabel 3 bisa diketahui bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner termasuk valid.

4. Uji Reliabilitas Kuisioner

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha* terhadap 20 butir pertanyaan yang ada pada kuisioner. Reliabilitas alat ukur akan terbukti jika hasil nilai $r_{alpha} > 0{,}60$. Dari tabel 4 bisa diketahui bahwa kuesioner reliabel sehingga pertanyaan bisa digunakan dalam kondisi yang berbeda.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner

No	Variabel	*N Of Items*	Cronbach Alpha	r_{-alpha}	Status
1	Kinerja Pelayanan	20	0,903	0,60	Reliabel
2	Harapan Pelayanan	20	0,929	0,60	Reliabel

5. Analisis *Gap Performance-Importance* (Gap P-I)

Analisis *gap* model servqual adalah menganalisis *gap* antara kinerja kualitas jasa yang ada (K) dengan kualitas jasa yang diinginkan (H). Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan 343 kuesioner langsung pada responden. Dari analisis *gap* di tabel 5 menunjukkan hasil tidak puas pada semua atribut pertanyaan. Sepertinya pelayanan belum sesuai antara harapan dan kenyataan yang diterima pasien dari puskesmas sesuai yang dijanjikan. Dari tabel diatas, pasien puskesmas tidak puas dengan keamanan kesehatan yang disediakan oleh puskesmas terkait ruangan yang bebas penyakit serta resiko infeksi. Hal itu terlihat dari *gap* tertinggi terletak pada atribut pelayanan keamanan sebesar -0,26 sehingga puskesmas harus lebih memperhatikan kebersihan tempatnya.

Gap ini bisa terjadi karena pasien puskesmas tidak puas dengan keamanan kesehatan yang disediakan oleh puskesmas terkait ruangan yang bebas penyakit serta resiko infeksi. Puskesmas harus lebih memperhatikan kebersihan tempatnya agar pasien tidak terkena penyakit yang lain saat datang kesana. Pada umumnya ketidakpuasan pasien lebih pada hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku

petugas kesehatan; keterlambatan pelayanan dokter dan perawat; dokter sulit ditemui; dokter kurang komunikatif dan tidak informatif; perawat yang kurang ramah dan tanggap terhadap kebutuhan pasien; lamanya waktu menunggu pemeriksaan; ketertiban, kenyamanan serta keamanan pelayanan kesehatan (Satrianegara, 2014).

Tabel 5. Perhitungan *Gap Performance – Importance* Secara Keseluruhan

No	Pertanyaan	[1]Kinerja Pelayanan (1)	[2]Harapan / Kepentingan (2)	GAP (3) = (1)-(2)	Hasil
1	Kompetensi Teknik	3,77	3,96	-0,19	Tidak Puas
2	Keterjangkauan	3,74	3,90	-0,15	Tidak Puas
3	Efektifitas	3,73	3,94	-0,21	Tidak Puas
4	Efisiensi	3,40	3,64	-0,23	Tidak Puas
5	Kesinambungan	3,56	3,77	-0,21	Tidak Puas
6	Keamanan	3,56	3,82	-0,26	Tidak Puas
7	Kenyamanan	3,69	3,92	-0,23	Tidak Puas
8	Infromasi	3,75	3,95	-0,21	Tidak Puas
9	Ketepatan Waktu	3,66	3,90	-0,24	Tidak Puas
10	Komunikasi	3,77	4,00	-0,23	Tidak Puas
Rerata		**3,66**	**3,88**	**-0,22**	**Tidak Puas**

Keterangan: [1]rerata dari nilai tiap pertanyaan kinerja, [2]rerata dari nilai setiap pertanyaan harapan

6. Analisa Kesesuaian Variabel *Importance* dan *Performance*.

Sebuah perbandingan antara kenyataan atas layanan yang diterima (*performance*) dengan harapan yang diinginkan atas layanan tersebut (*importance*). Hasilnya berupa tingkat kesesuaian pencapaian kualitas pelayanan. Dari tabel dibawah, efisiensi dan keamanan memiliki nilai 93% sebagai kesesuaian yang terendah sehingga perlu

dievaluasi. Evaluasi bisa dimasukkan ke dalam rencana strategik puskesmas yang menggambarkan arah tujuan serta langkah yang harus dilaksanakan. Hal ini memusatkan perhatian untuk pekerjaan yang benar dan efektif agar puskesmas berfungsi dengan baik serta tanggap dan antisipatif terhadap lingkungan puskesmas (Siagian, 2004).

Tabel 7. Tingkat Kesesuaian Pelayanan Puskesmas Per Atribut

No	Pertanyaan	Kinerja (*Performance*)	Harapan (*Importance*)	Kesesuaian
1	Kompetensi Teknik	3,77	3,96	95 %
2	Keterjangkauan	3,74	3,90	96 %
3	Efektifitas	3,73	3,94	95 %
4	Efisiensi	3,40	3,64	93 %
5	Kesinambungan	3,56	3,77	94 %
6	Keamanan	3,56	3,82	93 %
7	Kenyamanan	3,69	3,92	94 %
8	Infromasi	3,75	3,95	95 %
9	Ketepatan Waktu	3,66	3,90	94 %
10	Komunikasi	3,77	4,00	94 %
	Rerata	**3,66**	**3,88**	**94,3 %**

7. Analisa Dengan Metode *Customer Satisfaction Index* (CSI).

Evaluasi kepuasan konsumen bisa memakai metode *Customer Service Index* (CSI). CSI digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut yang diukur. Perhitungan CSI pada tabel 8 yang dipakai sebagai berikut: CSI = WT / HS = 366,68 % / 5 = 73,34 %.

Tabel 8. Perhitungan *Costumer Satisfaction Index* (CSI)

No	Pertanyaan	Rerata Kinerja Pelayanan (MSS)	Rerata Kepentingan / Harapan (MIS)	WF = 100% x (MIS / ∑MIS)	WS = MSS x WF (%)
1	**Kompetensi Teknik**				
	Kompetensi tenaga medis yang ada	3,76	3,96	5,10 %	19,16
	Standar layanan kesehatan yang diberikan	3,78	3,96	5,10 %	19,28
2	**Keterjangkauan**				
	Letak Puskesmas Cukup terjangkau	3,90	3,98	5,13 %	20,01
	Biaya yang ditetapkan Puskesmas cukup terjangkau	3,58	3,81	4,91 %	17,58
3	**Efektifitas**				
	Pengobatan yang diberikan memberikan kesembuhan	3,73	3,96	5,10 %	19,03
	Pengobatan yang diberikan mampu mencegah berkembangnya penyakit	3,72	3,92	5,06 %	18,82
4	**Efisiensi**				
	Jumlah tenaga medis sudah mencukupi	3,39	3,64	4,70 %	15,94
	Jumlah ruang pemeriksaan sudah mencukupi	3,41	3,63	4,68 %	15,96
5	**Kesinambungan**				
	Kemampuan Puskesmas merujuk pasien ke RS lain	3,56	3,77	4,85 %	17,27

	Puskesmas memberikan perawatan penyakit yang berkesinambungan	3,57	3,78	4,87 %	17,41
6	**Keamanan**				
	Layanan kesehatan di puskesmas ini steril penyakit	3,55	3,81	4,91 %	17,43
	Layanan kesehatan disini tidak beresiko menularkan infeksi	3,57	3,83	4,93 %	17,61
7	**Kenyamanan**				
	Ruang periksa Puskesmas nyaman	3,71	3,94	5,08 %	18,88
	Ruang tunggu Puskesmas nyaman	3,66	3,90	5,02 %	18,41
8	**Informasi**				
	Petugas mampu memberikan informasi layanan secara jelas	3,75	3,96	5,10 %	19,12
	Petugas mempu memberikan informasi obat secara rinci	3,75	3,95	5,10 %	19,09
9	**Ketepatan Waktu**				
	Jam buka Puskesmas tepat waktu	3,68	3,92	5,05 %	18,57
	Jam tutup puskesmas tapat waktu	3,64	3,88	5,00 %	18,18

10	**Komunikasi**				
	Pegawai Puskesmas ramah saat berinteraksi dengan pasien	3,75	3,98	5,13 %	19,22
	Komunikasi antar pegawai Puskesmas cukup baik	3,80	4,03	5,19 %	19,73
Jumlah (∑)		**73,27**	**77,59**		**366,68 (WT)**
Rerata		**3,66**	**3,88**		

Keterangan : HS = 5 (nilai skala likert tertinggi yang digunakan dalam kuisioner).

Nilai CSI pelayanan puskesmas di Kabupaten Sleman adalah **73,34%**. Nilai tersebut merupakan indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan yang terdapat pada kriteria "puas" karena berada pada rentang 66,00% - 80,99% (Susan, 2014). Walaupun kepuasan pasien sudah tercapai, puskesmas harus tetap meningkatkan kinerja pelayanan agar kepuasan pasien bisa tercapai 100% setidaknya kepuasan tersebut tetap bertahan lama.

8. Analisa Metode *Importance Performance Analysis* (IPA).

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menghitung rerata setiap atribut pertanyaan dari variabel *importance* dan *performance* sehingga diketahui atribut pelayanan manakah yang perlu ditingkatkan agar kinerja petugas puskesmas lebih baik dan efisien. Caranya diukur sebanyak 343 responden lalu dilakukan analisa cartesian. Analisa ini dilakukan dengan cara membuat matriks antara kinerja pelayanan dengan harapan yang diinginkan berdasarkan semua item pertanyaan atribut pelayanan. Hal ini terlihat dengan diagram kartesius yang menunjukkan bagian mana prioritas utama dari puskesmas untuk melakukan perubahan pelayanan sampai yang perlu dikurangi karena berlebihan (Setyorini, 2015).

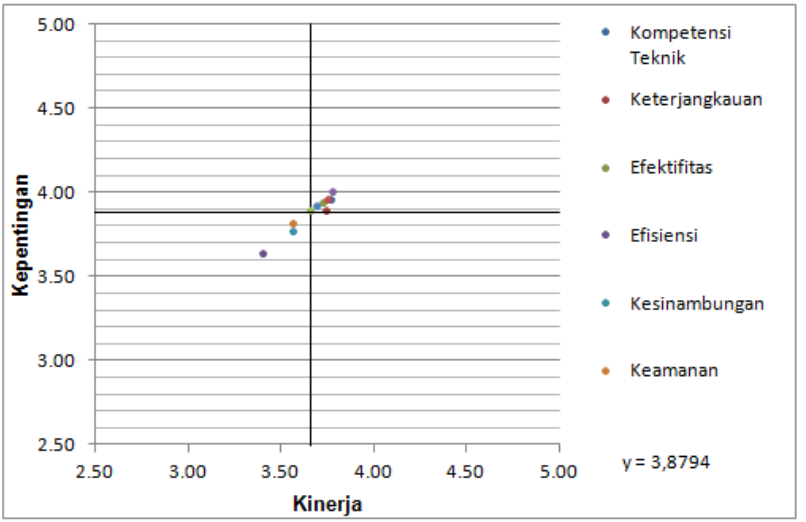

Gambar 1. Diagram Cartesius *Importance Performance Analysis* Pasien JKN Pengguna Puskesmas

Kuadran I adalah prioritas pertama untuk segera dilakukan perbaikan kinerja Atribut yang termasuk kuadran ini yaitu ketepatan waktu. Kuadran II adalah area yang perlu dipertahankan prestasinya terdiri dari atribut kompetensi teknik, keterjangkauan, efektifitas, kenyamanan, informasi dan hubungan antarmanusia secara kinerja dan secara harapan sudah diatas rata-rata (kuadran II). Atribut efisiensi, kesinambungan dan keamanan memiliki nilai kinerja dan kepentingan pasien yang kurang penting sehingga digolongkan dalam kuadran III (prioritas rendah). Kuadran III adalah area yang dianggap bisa ditunda perbaikan pelaksanaannya. Kuadran IV adalah area yang dianggap berlebihan karena tidak penting bagi pasien. Dari hasil penelitian, tidak ada satupun atribut yang masuk dalam kuadaran IV ini.

KESIMPULAN

Hasil analisa tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan pasien peserta JKN dengan metode IPA menunjukkan bahwa atribut ketepatan waktu berada di kuadran I yang berarti masih kurang baik kinerjanya sehingga menjadi prioritas pertama dalam perbaikan. Hasil analisa dengan metode CSI memberikan nilai 73,34% yang berarti pasien JKN pengguna puskesmas menyatakan puas terhadap kinerja puskesmas di Kabupaten Sleman.

SARAN

1. Puskesmas di Kabupaten Sleman dapat membuat rancangan strategi pelayanan dengan meningkatkan perlindungan bagi pasien tentang kebersihan dan keamanan (*patient safety*). Optimalisasi aspek di kuadran I perlu ditingkatkan, misalnya terkait ketepatan jam buka dan tutup.
2. Penelitian hanya terbatas di puskesmas sampel, sehingga bisa dikembangkan dengan meneliti puskesmas lain di Kabupaten Sleman agar hasilnya bisa menggambarkan kinerja seluruh puskesmas Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, N., Kartikasari, E., dan Ainy, A., 2010. Kepuasan Pasien Jamkesmas Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Poli Umum Puskesmas Petaling Kabupaten Bangka Tahun 2009. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 11.

Faraby, A., 2010. 'Analisis Ekspektasi Dan Persepsi Mahasiswa Terhadap Mutu Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta (Ditinjau Dari Perspektif Marketing)', , *Tesis*, . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hurriyati, R., 2010. *Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen*. Alfabeta, Bandung.

Kementerian Kesehatan, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2004. *Keputusan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*.

Kotler, P., 2009. *Manajemen Pemasaran*. PT. Prenhallindo, Jakarta.

Satrianegara, M., 2014. *Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan : Teori Dan Aplikasi Dalam Pelayanan Puskesmas Dan Rumah Sakit*. Salemba Medika, Jakarta.

Setyorini, R., 2015. 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Layanan Di Program Magister Sains Dan Doktor Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada : Penerapan Model Servqual Gap-5 Dan Importance Performance Analysis (IPA)', , *Tesis*, . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Siagian, S., 2004. *Manajemen Stratejik*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Susan, E.F., 2014. 'Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Air Minum Tahun 2013 (Studi Pada PDAM Sleman)', . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjiptono, F., 2008. *Manajemen Jasa*. Andi, Yogyakarta.

Yu, C., Chang, H., dan Huang, G., 2006. A Study Of Service Quality, Customer Satisfaction And Loyalty In Taiwanese Leisure Industry. *The Journal Of American Academy Of Business*, , 9 **I**: 126 – 133.

Yunevy, E.F.T. dan Haksama, S., 2013. Analisis Kepuasan Berdasarkan Persepsi dan Harapan Pasien Di Puskesmas Medokanayu, Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, , 1 I: 9 – 20.